WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LEMBARAN DAERAH
KOTA MALANG

No.3, 2025 BAPPEDA. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2025-2029.

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
4. Walikota adalah Walikota Malang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang untuk periode 5 (lima) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Malang dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
14. Hasil adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu keluaran.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
17. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagi instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik penurunan kinerja.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan.
22. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
23. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

24. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
(3) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif.
(4) Perubahan atas target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) Dokumen RPJMD tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas:
    a. bab I berisi mengenai pendahuluan;
    b. bab II berisi mengenai gambaran umum daerah;
    c. bab III berisi mengenai visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
    d. bab IV berisi mengenai program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
    e. bab V berisi mengenai penutup.
(2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
    a. bencana alam;
    b. goncangan politik;
    c. krisis ekonomi;
    d. konflik sosial budaya;
    e. gangguan keamanan;
    f. pemekaran Daerah; atau
    g. perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

RPJMD dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 137-3/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Sebagaimana dalam ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi Walikota dan Wakil Walikota, merupakan komitmen kinerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi "Menuju Malang Mbois dan Berkelas" serta Misi yang terdiri atas (1) Mewujudkan generasi yang Berbudaya, Optimis dan Inovatif; (2) Mewujudkan masyarakat Sejahtera dan Mandiri berbasis perekonomian yang mapan dan Adaptif; (3) Mewujudkan lingkungan perkotaan yang Indah, Kolaboratif, Berkelanjutan dan Lestari; (4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang Efisien dan Sinergis. Pencapaian Visi dan Misi tersebut dirumuskan dalam Dasabakti Unggulan yang merupakan upaya percepatan pembangunan daerah yang dibangun dari ikhtiar pemahaman terhadap permasalahan dan potensi Kota Malang. RPJMD menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dalam perencanaan daerah tahunan.

Materi muatan dalam bagian batang tubuh Peraturan Daerah ini beserta penjelasan dan lampirannya yang memuat materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2025-2029 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks Kota Malang, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program dan kegiatan yang terukur dan terarah. RPJMD Kota Malang harus disusun dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan yang cepat, aspirasi masyarakat, serta potensi dan tantangan yang ada.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku untuk periode lima tahun, dan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini tidak hanya mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah tetapi juga menggambarkan prioritas pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional dengan tujuan agar dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, sehingga dimaknai bahwa tiap-tiap pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Malang berkewajiban untuk membuat dokumen RPJMD. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), menyatakan bahwa yang dimaksud RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penguatan RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan elaborasi potensi dan tantangan spesifik, baik permasalahan urusan pariwisata, pendidikan, kemacetan, sampah, dan kesenjangan serta isu strategis lokal mendesak. Penegasan mekanisme partisipasi pemangku kepentingan yang konkret melalui forum dan musrenbang yang diadakan untuk penajaman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Penyertaan temuan kunci evaluasi RPJMD sebelumnya yang menjadi bagian dari permasalahan dan isu strategis daerah. Penguatan Fondasi Transformasi dengan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia di tengah globalisasi yang semakin pesat, penting bagi kita untuk memperhatikan pembentukan karakter generasi muda.

Dengan dilantiknya pada tanggal 20 Februari 2025, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM dan Ali Muthohirin sebagai Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih periode 2025-2030 menjadikan Visi dan Misi RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029. Visi “Menuju Malang Mbois dan Berkelas” serta Misi yang terdiri atas (1) Mewujudkan generasi yang Berbudaya, Optimis dan Inovatif; (2) Mewujudkan masyarakat Sejahtera dan Mandiri berbasis perekonomian yang mapan dan Adaptif; (3) Mewujudkan lingkungan perkotaan yang Indah, Kolaboratif, Berkelanjutan dan Lestari; (4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang Efisien dan Sinergis. Pencapaian Visi dan Misi tersebut dirumuskan dalam Dasabakti Unggulan yang merupakan upaya percepatan pembangunan daerah yang dibangun dari ikhtiar pemahaman terhadap permasalahan dan potensi Kota Malang. Selanjutnya uraian dari Dasabakti unggulan dijabarkan melalui Ngalam Pinter, Ngalam Tahes, Ngalam Ngopeni, Ngalam Nyaman, Ngalam Seger, Ngalam Asyik, Ngalam Rijik, Ngalam Idrek, Ngalam Laris, dan Ngalam Santun.

Penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan periodesasi RPJMD dalam RPJPD Kota Malang Tahun 2025-2045. Periodesasi RPJMD dalam RPJPD Tahun 2025-2045 Kota Malang terbagi menjadi empat tahap yaitu tahap pertama tahun 2025-2029 (Penguatan Fondasi Transformasi), tahap kedua tahun 2030-2034 (Akselerasi Transformasi), tahap ketiga tahun 2035-2039 (Ekspansi Global), dan tahap keempat tahun 2040-2045 (Kota Malang Berdaya Saing Global). Merujuk hal tersebut bahwa posisi RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama pencapaian RPJPD Kota Malang 2025-2045 atau merupakan fase penguatan fondasi transformasi Kota Malang sebagai kota yang Berkelas, Berakhlak, Maju, Berdaya Saing Global, Sejahtera dan Berkelanjutan dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045 yakni Negara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Selain itu, RPJMD disusun harus dengan tetap memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, kondisi lingkungan strategis daerah, potensi daerah, isu-isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa dalam menyusun RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratik atau pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan politis, artinya penerjemahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya didasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
3. Pendekatan Partisipatif atau pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi, dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah–atas (*bottom-up*) yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Keempat pendekatan perencanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara sistematis dan konsisten, yang dimulai dari melakukan pendekatan teknokratis dilaksanakan berdasarkan kajian ilmiah dan bukti fisik, data dan informasi yang akurat kondisi existing Kota Malang. Selanjutnya pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik sehingga dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, serta terciptanya konsensus. Sehingga membutuhkan pendekatan *top down* dan *bottom up* dilakukan melalui mekanisme Forum Konsultasi Publik dan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Terakhir, pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD, yang mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik. Sedangkan penetapan RPJMD menurut Pasal 70 ayat (2) Permen tersebut, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut juga mengatur bahwa dalam RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja PD), bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan Kota Malang Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029, adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2028 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 66);

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kota Malang, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kota Malang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan daerah untuk menyelaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional, mengamanatkan bahwa perlu dilakukannya telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah.

Dokumen RPJMD nantinya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan sejumlah dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

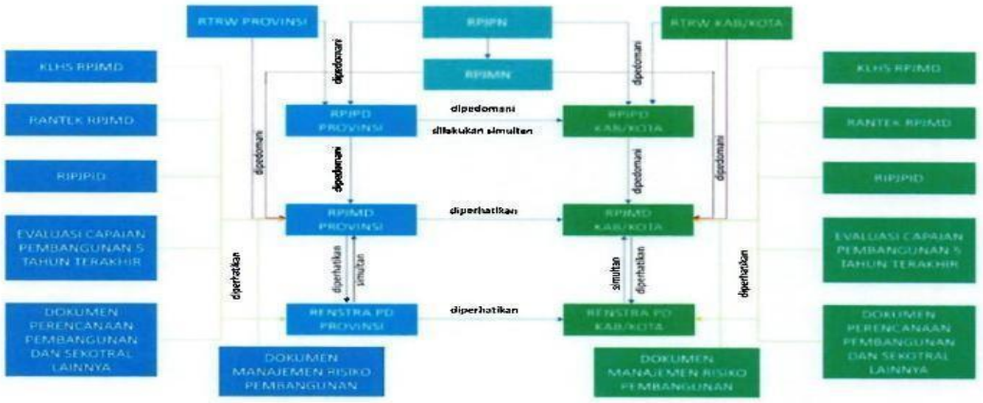

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2020

Adapun hubungan keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, selain RPJPD Kota Malang Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kota Malang juga berkomitmen terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan yang diintegrasikan dengan dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029. Sebagaimana dalam penyusunan RPJPD Kota Malang Tahun 2025-2045 mempertimbangkan KLHS RPJPD Kota Malang Tahun 2025-2045, sehingga Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kota Malang Tahun 2025-2045 terjaga keselarasan pencapaian pembangunan berkelanjutan pada dokumen jangka panjang dan jangka menengah, serta rencana sektoral lainnya yang ada di daerah.

Dokumen rencana pembangunan sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Kepala BRIN Nomor 5 Tahun 2023 dan ketentuan umum Inmendagri disebutkan RIPJPID adalah Dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah, keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 tersebut menjadi pedoman dan sangat membantu memudahkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berdasarkan riset berbasis bukti.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pelaksanaan visi, misi, dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota periode tahun 2025-2030, serta menjadi landasan arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 2026-2030. Adapun maksud penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan arah Pembangunan jangka menengah Kota Malang periode tahun 2026-2030;
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Menjadi landasan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
d. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, serta keberhasilan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
e. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan Pembangunan di wilayah Kota Malang

1.4.2 Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 ini antara lain:

a. Penyelarasan sasaran, prioritas Pembangunan daerah dengan sasaran, prioritas Pembangunan nasional;

b. Penyesuaian target indikator program dan strategi Pembangunan serta reformulasi target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. Tersedianya rumusan gambaran umum kondisi daerah beserta analisanya yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan prioritas penyelenggaraan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan;
d. Tersedianya gambaran kondisi keuangan daerah sebagai landasan dalam menentukan kebijakan keuangan daerah 5 (lima) tahun kedepan;
e. Tersedianya rumusan kondisi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah sebagai landasan dalam perumusan kebijakan dan strategi 5 (lima) tahun kedepan;
f. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan disesuaikan dengan tata cara penyusunan RPJMD menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika penyusunan Dokumen RPJMD sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya;
- 1.4. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.5. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi;
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
  - 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah;
  - 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum.
- 2.2. Gambaran Keuangan Daerah;
- 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis
  - 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah;
  - 2.3.2. Isu Strategis Daerah;

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  - 3.1.1 Visi dan Misi; dan
  - 3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- 3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
  - 3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan

3.2.2 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah;

4.1.2 Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).

BAB V : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Malang secara geografis terletak di 7°54'39" - 8°3'5" Lintang Selatan dan 112°34'8" - 112°41'37" Bujur Timur. Secara topografi, Kota Malang terletak di ketinggian 440 – 667 meter di atas permukaan laut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2011, Kota Malang memiliki luas sebesar 111,08 Km^2. Secara geografis, Kota Malang merupakan *enklave* Kabupaten Malang dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
4. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Kota Malang dilalui oleh sebuah sungai besar, yaitu sungai brantas yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa. Kota Malang juga merupakan kota yang dikelilingi oleh pegunungan. Di sebelah utara terdapat Gunung Arjuno, di sebelah timur terdapat Gunung Semeru, di sebelah barat terdapat Gunung Panderman, Gunung Kawi, dan Gunung Kelud.

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain aluvial kelabu kehitaman dengan luas 6.930.267 Ha, Meiteran Coklat dengan luas 1.225.160 Ha, Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan atau keabu-abuan dengan luas 1.942.160 Ha, dan Sosiasi Andosol Coklat dan Humus Kelabu dengan luas 1.765,160 Ha. Struktur tanah pada umumnya relatif baik, tetapi perlu tetap diperhatikan bahwa jenis tanah andosol memiliki sifat peka terhadap erosi dan banyak ditemukan di Kecamatan Lowokwaru dengan relatif kemirinangan sekitar 15%.

Iklim di Kota Malang mirip seperti iklim di Kabupaten Malang yaitu iklim muson tropis. Kota Malang akan mengalami kedinginan saat musim kemarau karena posisi matahari berada di belahan bumi bagian utara sehingga radiasi matahari di belahan bumi bagian selatan menjadi kurang. Curah hujan relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, dan Desember. Sedangkan pada Bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, Juli, dan September.

Pada kerangka pembangunan nasional, setiap daerah memiliki posisi dan peran strategis yang berkontribusi signifikan terhadap tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Keberagaman potensi, karakteristik geografis, serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap daerah merupakan elemen kunci dalam memperkuat daya saing nasional sekaligus memperkokoh struktur perekonomian. Guna menghadapi tantangan globalisasi, perubahan teknologi, serta dinamika sosial yang terus berkembang,

daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan keunggulan kompetitifnya secara berkelanjutan.

A. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Malang terhadap Nasional (%) (ADHB)

Proporsi kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (ADHB) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekonomi Kota Malang terhadap keseluruhan ekonomi nasional dalam harga dasar berlaku (ADHB). PDRB mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah dalam periode tertentu, sedangkan PDB nasional mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi di seluruh Indonesia.

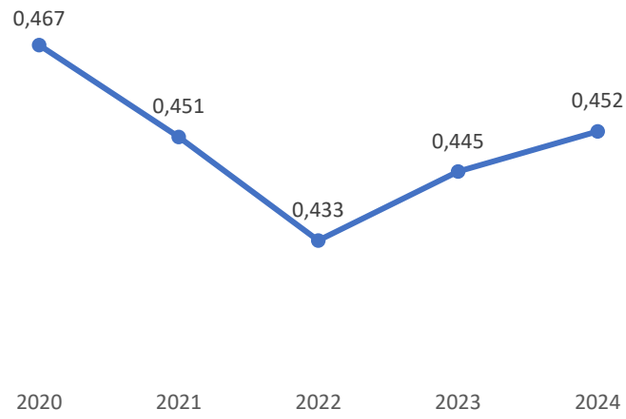

Gambar 2.1 Proporsi kontribusi PDRB Kota Malang terhadap Nasional (%) (ADHB)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, Data Diolah

Proporsi kontribusi PDRB Kota Malang terhadap nasional dalam ADHB mencerminkan seberapa besar peran ekonomi Kota Malang dalam konteks perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Nilai yang berkisar di sekitar 0,43% hingga 0,46% menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki kontribusi yang cukup stabil dan konsisten, sekalipun dalam skala relatif kecil. Hal ini menandakan keberlanjutan aktivitas ekonomi daerah dan potensi yang tetap relevan dalam struktur ekonomi nasional.

B. Proporsi kontribusi PDRB Kota Malang terhadap Nasional (%) (ADHK)

Proporsi kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dalam harga konstan (ADHK) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekonomi Kota Malang terhadap keseluruhan ekonomi nasional dalam harga konstan. Harga konstan berarti perhitungan dilakukan dengan menghilangkan pengaruh inflasi, sehingga mencerminkan volume riil dari produksi barang dan jasa. Berikut adalah nilai Proporsi kontribusi PDRB Kota Malang terhadap Nasional:

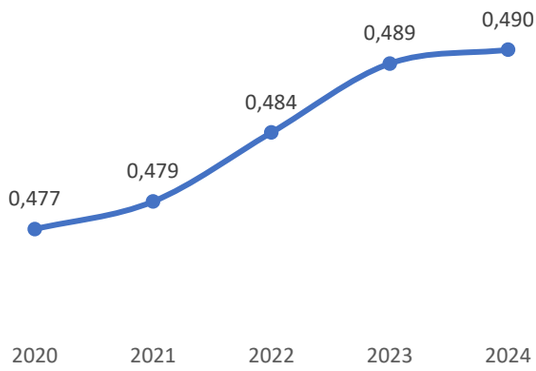

Gambar 2.2 Proporsi kontribusi PDRB Kota Malang terhadap Nasional (%) (ADHK)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, Data Diolah

Proporsi kontribusi PDRB Kota Malang terhadap nasional dalam ADHK menunjukkan peran ekonomi daerah yang relatif stabil dan sedikit meningkat dalam struktur perekonomian Indonesia. Angka yang berada di kisaran 0,47% hingga 0,49% mencerminkan bahwa perekonomian Kota Malang terus berkembang dan mampu mempertahankan kontribusinya secara konsisten, yang menandakan adanya aktivitas ekonomi yang sehat dan terjaga dalam jangka waktu yang berkelanjutan.

C. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang RTRW disebutkan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang merupakan salah satu aspek utama dalam penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang dilakukan agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang.

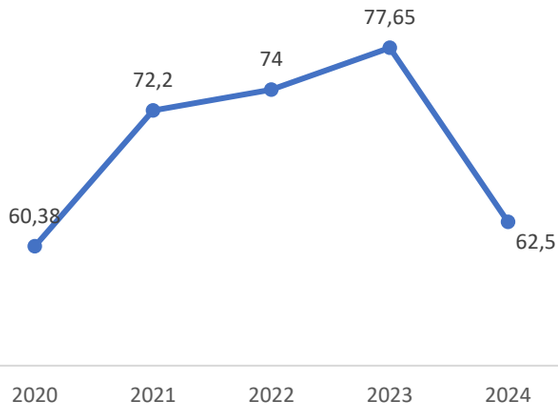

Gambar 2.3 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW
Sumber: Bappeda Kota Malang

Berdasarkan data grafik persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi dalam tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Meskipun sempat mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2023, yakni 77,65%, namun pada tahun 2024 angka tersebut menurun signifikan menjadi 62,5%. Hal ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga konsistensi implementasi rencana tata ruang, yang dapat berdampak pada keteraturan pembangunan dan pengelolaan ruang kota secara berkelanjutan. Diperlukan penguatan pengawasan serta penegakan regulasi tata ruang agar pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih optimal dan sesuai perencanaan.

D. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM

Akses terhadap air minum yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya dalam sektor kesehatan dan kesejahteraan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses tersebut adalah melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM mencerminkan sejauh mana layanan dasar ini menjangkau masyarakat secara merata dan berkelanjutan, serta menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur air bersih di suatu daerah.

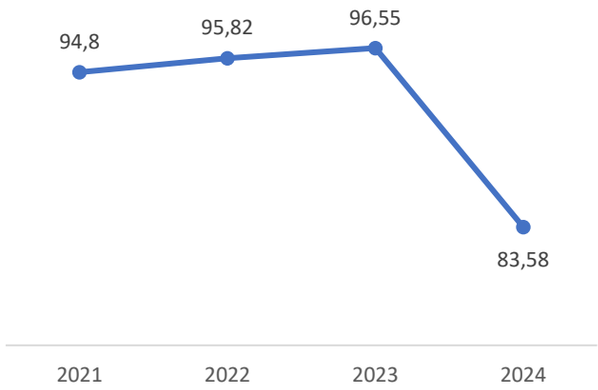

Gambar 2.4 Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

Akses rumah tangga terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menunjukkan tren yang menurun, setelah sempat meningkat dari 94,8% pada tahun 2021 menjadi 96,55% tahun 2023, capaiannya turun drastis menjadi 83,58% pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebelumnya akses air minum melalui SPAM terjaga dengan baik, namun diperlukan upaya penguatan keberlanjutan layanan, perawatan infrastruktur, dan pemantauan berkala agar penurunan serupa tidak berulang di tahun-tahun mendatang.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

A. Produktivitas Padi

Produktivitas padi adalah ukuran hasil produksi padi per satuan luas lahan yang digunakan untuk penanaman. Produktivitas ini dinyatakan dalam kuintal per hektar (ku/ha).

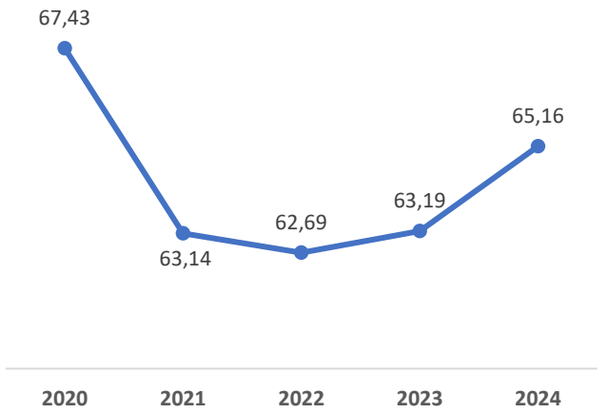

Gambar 2.5 Produktivitas Padi Kota Malang (Ku/Ha)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Produktivitas padi di Kota Malang selama periode 2020–2024 menunjukkan nilai yang relatif stabil dalam kisaran 62 hingga 67 kuintal per hektar. Angka ini mencerminkan kinerja sektor pertanian tanaman pangan yang cukup baik dan berpotensi mendukung ketersediaan pangan lokal. Stabilitas produktivitas ini dapat mencerminkan keberlanjutan praktik budidaya yang dijalankan, meskipun tetap diperlukan perhatian terhadap faktor pendukung seperti irigasi, pupuk, dan pelatihan petani untuk menjaga atau meningkatkan hasil panen ke depannya.

B. Produksi Beras

Produksi beras di Kota Malang mencerminkan kapasitas pertanian lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar masyarakat. Produksi beras sangat dipengaruhi oleh luas panen dan produktivitas lahan, serta faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan ketersediaan sarana produksi. Konsistensi dalam menjaga produksi beras sangat penting untuk ketahanan pangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah. Upaya seperti intensifikasi pertanian, penyuluhan kepada petani, dan perbaikan infrastruktur irigasi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi.

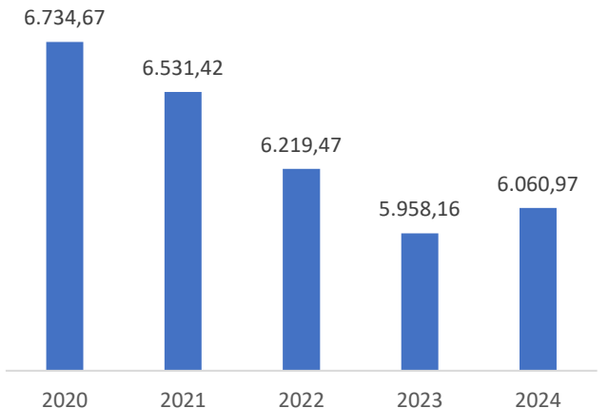

Gambar 2.6 Produksi Beras Kota Malang (ton)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Produksi beras Kota Malang menggambarkan kapasitas produksi beras di Kota Malang cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Meskipun begitu, produksi tetap berada pada level di atas 5.900 ton per tahun, yang menunjukkan bahwa Kota Malang masih

mampu menjaga ketahanan pangan lokal dari sisi ketersediaan beras. Namun, untuk memastikan keberlanjutan, diperlukan upaya strategis dalam menjaga luas lahan pertanian, meningkatkan produktivitas, dan menghadapi tantangan perubahan iklim serta urbanisasi.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dalam era pembangunan yang semakin pesat, keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan menjadi tantangan utama. Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup hadir sebagai prinsip fundamental dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem.

Daya dukung lingkungan merujuk pada kemampuan ekosistem untuk menyediakan sumber daya dan menyerap limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia tanpa mengalami degradasi yang signifikan. Sementara itu, daya tampung lingkungan mengacu pada kapasitas lingkungan dalam menampung populasi manusia dan aktivitasnya tanpa menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman

Daya dukung lahan mencerminkan kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumber daya yang cukup untuk kehidupan manusia, sedangkan daya tampung lahan mengacu pada kapasitas suatu wilayah dalam menampung aktivitas manusia tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. Sehingga, di Kota Malang dapat diketahui Kawasan yang potensial, limitasi, dan kendala dalam daya dukung lahannya.

Tabel 2.1 Daya Dukung Lahan Kota Malang (Ha) Tahun 2023

Daya Dukung Lahan Kota Malang	KECAMATAN					
	Blimbing	**Kedungkandang**	**Klojen**	**Lowokwaru**	**Sukun**	**Total**
Kawasan Kendala	108,22	680,76	22,20	39,22	120,47	970,89
Kawasan Limitasi	67,52	633,68	28,20	292,22	377,51	1.399,15
Kawasan Potensial	1.602,97	2.663,56	846,73	2.013,44	1.610,95	8.737,67
Total	**1.778,73**	**3.978,01**	**897,14**	**2.344,88**	**2.108,94**	**11.107,72**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029

Secara spasial, Kecamatan Kedungkandang memiliki kawasan potensial terbesar (2.663,56 Ha), sedangkan Kecamatan Klojen memiliki kawasan potensial terkecil (846,73 Ha). Secara umum sebagian besar wilayah Kota Malang memiliki daya dukung lahan berupa kawasan potensial seluas 8.737,67 Ha yang mampu menampung pertumbuhan penduduk dan pengembangan permukiman.

Tabel 2.2 Kriteria Daya Dukung Permukiman Kota Malang (Ha) Tahun 2023

Kriteria	Blimbing	Kedungkandang	Klojen	Lowokwaru	Sukun	Total
DDPm<1	1.613,07	332,72	897,14	1.451,15	1.443,60	5.737,69
DDPm>3	0	935,59	0	0	0	935,59
DDPm 1-3	165,66	2.709,69	0	893,73	665,33	4.434,42
Total	1.778,73	3.978,01	897,147	2.344,88	2.108,94	11.107,72

Sumber: KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029

Berdasarkan kriteria daya dukung permukiman sebagian besar wilayah Kota Malang berada pada kategori daya dukung permukiman buruk (DDPm<1) dengan luasan 5.737,69 hektar. Kondisi tersebut menggambarkan sebagian besar lahan di Kota Malang memiliki daya dukung permukiman yang rendah dan tidak bisa lagi menampung pertambahan penduduk untuk menghuni dan membangun rumah pada kawasan tersebut.

Tabel 2.3 Daya Tampung Permukiman Kota Malang Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Nilai Daya Dukung	Nilau Daya Tampung (Jiwa)	Sisa Daya Tampung (Jiwa)	Status Daya Tampung
Blimbing	182.693	0,64	117.868	-64.825	Melampaui
Kedungkandang	208.741	1,55	323.786	115.045	Tidak Melampaui
Klojen	94.039	0,72	68.377	-25.662	Melampaui
Lowokwaru	163.964	1,11	182.450	18.536	Tidak Melampaui
Sukun	196.689	0,73	144.366	-52.323	Melampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029

Kecamatan Blimbing, Klojen, dan Sukun mengalami overpopulasi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan permukiman di kawasan tersebut sudah tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Sedangkan Kecamatan Kedungkandang dan Lowokwaru masih memiliki ruang untuk pertumbuhan, tetapi pengelolaannya harus diarahkan dengan baik agar tidak mengalami kepadatan yang sama di masa mendatang. Secara umum, Kota Malang perlu menyeimbangkan pertumbuhan permukiman dengan kapasitas daya dukung lingkungan serta mengoptimalkan wilayah yang masih memiliki daya tampung agar pembangunan tetap berkelanjutan.

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Ketersediaan air bersih menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan Kota Malang lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kondisi daya dukung dan daya tampung air Kota Malang secara umum menunjukkan ketersediaan air di Kota Malang dalam kondisi surplus.

Tabel 2.4 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Tahun 2023

Kecamatan	Ketersediaan Air (m^3/tahun)	Kebutuhan Air Domestik (m^3/tahun)	Status Daya Dukung Air	Status Daya Tampung Air
Blimbing	74.243.146,33	3.267.150,51	23.405,63	Tidak Terlampaui
Kedungkandang	228.409.820,52	6.457.990,28	53.540,51	Tidak Terlampaui
Klojen	36.034.561,69	1.171.547,06	-17.734,60	Terlampaui
Lowokwaru	121.757.311,62	5.122.605,68	21.679,50	Tidak Terlampaui
Sukun	127.254.702,49	5.765.145,84	54.283,08	Tidak Terlampaui
Total	587.699.542,66	21.784.439,37	135.174,12	Tidak Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029

Pada tahun 2023, ketersediaan air total di Kota Malang tercatat sebesar 587,7 juta m^3 per tahun, sedangkan kebutuhan air domestik mencapai 21,78 juta m^3 per tahun. Secara agregat, data ini menunjukkan adanya surplus dalam kuantitas air secara keseluruhan. Kecamatan Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru, dan Sukun masih menunjukkan nilai positif dalam daya dukung air, yang

berarti masih terdapat ruang ekologis untuk mencukupi kebutuhan air domestik. Sebaliknya, Kecamatan Klojen tercatat mengalami defisit daya dukung air sebesar -17.734 m³/tahun, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan air telah melampaui kapasitas penyediaan air alami di wilayah tersebut. Hal ini patut menjadi perhatian khusus, mengingat Klojen merupakan kawasan pusat kota dengan kepadatan aktivitas sosial dan ekonomi yang tinggi.

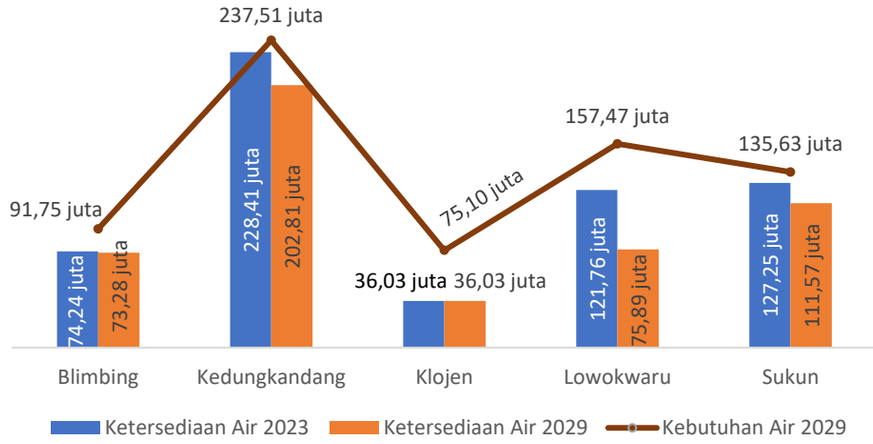

Gambar 2.7 Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kota Malang Tahun 2029 (m³/tahun)
Sumber: KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029

Meskipun kondisi saat ini menunjukkan bahwa secara agregat ketersediaan air di Kota Malang masih relatif tercukupi, dengan total ketersediaan mencapai lebih dari 587 juta m³ per tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik sekitar 21,78 juta m³ per tahun, namun tren yang ada menunjukkan adanya penurunan ketersediaan air pada tahun 2029.

Proyeksi untuk tahun 2029 memperlihatkan bahwa defisit air akan terjadi di semua kecamatan, dengan tingkat yang paling parah di Kecamatan Lowokwaru dan Klojen, yang merupakan kawasan padat penduduk dengan tingkat pembangunan tertinggi. Hal ini akan berdampak pada ketahanan air kota secara keseluruhan, dan berpotensi memicu masalah sosial-ekonomi yang lebih luas, seperti keterbatasan layanan air bersih, meningkatnya konflik pemanfaatan air antar sektor, hingga menurunnya kualitas kesehatan masyarakat.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Malang tahun 2023, kondisi daya dukung dan daya tampung pangan secara umum masih berada pada kondisi surplus, namun dengan ketimpangan distribusi antarwilayah yang perlu diantisipasi.

Tabel 2.5 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Tahun 2023

Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Kg/tahun)	Kebutuhan Pangan (Kg/tahun)	Status Daya Dukung Pangan	Status Daya Tampung Pangan
Blimbing	8,41	2.256.073,38	-2.256.064,97	Terlampaui
Kedungkandang	29.807.733,31	5.271.490,94	24.536.242,36	Tidak Terlampaui
Klojen	0	673.851,75	-673.851,75	Terlampaui

Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Kg/tahun)	Kebutuhan Pangan (Kg/tahun)	Status Daya Dukung Pangan	Status Daya Tampung Pangan
Lowokwaru	26.056.947,80	3.745.560,82	22.311.386,98	Tidak Terlampaui
Sukun	14.070.418,22	4.352.815,04	9.717.603,19	Tidak Terlampaui
Total	69.935.107,74	16.299.791,93	53.635.315,81	Tidak Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029

Secara agregat, pada tahun 2023 Kota Malang memiliki surplus pangan sekitar 53,63 juta kg/ tahun, yaitu selisih antara total ketersediaan pangan dengan total kebutuhan konsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara makro, Kota Malang masih mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Surplus ini sebagian besar berasal dari kontribusi wilayah yang memiliki daya dukung lahan pertanian lebih besar, seperti Kecamatan Kedungkandang dan Sukun. Namun demikian, terdapat dua kecamatan yang mengalami defisit pangan yaitu Kecamatan Blimbing defisit sekitar 2,25 juta kg/tahun dan Kecamatan Klojen defisit sekitar 673 ribu Kg/tahun.

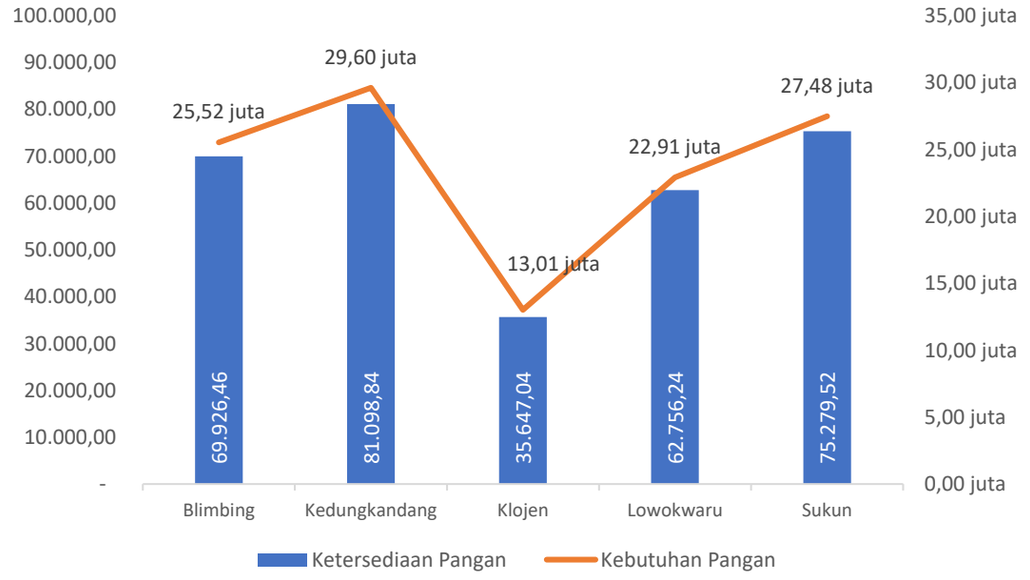

Gambar 2.8 Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kota Malang Tahun 2029
Sumber: KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029

Berdasarkan proyeksi ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kota Malang pada tahun 2029, kondisi status daya dukung dan daya tampung pangan terlampaui dimana kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan pangan. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan serius terhadap kemampuan Kota Malang dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

Proyeksi kondisi daya dukung dan daya tampung pangan Kota Malang pada tahun 2029 menunjukkan bahwa kapasitas produksi pangan lokal sudah berada pada titik kritis, dengan kebutuhan yang diproyeksikan melampaui ketersediaan jika tren saat ini berlanjut. Sehingga Pemerintah Kota Malang perlu melakukan upaya mulai penguatan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan hingga penguatan system distribusi dan cadangan pangan.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

A. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indikator ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta pemanfaatan pangan sebagai aspek-aspek utama penopang ketahanan pangan.

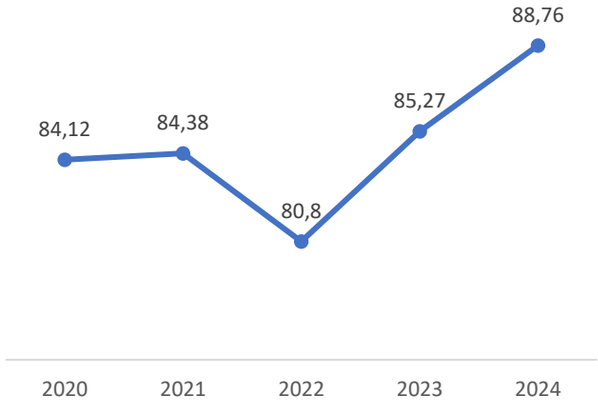

Gambar 2.9 Indeks Ketahanan Pangan
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang

Berdasarkan data indeks ketahanan pangan Kota Malang dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika dalam tingkat ketahanan pangan yang mengalami fluktuasi dalam periode tersebut. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, kondisi ketahanan pangan menunjukkan tren pemulihan pada tahun 2023 dengan indeks meningkat kembali ke angka 85,27, yang kemudian terus mengalami perbaikan lebih lanjut hingga mencapai 88,76 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya dan kebijakan yang berhasil dalam memperbaiki ketahanan pangan, baik dari aspek produksi, distribusi, maupun akses masyarakat terhadap bahan pangan yang cukup dan bergizi.

B. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, yang konsumsi energi sehari-hari dari makanan (pangan) tidak cukup memenuhi tingkat energi untuk hidup normal. Prevalensi ketidakcukupan pangan di Kota Malang mengalami peningkatan dari 5,31% pada 2020 hingga mencapai puncak 6,7% pada 2022, menunjukkan tantangan dalam akses pangan. Namun, setelah itu, angka ini menurun menjadi 5,04% pada 2023 dan 4,99% pada 2024, mencerminkan perbaikan dalam ketahanan pangan. Tren penurunan ini menunjukkan efektivitas upaya peningkatan akses dan ketersediaan pangan di Kota Malang.

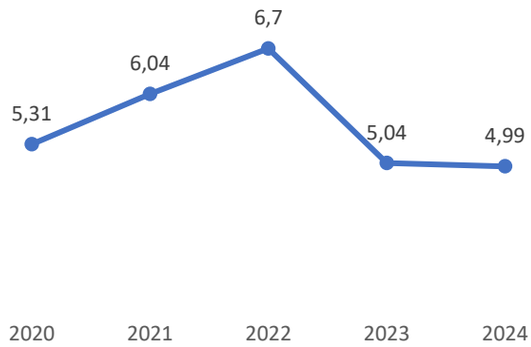

Gambar 2.10 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik Pusat

C. Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringna perpipaan yang memenuhi syarat kualitas air minum. Gambaran umum akses di kota malang sebagaimana pada gambar di bawah. Pada tahun 2024 mengalami penurunan sedangkan perlu peningkatan akses air siap minum perpipaan oleh karena itu indikatro ini menjadi prioritas dalam indikator kinerja daerah yang meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2030.

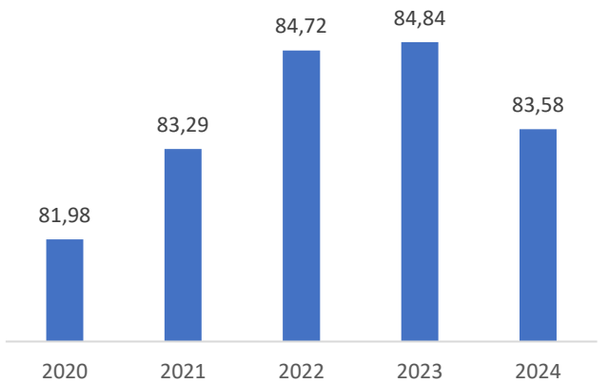

Gambar 2.11 Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang

D. Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Secara umum, persentase rumah tinggal yang memiliki akses terhadap air minum di Kota Malang menunjukkan ketersediaan layanan dasar yang cukup baik. Hal ini mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam memperluas cakupan infrastruktur air minum, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung derajat kesehatan lingkungan perkotaan. Nilai persentase yang konsisten tinggi mencerminkan keberhasilan pembangunan infrastruktur air minum dan komitmen

pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara merata.

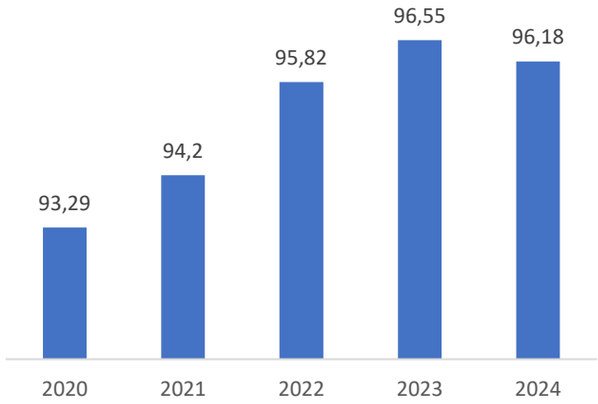

Gambar 2.11 Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang

E. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pencapaian skor pola pangan harapan menggambarkan tren peningkatan yang konsisten dalam periode tahun 2020 hingga tahun 2024. PPH merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas dan keragaman konsumsi pangan suatu populasi, dengan skor maksimal 100 yang mencerminkan pola konsumsi yang ideal dan seimbang.

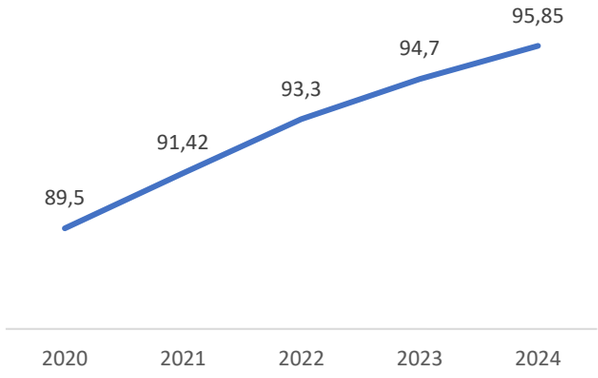

Gambar 2.12 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang

Tren peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam mencapai pola konsumsi pangan yang lebih ideal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang, peningkatan akses terhadap pangan yang beragam dan bergizi, serta intervensi kebijakan melalui program-program pangan dan gizi.

Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, penting untuk diingat bahwa skor PPH yang ideal adalah 100. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan perlu terus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Hal ini meliputi edukasi gizi yang berkelanjutan, peningkatan akses terhadap pangan yang beragam dan bergizi, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung ketahanan pangan.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

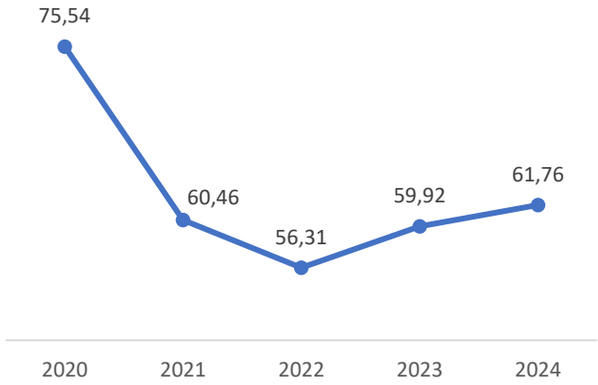

Gambar 2.13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Data indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Malang menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam periode 2020-2022, diikuti dengan upaya pemulihan yang mulai meningkat di tahun-tahun selanjutnya. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 dipengaruhi oleh kenaikan nilai Indeks Kualitas Air dan nilai Indeks Kualitas Udara. Untuk dapat meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air dapat dilakukan beberapa hal yaitu perbaikan sistem sanitasi, penerapan pengelolaan limbah yang lebih efektif, edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya dampak pencemaran lingkungan, dan perbaikan infrastruktur pengelolaan limbah. Sedangkan perbaikan Indeks Kualitas Udara perlu dilakukan program-program yang mampu menurunkan minat penggunaan kendaraan bermotor seperti *Green Transportation*/transportasi berwawasan lingkungan misalnya bersepeda dan meningkatkan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan misalnya penggunaan mobil dengan energi listrik, pencegahan emisi CO_2 menurun dengan adanya peraturan membayar setiap kerugian akibat pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan perindustrian. Perlu menjadi perhatian bahwa pemulihan IKLH di Kota Malang tersebut masih dalam tahap awal dan diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

B. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kebersihan dan kesehatan sumber-sumber air, seperti sungai, danau, dan air tanah, berdasarkan parameter fisik, kimia, dan biologi. Indeks ini mencerminkan seberapa baik kondisi air untuk mendukung kehidupan manusia, pertanian, industri, dan ekosistem. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kualitas air yang tersedia, yang pada akhirnya mendukung kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Indeks Kualitas Air menjadi alat penting dalam memantau keberlanjutan pengelolaan sumber daya air dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan berbasis lingkungan.

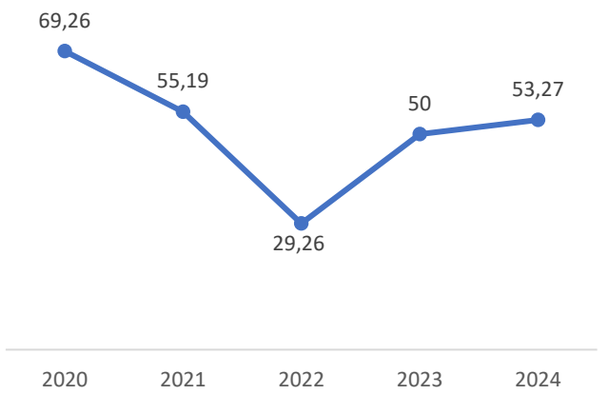

Gambar 2.14 Indeks Kualitas Air
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Indeks Kualitas Air dalam periode tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan adanya variasi dalam tingkat kebersihan dan kesehatan sumber air. Meskipun terdapat fluktuasi, data ini secara umum mengindikasikan adanya upaya perbaikan kualitas air di beberapa tahun terakhir. Nilai indeks yang masih berada di kisaran menengah mencerminkan bahwa kualitas air perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi standar kesehatan lingkungan yang optimal. Beberapa faktor pendorong peningkatan nilai Indeks Kualitas Air antara lain perbaikan sistem sanitasi, penerapan pengelolaan limbah yang lebih efektif, edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya dampak pencemaran lingkungan, dan perbaikan infrastruktur pengelolaan limbah.

C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan indikator yang mengukur kondisi dan kelestarian tutupan lahan di suatu wilayah, termasuk hutan, lahan pertanian, kawasan permukiman, dan ruang terbuka hijau. Indeks ini mencerminkan seberapa baik wilayah mempertahankan fungsi ekologisnya, seperti penyerapan karbon, perlindungan biodiversitas, dan pengendalian erosi. Pemantauan Indeks Kualitas Tutupan Lahan menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

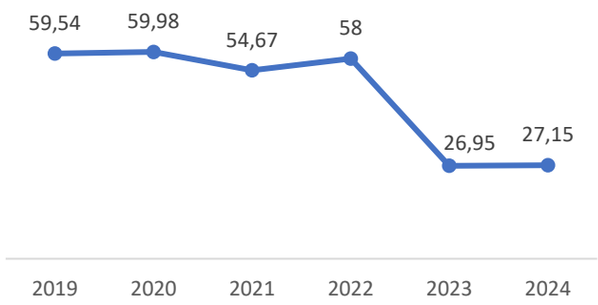

Gambar 2.15 Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dalam periode tahun 2019 hingga tahun 2024 menunjukkan kecenderungan perlunya perhatian lebih terhadap pengelolaan ruang terbuka dan penggunaan lahan. Nilai indeks yang cenderung menurun mengindikasikan bahwa kualitas dan keberlanjutan tutupan lahan menghadapi tantangan, baik akibat tekanan pembangunan, alih fungsi lahan, maupun degradasi lingkungan. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya perlindungan ruang hijau, konservasi kawasan lindung, serta perencanaan tata ruang yang lebih berwawasan lingkungan. Indeks kualitas Lahan mengalami penurunan pada tahun 2023 karena terjadi perubahan metode perhitungan yang semula sudah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 dengan menggunakan metode pengambilan data yang terbaru. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kota Malang untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan perlu dilakukan perluasan area Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan melaksanakan program yang sifatnya mengelola bukan merusak lingkungan hidup.

D. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah indikator yang mengukur tingkat kebersihan atau pencemaran udara berdasarkan konsentrasi polutan seperti partikel debu, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan ozon. Indeks ini penting untuk menilai sejauh mana udara di suatu wilayah aman bagi kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

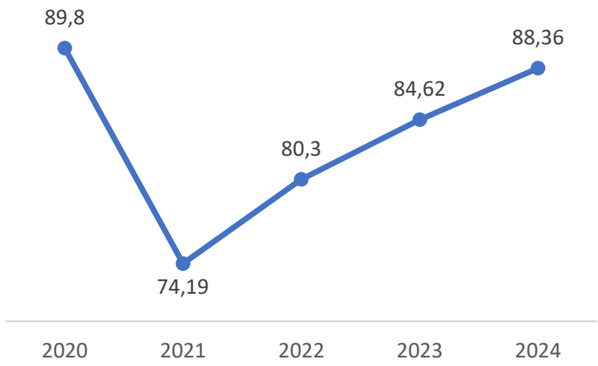

Gambar 2.16 Indeks Kualitas Udara
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Kualitas udara di Kota Malang menunjukkan tren membaik setelah sempat menurun tajam pada tahun 2021. Upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat mulai menunjukkan hasil positif, terlihat dari peningkatan indeks kualitas udara secara bertahap hingga mendekati kondisi awal tahun 2020. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan kualitas udara, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan secara konsisten. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kota Malang dalam meningkatkan kualitas udara perlu antara lain pengembangan transportasi ramah lingkungan, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi,

peningkatan penggunaan energi terbarukan, edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan.

E. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Rumah tangga dengan akses sanitasi layak merupakan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak seperti memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan. Tingginya persentase akses sanitasi layak menunjukkan perbaikan dalam kondisi kesehatan masyarakat, pengurangan risiko penyakit, dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan di sektor lingkungan dan kesehatan.

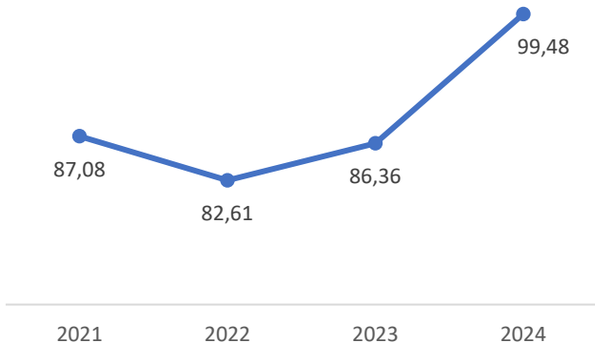

Gambar 2.17 Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kota Malang berada pada kisaran di atas 80 persen selama periode 2020 hingga 2024. Peningkatan tajam ini mengindikasikan adanya intervensi kebijakan infrastruktur yang efektif, yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Capaian mendekati 100% juga menandakan bahwa akses sanitasi layak hampir merata di seluruh rumah tangga di Kota Malang.

F. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah mencerminkan sejauh mana kapasitas pengelolaan sampah di suatu wilayah mampu menangani limbah yang dihasilkan masyarakat. Indikator ini menunjukkan efektivitas sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah, serta peran fasilitas seperti TPS 3R, TPA, dan bank sampah. Persentase yang tinggi menunjukkan sistem pengelolaan yang berjalan baik dan berkontribusi pada pengurangan pencemaran lingkungan.

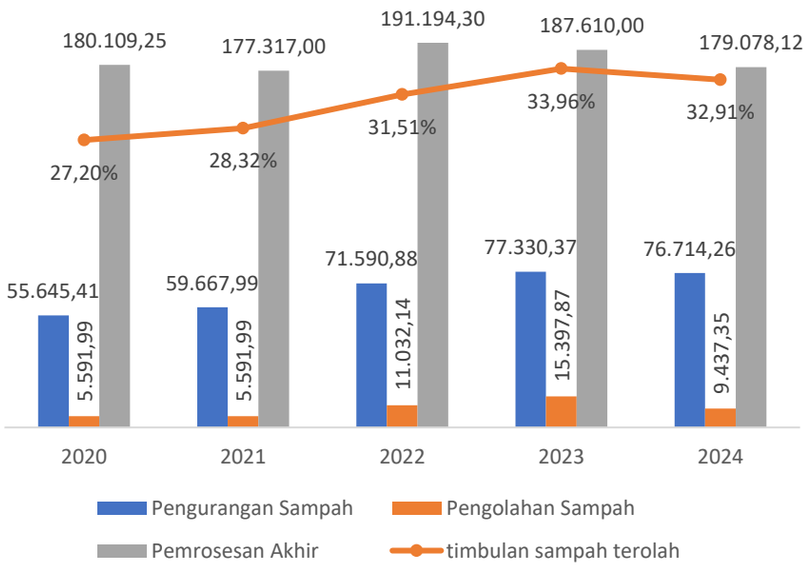

Gambar 2.18 Komponen Sampah Terkelola (Ton/Tahun)
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Grafik timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah merupakan pengurangan dan pengolahan sampah disbanding dengan timbulan sampah, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengolahan sampah. Meskipun demikian persentase sampah yang diolah masih relatif rendah, dimana sebagian besar sampah masih belum tertangani dengan baik. Beberapa faktor penyebab sampah tidak terolah antara lain kurangnya fasilitas pengolahan sampah karena TPA masih menggunakan sistem *open dumping*, minimnya pemilahan sampah di sumber (masih minimnya pemilahan sampah pada rumah tangga), kapasitas TPA Supit Urang yang terbatas dan akan mencapai Batasan maksimal dalam waktu tidak terlalu lama, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi fasilitas pengolahan sampah, serta mendorong pengurangan timbulan sampah dari sumbernya.

G. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mencerminkan cakupan pelayanan kebersihan yang diterima oleh masyarakat. Angka ini menunjukkan seberapa besar populasi yang mendapatkan akses rutin dan terjadwal terhadap sistem pengumpulan sampah oleh petugas atau instansi terkait. Semakin tinggi proporsinya, semakin baik pula tingkat pelayanan dasar kebersihan dan pengelolaan lingkungan di suatu wilayah.

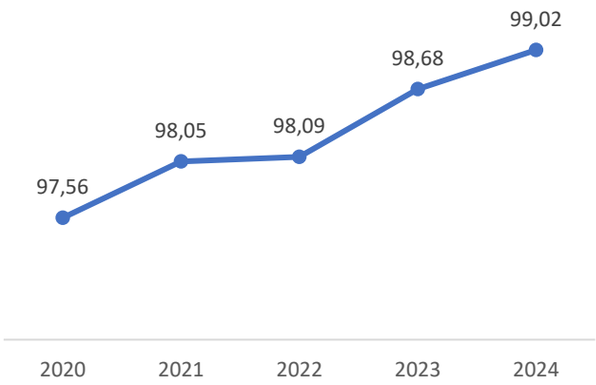

Gambar 2.19 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Kota Malang mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka ini tercatat sebesar 97,56%, dan terus meningkat hingga mencapai 99,02% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam layanan pengelolaan sampah, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kebersihan bagi masyarakat.

Peningkatan kinerja ini tidak lepas dari upaya komprehensif pemerintah daerah, yang diwujudkan melalui perluasan jangkauan armada pengangkut sampah, optimalisasi jadwal layanan, peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS), serta sosialisasi pengelolaan sampah terpadu di tingkat rumah tangga. Meskipun demikian, upaya ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama kendala aksesibilitas di kawasan padat penduduk dan kesadaran masyarakat yang belum optimal dalam memilah sampah dari sumbernya. Oleh karena itu, walaupun capaian yang ada menunjukkan kinerja sangat baik, inovasi layanan dan penguatan partisipasi publik menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di masa depan

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Penurunan Emisi GRK

Gas rumah kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode *base year* hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK *baseline* daerah untuk periode yang sama. Gambaran umum kondisi emisi GRK Kota Malang tahun 2023 potensi penurunan emisi senilai 481.361,4997 ton CO_2 eq, sedangkan potensi penurunan emisi tahun 2024 senilai 485.960,1537 ton CO_2 eq.

B. Indeks Risiko Bencana

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan resiko bencana di suatu daerah. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana.

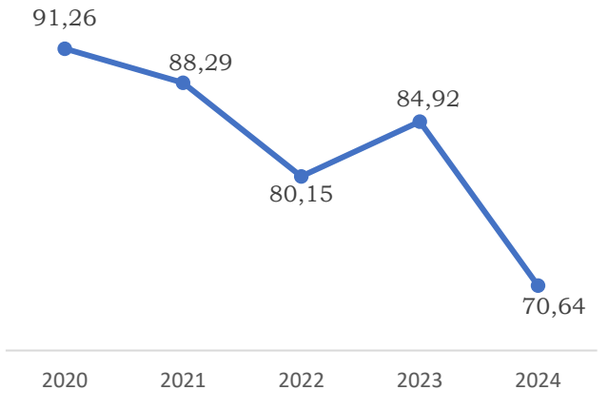

Gambar 2.20 Indeks Risiko Bencana
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Indeks Risiko Bencana Kota Malang dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan, mencerminkan tingkat kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana. Secara tren lima tahun terakhir indeks risiko bencana menunjukkan penurunan, yang berarti risiko bencana di Kota Malang cenderung membaik. Meski demikian, fluktuasi tahunan menandakan perlunya upaya yang lebih konsisten dan sistematis dalam membangun ketahanan wilayah, termasuk peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan sistem informasi bencana, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan tanggap darurat.

Upaya pengurangan risiko bencana di Kota Malang dijalankan secara komprehensif, mulai dari program Kelurahan Tangguh Bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, hingga mitigasi fisik seperti perkuatan lereng dan penyusunan peta rawan bencana. Keberhasilan program ini sangat ditopang oleh sinergi "pentahelix" yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan komunitas. Namun, upaya ini dihadapkan pada tantangan berat dari laju urbanisasi yang cepat, keterbatasan anggaran, serta meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, yang menjadi penghambat utama dalam mencapai ketangguhan kota yang optimal.

C. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di daerah. IKD terdiri dari tiga komponen, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. Indeks Ketahanan Daerah juga akan mempengaruhi Indeks Risiko Bencana Indonesia di tingkat nasional pada setiap provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

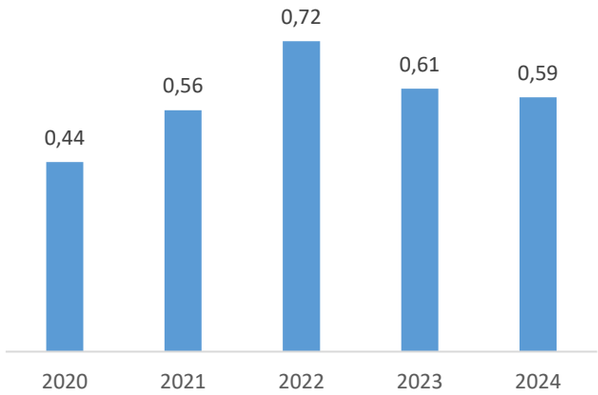

Gambar 2.21 Indeks Ketahanan Daerah Kota Malang
Sumber: BPBD Provinsi Jatim, 2024

Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kota Malang selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Indeks ini mengalami peningkatan dari 0,44 pada tahun 2020 hingga mencapai 0,72 pada 2022, mencerminkan adanya penguatan kapasitas wilayah dalam menghadapi potensi bencana. Namun, sejak 2022, terjadi penurunan bertahap menjadi 0,61 di tahun 2023 dan 0,59 pada 2024, yang mengisyaratkan perlunya penguatan kembali dalam upaya adaptasi dan mitigasi risiko bencana guna menjaga ketahanan daerah secara konsisten.

Pemerintah Kota Malang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan daerah, seperti penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tangguh, serta pelibatan masyarakat melalui edukasi dan simulasi kebencanaan. Peningkatan IKD didukung oleh komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektora. Namun, capaian ini masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan anggaran, minimnya tenaga teknis, dan dampak urbanisasi yang meningkatkan kerentanan bencana. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah korektif dan strategis agar ketahanan daerah terus terjaga dan berkembang secara berkelanjutan.

Table 2.6 Pemetaan Risiko Bencana di Kota Malang

Kecamatan	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
Klojen	Banjir	Tinggi
	Gempa Bumi	Rendah
	Cuaca Ekstrem	Sedang
	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi
Blimbing	Banjir	Tinggi
	Gempa Bumi	Rendah
	Cuaca Ekstrem	Sedang
	Epidemi dan Wabah Penyakit	Sedang
Lowokwaru	Banjir	Sedang
	Gempa Bumi	Sedang
	Cuaca Ekstrem	Sedang
	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi
Kedungkandang	Banjir	Tinggi
	Tanah Longsor	Sedang
	Gempa Bumi	Sedang

Kecamatan	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
	Cuaca Ekstrem	Sedang
	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi
Sukun	Banjir	Sedang
	Tanah Longsor	Sedang
	Gempa Bumi	Rendah
	Cuaca Ekstrem	Sedang
	Epidemi dan Wabah Penyakit	Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (data diolah, Kajian Risiko Bencana Kota Malang)

Kota Malang memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi, terutama terhadap banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Permukiman yang tumbuh di wilayah rawan, alih fungsi lahan yang tak terkendali, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi masalah pokok yang memperparah kerentanan. Infrastruktur penanggulangan seperti sistem peringatan dini dan jalur evakuasi juga masih terbatas.

Akar masalahnya terletak pada belum terintegrasinya data risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang, kapasitas kelembagaan dan SDM yang belum optimal, serta pendekatan penanggulangan yang masih reaktif. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan turut meningkatkan intensitas bencana. Situasi ini menuntut pendekatan yang lebih terencana dan preventif, dengan sinergi antar sektor, perbaikan tata ruang berbasis risiko, dan peningkatan kapasitas masyarakat agar ketahanan bencana Kota Malang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

2.1.1.7 Demografi

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data BPS, Kota Malang pada tahun 2024, Kota Malang memiliki jumlah penduduk sebesar 889.359 jiwa.

A. Pertumbuhan Penduduk

Peningkatan jumlah penduduk tidak serta merta dapat menjadi sebuah pertanda baik jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran. Angka pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Berikut adalah data pertumbuhan penduduk di Kota Malang:

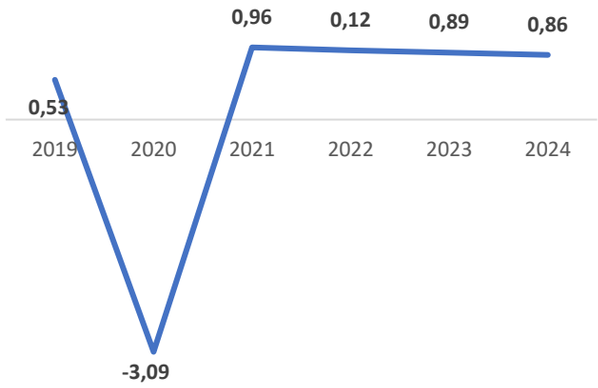

Gambar 2.22 Pertumbuhan Penduduk
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Setelah sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kota Malang kembali stabil pada tahun-tahun berikutnya dengan kisaran moderat di bawah 1%. Pola ini mencerminkan transisi demografis menuju pertumbuhan yang lebih terkendali, serta menunjukkan pemulihan mobilitas penduduk pasca pandemi.

B. Rasio Penduduk (Jenis Kelamin)

Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita.

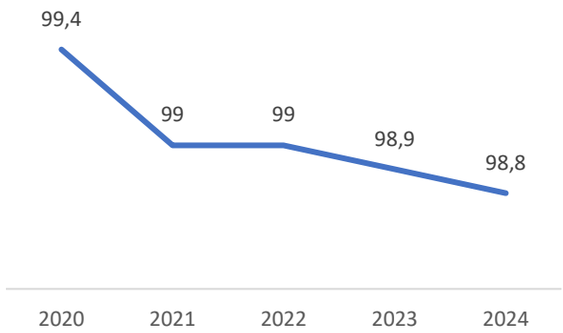

Gambar 2.23 Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Data rasio penduduk Kota Malang menunjukkan tren yang cenderung menurun selama periode tahun 2020-2024. Dari angka 99,4 pada tahun 2020, rasio ini menurun menjadi 98,8 pada tahun 2024. Penurunan rasio penduduk dari tahun 2020 hingga 2024 mengindikasikan bahwa jumlah perempuan semakin mendominasi dibanding laki-laki. Fenomena ini dapat mencerminkan beberapa dinamika demografis, seperti tingginya angka harapan hidup perempuan serta kemungkinan adanya mobilitas laki-laki ke luar daerah untuk keperluan kerja atau pendidikan.

C. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Analisis kepadatan penduduk penting untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk merupakan

indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang di timbulkan.

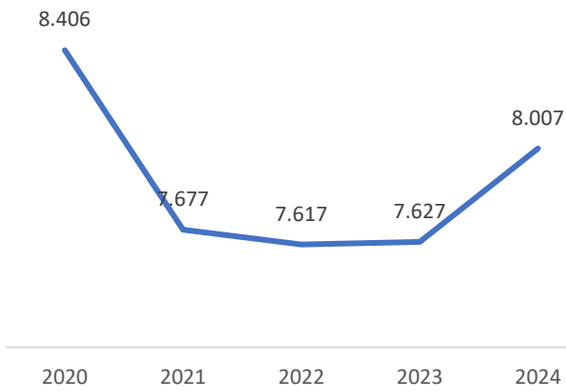

Gambar 2.24 Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Kepadatan penduduk per kilometer persegi di Kota Malang mengalami fluktuasi selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, angka kepadatan tercatat sebesar 8.406 jiwa/km^2, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 7.677 jiwa/km^2 dan terus menurun hingga titik terendah di tahun 2022 sebesar 7.617 jiwa/km^2. Setelah itu, terjadi sedikit kenaikan pada 2023 dan lonjakan lebih besar pada 2024 dengan angka mencapai 8.007 jiwa/km^2. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa setelah masa penurunan, yang kemungkinan disebabkan oleh mobilitas penduduk atau dampak pandemi, wilayah tersebut kembali mengalami peningkatan aktivitas dan konsentrasi penduduk, yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan ruang dan pelayanan publik.

D. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang berdasarkan data dan tren demografis saat ini. Proyeksi ini dibuat dengan menggunakan berbagai metode statistik dan model matematika yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan demografis lainnya. Berikut adalah data proyeksi penduduk di Kota Malang dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Tabel 2.7 Proyeksi Penduduk Kota Malang Tahun 2025-2029

Jumlah Penduduk					
Jumlah Penduduk 2023 (jiwa)	**Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)**				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
847.182	879.870	886.820	893.510	899.950	906.140

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Tabel tersebut menunjukkan jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2023 dan proyeksi penduduk untuk tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2023, jumlah penduduk tercatat sebanyak 847.182 jiwa. Proyeksi untuk tahun-tahun berikutnya menunjukkan peningkatan jumlah penduduk secara bertahap. Pada tahun 2025, diperkirakan jumlah penduduk akan mencapai 879.870 jiwa, kemudian meningkat menjadi 886.820 jiwa pada tahun 2026. Pada

tahun 2027, jumlah penduduk diproyeksikan akan menjadi 893.510 jiwa, sedikit menurun menjadi 899.950 jiwa pada tahun 2028, dan kembali meningkat pada tahun 2029 dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 906.140 jiwa.

Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk Kota Malang Tahun 2025-2029

Kepadatan Penduduk							
Luas Wilayah Kota Malang		**Kondisi Tahun 2023**	**Proyeksi Kepadatan Penduduk**				
			2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Km²	111,08	7.627	7.921	7.984	8.044	8.102	8.158

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Tabel diatas menyajikan data mengenai kepadatan penduduk di Kota Malang, dengan luas wilayah sebesar 111,08 km². Pada tahun 2023, kondisi kepadatan penduduk tercatat sebesar 7.627 jiwa per km². Proyeksi kepadatan penduduk untuk tahun-tahun berikutnya menunjukkan peningkatan bertahap. Pada tahun 2025, kepadatan penduduk diproyeksikan mencapai 7.921 jiwa per km², kemudian meningkat menjadi 7.984 jiwa per km² pada tahun 2026. Pada tahun 2027, kepadatan penduduk diperkirakan akan mencapai 8.044 jiwa per km², dan sedikit meningkat menjadi 8.102 jiwa per km² pada tahun 2028. Dilanjutkan dengan, proyeksi untuk tahun 2029 menunjukkan peningkatan kembali, dengan kepadatan penduduk diperkirakan mencapai 8.158 jiwa per km².

Tabel 2.9 Komposisi Umur Penduduk Kota Malang Tahun 2025-2029

Komposisi Umur						
Kelompok Umur	**Penduduk Tahun 2023**	**Proyeksi Penduduk (jiwa)**				
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
0-14 tahun	183.035	184.100	183.060	181.910	180.700	179.470
15-64 tahun	590.944	306.660	616.610	620.190	623.520	626.610
> 65 tahun	73.203	36.340	87.160	91.430	84.470	100.080
Angka Ketergantungan	0,43	0,72	0,44	0,44	0,43	0,45
Anak-anak	21,61%	20,92%	20,64%	20,36%	20,03%	19,81%
Bonus Demografi	69,75%	34,85%	69,53%	69,41%	69,28%	69,15%
Lansia	8,64%	4,13%	9,83%	10,23%	9,39%	11,04%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Komposisi umur adalah distribusi penduduk dalam berbagai kelompok umur di suatu wilayah. Ini mencerminkan bagaimana penduduk terbagi dalam berbagai kategori usia, seperti anak-anak (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan lanjut usia (>65 tahun). Tabel diatas menggambarkan komposisi umur penduduk dan proyeksi jumlah penduduk di Kota Malang dari tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2023, jumlah penduduk berusia 0-14 tahun adalah 183.035 jiwa, penduduk berusia 15-64 tahun sebanyak 590.944 jiwa, dan penduduk berusia di atas 65 tahun mencapai 73.203 jiwa. Proyeksi untuk tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan fluktuasi dalam jumlah penduduk setiap kelompok umur. Pada tahun

2025, jumlah anak-anak diperkirakan mencapai 184.100 jiwa, namun akan menurun menjadi 179.470 jiwa pada tahun 2029. Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) diproyeksikan meningkat dari 306.660 jiwa pada tahun 2025 menjadi 626.610 jiwa pada tahun 2029. Penduduk lansia (>65 tahun) juga diperkirakan meningkat, dari 36.340 jiwa pada tahun 2025 menjadi 100.080 jiwa pada tahun 2029. Angka ketergantungan menunjukkan rasio antara jumlah penduduk non-produktif terhadap penduduk produktif, diperkirakan mengalami sedikit perubahan, dari 0,43 pada tahun 2023 menjadi 0,45 pada tahun 2029. Proporsi anak-anak terhadap total penduduk diperkirakan menurun dari 21,61% pada tahun 2023 menjadi 19,81% pada tahun 2029. Bonus demografi, yang menunjukkan persentase penduduk usia produktif, akan mengalami fluktuasi, mulai dari 69,75% pada tahun 2023 dan mencapai 70,16% pada tahun 2028, sebelum sedikit menurun menjadi 69,15% pada tahun 2029. Sementara itu, persentase lansia diperkirakan meningkat dari 8,64% pada tahun 2023 menjadi 11,04% pada tahun 2029.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kunci untuk mengukur kinerja pembangunan suatu wilayah. Secara umum, tren pertumbuhan ekonomi mencerminkan kapasitas daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, serta mencerminkan daya tahan terhadap berbagai tekanan ekonomi. Pertumbuhan yang stabil menunjukkan pemulihan dan keberlanjutan aktivitas ekonomi, sementara fluktuasi tajam bisa mengindikasikan adanya gangguan struktural maupun faktor eksternal seperti krisis global atau pandemi.

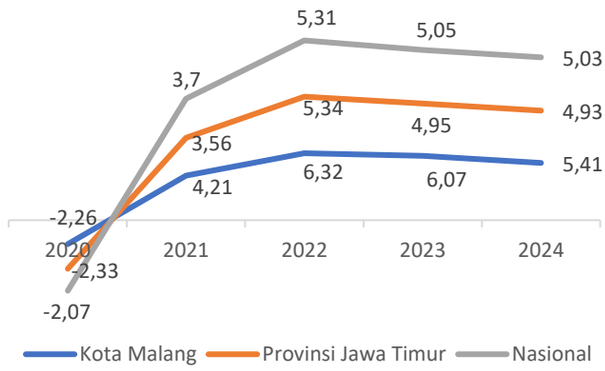

Gambar 2.25 Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki tren pemulihan dan penguatan ekonomi yang cukup solid dalam beberapa tahun terakhir. Laju pertumbuhan Kota Malang cenderung sejajar bahkan melampaui rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun-tahun terakhir. Hal ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang aktif dan keberhasilan strategi pemulihan daerah, serta potensi Kota Malang dalam menopang pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

B. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Kemiskinan adalah Suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat.

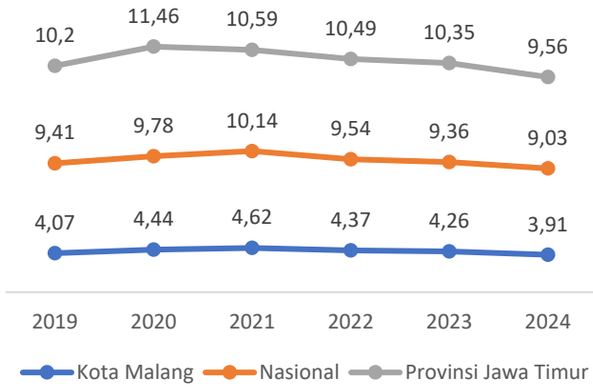

Gambar 2.26 Tingkat Kemiskinan (persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang
**) kemiskinan Provinsi Jawa Timur merupakan data semester 2*

Tingkat kemiskinan di Kota Malang pada periode 2019–2024 secara konsisten tercatat jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat di Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Selama periode ini, Kota Malang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 4,07% pada 2019 menjadi 3,91% pada 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Malang relatif lebih efektif dan stabil dibandingkan dengan di tingkat provinsi dan nasional. Hal tersebut dapat mencerminkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran, dukungan ekonomi lokal yang kokoh, serta akses layanan sosial yang lebih optimal di Kota Malang. Meski demikian, tantangan tetap ada untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan dan mengantisipasi risiko ekonomi yang berpotensi berdampak pada kelompok masyarakat rentan di masa mendatang.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam setahun, dibagi dengan jumlah penduduknya. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran rata-rata penduduk di wilayah tersebut. PDRB per kapita yang tinggi menunjukkan standar hidup yang lebih baik, sementara angka yang rendah bisa mencerminkan tantangan ekonomi seperti lapangan pekerjaan yang terbatas atau produktivitas yang rendah. Meskipun berguna untuk perbandingan antar daerah, PDRB per kapita tidak menggambarkan secara rinci ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu daerah.

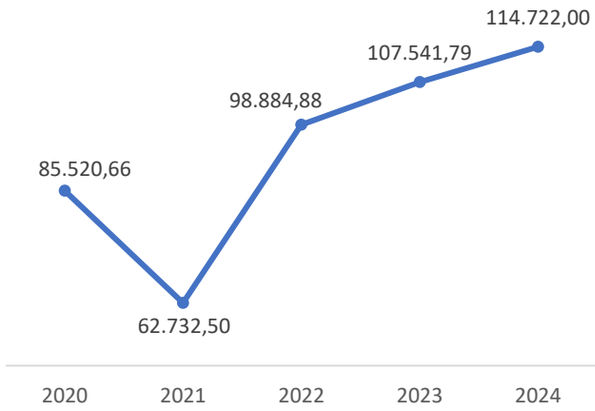

Gambar 2.27 PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Grafik PDRB per kapita menunjukkan fluktuasi yang signifikan antara 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 85.520,66 ribu rupiah, yang kemudian mengalami penurunan pada 2021 menjadi 62.732,50 ribu rupiah. Namun, sejak tahun 2022, terjadi pemulihan yang signifikan dengan angka PDRB per kapita mencapai 98.884,88 ribu rupiah, dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 114.722 ribu rupiah pada 2024.

Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam periode tersebut, dengan kontribusi positif yang semakin besar terhadap kesejahteraan penduduk. Lonjakan yang tajam di tahun 2022 mencerminkan pemulihan pasca-pandemi, diikuti dengan tren pertumbuhan yang stabil dan signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun ada penurunan di awal 2021, secara keseluruhan, data ini mencerminkan perbaikan ekonomi yang kuat, dengan proyeksi yang optimis untuk masa depan.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan persentase penduduk yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya. Indikator ini penting untuk menilai keseimbangan antara jumlah lapangan kerja yang ada dan jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi bisa menunjukkan kesulitan dalam menciptakan pekerjaan, sementara yang rendah mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih baik dengan lebih banyak peluang kerja tersedia.

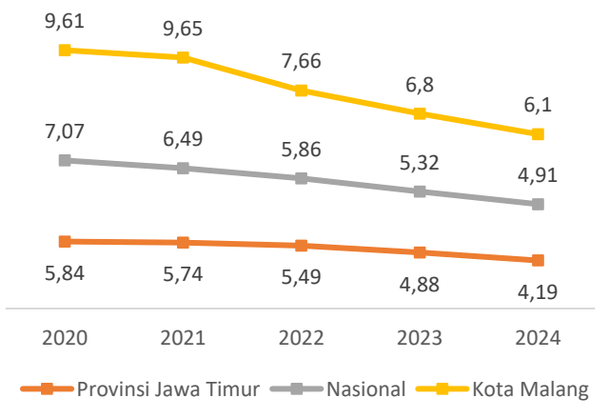

Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Grafik tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan yang konsisten di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional antara 2020 hingga 2024. Kota Malang mengalami penurunan signifikan dari 9,61% pada 2020 menjadi 6,1% pada 2024, dengan penurunan yang stabil setiap tahunnya.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan adanya perbaikan di pasar tenaga kerja, yang kemungkinan berhubungan dengan peningkatan kesempatan kerja dan kondisi perekonomian yang semakin baik. Penurunan pengangguran juga berkaitan erat dengan pengurangan tingkat kemiskinan, karena lebih banyak orang yang memiliki pekerjaan dapat meningkatkan pendapatan mereka, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup.

E. Rasio Gini

Rasio gini adalah alat yang digunakan untuk melihat sejauh mana pendapatan atau kekayaan dibagi di antara penduduk suatu wilayah. Jika Gini ratio rendah, artinya pendapatan masyarakat relatif merata, di mana sebagian besar orang memiliki tingkat kesejahteraan yang hampir sama. Sebaliknya, jika Rasio gini tinggi, ini menunjukkan bahwa kekayaan atau pendapatan sangat terkonsentrasi pada sebagian kecil orang, sementara sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah. Indikator ini sangat penting untuk menilai sejauh mana ketimpangan sosial dan ekonomi terjadi dalam masyarakat.

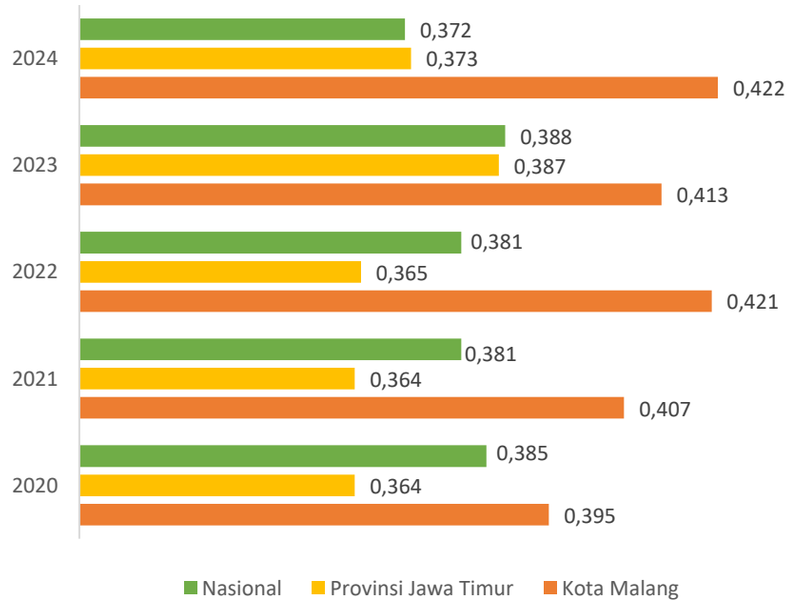

Gambar 2.29 Indeks Gini
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Data Indeks Gini selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Malang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional. Ketimpangan di Kota Malang bahkan cenderung meningkat, sementara di tingkat provinsi dan nasional relatif stabil dengan kecenderungan membaik.

Tingginya ketimpangan di Kota Malang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota ini belum inklusif, sebagian

besar manfaatnya masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga distribusi pendapatan menjadi semakin timpang. Sebaliknya, kondisi di tingkat provinsi dan nasional yang lebih rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata dan kebijakan pemerataan yang lebih efektif.

Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat di tingkat kota, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja produktif, serta kebijakan yang mendorong inklusivitas pertumbuhan agar ketimpangan dapat ditekan.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran untuk menilai kesejahteraan hidup masyarakat, yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM dihitung berdasarkan harapan hidup, lama sekolah, dan PDRB per kapita. Semakin tinggi IPM, semakin baik kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Sehingga, IPM mencerminkan keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya.

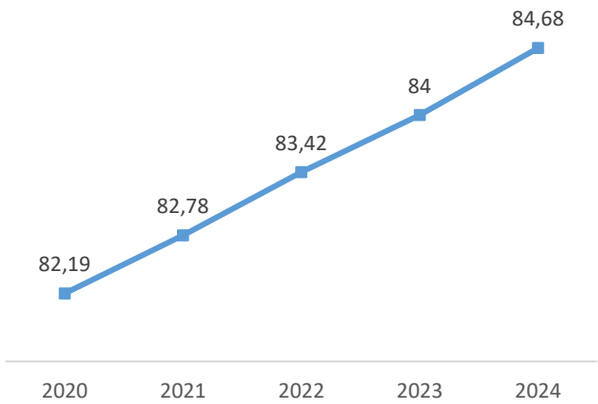

Gambar 2.30 Indeks Pembangunan Manusia
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Perkembangan IPM di Kota Malang stabil meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020, IPM tercatat sebesar 82,19, dan terus mengalami kenaikan setiap tahun, mencapai 84,68 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan yang konsisten dalam kualitas hidup masyarakat, yang mencakup peningkatan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

G. Jumlah Pengangguran

Jumlah pengangguran adalah persentase dari jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Angka ini dihitung dengan membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan mengalikan hasilnya dengan 100. Jumlah pengangguran adalah indikator penting untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu wilayah, karena mencerminkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan pekerjaan bagi penduduk di daerah.

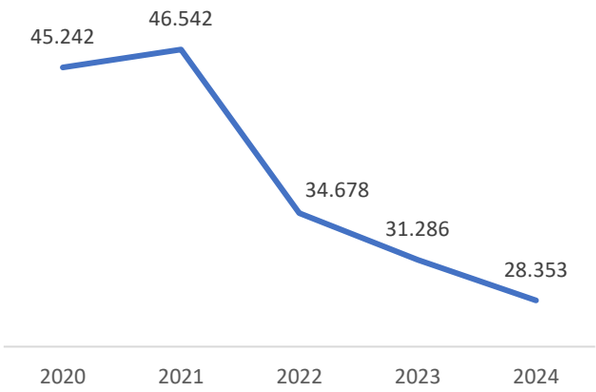

Gambar 2.31 Jumlah Pengangguran (Jiwa)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Jumlah pengangguran di Kota Malang mengalami tren perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan jumlah pengangguran ini dapat mencerminkan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja dan meningkatnya peluang kerja yang tersedia di wilayah tersebut, seiring dengan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

H. Penghargaan Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak adalah pengakuan atau penghargaan yang diberikan kepada suatu kota/kabupaten yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang mendukung hak-hak anak serta memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Definisi ini mencakup beberapa aspek penting, termasuk perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, akses terhadap rekreasi dan kegiatan positif, serta keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kota Malang menerima penghargaan predikat Madya pada Tahun 2019 dan mengalami kenaikan menjadi predikat Ninyda yang stabil dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

I. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah data yang menyajikan atau menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduuk yang sedang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan dari penduduk usia kerja (15 – 64) tahun. Penduduk usia kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Berikut adalah data Penduduk usia kerja di Kota Malang:

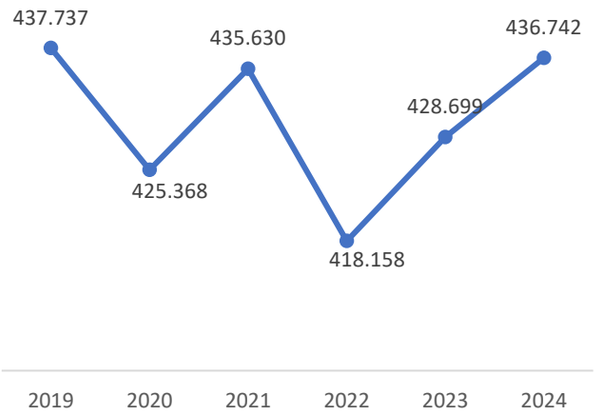

Gambar 2.32 Penduduk Usia Kerja
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Malang mengalami fluktuasi sepanjang periode 2019–2024. Jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebanyak 437.737 orang, kemudian sempat menurun pada tahun 2020 dan 2022. Pada tahun 2024, jumlah penduduk usia kerja kembali meningkat mencapai 436.742 orang, mendekati angka tertinggi di awal periode. Pola ini menunjukkan dinamika demografis yang tetap stabil, dengan kecenderungan peningkatan pada akhir periode, yang berpotensi mendukung ketersediaan tenaga kerja dalam pembangunan daerah.

J. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja, sering juga disebut dengan *Employment-to-Population Ratio*, adalah persentase dari total populasi yang berada dalam kelompok usia kerja yang saat ini memiliki pekerjaan.

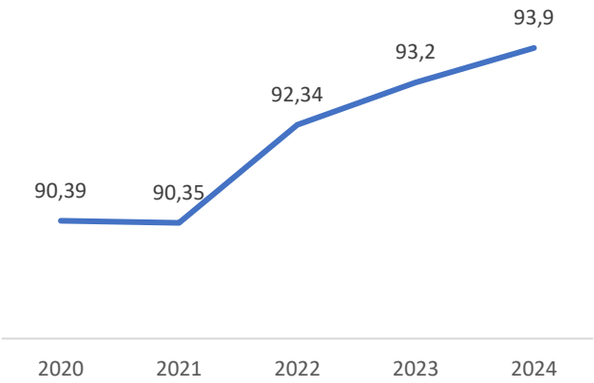

Gambar 2.33 Rasio Penduduk yang Bekerja
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Rasio penduduk yang bekerja di Kota Malang menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 90,39 persen dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 93,9 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang mampu terserap dalam kegiatan ekonomi. Hal ini bisa mencerminkan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi, meningkatnya lapangan kerja di berbagai sektor, serta kemungkinan adanya perbaikan dalam sistem pendidikan atau pelatihan keterampilan yang meningkatkan daya saing tenaga kerja.

K. Kontribusi Sektor Produksi terhadap PDRB

Kontribusi sektor produksi (dalam hal ini adalah sektor pertanian/perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri pengolahan) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pengukuran proporsi nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai tambah ekonomi suatu atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Ini menggambarkan kontribusi relatif dari berbagai sektor dalam menciptakan nilai ekonomi bruto suatu wilayah**.**

Tabel 2.10 Konstribusi Sektor Produksi terhadap PDRB

Tahun	Sektor Produksi			
	Pertanian/ Perkebunan	Pertambangan	Perdagangan	Industri Pengolahan
2020	0,27	0,07	28,09	26,72
2021	0,26	0,07	29,09	26,72
2022	0,25	0,06	29,54	26,74
2023	0,25	0,06	29,43	26,88
2024	0,22	0,05	29,22	27,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang

Sektor perdagangan dan industri pengolahan merupakan dua sektor dominan dengan kontribusi terbesar secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Sektor perdagangan mencatatkan kontribusi tertinggi di antara sektor lainnya, sementara industri pengolahan berada pada posisi kedua. Di sisi lain, sektor pertanian/perkebunan dan pertambangan memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap PDRB, mencerminkan struktur ekonomi Kota Malang yang berorientasi pada sektor tersier dan sekunder, serta minimnya aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam.

L. Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berikut adalah data penduduk miskin yang ada di Kota Malang:

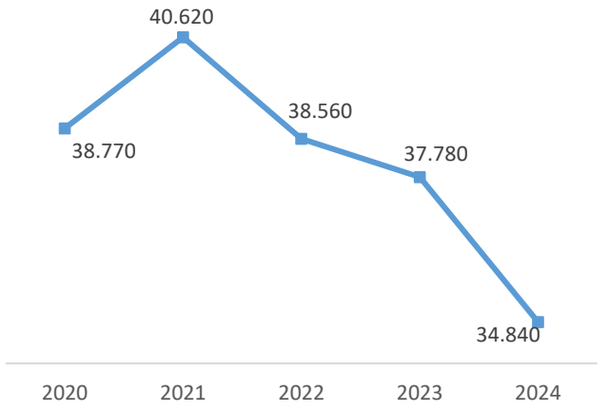

Gambar 2.34 Penduduk Miskin
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Malang tercatat sebesar 38.770, kemudian meningkat menjadi 40.620 pada 2021.

Setelah puncak tersebut, tingkat kemiskinan menurun secara bertahap hingga mencapai 34.840 pada 2024. Penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan sejak 2022 mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi dan keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun ada lonjakan di 2021, secara keseluruhan, tren penurunan menunjukkan kemajuan positif dalam mengurangi kemiskinan di Kota Malang.

2.1.2.2 Kesehatan untuk semua

A. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan indikator yang mengukur rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup di suatu wilayah. Angka ini mencerminkan sejauh mana sistem kesehatan, sanitasi, gizi, serta faktor-faktor sosial-ekonomi dapat mendukung kehidupan masyarakat. Semakin tinggi usia harapan hidup, semakin baik kualitas hidup yang tercermin dalam tingkat kesehatan yang optimal dan keberhasilan pembangunan sosial-ekonomi di suatu daerah.

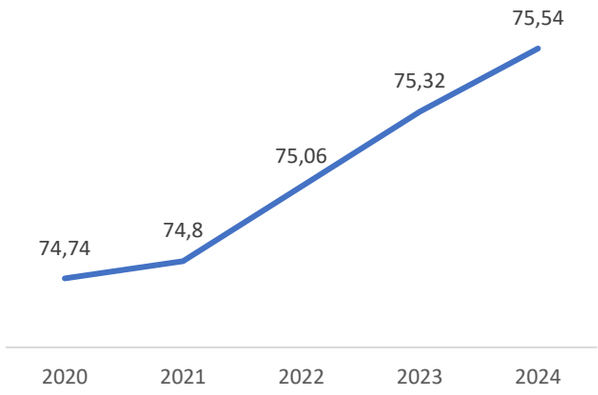

Gambar 2.35 Usia Harapan Hidup
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Usia harapan hidup Kota Malang menunjukkan peningkatan dari 74,74 tahun pada 2020 menjadi 75,54 tahun pada 2024. Angka ini terus naik setiap tahunnya, mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup dan kesehatan masyarakat serta perbaikan dalam sektor kesehatan, sanitasi, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kualitas hidup penduduk Kota Malang semakin baik, dengan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial-ekonomi. Peningkatan ini juga menunjukkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

B. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai kesehatan masyarakat. IKS mencakup 12 aspek yang meliputi kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan keluarga memiliki akses dan kondisi hidup yang mendukung kesehatan yang baik.

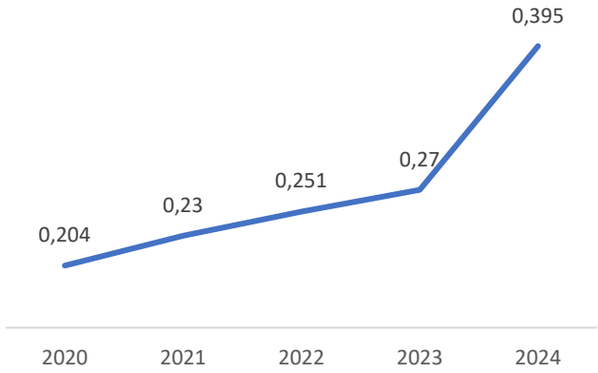

Gambar 2.36 Indeks Keluarga Sehat
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Grafik menunjukkan peningkatan yang stabil dalam Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari 2020 hingga 2024. Pada 2020, IKS berada di angka 0,204, dan terus meningkat hingga mencapai 0,395 pada 2024. Peningkatan IKS ini mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek kesehatan keluarga, termasuk kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Meskipun ada kenaikan yang stabil, laju peningkatannya terutama terasa di tahun-tahun terakhir, yang mungkin menunjukkan adanya upaya lebih intensif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan keluarga di Kota Malang.

C. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting yang mengukur jumlah kematian ibu selama proses kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mencerminkan kualitas layanan kesehatan ibu dan akses mereka terhadap perawatan medis yang memadai. AKI yang tinggi menunjukkan adanya tantangan dalam sistem kesehatan, sedangkan angka yang rendah menandakan kemajuan dalam perawatan maternal dan kesejahteraan ibu.

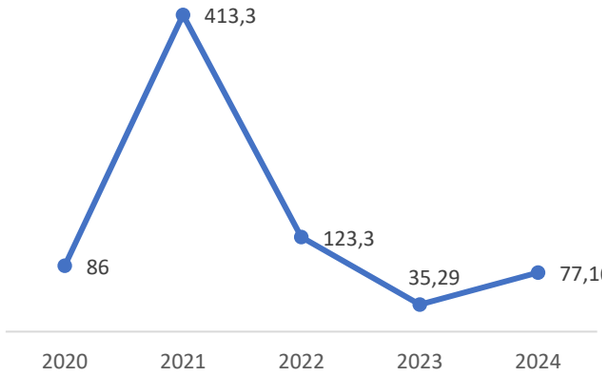

Gambar 2.37 Angka Kematian Ibu (AKI)
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Perkembangan angka kematian ibu (AKI) di Kota Malang menunjukkan fluktuasi yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2024. Meskipun terjadi lonjakan yang tajam pada tahun 2021, angka kematian ibu mengalami penurunan drastis setelahnya dan mencapai angka yang lebih rendah pada 2024. Tren penurunan ini

mencerminkan perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan ibu, meskipun masih perlu perhatian terhadap angka yang tinggi pada beberapa tahun sebelumnya. Penurunan yang terjadi menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam peningkatan akses dan kualitas perawatan ibu hamil dan bersalin di wilayah tersebut.

D. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)

Prevalensi stunting adalah ukuran yang menunjukkan persentase anak di bawah usia lima tahun yang memiliki tinggi badan di bawah standar usia mereka akibat kekurangan gizi kronis. Stunting dapat berdampak negatif pada pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan daya saing masa depan anak. Indikator ini penting untuk menilai kondisi gizi anak-anak dan efektivitas program kesehatan dan gizi di suatu wilayah.

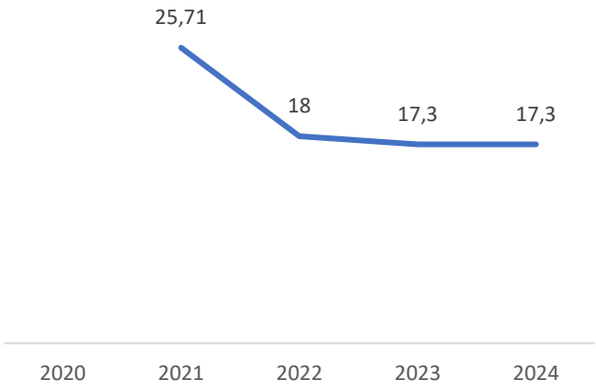

Gambar 2.38 Prevalensi Stunting Kota Malang (persen)
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Prevalensi *stunting* Kota Malang berdasarkan Survei Status Gizi Indonesi (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di mana angka stunting tahun 2024 masih cukup tinggi sebesar 17,3%. Sehingga perlu intervensi spesifik dan sensitif agar capaian pembangunan kesehatan dan tren status gizi di Kota Malang membaik.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang mengukur jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal. Angka ini mencerminkan tingkat akses dan kualitas pendidikan di suatu wilayah. Semakin tinggi RLS, semakin baik pula tingkat pendidikan penduduk di wilayah tersebut, yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan daya saing ekonomi.

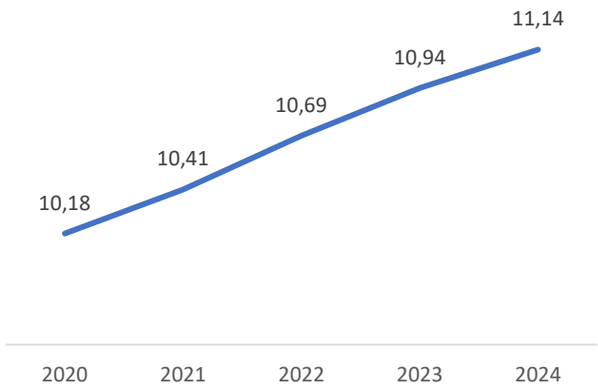

Gambar 2.39 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan yang stabil dari 10,18 tahun pada 2020 hingga 11,14 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam akses dan kualitas pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Meskipun kenaikannya tidak drastis, tren positif ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tingkat pendidikan penduduk dan merupakan indikator keberhasilan upaya pendidikan yang berkelanjutan di Kota Malang.

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mengukur rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak di suatu wilayah, berdasarkan usia masuk sekolah. HLS mencerminkan potensi akses pendidikan dan kualitas pendidikan di masa depan, yang berhubungan langsung dengan tingkat kesiapan sumber daya manusia untuk bersaing di pasar tenaga kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi HLS, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk di masa depan.

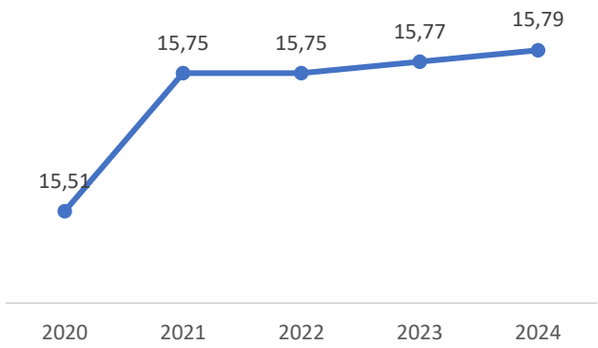

Gambar 2.40 Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Grafik menunjukkan peningkatan stabil dalam Harapan Lama Sekolah dari 15,51 tahun pada 2020 hingga 15,79 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses pendidikan dan proyeksi peningkatan tingkat pendidikan penduduk di masa depan. Meskipun angkanya relatif stabil, tren ini menunjukkan kemajuan dalam menciptakan peluang pendidikan

yang lebih baik dan dapat berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

C. Skor Literasi dan Numerasi

Skor literasi dan numerasi SD dan SMP mengukur kemampuan dasar siswa dalam membaca, menulis, serta berhitung dan memahami matematika. Kedua indikator ini penting untuk menilai kualitas pendidikan dasar dan menengah serta kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan pendidikan selanjutnya. Peningkatan skor literasi dan numerasi mencerminkan kemajuan dalam kemampuan akademik siswa yang akan berdampak pada perkembangan kemampuan kognitif dan daya saing mereka di masa depan.

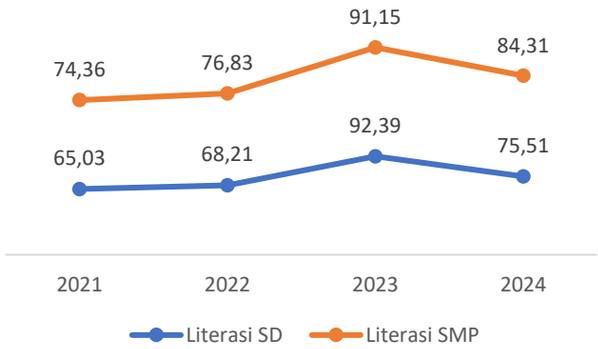

Gambar 2.41 Skor Literasi SD dan SMP
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Skor literasi untuk SD dan SMP dari 2021 hingga 2024 menggambarkan adanya perkembangan yang baik. Skor literasi untuk SD menunjukkan peningkatan yang konsisten, mencapai skor 75,51 di tahun 2024. Sementara itu, literasi SMP mengalami fluktuasi yang lebih signifikan, dengan peningkatan di tahun 2023 dengan skor 92,39, meskipun terjadi penurunan menjadi 84,31 pada 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan kemajuan dalam kemampuan literasi siswa, dengan perbaikan yang lebih stabil di tingkat SD dan fluktuasi yang lebih besar di tingkat SMP. Peningkatan skor literasi ini mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan kemampuan membaca serta memahami teks di kalangan siswa.

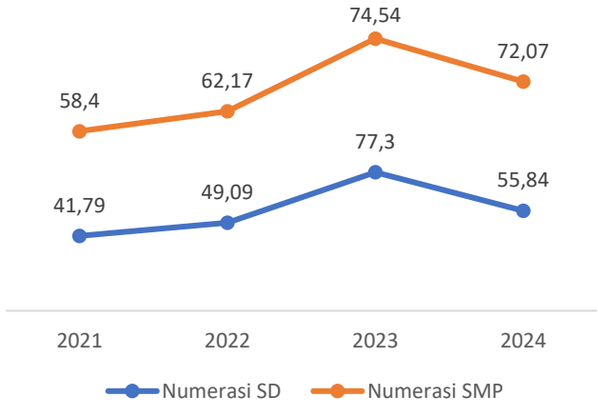

Gambar 2.42 Skor Numerasi SD dan SMP
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Skor numerasi di tingkat SMP mengalami peningkatan yang baik, mencapai 74,54 pada 2023, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024. Sementara itu, skor numerasi SD juga mengalami kenaikan, mencapai 55,84 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam kemampuan siswa dalam memahami dan memecahkan masalah matematika, yang merupakan keterampilan dasar penting dalam pendidikan. Meskipun ada perbedaan laju kenaikan antara tingkat SD dan SMP, secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa mengalami perkembangan ke arah lebih baik.

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indikator yang mengukur tingkat kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi di kalangan penduduk. Indeks ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses dan keterampilan dalam mengelola informasi yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan pekerjaan. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik kemampuan literasi masyarakat, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan daya saing ekonomi suatu daerah.

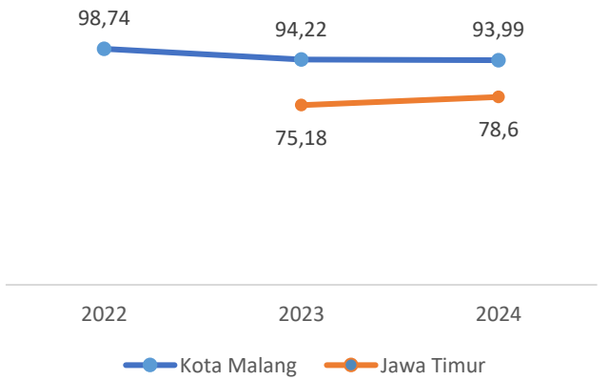

Gambar 2.43 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Sumber: Perpustakaan Nasional

Skor IPLM Kota Malang tergolong sangat tinggi secara konsisten, namun mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Meskipun capaian tersebut masih berada dalam kategori sangat tinggi, tren penurunan ini perlu diwaspadai dan menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan literasi ke depan. Hasil ini menunjukkan perlunya sinergi lintas sektor dan lintas wilayah guna memastikan pembangunan literasi masyarakat berjalan merata dan berkelanjutan.

E. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan lanjutan serta kapasitas mereka untuk berperan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Tingginya proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi tidak hanya menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan, tetapi juga mencerminkan

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing.

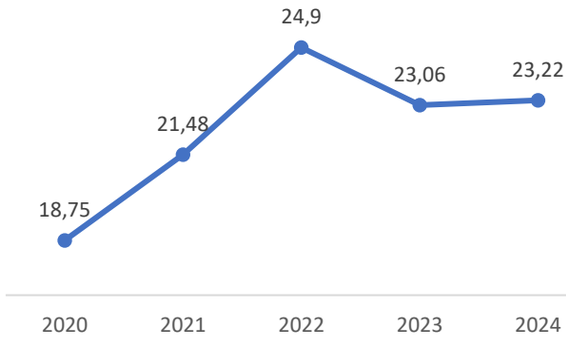

Gambar 2.44 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020 hingga 2022, yaitu dari 18,75% pada 2020 menjadi 24,9% pada 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi, yang kemungkinan didorong oleh program perluasan akses pendidikan, beasiswa, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi untuk meningkatkan taraf hidup.

Namun, setelah tahun 2022, proporsi ini mengalami sedikit penurunan menjadi 23,06% pada 2023 dan stabil di angka 23,22% pada 2024. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti berkurangnya daya serap pasar kerja terhadap lulusan baru, faktor ekonomi yang membuat sebagian masyarakat menunda atau menghentikan studi, atau mulai berkurangnya efek dari program-program akselerasi pendidikan yang dilakukan sebelumnya.

F. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf

Penduduk usia 10 tahun ke atas yang melek huruf merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat literasi dasar masyarakat di suatu wilayah. Data ini menunjukkan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, yang menjadi fondasi utama dalam mengakses pendidikan, informasi, dan peluang ekonomi. Tingginya angka melek huruf mencerminkan keberhasilan program pendidikan dasar dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sedangkan rendahnya angka ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan.

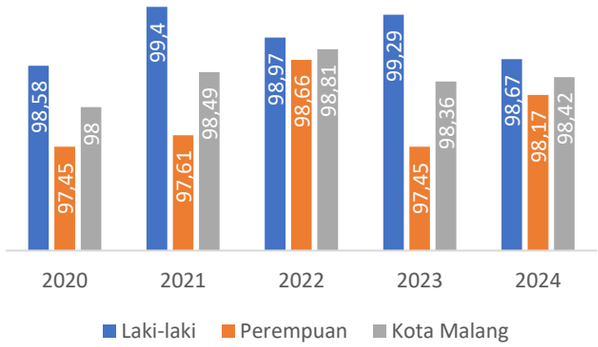

Gambar 2.45 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Secara umum, tingkat melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas di Kota Malang menunjukkan capaian yang tinggi, baik pada laki-laki, perempuan, maupun total penduduk. Pada periode 2020–2024, persentase laki-laki konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan angka tertinggi mencapai 99,4% pada 2021. Sementara itu, perempuan mengalami fluktuasi, namun tetap berada di kisaran 97–98%. Secara keseluruhan, Kota Malang mempertahankan angka melek huruf di atas 98%, menandakan pencapaian pendidikan dasar yang cukup merata.

Dinamika data ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Peningkatan angka pada 2021–2022 didukung oleh program pendidikan inklusif, kampanye literasi, dan peningkatan akses pendidikan dasar. Sementara fluktuasi kecil pada tahun berikutnya bisa dipengaruhi oleh migrasi penduduk, putus sekolah pada kelompok rentan, atau tantangan akses di sebagian wilayah marginal.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan adalah ukuran sejauh mana penduduk suatu daerah atau wilayah terdaftar dan memiliki akses terhadap program jaminan sosial di bidang Kesehatan. Tujuan cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dalam rangka mendukung Universal Health Coverage (UHC), yaitu memastikan semua orang mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa kesulitan finansial. Untuk Kota Malang cakupan kepesertaan jaminan sosial Kesehatan mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sudah ter-*coverage* (100%).

B. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengukur sejauh mana penduduk, terutama pekerja, telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini mencakup jaminan sosial berupa perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Tingginya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan upaya pemerintah dan perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi masyarakat.

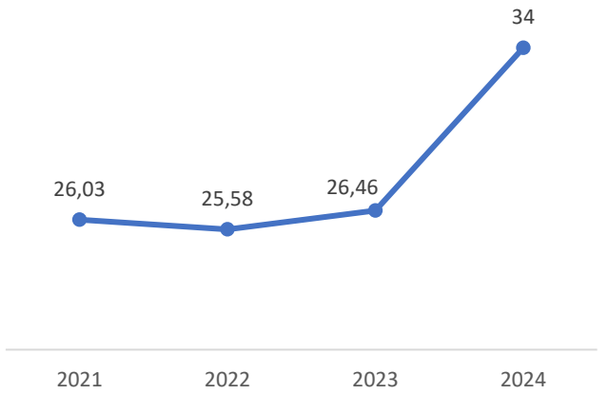

Gambar 2.46 Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (%)
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2024

Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 2021 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan, dari 26,03% kemudian meningkat hingga mencapai 34% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, yang berkontribusi pada kesejahteraan dan keamanan sosial tenaga kerja. Tren kenaikan menunjukkan progres yang positif dalam memastikan lebih banyak pekerja terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan.

C. Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar mengukur seberapa banyak individu atau keluarga yang membutuhkan bantuan sosial yang telah menerima layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, tempat tinggal, dan kesehatan. Indikator ini mencerminkan efektivitas program kesejahteraan sosial dalam memberikan dukungan kepada kelompok rentan. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik program tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan. Sebagai gambaran umum Jumlah PPKS Kota Malang tahun 2023 sebanyak 135.186 sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 110.891.

2.1.2.5 Beragam Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. Indeks kerukunan umat beragama diukur melaluo tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. IKUB nasional mengalami peningkatan di tahun 2024 dengan skor 76,47 dari 2023 76,02. Sedangkan skor IKUB Jawa Timur tahun 2023 sebesar 77,55. Sedangkan untuk IKUB level Kabupaten/Kota belum tersedia sehingga Kota Malang akan mulai menghitung mulai tahun 2025.

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks pembangunan kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat tujuh dimensi yaitu, dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi

budaya literasi dan dimensi kesetaraan gender. IPK Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sebesar 59,38 sedangkan untuk level kabupaten/kota belum tersedia.

C. Nilai Toleransi

Nilai toleransi merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu masyarakat atau kelompok dapat menerima dan menghargai keberagaman dalam aspek-aspek tertentu, seperti agama, budaya, suku, dan pandangan hidup. Indikator ini mencerminkan sikap saling menghormati, keterbukaan, dan kesediaan untuk hidup berdampingan secara harmonis meskipun terdapat perbedaan.

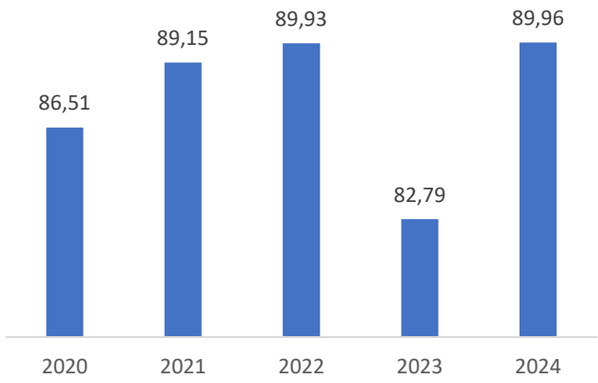

Gambar 2.47 Nilai Toleransi
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Nilai toleransi di Kota Malang selama periode 2020 hingga 2024 secara umum menunjukkan capaian yang cukup tinggi, dengan nilai berada di atas 80 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Malang memiliki tingkat penerimaan, penghargaan, dan sikap saling menghormati yang baik terhadap perbedaan, baik dari segi agama, suku, budaya, maupun pandangan sosial lainnya. Capaian ini menjadi refleksi dari iklim sosial yang relatif kondusif dan inklusif, yang mendukung stabilitas sosial serta memperkuat kohesi antarwarga. Nilai-nilai toleransi yang tinggi juga menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Perlindungan Anak

Kenaikan jumlah kasus yang berkaitan dengan hak anak menuntut adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak dapat digunakan sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana upaya perlindungan anak telah berhasil.

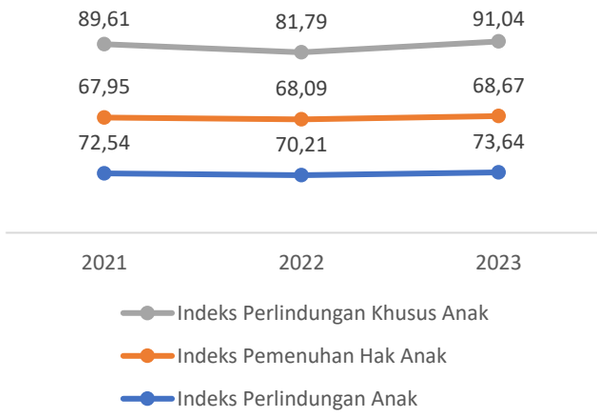

Gambar 2.48 Perlindungan Anak
Sumber: Kementerian PPPA, 2024

Perkembangan perlindungan anak di Kota Malang, secara umum terdapat peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut, khususnya dalam memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan yang lebih optimal di masa depan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak semakin diperhatikan, namun tantangan untuk mencapainya secara menyeluruh tetap ada.

B. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70; dan c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Berikut adalah capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Provinsi Jawa Timur:

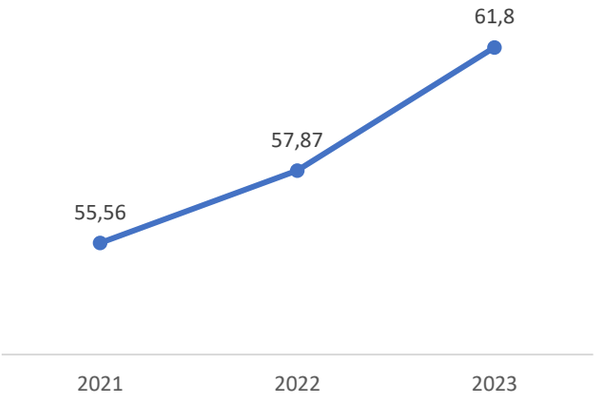

Gambar 2.49 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Provinsi Jawa Timur
Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari

tahun 2021 hingga 2023 dengan kategori Keluarga Berkembang. Pada tahun 2021, indeks ini tercatat sebesar 55,56. Selanjutnya, pada tahun 2022, indeks ini meningkat menjadi 57,87, mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas kehidupan keluarga di wilayah tersebut. Peningkatan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2023, di mana indeks mencapai 61,8. Peningkatan yang konsisten selama tiga tahun ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas keluarga berhasil dan terus menunjukkan hasil yang positif.

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur sejauh mana perbedaan atau ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. Indeks ini menggambarkan sejauh mana kesetaraan gender tercapai di suatu wilayah. Semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan gender, yang mencerminkan kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan di berbagai sektor kehidupan.

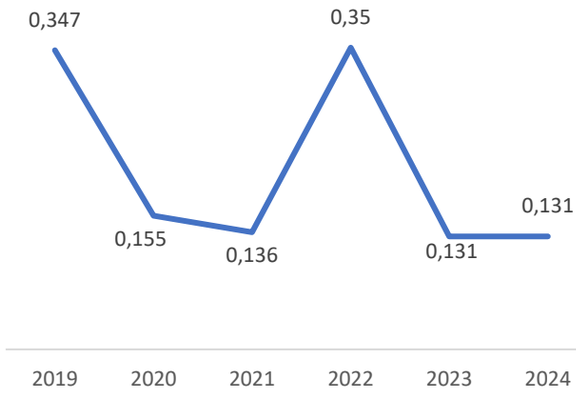

Gambar 2.50 Indeks Ketimpangan Gender
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan fluktuasi dalam Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Nilai IKG mulai pada angka 0,347 di 2019, mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 0,131. Penurunan IKG Kota Malang tahun 2023 dipengaruhi oleh perbaikan seluruh indikator pada ketiga dimensinya, khususnya dimensi pasar tenaga kerja. Penurunan nilai IKG ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengurangan ketimpangan gender, dengan kesetaraan gender yang semakin membaik di beberapa tahun terakhir. Meskipun ada fluktuasi, tren penurunan IKG menunjukkan adanya kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dan pencapaian kesetaraan dalam berbagai sektor.

D. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator yang memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda yang didasari oleh lima domain yaitu, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempata kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Timur menunjukkan angka 55,33 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi

55,50 pada tahun 2023. Secara umum, capaian ini mencerminkan perkembangan yang positif, meskipun masih dalam kategori sedang. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam dimensi-dimensi penting seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta partisipasi pemuda dalam pembangunan, namun perlu upaya lanjutan agar kualitas hidup dan peran strategis pemuda dapat lebih optimal.

E. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) adalah indikator yang mengukur kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. IPMas digunakan untuk menilai seberapa besar kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan daerah, serta menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Semakin tinggi IPMas, semakin baik kondisi kehidupan masyarakat, yang menunjukkan pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

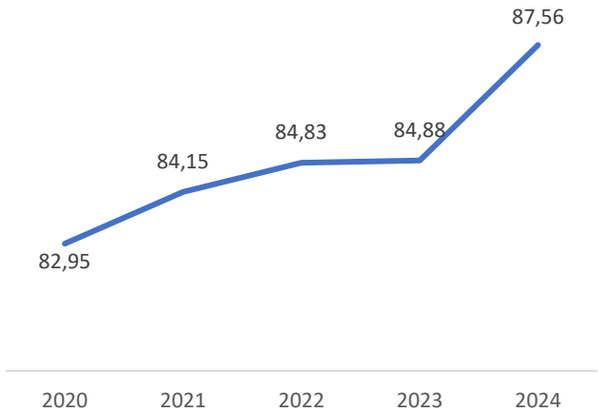

Gambar 2.51 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
Sumber: Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) mengalami peningkatan yang konsisten dari 82,95 pada 2020 hingga mencapai 87,56 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun terdapat peningkatan yang stabil, angka ini juga menunjukkan adanya peluang untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif dan inklusif.

F. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) secara umum menggambarkan sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dalam kegiatan politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Nilai IDG yang tinggi mencerminkan kesetaraan yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang, serta peran kepemimpinan di berbagai sektor pembangunan.

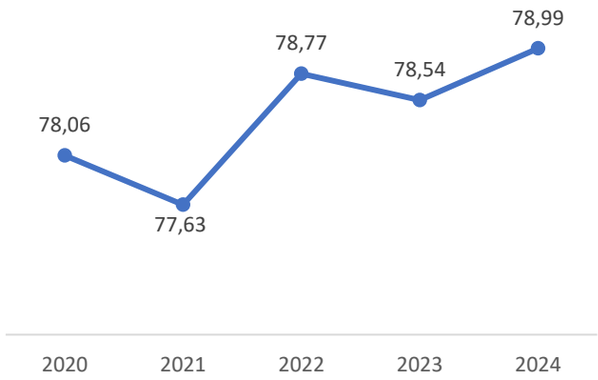

Gambar 2.52 Indeks Pemberdayaan Gender
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Malang selama periode 2020–2024 menunjukkan angka yang relatif tinggi dan stabil di kisaran 77 hingga 78. Hal ini mencerminkan adanya partisipasi perempuan yang cukup kuat dalam kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan publik. Capaian ini mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

2.1.3 Aspek Daya Saing

Aspek Daya Saing Daerah teriri dari daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah dan daya saing iklim investasi, engan capaian indikator sebagai berikut :

2.1.3.1 Daya Saing SDM

A. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan mengukur sejauh mana kualitas dan akses pendidikan di wilayah tersebut. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti tingkat partisipasi sekolah, kualitas pembelajaran, serta infrastruktur pendidikan. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik kualitas pendidikan yang tersedia bagi masyarakat, yang berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan sosial-ekonomi daerah.

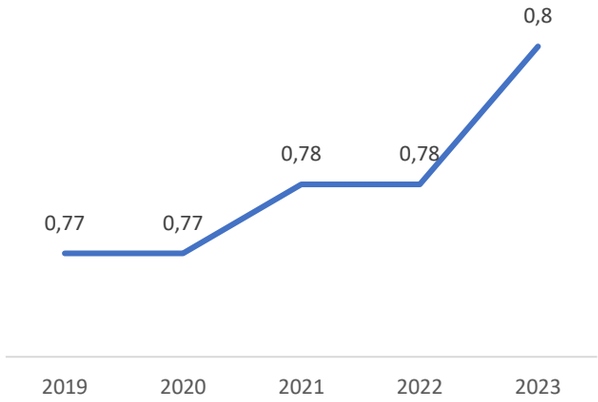

Gambar 2.53 Indeks Pendidikan
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Indeks Pendidikan Kota Malang menunjukkan perkembangan yang membaik dari 0,77 pada 2019 hingga mencapai 0,8 pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam kualitas dan akses pendidikan di kota tersebut, yang mencakup keberhasilan

dalam memperbaiki sistem pembelajaran dan infrastruktur pendidikan. Meskipun peningkatan nilai tidak signifikan setiap tahunnya, tren ini menunjukkan adanya upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan standar pendidikan dan mendukung perkembangan sumber daya manusia di Kota Malang.

B. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan menggambarkan rasio jumlah penduduk yang bergantung pada penduduk usia produktif (15-64 tahun), seperti anak-anak dan lansia, terhadap jumlah penduduk usia produktif itu sendiri. Indikator ini penting untuk menilai beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar tekanan pada sektor ekonomi dan kesejahteraan, yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah.

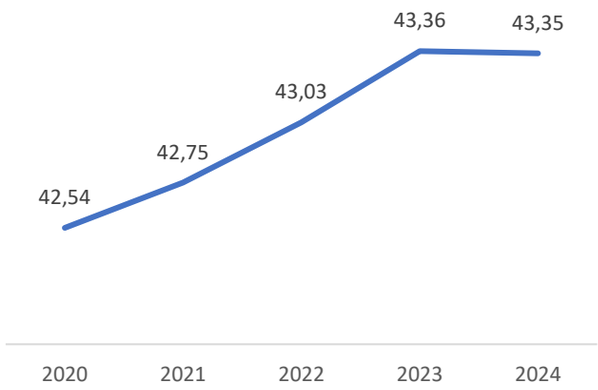

Gambar 2.54 Rasio Ketergantungan
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Angka ketergantungan Kota Malang menunjukkan peningkatan dari 42,54 pada tahun 2020 menjadi 43,35 pada tahun 2024. Kenaikan angka ketergantungan ini menunjukkan adanya perubahan demografis, seperti peningkatan jumlah penduduk lansia yang membutuhkan perawatan dan fasilitas kesehatan. Hal ini menambah tekanan pada sektor ekonomi dan pelayanan sosial, karena kelompok usia produktif harus mencukupi kebutuhan yang semakin besar dari kelompok non-produktif. Peningkatan angka ketergantungan ini mempertegas pentingnya perencanaan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan sosial, penguatan sistem jaminan sosial, dan strategi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi meskipun terjadi peningkatan ketergantungan.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) ADHB

Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB) mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB dalam suatu wilayah, dengan menggunakan data dalam harga dasar berlaku (ADHB). Angka ini memberikan gambaran penting mengenai peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah, yang mencakup berbagai sub-sektor seperti manufaktur, pengolahan bahan mentah, dan produk setengah jadi. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran signifikan dalam perekonomian daerah, berpotensi menciptakan lapangan kerja,

meningkatkan nilai tambah produk, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

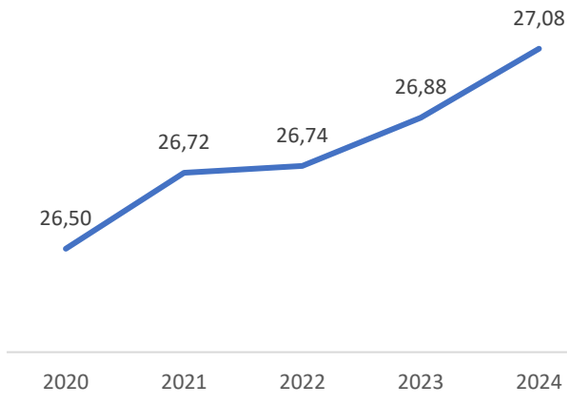

Gambar 2.55 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) ADHB
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, Data Diolah

Rasio PDRB Industri Pengolahan menunjukkan kontribusi sektor industri terhadap total PDRB, yang meningkat dari 26,50% pada 2020 menjadi 27,08% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan semakin berperan penting dalam perekonomian daerah, dengan adanya pertumbuhan yang stabil dalam kontribusinya terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini berhasil mengoptimalkan nilai tambah dari produksi barang, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan ini juga menandakan diversifikasi ekonomi yang lebih baik, di mana daerah tidak terlalu bergantung pada sektor lainnya seperti pertanian atau jasa.

B. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (ADHB) mengukur kontribusi sektor akomodasi, makanan, dan minuman terhadap total PDRB dengan menggunakan harga dasar berlaku (ADHB). Indikator ini penting untuk menilai peran sektor pariwisata dan layanan makan-minum dalam perekonomian suatu daerah. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan-minum semakin memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, mendukung industri pariwisata, dan meningkatkan pendapatan daerah.

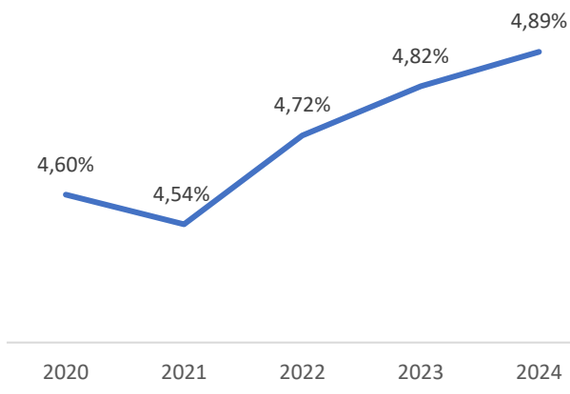

Gambar 2.56 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum menunjukkan kontribusi sektor ini terhadap total PDRB, yang terus meningkat dari 4,60 pada 2020 hingga mencapai 4,89 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan bahwa sektor akomodasi, makanan, dan minuman semakin berperan penting dalam perekonomian daerah, seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata dan permintaan terhadap layanan makan dan minum. Kontribusi sektor ini yang terus meningkat menunjukkan adanya potensi untuk memperkuat sektor pariwisata lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah, serta mengindikasikan bahwa sektor ini dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

C. PDRB Ekonomi Kreatif

PDRB ekonomi kreatif mengukur kontribusi sektor-sektor yang berhubungan dengan kreativitas dan inovasi, seperti seni, desain, teknologi informasi, media, dan sektor kreatif lainnya terhadap total PDRB suatu daerah. Ekonomi kreatif menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi modern, karena mendorong penciptaan nilai tambah melalui ide-ide baru, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Peningkatan PDRB sektor ekonomi kreatif menunjukkan bahwa daerah semakin mengandalkan kreativitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing global.

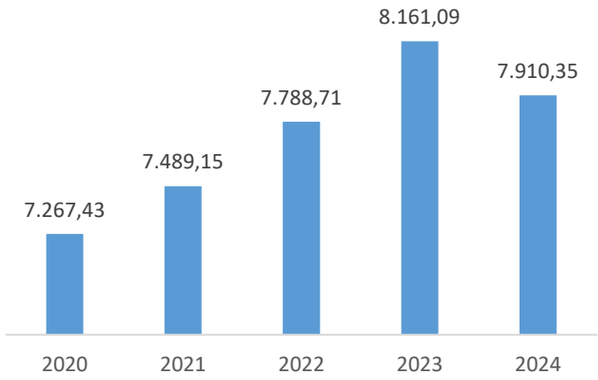

Gambar 2.57 PDRB Ekonomi Kreatif (Miliar Rupiah)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, Data Diolah

Data PDRB sektor ekonomi kreatif penyediaan akomodasi makan dan minum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Pada 2020, sektor ini tercatat dengan angka 7.267,43 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 8.161,09 miliar rupiah pada 2023. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2024, sektor ini tetap menunjukkan kontribusi yang solid terhadap perekonomian daerah.

Peningkatan ini mencerminkan peran sektor akomodasi makan dan minum, yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata, kuliner, dan layanan terkait. Sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah. Peningkatan yang konsisten mencerminkan keberhasilan dalam pengembangan sektor ini dan meningkatkan daya tarik kota sebagai

destinasi wisata. Meskipun ada fluktuasi di tahun terakhir, sektor ini tetap menjadi salah satu pendorong utama dalam perekonomian berbasis kreativitas dan pariwisata.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar potensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pasar tenaga kerja. Semakin tinggi TPAK, semakin besar pula jumlah angkatan kerja yang berperan dalam perekonomian, yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, TPAK yang terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai bisa menandakan ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan peluang yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk mengelola TPAK secara efektif agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

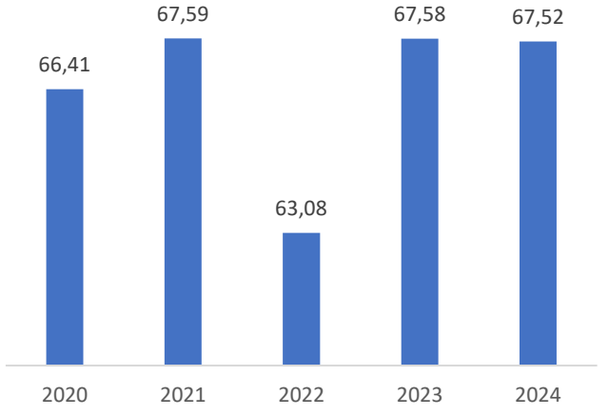

Gambar 2.58 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama periode 2020 hingga 2024 berada pada kisaran yang relatif tinggi, yakni di atas 63%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Keterlibatan yang konsisten tersebut mencerminkan potensi sumber daya manusia yang cukup besar dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan jenis kelamin mengukur keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam aktivitas ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana kesetaraan akses ke pasar kerja telah tercapai antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, tingkat partisipasi laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang dapat mencerminkan berbagai faktor sosial, budaya, maupun struktural, seperti peran gender tradisional atau keterbatasan akses terhadap peluang kerja. Memantau perbedaan ini membantu dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan mendorong peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja guna memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

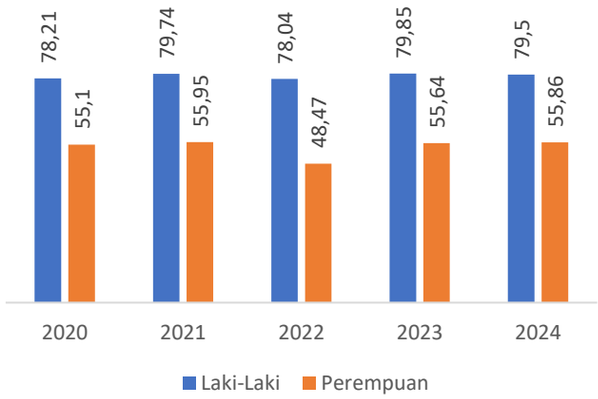

Gambar 2.59 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Data menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Tingkat partisipasi laki-laki masih menunjukkan dominasi dalam pasar tenaga kerja. Kesenjangan ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam mendorong partisipasi perempuan ke dunia kerja secara optimal. Meskipun demikian, tingkat partisipasi perempuan yang stabil menandakan bahwa potensi peningkatan kontribusi perempuan di sektor ekonomi tetap terbuka, dan bisa diperkuat melalui dukungan kebijakan yang mendorong kesetaraan akses terhadap peluang kerja. Hal ini penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

F. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita yang meningkat umumnya mencerminkan produktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu menghasilkan dan mengakses barang dan jasa dalam jumlah lebih besar, yang menjadi cerminan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dengan kata lain, produktivitas ekonomi yang baik mendorong peningkatan pendapatan, yang kemudian tercermin dalam pengeluaran per kapita yang lebih tinggi.

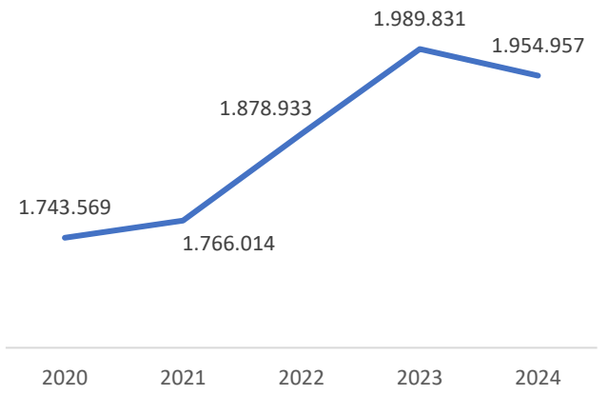

Gambar 2.60 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita per Bulan (Rupiah)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Pengeluaran per kapita menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini mencerminkan daya beli masyarakat yang cukup baik serta indikasi pertumbuhan ekonomi yang positif, didukung oleh produktivitas yang stabil dalam perekonomian lokal.

G. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam mengembangkan inovasi di berbagai sektor, baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun pengembangan ekonomi dan sosial. Indeks ini mencerminkan sejauh mana daerah mampu mendorong kreativitas, menerapkan teknologi baru, serta menghasilkan solusi yang efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan pembangunan.

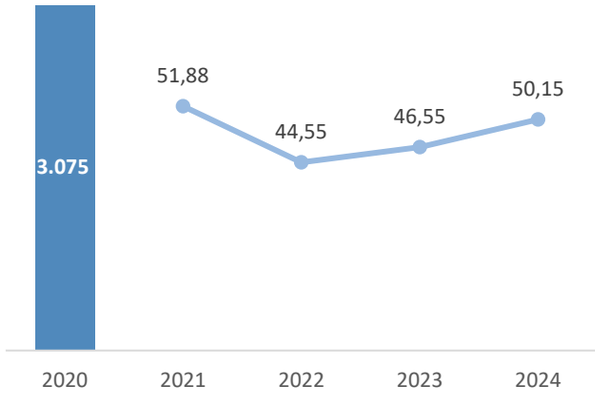

Gambar 2.61 Indeks Inovasi Daerah
Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI

Indeks Inovasi Daerah selama periode 2021 hingga 2024 Kota Malang menunjukkan resiliensi yang luar biasa dengan memulai tren pemulihan pada tahun 2023 dan melanjutkannya secara solid pada tahun 2024 dengan skor mencapai 50,15. Angka ini menegaskan bahwa ekosistem inovasi kota tidak hanya berhasil bangkit dari tantangan, tetapi juga berada di jalur yang kuat untuk kembali mencapai performa puncaknya. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat perbedaan penghitungan Indeks Inovasi Daerah baik dalam mekanismenya maupun penentuan batas rentang skor pengkategorian indeks inovasi daerah, sehingga pada tahun 2020 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun berikutnya.

Kinerja indeks ini juga menggambarkan komitmen daerah dalam menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif, baik melalui penguatan kebijakan, pemanfaatan sumber daya lokal, maupun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan capaian tersebut, daerah semakin siap menghadapi dinamika perubahan dan tantangan pembangunan ke depan secara lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID), dijabarkan serangkaian tema permasalahan utama yang menjadi prioritas daerah, yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Permasalahan ini mencakup aspek pembangunan dan penataan ruang serta infrastruktur perkotaan, tantangan mewujudkan transformasi ekonomi yang

tangguh, dan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan lingkungan. Selain itu, RIPJPID juga menyoroti permasalahan terkait tata kelola pemerintahan dan penerapan. Sebagai jawaban strategis, khususnya untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, RIPJPID merumuskan sejumlah Produk Unggulan Daerah (PUD). PUD yang menjadi fokus pengembangan meliputi industri pengolahan makanan dan minuman, sektor game dan aplikasi, industri film, video, dan animasi, serta industri kreatif fashion dan sektor pariwisata. Untuk mendorong pengembangan PUD dan ekosistem inovasi secara keseluruhan, Kota Malang mengandalkan peran Malang Creative Center (MCC). Fasilitas ini secara konsisten berkontribusi sebagai inkubator bagi sektor ekonomi kreatif sekaligus sebagai media promosi untuk produk-produk unggulan tersebut.

Lebih jauh, substansi RIPJPID juga mencakup analisis mendalam mengenai tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah. Dokumen ini juga menganalisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti, merumuskan strategi riset dan inovasi, hingga menyusun program indikatif yang dirancang berdasarkan elaborasi PUD dan masalah prioritas daerah

H. Rasio PAD

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio PAD yang tinggi menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang baik, menandakan kuatnya basis ekonomi lokal dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Meningkatkan rasio PAD menjadi kunci untuk memperkuat otonomi dan daya saing daerah.

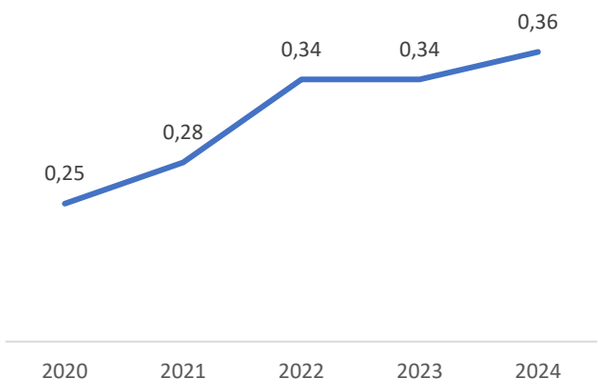

Gambar 2.62 Rasio PAD
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Grafik rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, baik dari pajak daerah, retribusi, maupun sumber PAD lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan semakin membaik, yang menjadi indikator positif dalam memperkuat otonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Ekonomi Hijau

Pemerintah Kota Malang menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau melalui berbagai kebijakan daerah dan implementasi program strategis yang berfokus pada pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Program-program unggulan ekonomi hijau telah diimplementasikan secara konsisten di berbagai sektor. Salah satu program yang menonjol adalah penguatan Bank Sampah sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Pemerintah juga mengembangkan Kampung Tematik yang menggabungkan fungsi estetika, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di sisi pengelolaan limbah, modernisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang menjadi langkah signifikan dalam mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah kota. Selain itu, pembangunan dan revitalisasi taman kota serta ruang terbuka hijau (RTH) terus didorong untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan mendukung ketahanan iklim.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kota Malang telah meluncurkan berbagai program yang mendukung ekonomi hijau. Salah satunya adalah program Bankk Sampah yang tersebar di berbagai kelurahan, yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Selain itu, pengembangan Kampung Tematik seperti Kampung Warna-Warni, Kampung Glintung *Go Green*, dan Kampung 3D Kesatrian telah berhasil mengintegrasikan aspek lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. TPA Supit Urang juga telah mengalami tranformasi menjadi sistem *sanitary landfill* dengan kapasitas 953.340 m^3, mampu menampung hingga 450 ton sampah per hari, yang melayani sekitar 700.000 jiwa penduduk Kota Malang. Pengembangan taman kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi prioritas, dengan berbagai taman aktif dan kebun bibit yang tersebar di seluruh kota.

B. Ekonomi Biru

Ekonomi biru biasanya identik dengan pemanfaatan potensi laut dan pesisir, namun karena Kota Malang tidak memiliki wilayah laut ekonomi biru dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya air tawar (pengelolaan perikanan budidaya) dan inovasi berbasis daur ulang. Sungai-sungai yang melintasi kota dapat dioptimalkan untuk program konservasi, pengendalian pencemaran, serta pengembangan taman tepi sungai. Pemanfaatan teknologi *water treatment* untuk mengolah limbah domestik menjadi air layak pakai juga menjadi bagian dari pendekatan ekonomi biru. Selain itu, sektor pertanian perkotaan (*urban farming*) yang memanfaatkan irigasi hemat air dapat menjadi model produksi pangan yang efisien. Limbah organik dari pasar dan rumah tangga diolah menjadi kompos atau biogas, sementara limbah plastik dapat diubah menjadi produk bernilai jual tinggi.

2.1.3.4 Transformasi Digital

A. Indeks Literasi Digital

Literasi digital merupakan minat baca secara digital, yang di mana masyarakat mencari bahan bacaan atau informasi yang bermanfaat melalui teknologi komputer dan internet seperti ponsel atau laptop. Pengukuran indeks literasi digital diperlukan agar bisa

mengukur kemampuan literasi digital di Indonesia dari berbagai sudut pandang, guna meningkatkan kebijakan berbasis bukti dan pengaruhnya terhadap penyediaan program-program yang tepat untuk peningkatan literasi digital penduduk. Pengukuran indeks literasi digital mengacu pada kerangka kerja dalam *Road Map* Literasi Digital dengan empat pilar pengukuran literasi digital yaitu *Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety,* dan *Digital Culture*.

Indeks Literasi Digital nasional pada tahun 2020 berada di angka 3,47 sedangkan di tahun 2021 sebesar 3,49. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin menjadi 3,54. Hal ini juga selaras dengan Indeks Literasi Digital Jawa Timur dimana pada tahun 2022 berada di angka 3,58 meningkat 0,03 poin dari tahun 2021 sebesar 3,55. Hal ini menunjukkan bahwa ada *progres*s yang cukup baik dalam peningkatan kemampuan penggunaan perangkat keras dan piranti lunak TIK, tata kelola etika digital, kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital, serta pemanfaatan TIK dengan nilai budaya Indonesia.

B. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia mengukur sejauh mana masyarakat mampu mengakses, memanfaatkan, dan berpartisipasi dalam ekosistem digital. Indeks ini mencerminkan aspek literasi digital, ketersediaan infrastruktur, serta tingkat penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat semakin terhubung dengan teknologi dan mampu memanfaatkan transformasi digital untuk pendidikan, ekonomi, layanan publik, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, peningkatan indeks ini menjadi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan memperkuat daya saing daerah di era transformasi digital.

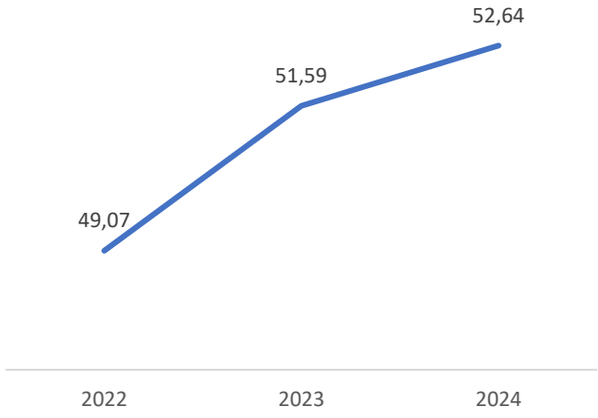

Gambar 2.63 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang

Peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia di Kota Malang selama periode 2022 hingga 2024 mencerminkan kemajuan dalam adaptasi teknologi digital di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa warga semakin aktif memanfaatkan layanan digital untuk berbagai keperluan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Perkembangan ini menjadi indikator penting dalam mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif, efisien, dan terhubung secara digital.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menggambarkan besarnya investasi yang dilakukan untuk menambah aset tetap di suatu daerah, seperti pembangunan gedung, infrastruktur, dan pembelian alat produksi. Tingginya PMTB menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi karena memperlihatkan adanya penguatan kapasitas produksi dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi jangka panjang. PMTB yang kuat juga mencerminkan kepercayaan dunia usaha terhadap stabilitas dan prospek ekonomi daerah tersebut.

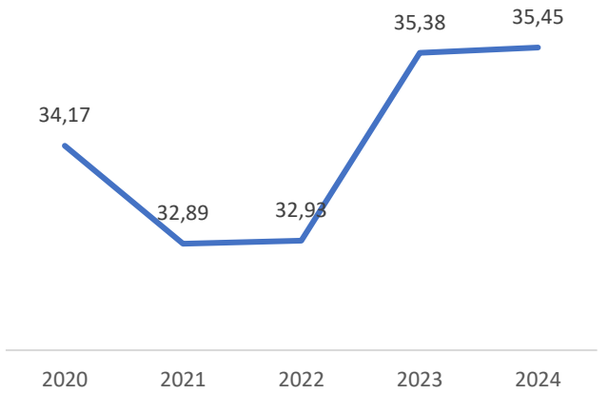

Gambar 2.64 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur mengukur seberapa baik layanan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi tersedia dan berfungsi bagi masyarakat. Kualitas layanan infrastruktur yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat daya saing daerah. Sebaliknya, indeks yang rendah dapat menghambat aktivitas ekonomi dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

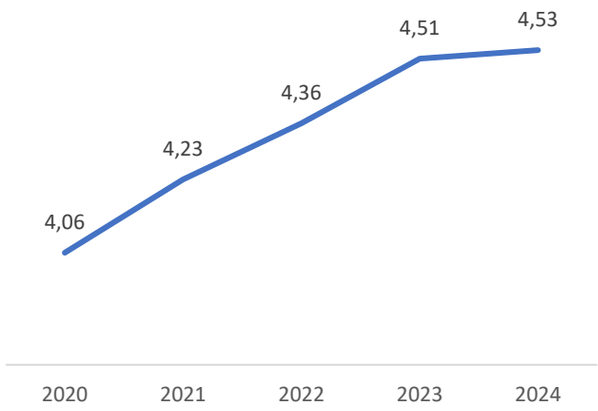

Gambar 2.65 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Indeks kualitas layanan infrastruktur di Kota Malang menunjukkan tren yang konsisten membaik dari tahun 2020 hingga

2024. Hal ini mencerminkan peningkatan dalam aksesibilitas dan mutu layanan dasar seperti transportasi, air bersih, dan sanitasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Malang. Kinerja ini menjadi indikasi positif bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Malang terus diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat secara lebih efisien dan berkelanjutan.

B. Cakupan Rumah Layak Huni

Cakupan rumah layak huni adalah ukuran persentase rumah yang memenuhi standar kelayakan, baik dari segi struktur bangunan, kesehatan penghuni, maupun kecukupan luas minimum, dibandingkan dengan total rumah yang ada dalam suatu wilayah. Tingginya cakupan menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang memiliki akses terhadap tempat tinggal yang aman, sehat, dan memenuhi standar kelayakan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat secara umum.

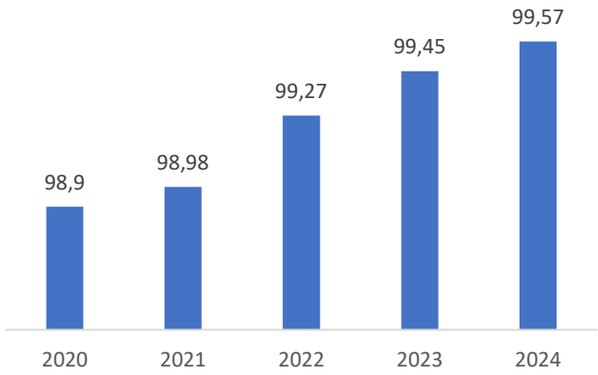

Gambar 2.66 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Sumber: Satu Data Kota Malang

Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Malang berada pada tingkat yang sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Angka yang hampir menyentuh 100 persen pada tahun 2024 mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan. Hal ini mencerminkan keberhasilan kebijakan perumahan serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman yang aman dan sehat bagi warganya.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB mencerminkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total aktivitas ekonomi di Kota Malang. Rasio ini penting sebagai indikator kapasitas fiskal daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. Rasio yang meningkat menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan pajak, serta mencerminkan partisipasi ekonomi masyarakat yang semakin baik dalam mendukung pembangunan melalui pajak. Sebaliknya, rasio yang rendah dapat mengindikasikan perlunya optimalisasi kebijakan perpajakan atau belum tergalinya potensi ekonomi daerah secara maksimal.

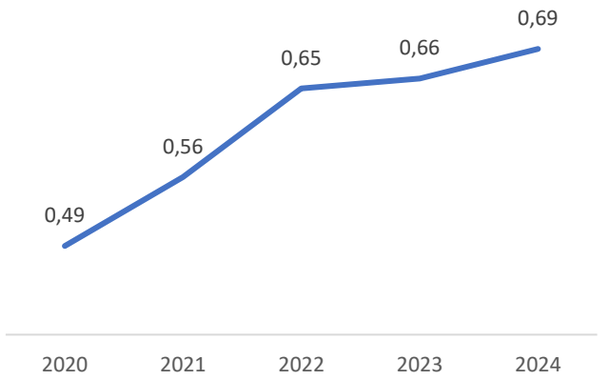

Gambar 2.67 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, Data Diolah

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dalam grafik tersebut menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini mencerminkan kinerja fiskal daerah yang semakin baik dalam menggali potensi penerimaan pajak seiring pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pendapatan daerah semakin optimal, memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, tren ini merupakan sinyal positif dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan nilai total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu. Secara umum, pertumbuhan PDRB mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di Kota Malang, baik dari sektor industri, jasa, perdagangan, maupun sektor lainnya. Jika PDRB mengalami pertumbuhan yang stabil, hal ini menunjukkan adanya kemajuan ekonomi, peningkatan daya saing wilayah, serta potensi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

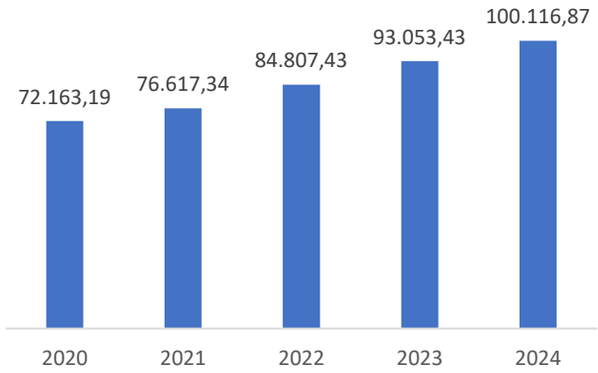

Gambar 2.68 PDRB Kota Malang (Miliar Rp)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

PDRB Kota Malang terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai PDRB yang naik setiap tahun menandakan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Malang tumbuh secara konsisten. Hal ini mencerminkan peningkatan produktivitas berbagai sektor

ekonomi, seperti perdagangan, industri, pariwisata, dan jasa, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki ketahanan ekonomi yang baik serta potensi pengembangan lebih lanjut, terutama jika diimbangi dengan penguatan investasi dan infrastruktur pendukung.

C. Tingkat Inflasi

Inflasi mencerminkan perubahan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang stabil menunjukkan ekonomi yang sehat, sementara inflasi tinggi dapat menekan daya beli masyarakat. Menjaga inflasi tetap terkendali penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

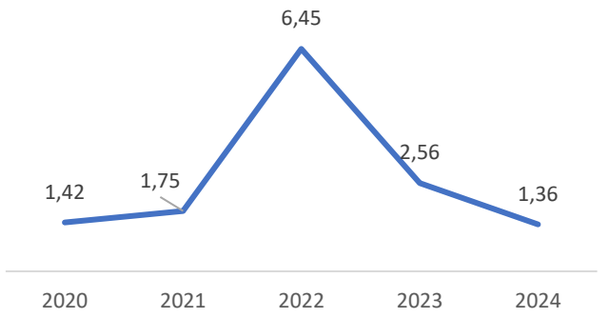

Gambar 2.69 Tingkat Inflasi
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Tingkat inflasi Kota Malang dalam periode tahun 2020–2024 menunjukkan rata-rata inflasi yang relatif terkendali dengan angka tahunan yang tidak terlalu ekstrem, kecuali pada tahun 2022. Secara umum, kondisi ini mencerminkan stabilitas harga di wilayah tersebut, mendukung aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Lonjakan inflasi pada tahun 2022, yang mencapai 6,45%, terutama disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi, peningkatan biaya distribusi, tekanan harga pangan. Hal ini mendorong kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan dalam skala nasional maupun daerah.

D. Indeks Daya Beli /Purchasing Power Parity

Indeks Daya Beli mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan pendapatan yang dimiliki. Secara umum, stabilitas atau peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat tetap terjaga, didukung oleh inflasi yang terkendali dan pertumbuhan pendapatan. Indeks Daya Beli menjadi indikator penting dalam menilai ketahanan konsumsi domestik di tengah dinamika ekonomi regional maupun global.

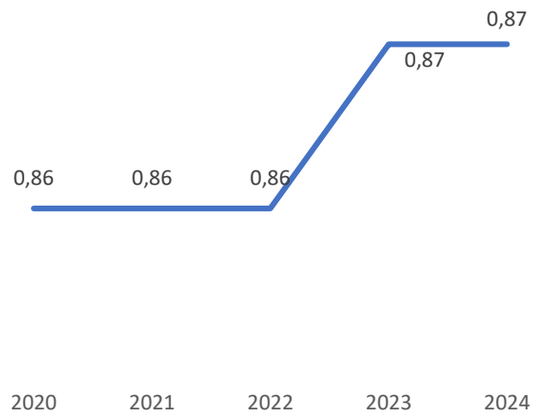

Gambar 2.70 Indeks Daya Beli
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Indeks Daya Beli masyarakat Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan cukup stabil, mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif terjaga. Daya beli ini didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali dan pertumbuhan pendapatan yang sejalan dengan peningkatan sektor-sektor produktif. Meski sempat menghadapi tekanan ekonomi nasional maupun global, daya beli warga Kota Malang tetap mampu dipertahankan, memperlihatkan ketahanan konsumsi domestik sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

A. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebuah sistem penilaian dan pemantauan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kemajuan serta kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu organisasi atau entitas pemerintah. Indeks reformasi birokrasi bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

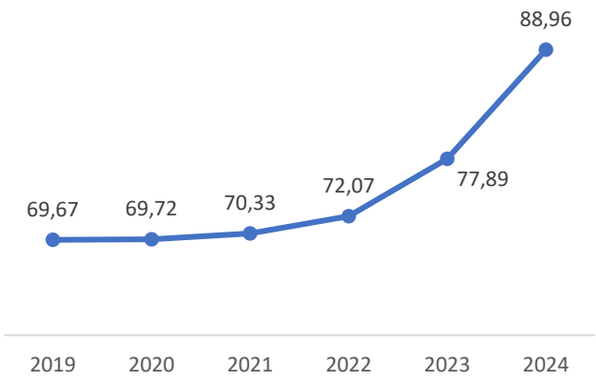

Gambar 2.71 Indeks Reformasi Birokrasi
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Malang dalam lima tahun terakhir menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Kinerja ini mencerminkan komitmen untuk

membangun birokrasi yang lebih akuntabel, transparan, dan melayani. Penguatan reformasi administrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta inovasi di sektor pemerintahan menjadi faktor utama dalam menjaga capaian indeks tetap positif dari tahun ke tahun.

B. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan dan efektivitas reformasi hukum dalam suatu negara atau wilayah. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas sistem hukum dan keadilan yang ada, serta seberapa baik pemerintah dalam menerapkan reformasi hukum yang dirancang untuk memperbaiki sistem tersebut. Nilai Indeks reformasi hukum Kota Malang pada tahun 2023 sebesar 56,5, dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 sebesar 96,38. Hal ini membuktikan bahwa kualitas reformasi kebijakan regulasi di Kota Malang sudah semakin baik.

C. Indeks SPBE

Indeks SPBE mencerminkan sejauh mana penerapan teknologi informasi mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan kemajuan dalam integrasi sistem layanan digital, peningkatan kualitas layanan publik, serta efisiensi dalam proses administrasi pemerintahan.

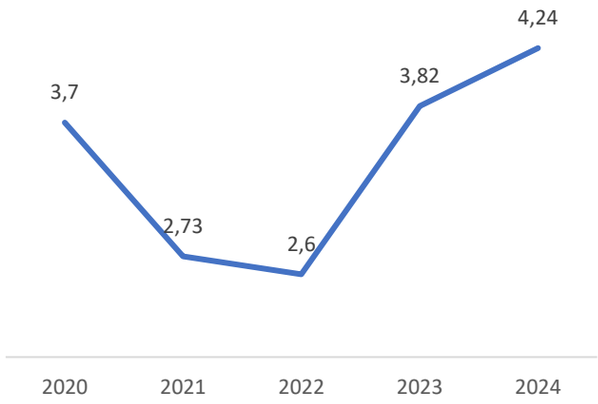

Gambar 2.72 Indeks SPBE
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Indeks SPBE Kota Malang secara umum mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai indeks yang terus membaik menunjukkan adanya peningkatan integrasi layanan digital, efisiensi tata kelola, serta upaya transformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital. Hal ini mengindikasikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan publik berbasis elektronik yang lebih efektif dan responsif.

D. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator yang menggambarkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, kecepatan, dan kepuasan pengguna layanan. Secara umum, indeks ini mencerminkan seberapa baik kinerja birokrasi publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan responsif. Nilai yang tinggi

menunjukkan pelayanan publik yang semakin optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

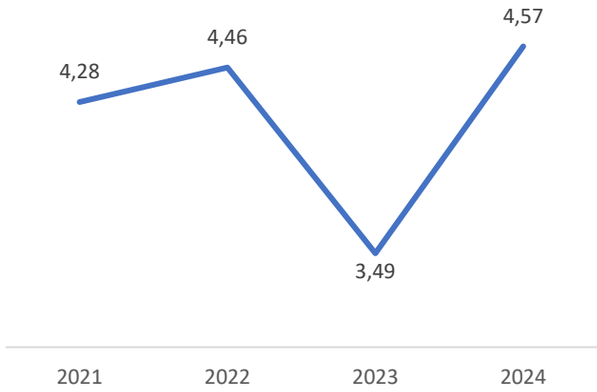

Gambar 2.73 Indeks Pelayanan Publik
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Indeks pelayanan publik menunjukkan nilai yang relatif tinggi pada rentang tahun 2021–2024. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas layanan publik di Kota Malang secara umum berada dalam kategori baik, dengan upaya perbaikan layanan yang terus dilakukan guna menjaga kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah.

E. Indeks Integritas

Indeks integritas adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menilai tingkat integritas serta potensi risiko korupsi dalam suatu organisasi atau institusi pemerintahan. SPI biasanya dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang budaya integritas di dalam organisasi dan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

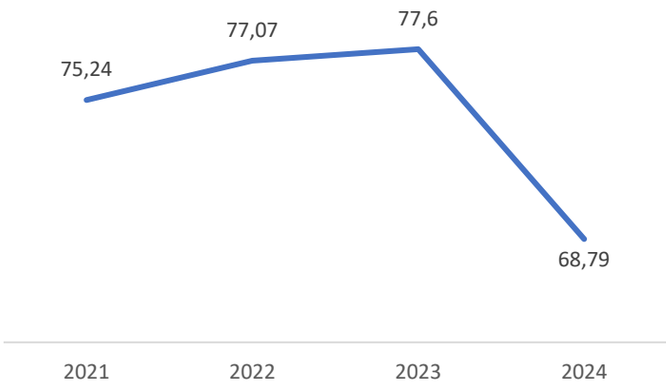

Gambar 2.74 Survey Penilaian Integritas
Sumbe : Inspektorat Daerah Kota Malang

Hasil Survei Penilaian Integritas Kota Malang secara umum mencerminkan dinamika persepsi publik dan internal terhadap praktik integritas di lingkungan pemerintahan daerah. Nilai SPI yang diperoleh berada pada kisaran sedang, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan upaya pencegahan korupsi.

Pencapaian ini menjadi cerminan penting bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan memperkuat sistem pengendalian internal, tata kelola pelayanan publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Evaluasi berkelanjutan dan komitmen terhadap integritas kelembagaan akan menjadi kunci dalam membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya.

F. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan. Nilai SAKIP mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah mampu mengelola sumber daya dengan baik, mencapai target yang telah ditetapkan, dan melaporkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel.

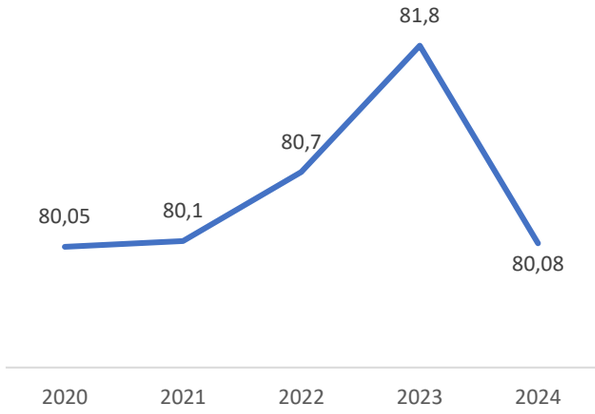

Gambar 2.75 Nilai SAKIP
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Malang berada pada kisaran nilai 80-an, yang mencerminkan kinerja pemerintahan dengan kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan kinerja yang akuntabel, meskipun tetap dibutuhkan penguatan tata kelola untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja.

G. Opini BPK

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini diberikan setelah BPK melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kota Malang berhasil meraih capaian yang membanggakan dalam pengelolaan keuangannya dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2019 hingga 2024. Prestasi ini menunjukkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Malang dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang baik, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Kota Malang terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Capaian Opini WTP ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta berbagai pihak terkait terhadap pemerintahan Kota Malang dan

menjadi motivasi untuk mempertahankan serta meningkatkan standar pengelolaan keuangan di masa mendatang.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Persentase Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM)

Persentase Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada perbandingan antara jumlah aksi HAM yang telah dilaksanakan dengan jumlah aksi yang direncanakan. Pelaksanaan aksi HAM di Kota Malang mencakup beberapa aspek, antara lain penguatan regulasi daerah yang berbasis HAM, peningkatan kualitas layanan publik berbasis HAM, serta upaya perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan melalui program-program sektoral. Seluruh aksi ini dilaporkan secara berkala melalui sistem pelaporan SIM RANHAM Kementerian Hukum dan HAM.

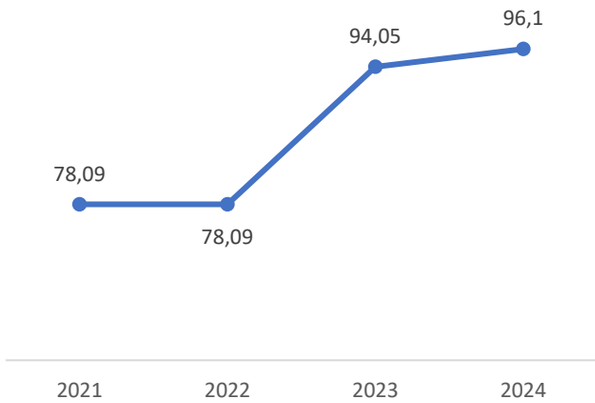

Gambar 2.76 Persentase Capaian Aksi HAM Kota Malang (%)
Sumber: Kementerian Hukum dan HAM

Capaian Aksi HAM di Kota Malang menunjukkan tren peningkatan setelah stagnan di angka 78,09% pada periode 2021-2022, capaiannya terus mengalami peningkatan menjadi 96,1% pada 2024. Peningkatan ini merefleksikan komitmen kuat Pemerintah Kota dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), yang menandakan adanya perbaikan efektif dalam koordinasi kelembagaan dan pengarusutamaan prinsip HAM ke dalam kebijakan serta layanan publik.

B. Persentase Penegakan Peraturan Daerah

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) mencerminkan seberapa efektif pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan regulasi di wilayahnya. Tingkat capaian indikator ini menunjukkan keseriusan dalam menertibkan pelanggaran, menjaga ketertiban umum, serta memastikan aturan daerah dijalankan sesuai ketentuan. Nilai yang tinggi menandakan aparatur penegak hukum daerah bekerja secara aktif dan responsif, sedangkan capaian rendah bisa menjadi indikasi adanya tantangan dalam koordinasi, sumber daya, atau kepatuhan masyarakat.

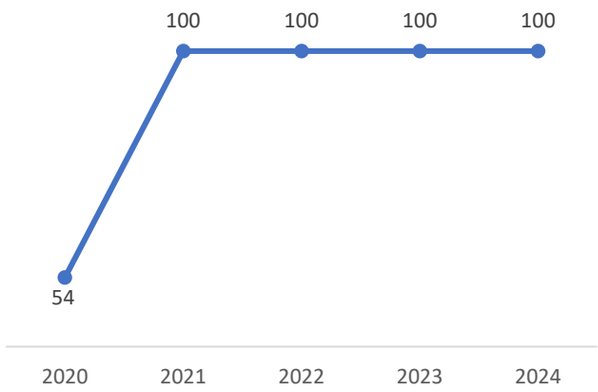

Gambar 2.77 Persentase Penegakan Perda
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Malang menunjukkan capaian maksimal dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memastikan setiap regulasi yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan di lapangan. Konsistensi capaian ini juga menunjukkan sistem penegakan hukum lokal yang tertata dengan baik, serta adanya koordinasi yang solid antara aparat penegak perda dan perangkat daerah lainnya.

C. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan subjektif yang dirasakan oleh individu di suatu komunitas atau negara. Indeks ini mencakup berbagai indikator yang menggambarkan perasaan aman seseorang dari ancaman kejahatan, kekerasan, dan gangguan keamanan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui survei yang menanyakan responden tentang pengalaman pribadi mereka terkait kejahatan, kekerasan, dan kepercayaan terhadap lembaga keamanan seperti polisi. Selain itu, pertanyaan mengenai persepsi keamanan di lingkungan sekitar, seperti berjalan sendirian di malam hari, juga sering dimasukkan. Indeks Rasa Aman memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai kondisi keamanan di suatu wilayah, tidak hanya berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan, tetapi juga berdasarkan perasaan dan pengalaman langsung masyarakat.

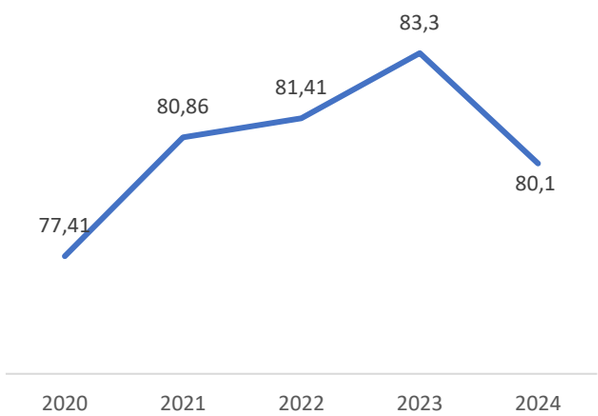

Gambar 2.78 Indeks Rasa Aman
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Indeks rasa aman Kota Malang secara keseluruhan menunjukkan tingkat persepsi masyarakat yang cukup baik terhadap kondisi keamanan di wilayahnya. Nilai indeks yang tergolong tinggi mencerminkan adanya kepercayaan publik terhadap penanganan isu-isu keamanan, baik dalam hal pencegahan kejahatan maupun penanggulangan bencana. Kondisi ini turut mendukung stabilitas sosial dan menjadi prasyarat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi, sosial, serta pembangunan berkelanjutan.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan iklim pembangunan yang kompetitif melalui efisiensi birokrasi, kualitas SDM, infrastruktur, serta inovasi ekonomi. Nilai indeks yang baik menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki fondasi yang mendukung produktivitas dan daya tarik investasi, serta kapasitas adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional maupun global.

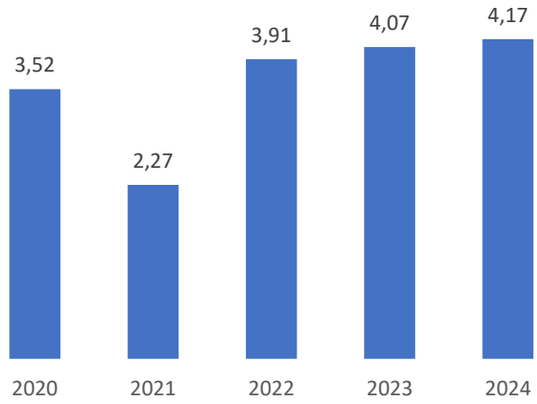

Gambar 2.79 Indeks Daya Saing Daerah
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Indeks Daya Saing Daerah Kota Malang secara keseluruhan menunjukkan kapasitas yang kuat dalam menciptakan lingkungan pembangunan yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Nilai yang tercatat mencerminkan adanya penguatan aspek kelembagaan, kualitas layanan publik, serta ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya tarik investasi, memperluas peluang kerja, serta memperkuat posisi daerah dalam menghadapi persaingan regional maupun nasional.

2.1.4.4 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah 7 – 12 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun menggambarkan tingkat keterlibatan anak-anak usia sekolah dasar dalam sistem pendidikan formal. Secara umum, tingkat partisipasi di kelompok usia ini di Kota Malang telah tercapai dengan baik, mencerminkan keberhasilan penyediaan akses pendidikan dasar yang merata dan terjangkau. Hal ini menjadi indikator positif dalam

mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

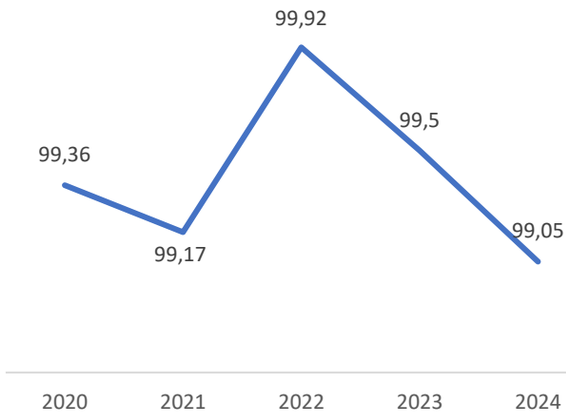

Gambar 2.80 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun di Kota Malang secara keseluruhan menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi dan mendekati universal. Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem pendidikan dasar dalam menjangkau seluruh anak usia sekolah dan mengindikasikan akses yang merata terhadap layanan pendidikan dasar di wilayah ini. Ketersediaan fasilitas pendidikan, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadi faktor utama yang menunjang kondisi tersebut.

2. Angka Partisipasi Sekolah 13 – 15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun merupakan indikator yang menggambarkan proporsi anak dalam kelompok usia tersebut yang sedang menempuh pendidikan formal. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan akses pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama, serta mencerminkan efektivitas sistem pendidikan dasar dalam mendorong keberlanjutan belajar anak-anak ke tingkat yang lebih tinggi.

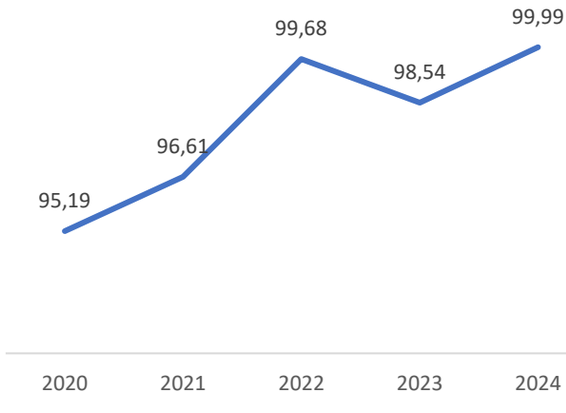

Gambar 2.81 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun di Kota Malang secara umum berada pada tingkat yang sangat tinggi. Kondisi

ini mencerminkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah menengah pertama telah mengakses pendidikan formal. Pencapaian tersebut mencerminkan keberhasilan penyediaan layanan pendidikan dasar yang merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan proporsi jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu tanpa memperhitungkan batasan usia ideal. Secara umum, APK dapat mencerminkan kapasitas sistem pendidikan dalam menampung peserta didik, termasuk mereka yang bersekolah lebih awal atau terlambat. Nilai APK yang tinggi menunjukkan akses pendidikan yang luas, namun perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan kualitas dan efisiensi pendidikan tetap terjaga.

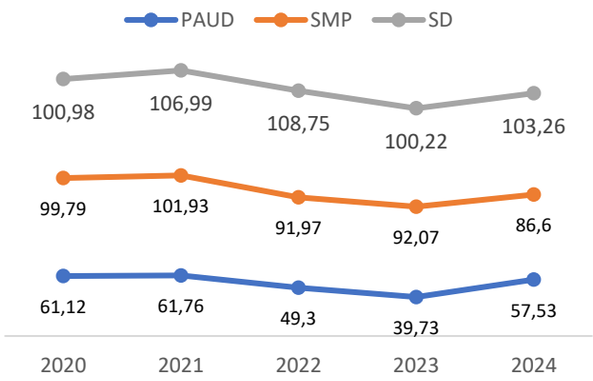

Gambar 2.82 Angka Partisipasi Kasar
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Secara umum, angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD di Kota Malang menunjukkan capaian di atas 100 persen, yang mengindikasikan daya tampung pendidikan dasar relatif memadai dan mencakup peserta didik di luar kelompok usia ideal. Sementara itu, APK jenjang SMP juga tergolong tinggi, namun berada di bawah angka 100 persen dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama. APK PAUD juga menunjukkan fluktuasi, dengan capaian 57,53% pada 2024, menandakan perlunya penguatan akses pendidikan anak usia dini. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan sistem pendidikan di Kota Malang telah mampu menyediakan akses yang cukup luas, meskipun tetap diperlukan perhatian terhadap keberlanjutan dan pemerataan akses pendidikan pada jenjang lanjutan.

4. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) mencerminkan proporsi anak usia sekolah yang bersekolah sesuai jenjang usianya. APM merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pendidikan dalam menjangkau kelompok usia sekolah yang tepat. Capaian APM yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas anak memperoleh akses pendidikan tepat waktu dan sesuai kelompok umur, yang menjadi fondasi penting dalam pemerataan dan kualitas pendidikan jangka panjang.

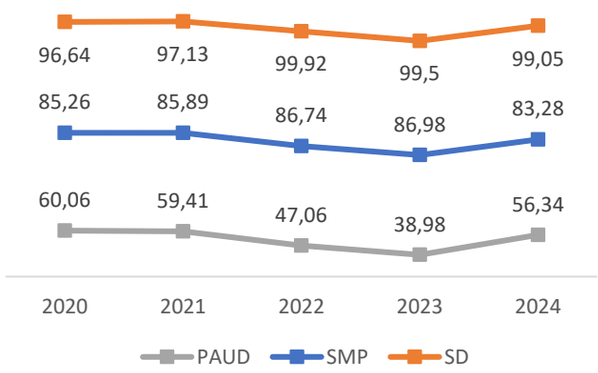

Gambar 2.83 Angka Partisipasi Murni
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD dan SMP di Kota Malang secara umum menunjukkan tingkat keterlibatan anak usia sekolah sesuai jenjang yang cukup tinggi. APM SD berada mendekati angka maksimal, mengindikasikan hampir seluruh anak usia 7–12 tahun telah mengakses pendidikan dasar sesuai umur. Sementara itu, APM SMP meskipun lebih rendah, tetap mencerminkan upaya yang cukup baik dalam menjangkau kelompok usia 13–15 tahun. Sementara itu, APM PAUD fluktuatif dan sempat menurun hingga 38,98% pada 2023 sebelum meningkat kembali menjadi 56,34% pada 2024, mencerminkan perlunya penguatan akses pendidikan anak usia dini. Secara keseluruhan, capaian ini menandakan keberhasilan sistem pendidikan dasar dalam menjamin akses pendidikan formal bagi anak-anak sesuai kelompok usia di Kota Malang.

5. Proposi Guru PAUD Formal Dengan Kualifikasi S1/DIV

Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/DIV merupakan indikator penting dalam menilai mutu layanan pendidikan usia dini. Semakin tinggi proporsinya, semakin baik kualitas tenaga pendidik yang tersedia, yang berkontribusi langsung terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak-anak. Peningkatan angka ini juga mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru di sektor pendidikan dasar.

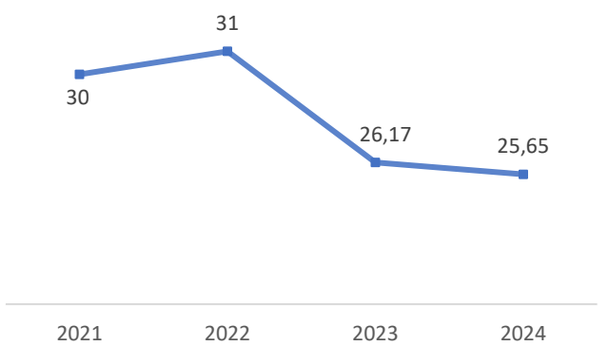

Gambar 2.84 Proposi Guru PAUD Formal Kualifikasi S1/D-IV
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/DIV di Kota Malang masih menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam pemenuhan standar kompetensi tenaga pendidik di jenjang pendidikan anak usia dini. Kualitas guru yang belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi akademik dapat berdampak pada mutu pembelajaran, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas melalui program pendidikan lanjutan dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan adalah tolok ukur wajib bagi pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat atas layanan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Penerapannya didasarkan pada Permendagri No. 59 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak usia sekolah.

Tabel 2.11 SPM Bidang Pendidikan

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan Anak Usia Dini	Anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	68,58%	50,87%	74,05%	99,04%	99,65%
Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara berusia 7-15 tahun yang mendapatkan pelayanan dasar pendidikan dasar	94,84%	88,38%	91,85%	98,97%	99,74%
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara berusia 7-18 tahun yang mendapat pelayanan dasar pendidikan kesetaraan	52,68%	94,37%	89%	93,57%	100%
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	NA	94,21	90,32	89,73	89,86
	Iklim keamanan SD	NA	73,83	74,23	75,22	76,89
	Iklim keamanan SMP	NA	73,83	72,96	74,54	74,82
	Iklim kebinekaan SD	NA	61,81	73,42	76,26	75,96
	Iklim kebinekaan SMP	NA	61,81	70,79	77,33	74,95
	Iklim inklusivitas SD	NA	55,78	57,58	58,19	60,82
	Iklim inklusivitas SMP	NA	55,78	57,19	62,44	64,36

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Secara umum, capaian SPM Bidang Pendidikan menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar dan kesetaraan di Kota Malang telah hampir merata sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Peningkatan signifikan di seluruh indikator mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperluas layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Keberhasilan mencapai 100% pada indikator Pendidikan Kesetaraan tahun 2024 menjadi bukti efektivitas intervensi program pendidikan bagi kelompok rentan dan putus sekolah.

Selain itu, masih terdapat tantangan dalam mempertahankan tingkat akreditasi PAUD yang membutuhkan perhatian lebih pada aspek pembinaan kelembagaan dan peningkatan mutu proses pendidikan di usia dini. Di sisi lain, Kota Malang menunjukkan pencapaian yang sangat positif dalam meningkatkan kualitas lingkungan belajar di jenjang pendidikan dasar. Kemajuan yang konsisten pada aspek iklim keamanan dan inklusivitas, serta peningkatan tajam pada iklim kebinekaan, menunjukkan bahwa arah kebijakan yang diterapkan telah efektif menciptakan sekolah sebagai ruang belajar yang lebih aman, ramah, terbuka, dan menghargai keberagaman bagi seluruh peserta didik. Keberhasilan ini sekaligus mengisyaratkan bahwa upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat mulai membuahkan hasil yang nyata dalam membangun ekosistem pendidikan yang berdaya saing dan berkeadilan.

B. Urusan Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan indikator penting dalam menggambarkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok usia rentan. Tingginya angka ini umumnya mencerminkan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, kualitas gizi, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, penurunan angka kematian bayi menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan kesehatan daerah melalui intervensi promotif, preventif, serta peningkatan layanan kesehatan dasar.

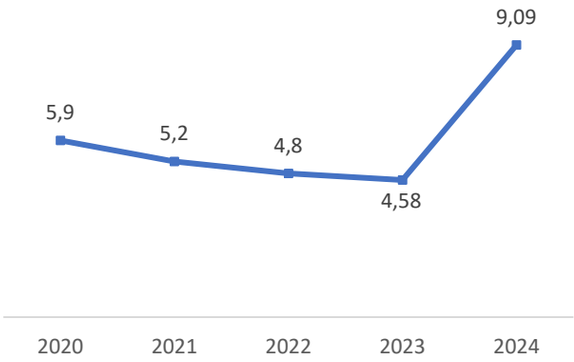

Gambar 2.85 Angka Kematian Bayi
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Peningkatan angka kematian bayi pada tahun 2024 mengindikasikan adanya kemungkinan tantangan dalam sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, seperti keterbatasan akses atau kualitas layanan neonatal, peningkatan kasus komplikasi kelahiran, atau kendala dalam deteksi dini dan penanganan bayi risiko tinggi. Kenaikan tajam ini patut menjadi perhatian serius karena berpotensi mencerminkan menurunnya efektivitas program intervensi kesehatan, baik dari sisi preventif maupun kuratif.

2. Persentase RS dan Puskesmas yang Terakreditasi

Persentase rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi mencerminkan kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap standar nasional kesehatan. Secara umum, angka ini menunjukkan upaya peningkatan mutu fasilitas kesehatan melalui proses penilaian dan pengawasan yang berkelanjutan. Akreditasi penting untuk menjamin keselamatan pasien, efisiensi layanan, serta kapasitas manajemen

pelayanan kesehatan yang profesional. Tingginya persentase akreditasi dapat menjadi indikator bahwa sistem pelayanan kesehatan daerah telah berkomitmen pada peningkatan kualitas dan tata kelola yang baik.

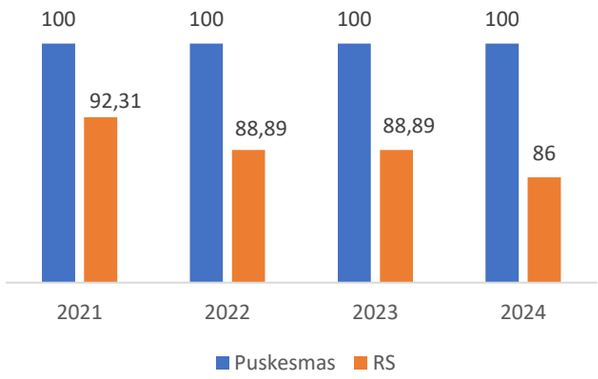

Gambar 2.86 Persentase RS dan Puskesmas yang Terakreditasi
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Grafik menunjukkan bahwa seluruh puskesmas di Kota Malang telah berhasil mempertahankan status akreditasi 100% selama periode 2021 hingga 2024, mencerminkan konsistensi dalam pemenuhan standar mutu layanan kesehatan dasar. Sementara itu, persentase rumah sakit yang terakreditasi juga tergolong tinggi, meskipun sedikit lebih fluktuatif, tetap berada di atas angka 85%. Secara umum, kondisi ini mencerminkan komitmen yang kuat dari penyelenggara layanan kesehatan dalam menjamin kualitas pelayanan dan keselamatan pasien melalui proses akreditasi yang berkelanjutan.

3. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap

Persentase imunisasi dasar lengkap merupakan indikator penting dalam mencerminkan cakupan pelayanan kesehatan dasar pada anak. Secara umum, capaian ini menunjukkan sejauh mana upaya pencegahan penyakit menular telah dijalankan dan diterima oleh masyarakat, serta mencerminkan kinerja sistem layanan kesehatan dasar yang menjangkau kelompok usia rentan secara merata.

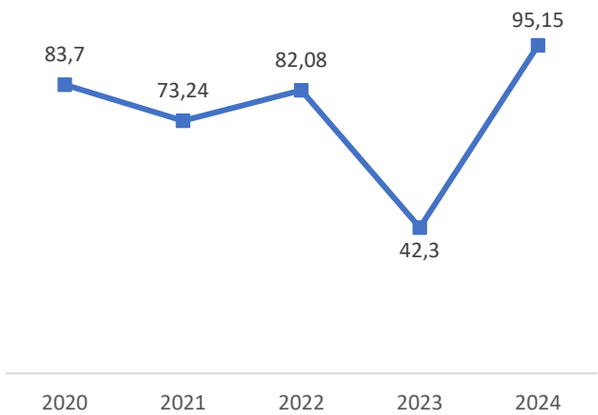

Gambar 2.87 Persentase Imunisasi Dasar Lengkap
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Persentase imunisasi dasar lengkap merupakan indikator kunci dalam mencerminkan keberhasilan program pencegahan penyakit menular pada anak. Secara umum, data ini mencerminkan komitmen layanan kesehatan terhadap cakupan imunisasi yang merata dan berkelanjutan. Angka yang tinggi menunjukkan efektivitas distribusi layanan kesehatan dasar serta tingkat kesadaran masyarakat yang baik terhadap pentingnya imunisasi anak.

4. Net Death Rate

Net Death Rate (NDR) atau angka kematian bersih secara umum mencerminkan jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam satu tahun setelah disesuaikan dengan struktur umur penduduk. Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nilai NDR yang relatif rendah menandakan bahwa kondisi pelayanan kesehatan, sanitasi, dan pola hidup masyarakat berada dalam kategori baik. Sebaliknya, nilai yang tinggi dapat menunjukkan adanya tantangan dalam aspek kesehatan, seperti penyakit menular, gizi buruk, atau akses terhadap layanan medis.

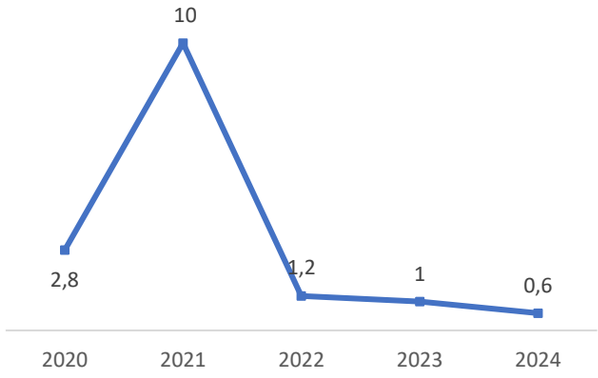

Gambar 2.88 *Net Death Rate* (%)
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Net Death Rate (NDR) di Kota Malang menunjukkan kondisi kesehatan populasi yang semakin baik dalam kurun waktu 2021–2024. Penurunan nilai NDR mengindikasikan tingkat kematian yang semakin rendah, yang dapat mencerminkan perbaikan pada layanan kesehatan, peningkatan akses terhadap fasilitas medis, serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Secara umum, tren ini menjadi indikator positif terhadap kualitas hidup masyarakat dan efektivitas kebijakan kesehatan daerah.

5. Persentase Posyandu Aktif

Persentase Posyandu Aktif adalah ukuran persentase dari jumlah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang aktif dibandingkan dengan total jumlah Posyandu yang seharusnya beroperasi atau terdaftar dalam suatu daerah atau wilayah. Posyandu adalah unit pelayanan kesehatan dasar yang berbasis masyarakat, sering kali terdiri dari tenaga kesehatan lokal seperti bidan dan kader kesehatan, yang bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan prasejahtera kepada ibu dan anak di tingkat desa atau kelurahan.

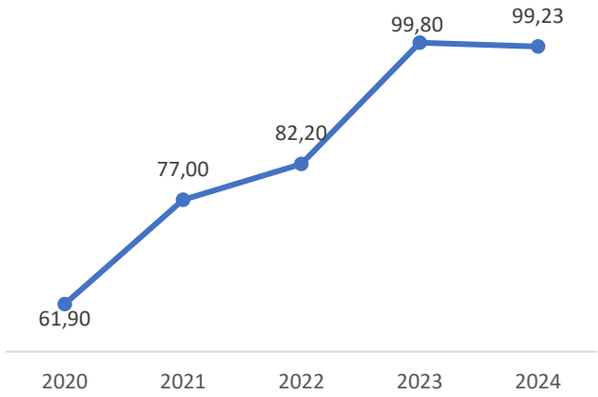

Gambar 2.89 Persentase Posyandu Aktif
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Persentase posyandu aktif menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, dari 61,90% menjadi 99,23%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas, yang berkontribusi terhadap upaya promotif dan preventif di tingkat masyarakat.

6. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita yang masuk dalam status gizi buruk adalah balita yang memiliki berat baan tidak sesuai (sangat kurang) dengan usianya. Persentase balita gizi buruk mengacu pada proporsi anak balita (biasanya di bawah usia lima tahun) dalam suatu populasi yang mengalami masalah gizi buruk. Perhitungan ini penting dalam kesehatan masyarakat karena menggambarkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan anak-anak dalam hal status gizi mereka.

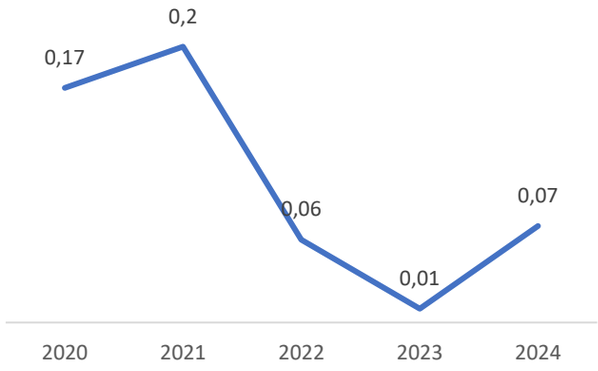

Gambar 2.90 Persentase Balita Gizi Buruk
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Persentase balita dengan gizi buruk menunjukkan tren perbaikan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan angka yang turun dari 0,17% menjadi 0,01%. Pada tahun 2024, terjadi sedikit kenaikan menjadi 0,07%. Secara umum, data ini mencerminkan keberhasilan upaya intervensi gizi dan pemantauan kesehatan anak, meskipun tetap perlu penguatan program untuk menjaga prevalensi tetap rendah dan terkendali.

7. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita Gizi Kurang mengacu pada proporsi anak balita dalam suatu populasi yang mengalami masalah kekurangan gizi

Indikator ini penting dalam konteks kesehatan masyarakat karena menggambarkan seberapa banyak anak-anak di suatu wilayah atau negara yang mengalami kondisi gizi yang tidak mencukupi untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal mereka.

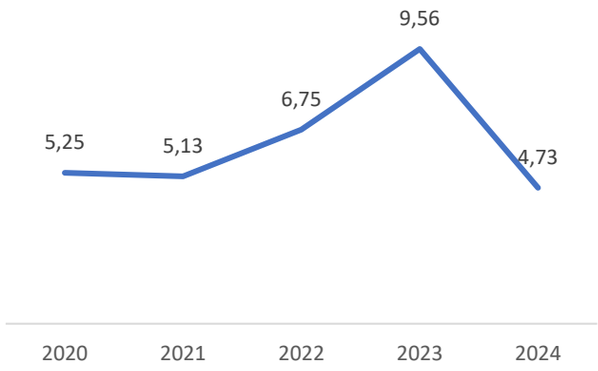

Gambar 2.91 Prevalensi Balita Gizi Kurang
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Prevalensi balita gizi kurang di Kota Malang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Angka prevalensi sempat meningkat dari 5,13% pada tahun 2021 menjadi 9,56% di tahun 2023, sebelum akhirnya mengalami penurunan signifikan menjadi 4,73% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya intervensi gizi dan program kesehatan anak. Secara umum, capaian tahun 2024 menunjukkan kondisi gizi balita yang lebih baik dibandingkan awal periode, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan status gizi anak-anak.

8. Cakupan Kelurahan/Desa Siaga Aktif

Cakupan Kelurahan Siaga Aktif mencakup peran komunitas dalam menyediakan layanan kesehatan dasar dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap isu kesehatan dan bencana.

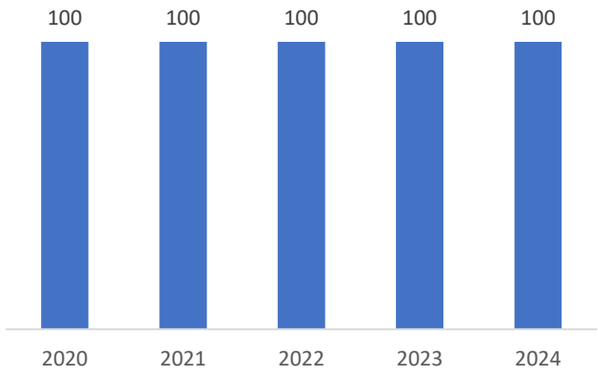

Gambar 2.92 Cakupan Kelurahan/Desa Siaga Aktif
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Cakupan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Malang dalam 5 tahun terakhir telah mencapai 100%. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/2008 dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 828/2008, cakupan siaga aktif ditargetkan mencapai 80 % Desa/Kelurahan di

setiap Kabupaten/Kota pada tahun 2015 sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

9. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis adalah indikator penting dalam program pengendalian Tuberkulosis yang mengukur persentase pasien Tuberkulosis yang berhasil menyelesaikan pengobatannya dan dinyatakan sembuh atau pengobatannya tuntas sesuai standar. Angka ini mencerminkan efektivitas sistem layanan kesehatan dalam menangani Tuberkulosis.

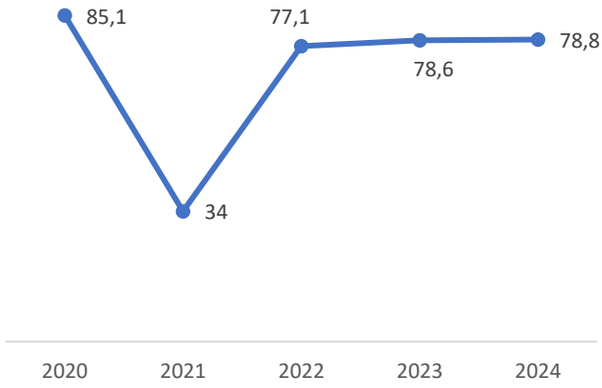

Gambar 2.93 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Tahun 2020 adalah tingkat keberhasilan tertinggi dalam lima tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh sistem pelacakan dan kepatuhan pasien yang baik, ketersediaan obat yang memadai dan pengawasan langsung yang efektif. Tahun 2021 menandai krisis dalam keberhasilan pengobatan, penurunan ini bisa dihubungkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya layanan kesehatan, keterlambatan diagnosis, dan penurunan akses pasien ke fasilitas Kesehatan. Adanya kenaikan besar pada tahun 2022 menandakan pemulihan sistem layanan kesehatan dan strategi penanggulangan Tuberkulosis. Meski belum mencapai angka tahun 2020, pada tahun 2023-2024 keberhasilan pengobatan tetap meningkat secara perlahan hal ini menunjukkan stabilitas sistem pengobatan Tuberkulosis mulai terbangun Kembali.

10. Cakupan Penemuan dan Pengobaran Kasus Tuberkulosis

Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis mengacu pada persentase estimasi total kasus Tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan didiagnosis oleh sistem Kesehatan. Sedangkan Cakupan Pengobatan Tuberkulosis menunjukkan sejauh mana pasien Tuberkulosis yang ditemukan berhasil dimasukkan ke dalam program pengobatan yang sesuai. Kedua indikator ini sangat penting karena penemuan dini mencegah penularan lebih lanjut dan pengobatan tepat waktu dan tuntas mencegah komplikasi serta kematian.

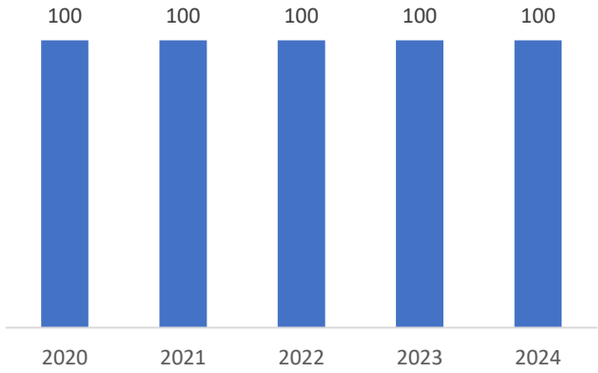

Gambar 2.94 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Selama lima tahun terakhir (2020–2024), cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis di Kota Malang konsisten berada pada angka 100%. Ini menunjukkan semua kasus Tuberkulosis yang diperkirakan atau ditargetkan berhasil ditemukan dan dimasukkan ke dalam pengobatan dan program Tuberkulosis di Kota Malang telah berjalan optimal dari sisi cakupan layanan.

11. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program strategis nasional yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia. Program ini dikelola oleh BPJS Kesehatan. Cakupan Kepesertaan JKN merujuk pada persentase jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta aktif JKN, dibandingkan dengan total jumlah penduduk di suatu wilayah atau nasional.

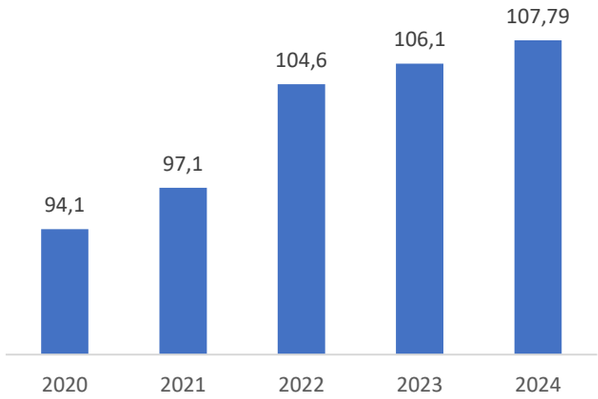

Gambar 2.95 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Pada tahun 2020 cakupan berada sedikit di bawah target UHC (95%), yaitu 94,1%. Sejak tahun 2021 Kota Malang berhasil mencapai dan melampaui target *Universal Health Coverage* (UHC). Tahun 2022 hingga 2024, cakupan melebihi 100% menunjukkan bahwa peserta JKN melebihi jumlah penduduk resmi Kota Malang.

12. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan layanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah untuk menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan

yang bermutu, terutama yang bersifat esensial dan promotif–preventif. SPM ini mencakup indikator penting seperti imunisasi dasar lengkap, penanganan ibu hamil dan balita bermasalah gizi, pengendalian penyakit menular, hingga pelayanan kesehatan jiwa dan lanjut usia.

Tabel 2.12 SPM Bidang Kesehatan

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi SPM (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	83,33%	84,13%	85,12%	94,71%	90,00%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	84,56%	82,96%	87,89%	97,71%	93,14%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	87,57%	85,38%	91,73%	100,00%	96,31%
Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,20%	72,90%	85,53%	89,05%	90,02%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100,06%	76,81%	82,66%	100,00%	107,27%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan	30,44%	44,23%	73,87%	90,15%	95,49%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	51,84%	27,04%	52,88%	80,29%	90,01%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17,55%	36,93%	56,19%	87,83%	105,56%

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi SPM (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70,93%	95,14%	109,29%	100,00%	107,15%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	59,09%	58,00%	91,66%	97,75%	101,51%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	67,04%	39,00%	113,43%	100,00%	104,77%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	44,31%	43,00%	70,68%	87,00%	95,23%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Kota Malang dari tahun 2020 hingga 2024, secara umum terlihat adanya peningkatan capaian di hampir semua indikator pelayanan. Beberapa indikator bahkan telah melampaui target 100%, seperti pelayanan kesehatan penderita hipertensi (105,56% pada 2024), diabetes melitus (107,15%), ODGJ berat (101,51%), dan TBC (104,77%). Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam penyediaan layanan kesehatan sesuai standar, serta adanya peningkatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan.

Namun demikian, terdapat sejumlah layanan yang belum sepenuhnya mencapai cakupan maksimal, terutama pada awal periode seperti pelayanan kesehatan usia produktif dan usia lanjut yang masih berada di bawah 60% pada tahun 2020-2021. Ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih besar terhadap kelompok usia dewasa dan lansia dalam akses layanan kesehatan dasar.

Secara keseluruhan, capaian realisasi SPM kesehatan menunjukkan tren yang positif dan mencerminkan peningkatan kualitas layanan, meskipun perlu terus diperkuat pada kelompok tertentu untuk menjamin akses kesehatan yang lebih merata dan inklusif di waktu mendatang.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Persentase Kondisi Kemantapan Jalan

Persentase kondisi kemantapan jalan mencerminkan tingkat kualitas infrastruktur jalan yang layak untuk digunakan, dimana menunjukkan kondisi jalan secara keseluruhan, apakah dalam kondisi baik, sedang, atau rusak. Indikator ini dihitung berdasarkan panjang jalan yang dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan yang diukur, kemudian dikalikan 100%. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin baik pula aksesibilitas dan kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Indikator ini

penting dalam mendukung konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

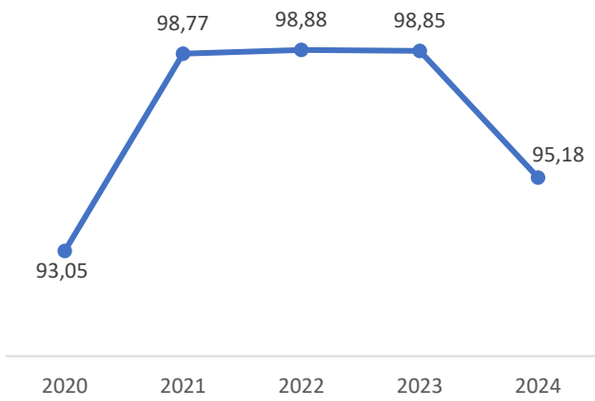

Gambar 2.96 Persentase Kondisi Kemantapan Jalan
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Malang

Persentase kondisi kemantapan jalan menunjukkan capaian yang relatif tinggi selama periode 2020–2024, berada di atas angka 93%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar ruas jalan di Kota Malang dalam kondisi mantap dan layak digunakan, yang mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta efisiensi distribusi logistik dan pelayanan publik.

2. Persentase Irigasi Kota dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi kota dalam kondisi baik menggambarkan tingkat kesiapan dan keberfungsian sistem irigasi dalam mendukung kebutuhan air untuk pertanian dan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Indicator menunjukkan perbandingan antara luas jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik terhadap total luas jaringan irigasi.

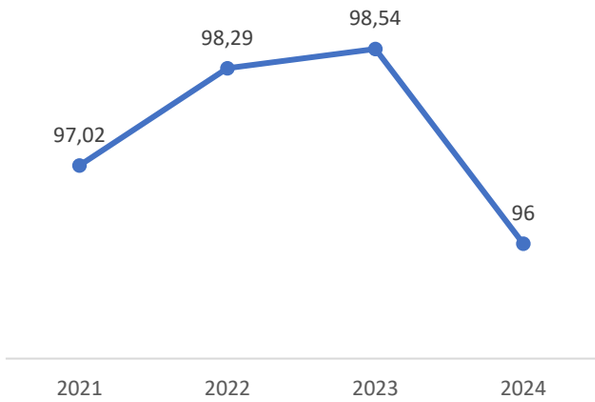

Gambar 2.97 Persentase Irigasi Kota dalam Kondisi Baik
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Malang

Persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan capaian yang konsisten tinggi dari tahun 2021 hingga 2024, dengan angka selalu berada di atas 96 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi irigasi yaitu kurangnya pemeliharaan rutin pada sistem irigasi, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun,

pencemaran dan sampah yang menyebabkan pencemaran dan penyumbatan saluran irigasi, serta perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang menyebabkan irigasi tidak dapat menampung aliran air.

3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga disebut mengakses sanitasi yang aman apabila fasilitas sanitasi yang digunakan merupakan jenis kloset berupa leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Persentase yang tinggi mencerminkan peningkatan kualitas hidup dan pengelolaan limbah domestik yang lebih baik, serta menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kesehatan dan lingkungan.

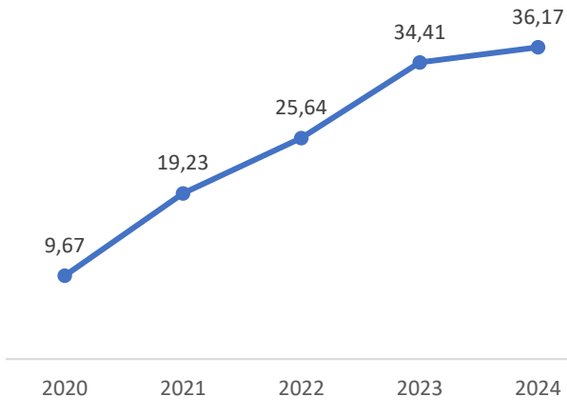

Gambar 2.98 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Malang

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman terus mengalami perbaikan dalam periode 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas program pembangunan sanitasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan lingkungan. Peningkatan ini juga mengindikasikan kemajuan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat dan pengelolaan limbah domestik yang berkelanjutan.

4. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Persentase drainase dalam kondisi baik merupakan proporsi saluran drainase yang berfungsi dengan baik terhadap total panjang saluran drainase. Angka ini secara umum menunjukkan sejauh mana infrastruktur drainase mampu berfungsi optimal dalam mencegah genangan atau banjir, serta mendukung sanitasi lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat. Persentase yang tinggi menandakan kesiapan infrastruktur dasar dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem dan mendukung keberlanjutan tata kota.

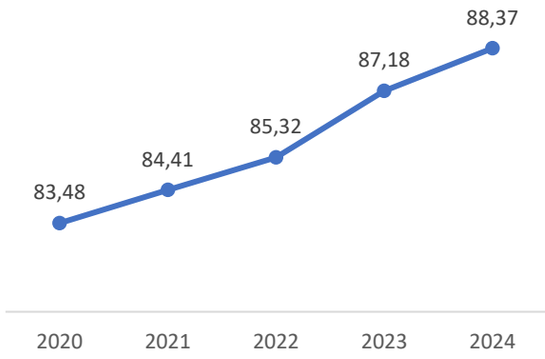

Gambar 2.99 Proporsi Drainase dalam Kondisi Baik
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Malang

Proporsi drainase dalam kondisi baik secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur drainase yang efektif, serta mendukung ketahanan lingkungan perkotaan terhadap risiko banjir dan genangan air. Persentase yang tinggi juga mengindikasikan perbaikan tata kelola infrastruktur dasar di wilayah Kota Malang.

5. Persentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang

Persentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang merupakan salah satu tolok ukur fundamental untuk menilai kualitas tata kelola dan keterpaduan pembangunan di suatu daerah. Indikator ini pada intinya mengukur sejauh mana program-program pembangunan yang direncanakan oleh berbagai sektor patuh dan selaras dengan arahan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

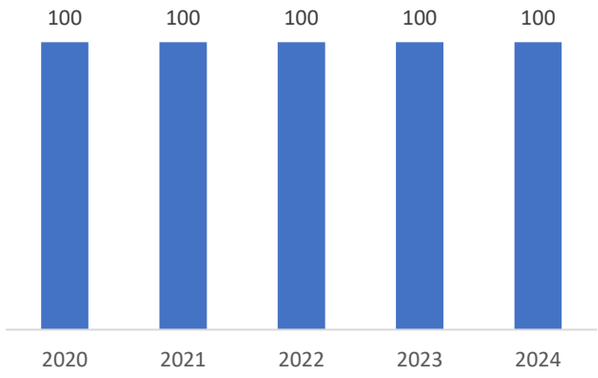

Gambar 2.100 Persentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Malang

Rencana program pembangunan yang diusulkan oleh berbagai sektor telah sepenuhnya selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Capaian yang stabil pada level tertinggi ini merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang disiplin dan terintegrasi.

Hal ini memastikan bahwa pertumbuhan wilayah berjalan secara tertib, terarah, dan berkelanjutan.

6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang PUPR

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara umum mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya layanan dasar infrastruktur bagi masyarakat. Cakupan pelayanan biasanya mencakup ketersediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, drainase lingkungan, persampahan, serta jalan lingkungan.

Tabel 2.13 SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	93,29%	94,20%	95,82%	96,55%	
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84,12%	84,98%	85,38%	85,92%	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Malang

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan hasil yang positif sepanjang periode 2020–2023. Pada aspek pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, terjadi peningkatan bertahap dari 93,29% di tahun 2020 menjadi 96,55% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perbaikan akses masyarakat terhadap layanan air bersih yang semakin merata dan konsisten dari tahun ke tahun. Di sisi lain, capaian layanan pengolahan air limbah domestik juga memperlihatkan tren peningkatan, dari 84,12% pada tahun 2020 menjadi 85,92% pada tahun 2023. Walaupun pertumbuhan tersebut relatif lebih lambat dibandingkan layanan air minum, angka ini tetap mencerminkan upaya perbaikan dalam sistem pengelolaan sanitasi dasar. Secara umum, capaian ini mengindikasikan bahwa pelayanan dasar sektor PUPR, khususnya dalam penyediaan air bersih dan pengolahan limbah domestik, telah berjalan cukup baik dan mendekati target universal akses layanan dasar yang layak.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

1. Luasan Kawasan Kumuh (Ha)

Luasan Kawasan Kumuh (Ha) mengacu pada total area dalam satuan hektar (Ha) yang diidentifikasi sebagai kawasan kumuh dalam suatu wilayah tertentu. Kawasan kumuh adalah daerah yang memiliki kondisi lingkungan yang tidak layak huni, dengan karakteristik seperti bangunan tidak memenuhi standar, akses terhadap layanan dasar yang buruk, dan infrastruktur yang tidak memadai.

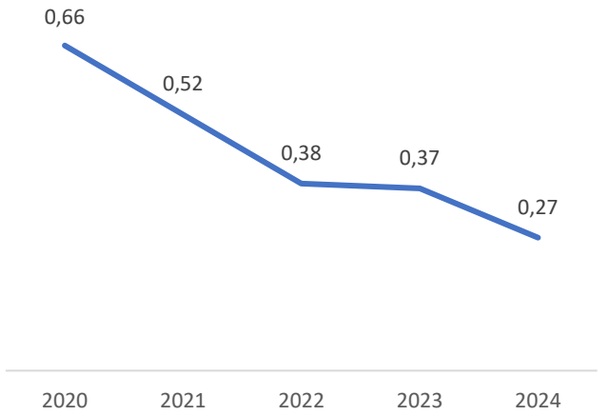

Gambar 2.101 Luasan Kawasan Kumuh
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Malang

Luasan kawasan kumuh di Kota Malang terus berada pada tren penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan upaya penataan lingkungan permukiman yang cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas hunian dan infrastruktur dasar di kawasan padat penduduk, sehingga dapat memperkecil wilayah dengan kategori kumuh.

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian layak dan lingkungan permukiman yang sehat. Cakupan indikator umumnya mencakup layanan terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dasar permukiman.

Tabel 2.14 SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Pelayanan Dasar	Capaian SPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Malang

SPM bidang perumahan dan permukiman dalam periode 2020-2024 tidak terdapat realisasi kegiatan pada dua jenis pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat dan permukiman di Kota Malang, yaitu: Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota, dan Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah.

Hal ini dikarenakan tidak adanya kejadian bencana alam yang mengharuskan adanya tindakan penyediaan dan rehabilitasi bagi korban bencana alam di Kota Malang dalam kurun waktu tersebut. Ketiadaan bencana yang memerlukan rehabilitasi adalah sebuah hasil

positif, namun harus diinterpretasikan dengan bijak sebagai kesempatan untuk terus membangun ketahanan, bukan sebagai tanda bahwa ancaman tersebut telah hilang.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan mencerminkan efektivitas aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam merespons serta menangani insiden yang mengganggu stabilitas sosial. Angka ini juga dapat menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian konflik dan keamanan di suatu daerah.

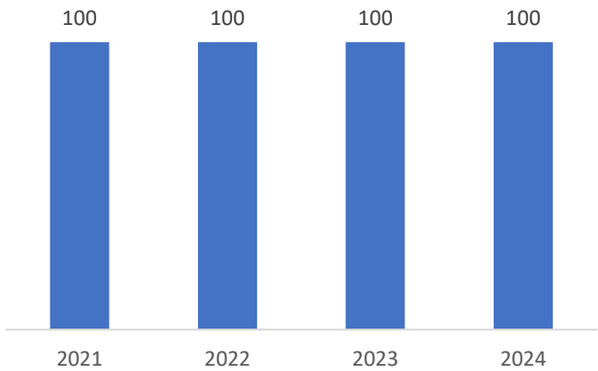

Gambar 2.102 Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Capaian persentase penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 100% selama periode 2021 hingga 2024 mencerminkan keberhasilan yang signifikan dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut. Seluruh laporan gangguan yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara tuntas oleh aparat atau instansi terkait, menunjukkan sistem respons yang efektif dan koordinasi kelembagaan yang berjalan dengan baik. Hal ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam menangani dinamika sosial di masyarakat serta efektivitas prosedur penyelesaian konflik yang telah diterapkan. Selain itu, konsistensi penyelesaian gangguan hingga mencapai tingkat maksimal selama empat tahun berturut-turut turut berkontribusi dalam memperkuat rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dan aparat keamanan. Meskipun demikian, capaian ini perlu terus dipertahankan dengan tetap mengedepankan kualitas penyelesaian, pencegahan dini, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

2. Rasio Linmas

Rasio Linmas (Perlindungan Masyarakat) mencerminkan jumlah personel Linmas dibandingkan kebutuhan ideal di suatu wilayah. Rasio yang memadai menunjukkan kesiapan daerah dalam menjaga ketertiban, memberikan perlindungan, serta respons cepat terhadap keadaan darurat. Jika rasio Linmas tercapai atau mendekati ideal, artinya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung

ketenteraman dan perlindungan masyarakat telah terkelola dengan baik.

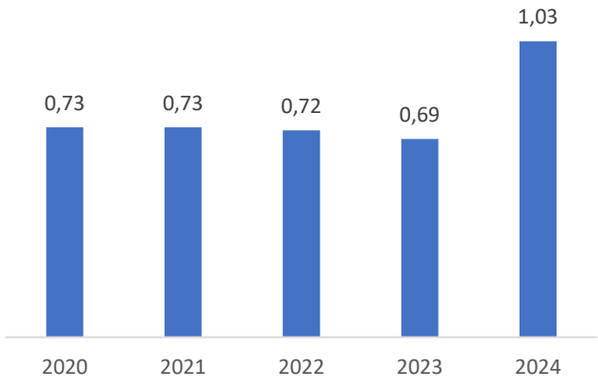

Gambar 2.103 Rasio Perlindungan Masyarakat
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Rasio Perlindungan Masyarakat di Kota Malang selama periode 2020–2023 relatif stabil di kisaran 0,69–0,73, menunjukkan adanya konsistensi dalam ketersediaan personel Linmas dibandingkan kebutuhan. Pada tahun 2024, rasio meningkat signifikan menjadi 1,03, yang mengindikasikan bahwa jumlah personel Linmas telah melampaui kebutuhan minimal. Capaian ini mencerminkan penguatan kapasitas perlindungan masyarakat, kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan ketertiban, serta peningkatan efektivitas pelayanan tanggap darurat di tingkat lokal.

3. Persentase kejadian kebakaran yang ditangani

Persentase kejadian kebakaran yang berhasil ditangani mencerminkan efektivitas respons cepat dan kesiapsiagaan tim pemadam kebakaran dalam menghadapi situasi darurat. Capaian tinggi dalam indikator ini menunjukkan koordinasi yang baik, ketersediaan sarana prasarana, serta peran penting sistem pelaporan dan penanganan yang tanggap. Secara umum, indikator ini berkontribusi dalam menjaga keselamatan masyarakat dan meminimalkan potensi kerugian yang ditimbulkan.

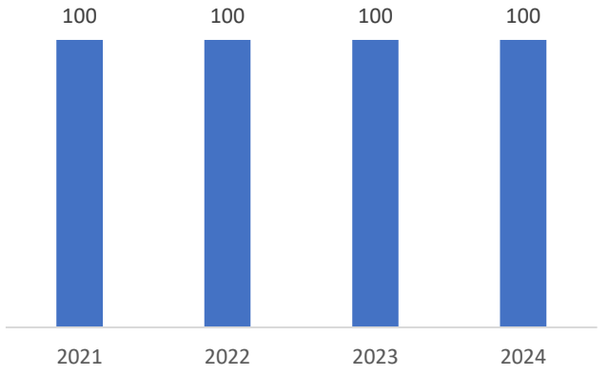

Gambar 2.104 Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Persentase kejadian kebakaran yang berhasil ditangani sebesar 100% selama periode 2021 hingga 2024 mencerminkan kinerja optimal dari unit pemadam kebakaran dan perangkat daerah terkait di Kota Malang. Capaian ini menunjukkan tingkat

kesiapsiagaan yang tinggi, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sistem respons cepat terhadap insiden kebakaran. Seluruh kejadian kebakaran yang dilaporkan dapat ditangani tanpa ada yang terabaikan, yang sekaligus mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan darurat yang tersedia. Keberhasilan ini juga menjadi indikator penting dalam menjaga keselamatan publik, melindungi aset warga, serta mencegah meluasnya dampak bencana kebakaran di lingkungan perkotaan.

4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk menjamin rasa aman, tertib, serta perlindungan kepada masyarakat dari ancaman gangguan sosial maupun bencana. Indikator umumnya mencakup penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan kebakaran, serta perlindungan dan evakuasi korban bencana. Peningkatan kualitas layanan pada bidang ini berkontribusi langsung terhadap stabilitas sosial, keamanan lingkungan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Tabel 2.15 SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator SPM	Capaian SPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan trantibum	103 Orang	103 Orang	103 Orang	104 Orang	500 Orang
Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	205 Unit	205 Unit	205 Unit	665 Unit	626 Unit
Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	4 Dokumen
Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	3.100 Orang	3.100 Orang	3.100 Orang	3.114 Orang	592 Orang
Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan	N.A	N.A	N.A	1 Dokumen	2 Dokumen

Indikator SPM	Capaian SPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal					
Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil*	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan*	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	62 Orang	66 Orang	75 Orang	100 Orang	3500 Orang
Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	100%	100%	100%	47,14%	67,60%
Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Sarana prasarana pemadam kebakaran	33 Unit	33 Unit	33 Unit	172 Unit	476 Unit
Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang
Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran**	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran**	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang

**dikatakan berhasil ketika tidak ada warga begara yang memperoleh pelayanan kerugian meteriil*
***tidak ada warga yang terluka dan meninggal dunia akibat kebakaran*
Sumber: Satuan Polisi PP Kota Malang

Capaian SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan perkembangan yang cukup bervariasi selama periode 2020–2024. Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan trantibum meningkat dari 103 orang menjadi 500 orang pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan efektivitas pelayanan publik di bidang ketertiban umum. Standar sarana prasarana Satpol PP juga mengalami pertumbuhan signifikan, dari 205 unit menjadi 626 unit, menunjukkan dukungan infrastruktur yang semakin memadai. Namun, jumlah dokumen SOP Satpol PP justru mengalami penurunan di tahun 2024, menjadi hanya 4 dokumen dibandingkan 45 dokumen pada tahun-tahun sebelumnya,

yang dapat mengindikasikan perlunya evaluasi konsistensi standar prosedural. Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP juga mengalami penurunan cukup tajam pada 2024, dari sebelumnya 3.114 orang menjadi 592 orang.

Sementara itu, jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran melonjak tajam dari 100 orang pada 2023 menjadi 3.500 orang pada 2024, didukung dengan peningkatan sarana pemadam kebakaran dari 172 unit menjadi 476 unit. Waktu tanggap terhadap laporan kebakaran sempat menurun drastis pada 2023 (47,14%) namun membaik menjadi 67,60% pada 2024, meskipun masih di bawah target 100%. Secara umum, capaian ini menunjukkan adanya penguatan sarana dan layanan dasar dalam perlindungan masyarakat, namun beberapa indikator seperti kualitas SOP, kapasitas SDM, dan kecepatan respons kebakaran masih memerlukan perhatian lebih untuk mempertahankan standar pelayanan optimal.

F. Urusan Sosial

1. Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan orang, keluarga atau kelompok masyarakat yang tidak mampu menjalankan fungsi sosial dikarenakan adanya hambatan, kesulitan atau gangguan, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. PPKS memerlukan pelayanan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (fisik, mental, dan sosial) secara utuh dan wajar.

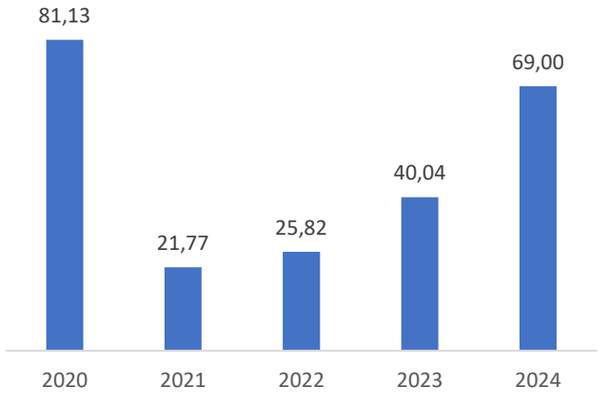

Gambar 2.105 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Persen)
Sumber: Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, terlihat bahwa pada tahun 2020 angka penerima sangat tinggi, yaitu mencapai 81,13%. Namun, pada tahun berikutnya terdapat pergeseran yang cukup mencolok, dengan angka yang jauh lebih rendah, yaitu 21,77% pada 2021, kemudian terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024 menjadi 69,00%. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam mekanisme atau cakupan penyaluran bantuan sosial. Angka yang tinggi di tahun 2020 berkaitan dengan upaya masif perlindungan sosial selama masa pandemi COVID-19.

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pemberian layanan dan bantuan yang tepat sasaran. Capaian indikator SPM bidang ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, menjangkau, dan memberikan intervensi terhadap kelompok rentan seperti lansia terlantar, anak telantar, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin ekstrem. SPM ini penting untuk memastikan tidak ada kelompok rentan yang terabaikan dan menjadi tolok ukur pemerataan akses kesejahteraan sosial.

Tabel 2.16 SPM Bidang Sosial

Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar panti	Persentase (%) Warga penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	39,51%	30,41%	73,67%	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	35%	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) warga lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	49,47%	100%	98,03%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase (%) warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	N.A	100%	100%	100%	100%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Presentase (%) warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	N.A	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang

Selama lima tahun terakhir, Kota Malang telah menunjukkan peningkatan yang nyata dan berkelanjutan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor sosial. Sejumlah indikator yang pada periode awal, yakni tahun 2020 dan 2021, capaiannya masih di bawah harapan, kini telah membaik secara pesat dan berhasil mencapai target penuh 100% pada tahun 2023 dan 2024.

Secara garis besar, prestasi ini menggambarkan kesungguhan Pemerintah Kota Malang dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak esensial bagi kelompok masyarakat rentan melalui penyelenggaraan layanan sosial yang inklusif dan merata. Keberlanjutan pencapaian 100% pada seluruh indikator dalam dua tahun terakhir ini menandakan kinerja pelayanan sosial yang optimal dan tanggap terhadap berbagai kebutuhan warganya.

2.1.4.5 Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja mencerminkan seberapa besar kontribusi rata-rata setiap pekerja terhadap output ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi nilai produktivitas, maka semakin efisien tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa. Produktivitas yang tinggi umumnya mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang baik, penggunaan teknologi yang memadai, serta sistem kerja yang efisien. Sebaliknya, produktivitas yang rendah dapat menunjukkan adanya keterbatasan dalam keterampilan tenaga kerja, dominasi sektor informal, atau rendahnya investasi modal dan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah.

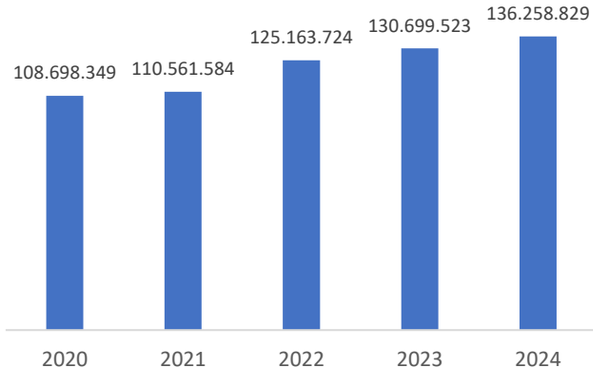

Gambar 2.106 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/Orang)
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

Data tingkat produktivitas tenaga kerja menunjukkan bahwa setiap tenaga kerja menghasilkan output ekonomi bernilai di atas 100 juta rupiah per tahun, dengan tren nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka ini mencerminkan kinerja tenaga kerja yang cukup efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Produktivitas yang tinggi ini juga dapat mengindikasikan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, efisiensi kerja, dan pemanfaatan teknologi dalam proses produksi di Kota Malang.

2. Tingkat Penyelesaian Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Tingkat penyelesaian kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama mengacu pada persentase dari total kasus atau sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme perjanjian bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Indikator ini biasanya digunakan dalam konteks penyelesaian sengketa di berbagai bidang, seperti hubungan industrial, konflik agraria, atau perselisihan bisnis.

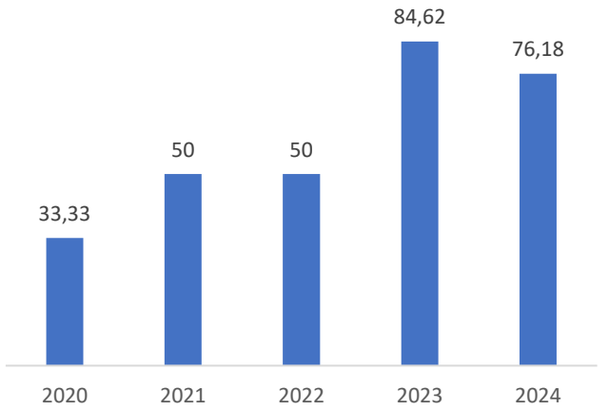

Gambar 2.107 Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

Data menunjukkan bahwa persentase kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama mengalami peningkatan signifikan, mencerminkan efektivitas pendekatan musyawarah dalam penyelesaian konflik. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam mekanisme mediasi dan kolaborasi antar pihak yang bersengketa, serta mengurangi ketergantungan terhadap proses hukum formal. Penyelesaian dengan perjanjian bersama juga mencerminkan tingkat kepercayaan dan komunikasi yang semakin baik di antara pemangku kepentingan.

3. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan mengacu pada proporsi individu yang berhasil ditempatkan dalam pekerjaan atau mendapatkan penempatan kerja setelah mencari pekerjaan dalam suatu periode waktu tertentu.

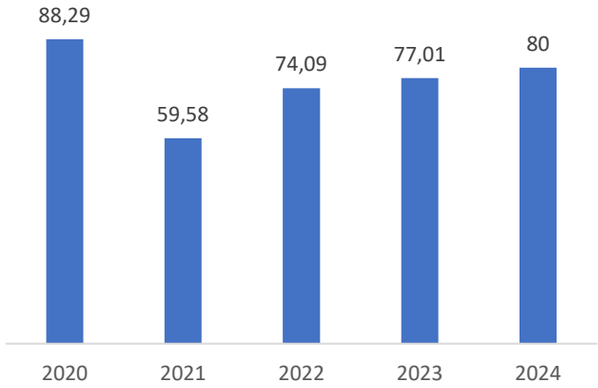

Gambar 2.108 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

Data persentase pencari kerja yang ditempatkan menunjukkan capaian yang cukup baik dalam mendukung penyerapan tenaga kerja. Hal ini mencerminkan peran aktif pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam memfasilitasi penempatan kerja, serta mengindikasikan respons positif terhadap dinamika pasar tenaga kerja di daerah. Ketersediaan informasi pasar kerja dan program pelatihan vokasi yang

tepat sasaran juga turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penempatan pencari kerja.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.Komponen penghitungan IPG adalah Angka harapan hidup, harapan pendidikan , dan indeks distribusi pendapatan Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh juga dari Sakernas, SUPAS dan Sensus Penduduk.Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

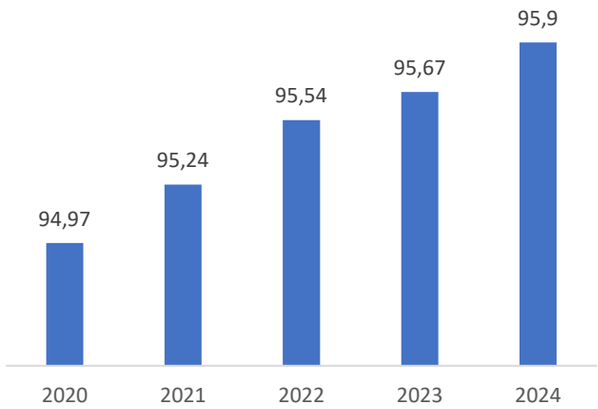

Gambar 2.109 Indeks Pembangunan Gender
Sumber: Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang

Data pada grafik menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Malang berada pada level tinggi di atas angka 94 selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan yang cukup baik, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nilai IPG yang konsisten tinggi menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan di Kota Malang relatif inklusif dan mampu menjangkau kedua kelompok gender secara seimbang.

2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rasio kasus KDRT merupakan indikator penting dalam mengukur kondisi ketenteraman sosial dan keamanan domestik, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Secara umum, rasio ini mencerminkan perbandingan antara jumlah kasus KDRT yang dilaporkan terhadap total jumlah rumah tangga atau populasi yang relevan dalam satu wilayah. Rasio yang tinggi menunjukkan masih lemahnya perlindungan dan kesadaran hukum

di tingkat rumah tangga, serta adanya potensi ketimpangan relasi kuasa dan ketidaksetaraan gender.

Tabel 2.17 Rasio KDRT Kota Malang

2020	2021	2022	2023	2024
1:37.255	1:27.240	1:33.523	1:36.317	1:37.302

Sumber: Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang

Data rasio KDRT Kota Malang menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga relatif rendah dibandingkan total populasi rumah tangga. Rasio yang berada pada kisaran 1:27.240 hingga 1:37.302 selama periode 2020–2024 mencerminkan bahwa kasus KDRT yang dilaporkan masih terjadi dalam skala terbatas. Angka ini dapat menunjukkan efektivitas upaya perlindungan dan edukasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun tetap diperlukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa rendahnya rasio bukan disebabkan oleh kurangnya pelaporan atau hambatan akses ke layanan pengaduan.

C. Urusan Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Indikator "Ketersediaan Pangan Utama" merujuk pada tingkat ketersediaan bahan pangan pokok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Bahan pangan pokok ini mencakup beras, jagung, gandum, daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ketersediaan diukur dalam kuantitas atau volume yang biasanya dinyatakan dalam ton atau kilogram, dan dipantau secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Data ketersediaan diperoleh dari berbagai sumber seperti dinas pertanian, dinas perdagangan, laporan distributor pangan, dan survei pasar. Selain itu, kondisi penyimpanan yang baik—termasuk suhu, kelembaban, dan kebersihan—juga mempengaruhi kualitas dan masa simpan pangan. Efektivitas distribusi pangan yang menjamin ketersebaran pangan secara merata dan tepat waktu sangat penting, begitu juga dengan adanya cadangan pangan untuk situasi darurat. Indikator ini juga mencakup ketersediaan pangan di tingkat konsumen, yang mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan pasokan pangan utama di pasar.

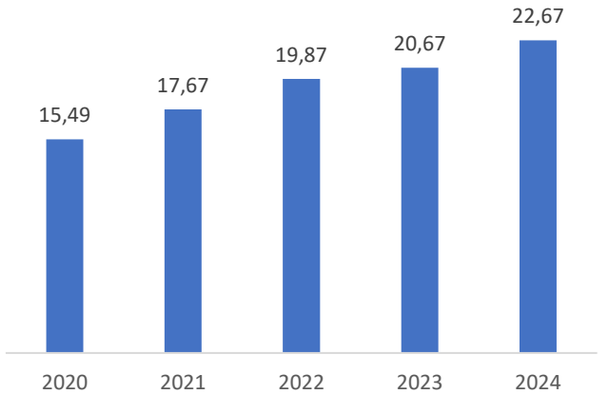

Gambar 2.110 Ketersediaan Pangan Utama
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang

Data grafik menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama mengalami tren positif dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Hal ini

mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem produksi, distribusi, dan pengelolaan pasokan pangan di daerah tersebut. Capaian ini menunjukkan upaya yang konsisten dalam menjaga ketahanan pangan, serta potensi meningkatnya akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok secara berkelanjutan. Ketersediaan pangan yang memadai juga menjadi dasar penting dalam mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, serta mengurangi risiko kerawanan pangan di masa depan.

2. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Prevalensi ketidakcukupan pangan mengukur persentase penduduk yang asupan energinya berada di bawah kebutuhan minimum. Indikator ini merefleksikan tingkat kerawanan pangan suatu wilayah secara langsung, dan sering dikaitkan dengan akses ekonomi, distribusi pangan, serta pola konsumsi masyarakat.

Jika prevalensi ketidakcukupan pangan masih tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan gizi dasar secara layak, yang bisa berdampak pada produktivitas tenaga kerja, kualitas kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan adanya perbaikan dalam aksesibilitas dan kecukupan konsumsi pangan masyarakat, serta keberhasilan program intervensi pangan dan gizi.

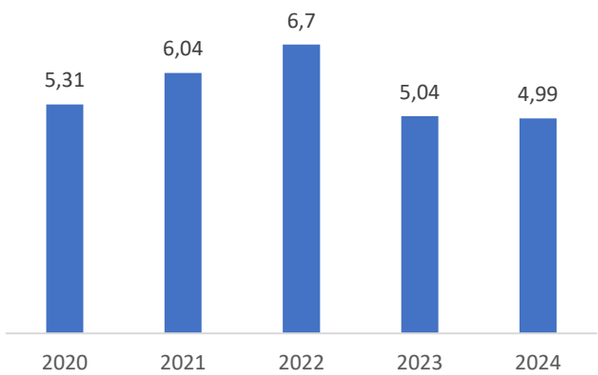

Gambar 2.111 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan berada pada kisaran 5–7 persen selama periode 2020–2024. Angka tersebut merefleksikan bahwa sebagian kecil penduduk masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan energi minimum harian. Meskipun demikian, trennya menggambarkan adanya potensi perbaikan dalam pemenuhan gizi masyarakat, yang menunjukkan efektivitas kebijakan intervensi pangan dan peningkatan akses terhadap sumber pangan.

D. Urusan Pertanahan

1. Nilai Tanah

Nilai tanah merujuk pada estimasi harga atau nilai ekonomi dari sebidang tanah pada suatu waktu tertentu. Pada tahun 2023, Kota Malang mencatat nilai tanah yang signifikan, mencapai angka 4.295.028.172.578 Rupiah. Peningkatan nilai ini mencerminkan dinamika ekonomi dan pertumbuhan infrastruktur yang terjadi di kota tersebut. Faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai

penyebab kenaikan nilai tanah ini meliputi pertumbuhan ekonomi yang stabil, investasi dalam pembangunan infrastruktur publik dan swasta, serta peningkatan permintaan akan properti dan lahan di Kota Malang. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dalam merencanakan penggunaan lahan yang efektif dan berkelanjutan, serta regulasi yang mendukung perkembangan pasar properti, juga berkontribusi dalam menentukan nilai tanah. Meskipun nilai tanah yang tinggi dapat mencerminkan kemajuan ekonomi, tantangan yang dihadapi termasuk risiko spekulasi tanah yang dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi penduduk. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Malang untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial dalam pengelolaan tanah dan pembangunan kota ke depannya.

E. Urusan Lingkungan Hidup

1. Persentase luas RTH publik

Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas lingkungan perkotaan serta keseimbangan ekosistem. Secara umum, RTH publik yang memadai mencerminkan ketersediaan ruang untuk aktivitas sosial, rekreasi, serta fungsi ekologis seperti resapan air dan pengendalian suhu udara. Standar ideal menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa luas RTH publik sebaiknya minimal 20% dari total wilayah kota.

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Malang sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang RTRW Tahun 2022-2042 terpetakan seluas 920 ha. Capaian ini menunjukkan bahwa penyediaan ruang hijau publik di Kota Malang masih terbatas, yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan, ketersediaan ruang resapan air, serta kenyamanan hidup masyarakat kota. Rendahnya persentase ini juga mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif dalam perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan, seperti revitalisasi taman kota, penghijauan lahan tidak terpakai, serta integrasi ruang hijau dalam pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas publik.

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Persentase penduduk ber KTP-elektronik

Persentase penduduk yang telah memiliki KTP elektronik merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas administrasi kependudukan dan kualitas layanan publik. Jika persentase ini tinggi, hal tersebut mencerminkan bahwa sistem pendataan penduduk telah berjalan dengan baik dan cakupan dokumen identitas resmi telah menjangkau mayoritas warga. KTP elektronik juga menjadi prasyarat utama dalam berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga pemilu. Oleh karena itu, capaian persentase penduduk ber-KTP elektronik yang tinggi mencerminkan kesiapan daerah dalam menjalankan program berbasis data kependudukan yang akurat dan terintegrasi.

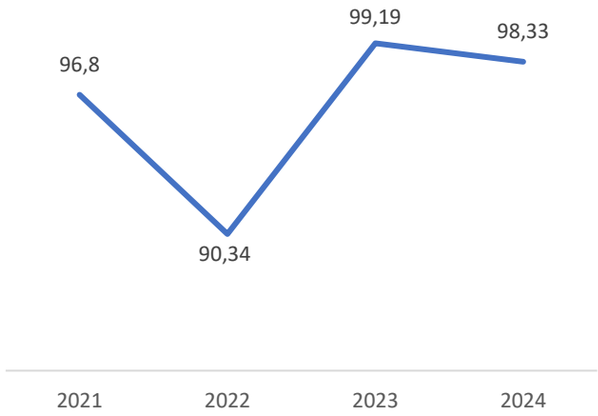

Gambar 2.112 Persentase penduduk ber KTP-elektronik
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Persentase penduduk yang memiliki KTP elektronik dalam grafik menunjukkan capaian yang sangat tinggi, konsisten berada di atas 90% sepanjang periode 2021 hingga 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas legal. Capaian tersebut juga menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai layanan publik yang berbasis data kependudukan.

2. Rasio Penduduk Usia 0-18 Tahun Berakta Kelahiran

Rasio penduduk usia 0–18 tahun yang memiliki akta kelahiran merupakan indikator penting dalam menjamin hak identitas hukum anak. Rasio ini mencerminkan seberapa baik akses masyarakat terhadap layanan administrasi dasar dan kepedulian terhadap dokumen kependudukan. Capaian rasio yang tinggi menunjukkan efektivitas pelayanan pencatatan sipil serta peran aktif keluarga dalam memenuhi hak-hak sipil anak. Rasio ini juga berkontribusi langsung terhadap perlindungan anak, akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

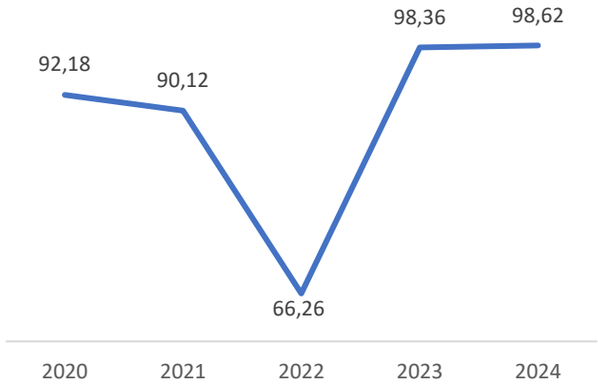

Gambar 2.113 Rasio Penduduk Usia 0-18 Tahun Berakta Kelahiran
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Rasio Penduduk Usia 0–18 Tahun yang memiliki akta kelahiran menunjukkan capaian yang relatif tinggi dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan adanya perhatian yang cukup terhadap pencatatan sipil anak-anak, yang penting bagi pemenuhan hak sipil dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Konsistensi capaian di atas 90% pada sebagian

besar tahun menunjukkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang cukup baik di wilayah tersebut.

3. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dengan total jumlah penduduk di Kota Malang. Data ini dihitung setiap tahun dan dipublikasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Malang.

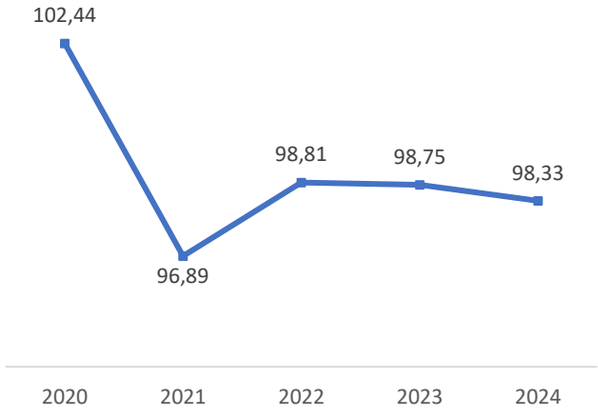

Gambar 2.114 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Grafik menunjukkan bahwa cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berada pada tingkat yang tinggi dan konsisten selama periode 2020 hingga 2024, dengan nilai di atas 96%. Hal ini mencerminkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan kesadaran masyarakat yang baik dalam kepemilikan dokumen identitas resmi. Capaian ini penting dalam mendukung akurasi data kependudukan dan kelancaran berbagai layanan publik.

4. Penerbitan Kartu Keluarga

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) di Kota Malang. Data ini dihitung setiap tahun dan dipublikasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Malang.

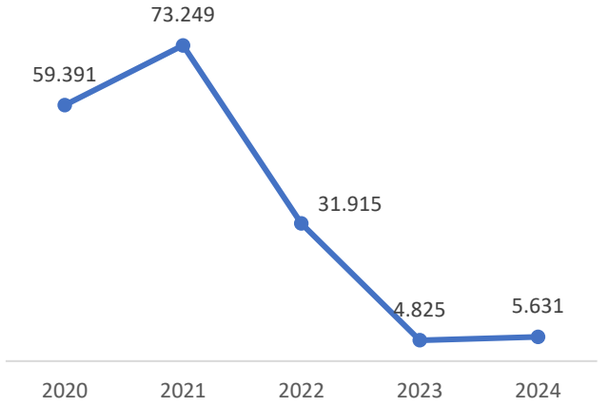

Gambar 2.115 Penerbitan Kartu Keluarga
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Pergerakan data ini mencerminkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap penerbitan KK mengalami perubahan signifikan, sejalan dengan mulai stabilnya administrasi kependudukan di Kota Malang. Penurunan tajam setelah 2021 dapat diindikasikan sebagai hasil dari optimalisasi layanan administrasi dasar serta penyelesaian backlog dokumen kependudukan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan kecil pada 2024 menunjukkan adanya dinamika baru, seperti kebutuhan perubahan KK karena peristiwa penting (pernikahan, perceraian, pindah domisili, dan lainnya). Secara umum, kondisi ini memperlihatkan arah positif terhadap tertib administrasi kependudukan di Kota Malang.

5. Persentase Penerbitan Akta Kematian

Persentase penerbitan akta kematian merupakan indikator penting dalam administrasi kependudukan yang mencerminkan tertib pencatatan peristiwa kematian. Capaian yang tinggi menunjukkan kesadaran masyarakat yang baik serta efektivitas pelayanan pencatatan sipil. Hal ini turut mendukung validitas data kependudukan dan perencanaan pembangunan yang lebih akurat.

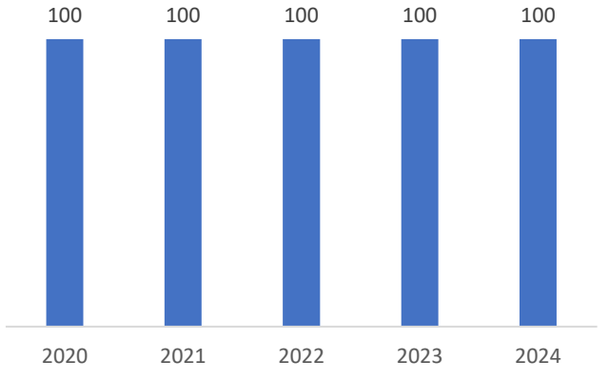

Gambar 2.116 Persentase Penerbitan Akta Kematian
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Persentase penerbitan akta kematian dari tahun 2020 hingga 2024 mencapai 100%, hal ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam sistem administrasi kependudukan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh peristiwa kematian berhasil tercatat secara resmi oleh instansi terkait, tanpa ada kasus yang luput dari pencatatan. Keberhasilan ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya dokumen kependudukan, serta adanya pelayanan publik yang responsif, mudah diakses, dan terintegrasi. Selain itu, pencatatan 100% juga memperkuat akurasi basis data kependudukan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan perencanaan pembangunan, perlindungan sosial, hingga administrasi waris dan hukum.

G. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. *Total Fertility Rate*

Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Fertilitas Total adalah sebuah indikator demografis yang digunakan untuk mengukur jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduktifnya (biasanya dianggap antara usia 15 hingga 49 tahun) berdasarkan tingkat kelahiran saat ini. TFR memberikan

gambaran mengenai tingkat kesuburan di suatu populasi dan digunakan untuk memahami dinamika pertumbuhan penduduk.

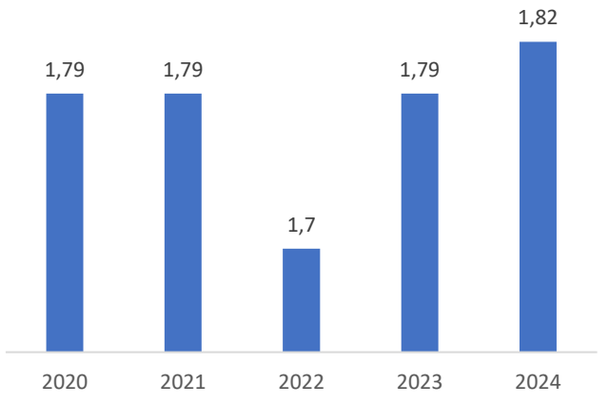

Gambar 2.117 *Total Fertility Rate* (TFR)
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKota Malang

Berdasarkan grafik *Total Fertility Rate* (TFR) dari tahun 2020 hingga 2024, angka kelahiran total berada dalam kisaran rendah, yaitu di bawah angka penggantian ideal sebesar 2,1 anak per perempuan. TFR pada periode tersebut relatif stabil dan menunjukkan tren yang tetap terjaga di bawah angka tersebut, mencerminkan keberhasilan dalam pengendalian kelahiran. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan usia subur di wilayah tersebut melahirkan kurang dari dua anak sepanjang hidupnya, yang berdampak pada kecenderungan penurunan jumlah penduduk dalam jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan migrasi masuk. Kondisi ini dapat menjadi cerminan dari keberhasilan program Keluarga Berencana, peningkatan kesadaran pendidikan reproduksi, serta pergeseran preferensi keluarga terhadap jumlah anak. Namun, dalam jangka panjang, angka TFR yang terlalu rendah dapat mempengaruhi struktur usia penduduk dan komposisi tenaga kerja produktif.

2. Rasio Akseptor KB

Rasio Akseptor KB adalah indikator yang menunjukkan persentase pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi KB.

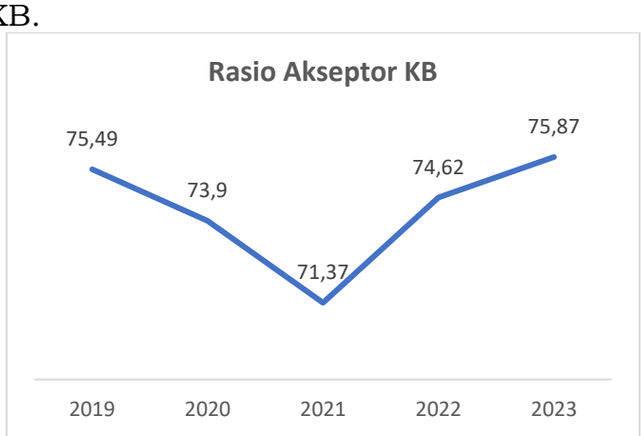

Gambar 2.118 Rasio Akseptor KB
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKota Malang

Pada 2019, rasionya mencapai 75,49%. Terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 73,9%, dan terus menurun ke titik terendah 71,37% di 2021. Namun, tren ini berbalik dengan peningkatan signifikan ke 74,62% di 2022, dan terus naik hingga 75,87% di 2023. Fluktuasi Ratio Akseptor KB ini mencerminkan dinamika program KB di masyarakat. Penurunan dari 2019 ke 2021 mungkin disebabkan oleh tantangan dalam pelayanan KB selama masa pandemi COVID-19, seperti akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan atau perubahan prioritas kesehatan masyarakat. Pemulihan yang kuat di 2022 dan 2023 menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam menghidupkan kembali program KB pasca-pandemi. Peningkatan ini bisa jadi hasil dari kampanye edukasi yang lebih intensif, perbaikan akses layanan KB, atau meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KB. Tren positif dalam dua tahun terakhir mengindikasikan potensi pencapaian target program KB nasional dan dampak positifnya terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.

3. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

Indikator pada grafik di atas adalah angka kelahiran remaja (ASFR 15-19). Indikator ini menunjukkan jumlah kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Angka kelahiran remaja merupakan salah satu indikator kesehatan reproduksi remaja yang penting untuk dipantau. Angka kelahiran remaja yang tinggi dapat mengindikasikan beberapa hal berikut:

- Tingginya tingkat pernikahan dini. Pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kehamilan dan persalinan dini, yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi.
- Kurangnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Remaja yang tidak memiliki akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas mungkin tidak mengetahui cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
- Rendahnya tingkat pendidikan. Remaja dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin lebih berisiko hamil di usia muda.

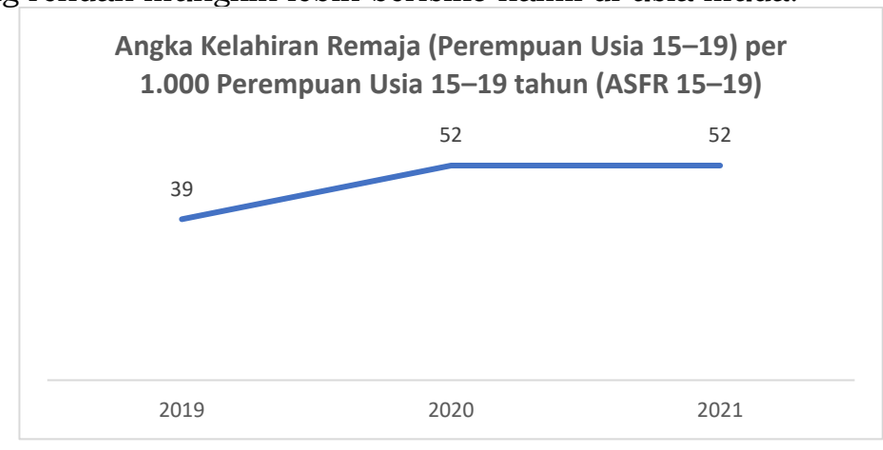

Gambar 2.119 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang (BPS)

Capaian Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) di Kota Malang menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, ASFR 15–19 tercatat sebesar 39, menunjukkan angka yang relatif moderat dalam konteks kesehatan remaja dan perencanaan keluarga. Namun, pada tahun 2020, angka ini meningkat drastis menjadi 52, dan tetap stabil pada angka yang sama di tahun 2021. Sayangnya, data untuk tahun 2022 dan 2023 tidak tersedia, sehingga analisis tren lebih lanjut tidak dapat dilakukan. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2020 dan stagnasi di tahun berikutnya menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif dalam program-program kesehatan reproduksi dan edukasi seksual bagi remaja di Kota Malang. Evaluasi dan penguatan kebijakan terkait dapat menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ini dan memastikan kesehatan serta kesejahteraan remaja perempuan di kota ini.

4. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (*unmet need*) adalah indikator yang menggambarkan persentase pasangan usia subur yang ingin menggunakan metode kontrasepsi tetapi tidak memiliki akses atau tidak dapat menggunakan layanan tersebut. Indikator ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Dengan memahami besaran unmet need, pemerintah dan penyedia layanan kesehatan dapat mengembangkan program yang lebih efektif untuk memastikan semua pasangan usia subur memiliki akses ke informasi dan layanan kontrasepsi yang dibutuhkan.

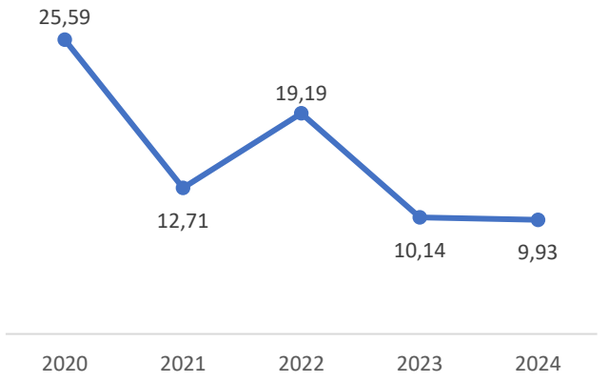

Gambar 2.120 Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi (unmet need) di Kota Malang mengalami penurunan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Dari angka 25,59% pada 2020, cakupan unmet need turun signifikan menjadi 9,93% pada 2024. Tren ini menunjukkan perbaikan akses dan layanan program keluarga berencana, yang berdampak positif terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi. Kinerja ini mencerminkan efektivitas

upaya sosialisasi dan peningkatan pelayanan KB di tingkat masyarakat.

5. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah indikator yang menunjukkan persentase pasangan usia subur yang terus menggunakan metode kontrasepsi dalam jangka waktu tertentu tanpa henti. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas dan kepuasan pengguna terhadap metode kontrasepsi yang mereka pilih. Tingkat keberlangsungan yang tinggi menunjukkan bahwa pengguna merasa nyaman dan puas dengan metode yang mereka gunakan, serta adanya dukungan yang memadai dari sistem layanan kesehatan.

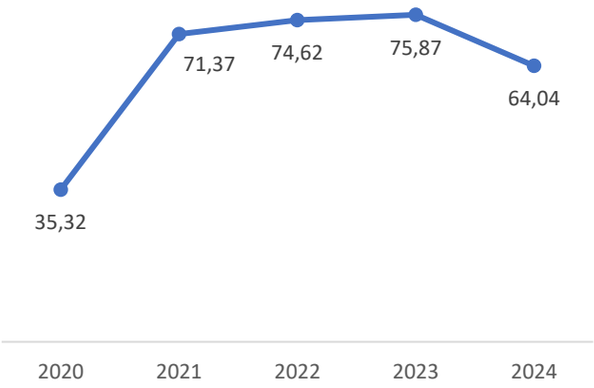

Gambar 2.121 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kota Malang mengalami peningkatan signifikan dari 35,32% pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya di 75,87% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 64,04%. Secara umum, tren ini mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan pengguna aktif kontrasepsi, meskipun penurunan pada tahun terakhir mengindikasikan perlunya penguatan kembali program edukasi dan pelayanan KB untuk menjaga keberlanjutan pemakaian kontrasepsi di masyarakat.

6. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah indikator yang menunjukkan persentase anggota kelompok Bina Keluarga Balita yang menggunakan metode kontrasepsi. Kelompok BKB merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak balita dalam keluarga. Indikator ini penting untuk memahami sejauh mana keluarga dengan anak balita mengakses dan menggunakan layanan kontrasepsi, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kesehatan ibu dan anak serta pengendalian jumlah anak dalam keluarga.

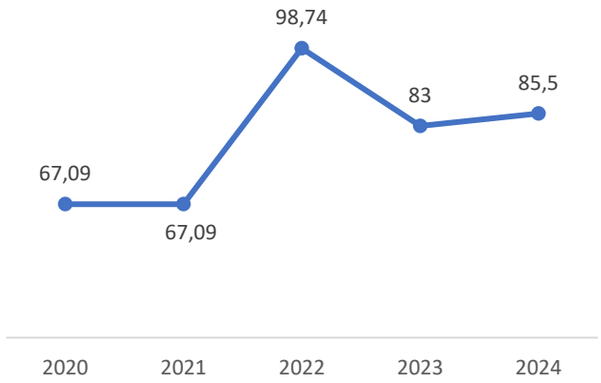

Gambar 2.122 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Data menunjukkan bahwa cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB mengalami peningkatan cukup signifikan dari 67,09% pada tahun 2020–2021, melonjak ke 98,74% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 83%, diikuti dengan kenaikan kembali di tahun 2024 menjadi 85,5%. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggota BKB dalam program KB tetap relatif tinggi, walaupun fluktuasi data mengindikasikan perlunya upaya konsolidasi dan penguatan komitmen ber-KB di kalangan keluarga binaan.

7. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB adalah indikator yang menunjukkan persentase anggota kelompok Bina Keluarga Remaja yang menggunakan metode kontrasepsi. Kelompok BKR berfokus pada pembinaan keluarga remaja untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan reproduksi mereka. Indikator ini penting karena menunjukkan sejauh mana remaja yang tergabung dalam BKR memiliki akses dan menggunakan metode kontrasepsi untuk merencanakan keluarga mereka. Ini mencerminkan kesadaran dan penerimaan remaja terhadap pentingnya penggunaan kontrasepsi dalam menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Gambar 2.123 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Data pada grafik menunjukkan persentase cakupan anggota BKR yang ber-KB dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, persentase cakupan adalah 62.08%. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2020 dan 2021, dengan persentase yang sama sebesar 61.38%. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan hingga mencapai 95.59%, menunjukkan lonjakan besar dalam penggunaan kontrasepsi di kalangan anggota BKR. Namun, pada tahun 2023, persentase ini menurun menjadi 87%.

Peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif tentang pentingnya penggunaan kontrasepsi, peningkatan aksesibilitas layanan kontrasepsi, atau adanya kebijakan khusus yang mendukung peningkatan penggunaan kontrasepsi di kalangan remaja. Penurunan pada tahun 2023 mungkin mencerminkan beberapa tantangan seperti berkurangnya intensitas program atau perubahan dalam persepsi dan penerimaan terhadap metode kontrasepsi.

Secara keseluruhan, data menunjukkan tren positif dalam peningkatan kesadaran dan penggunaan kontrasepsi di kalangan anggota BKR, meskipun ada fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Ke depan, penting untuk terus mendukung program-program edukasi dan penyediaan layanan kontrasepsi yang mudah diakses oleh remaja agar tren peningkatan ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi.

8. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB adalah indikator yang menunjukkan persentase anggota kelompok Bina Keluarga Lansia yang menggunakan metode kontrasepsi. Kelompok BKL berfokus pada pembinaan keluarga lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan reproduksi mereka. Indikator ini penting karena meskipun anggota BKL berada dalam kelompok usia lansia, penggunaan kontrasepsi masih relevan untuk mengatur kesehatan reproduksi dan mencegah komplikasi kesehatan.

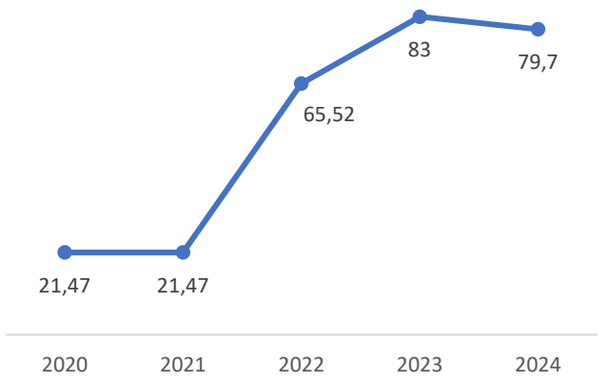

Gambar 2.124 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, dari hanya 21,47% pada tahun 2020 dan 2021, melonjak tajam menjadi 65,52% pada tahun 2022, kemudian terus meningkat menjadi 83% pada 2023.

Pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 79,7%, namun tetap jauh lebih tinggi dibandingkan awal periode. Pola ini menunjukkan efektivitas program edukasi dan pelayanan KB pada kelompok lansia, meskipun tetap diperlukan perhatian untuk menjaga konsistensi capaian di masa mendatang.

9. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan adalah indikator yang menunjukkan jumlah petugas yang bertanggung jawab untuk pembinaan keluarga berencana di setiap desa atau kelurahan. Indikator ini penting untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung program keluarga berencana di tingkat desa/kelurahan, serta untuk memastikan bahwa setiap desa atau kelurahan memiliki cukup petugas untuk mendukung pelaksanaan program KB.

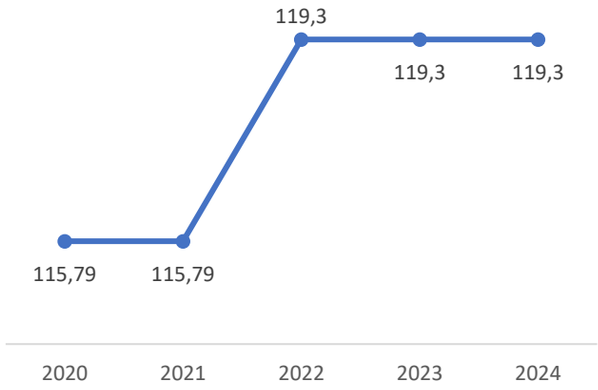

Gambar 2.125 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Rasio petugas PPKBD per kelurahan menunjukkan stabilitas yang baik dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Awalnya berada pada angka 115,79 pada tahun 2020 dan 2021, rasio ini meningkat menjadi 119,3 pada tahun 2022 dan konsisten bertahan hingga 2024. Kestabilan ini mencerminkan bahwa kebutuhan petugas di tingkat kelurahan relatif tercukupi, mendukung keberlanjutan layanan program Keluarga Berencana dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

10. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga adalah indikator yang menunjukkan persentase kelompok kegiatan yang aktif dalam melakukan pembinaan keluarga berdasarkan 8 fungsi keluarga. Delapan fungsi keluarga tersebut meliputi fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, serta fungsi lingkungan. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat terlibat dalam program pembinaan keluarga yang komprehensif dan multifungsi.

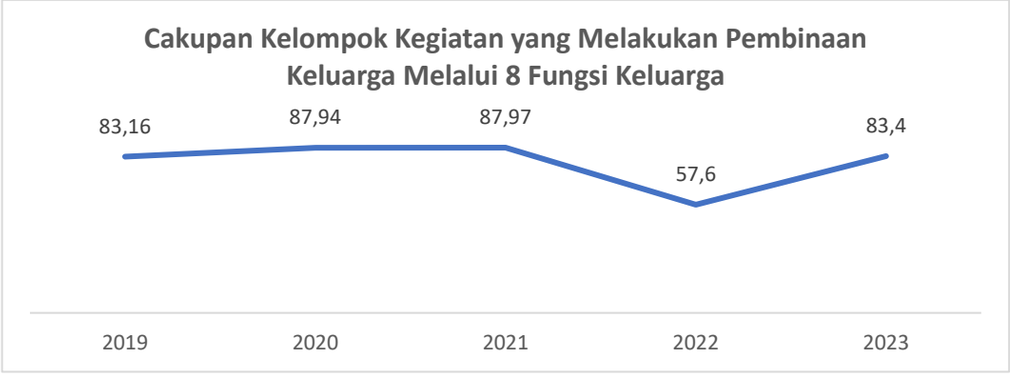

Gambar 2.126 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Capaian cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kota Malang menunjukkan fluktuasi dalam periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, capaian ini mencapai 83,16%, mencerminkan usaha yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembinaan keluarga. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 87,94%, dan sedikit meningkat lagi menjadi 87,97% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis hingga 57,6%, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti pandemi COVID-19 yang mengganggu berbagai aktivitas sosial dan program pembinaan. Meskipun demikian, pada tahun 2023, capaian ini kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai 83,4%. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemulihan dan peningkatan kembali dalam kegiatan pembinaan keluarga di Kota Malang.

11. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak adalah indikator yang menunjukkan persentase keluarga dengan balita dan anak yang secara aktif memahami dan mengimplementasikan praktik pengasuhan yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Indikator ini penting karena mencerminkan tingkat kesadaran dan pengetahuan orang tua tentang pentingnya pengasuhan yang berkualitas serta dampaknya terhadap kesehatan dan perkembangan anak.

Gambar 2.127 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Data pada grafik menunjukkan persentase cakupan keluarga yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, cakupan ini berada pada 0%, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya data atau inisiatif program pada saat itu. Pada tahun 2020, cakupan meningkat menjadi 24.07% dan tetap stabil pada angka yang sama pada tahun 2021. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan hingga mencapai 90.41%, namun angka ini sedikit menurun menjadi 83% pada tahun 2023.

Peningkatan signifikan pada tahun 2022 menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan praktik pengasuhan yang baik di kalangan keluarga dengan balita dan anak. Hal ini mungkin disebabkan oleh program edukasi, kampanye kesadaran, dan dukungan dari pemerintah atau organisasi terkait yang menekankan pentingnya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Penurunan pada tahun 2023, meskipun sedikit, mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan tingkat tinggi dari praktik pengasuhan yang baik.

Secara keseluruhan, data menunjukkan tren positif dalam peningkatan kesadaran dan praktik pengasuhan yang baik di kalangan keluarga dengan balita dan anak. Meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2023, persentase cakupan tetap tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk ke depan, penting untuk terus mendukung program-program edukasi dan intervensi yang membantu keluarga memahami dan melaksanakan pengasuhan yang berkualitas guna memastikan kesehatan dan perkembangan optimal anak-anak mereka.

12. Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita adalah indikator demografis yang menunjukkan rata-rata usia pada saat seorang wanita pertama kali menikah. Indikator ini sering digunakan untuk memahami pola perkawinan dalam suatu populasi dan memiliki implikasi penting bagi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

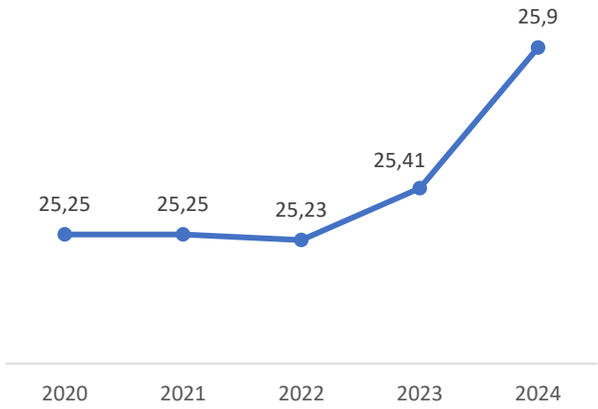

Gambar 2.128 Rata-Rata Usia Kawin Wanita
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Data rata-rata usia kawin wanita dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan di tahun-tahun akhir. Pada 2020 hingga 2022, usia kawin rata-rata berada di kisaran 25,2 tahun. Kemudian, terjadi peningkatan menjadi 25,41 tahun pada 2023 dan naik signifikan menjadi 25,9 tahun pada 2024. Tren ini mengindikasikan adanya pergeseran ke arah usia kawin yang lebih matang, yang dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas keluarga, penurunan angka kelahiran usia muda, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang kependudukan.

H. Urusan Perhubungan

1. Load Factor

Load factor merupakan indikator efisiensi pemanfaatan kapasitas angkutan, khususnya dalam sektor transportasi. *Load factor* yang tinggi menunjukkan bahwa kapasitas angkutan—baik kendaraan umum maupun pesawat, kapal, dan kereta—digunakan secara optimal oleh penumpang atau barang, sehingga biaya operasional per unit menjadi lebih efisien. Sebaliknya, *load factor* yang rendah menandakan adanya kelebihan kapasitas atau rendahnya tingkat okupansi, yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan menurunkan produktivitas. Dalam konteks perencanaan transportasi, *load factor* menjadi acuan penting untuk evaluasi kinerja layanan serta pengambilan keputusan terkait pengembangan atau pengurangan rute dan armada.

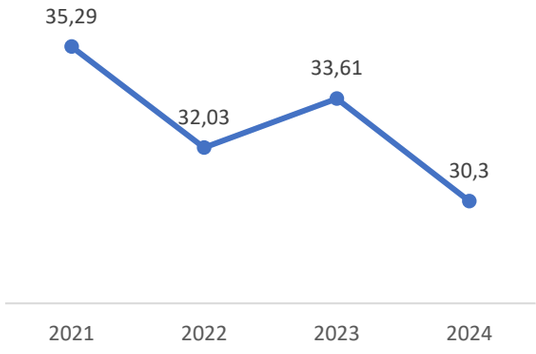

Gambar 2.129 *Load Factor*
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang

Nilai *load factor* dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 35,29 dan yang terendah pada tahun 2024 sebesar 30,3. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pemanfaatan kapasitas angkutan secara umum belum optimal, sehingga diperlukan evaluasi terhadap efisiensi operasional sistem transportasi, baik dari sisi rute, frekuensi, maupun kebutuhan pengguna jasa.

2. Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan

Transportasi umum merupakan salah satu elemen kunci dalam mewujudkan mobilitas perkotaan yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Tingginya persentase penggunaan moda transportasi umum di kawasan perkotaan tidak hanya mencerminkan kemudahan akses dan kualitas layanan, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemacetan, polusi udara, serta ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Oleh karena itu, pemantauan terhadap tingkat penggunaan transportasi umum menjadi indikator strategis dalam mengevaluasi kinerja sistem transportasi sekaligus merumuskan kebijakan pembangunan kota yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

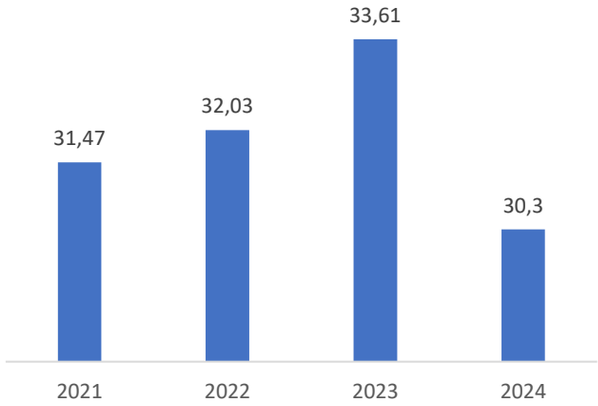

Gambar 2.130 Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang

Penurunan di tahun 2024 mengindikasikan adanya penurunan minat atau kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi umum, yang bisa disebabkan oleh faktor kenyamanan, keterjangkauan, ketepatan waktu, atau bersaingnya kendaraan pribadi dan transportasi online. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan, integrasi rute, serta strategi promosi penggunaan transportasi umum, agar minat masyarakat kembali meningkat dan tujuan mobilitas berkelanjutan di perkotaan dapat tercapai.

3. V/C *Ratio*

V/C *Ratio* merupakan Perbandingan dari Volume Lalu Lintas dibagi dengan Kapasitas Jalan. Dengan perhitungan jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu dibandingkan dengan kapasitas jalan.

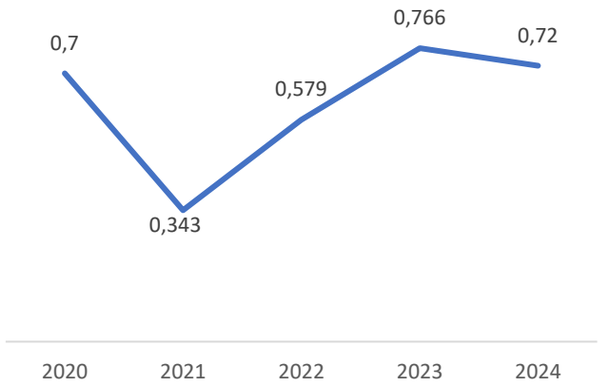

Gambar 2.131 V/C *Ratio*
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang

Rasio volume terhadap kapasitas (V/C *Ratio*) dalam grafik menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas jalan yang berada dalam rentang masih terkendali. Nilai-nilai yang ditampilkan menandakan kondisi lalu lintas relatif lancar hingga mendekati ambang padat, yang mencerminkan efisiensi jaringan jalan secara umum masih dapat dipertahankan.

I. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) mencerminkan partisipasi aktif warga dalam penyebaran informasi dan keterlibatan dalam pembangunan berbasis komunitas. Semakin banyak jumlah KIM, menunjukkan semakin kuatnya jaringan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya akses informasi yang akurat dan bermanfaat di tingkat lokal.

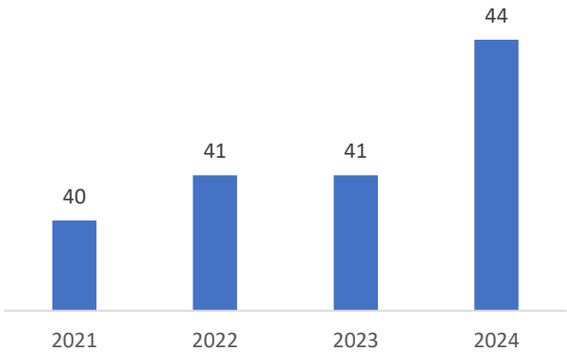

Gambar 2.132 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Berdasarkan grafik, jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menunjukkan tren stabil dan meningkat secara perlahan dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperkuat peran masyarakat dalam penyebaran informasi publik dan partisipasi pembangunan. Peningkatan ini menjadi indikator positif terhadap tumbuhnya literasi informasi dan komunikasi berbasis komunitas di daerah.

2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan Layanan Telekomunikasi adalah indikator yang menunjukkan persentase wilayah atau populasi yang memiliki akses ke layanan telekomunikasi, seperti telepon, internet, dan jaringan komunikasi lainnya. Indikator ini penting untuk menilai infrastruktur telekomunikasi di suatu wilayah dan memahami sejauh mana masyarakat dapat terhubung dan berkomunikasi secara efektif. Akses yang luas dan merata terhadap layanan telekomunikasi merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sosial.

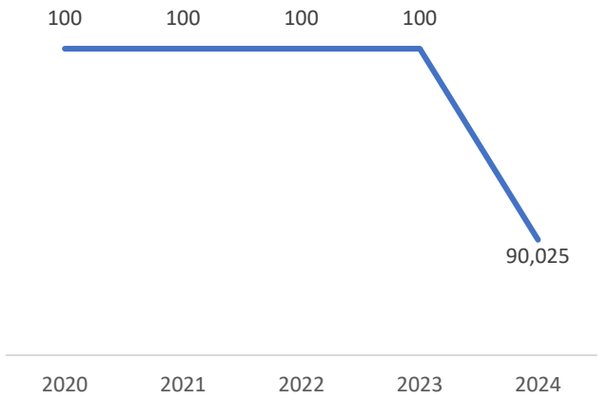

Gambar 2.133 Cakupan Layanan Telekomunikasi
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Berdasarkan grafik, cakupan layanan telekomunikasi menunjukkan capaian maksimal sebesar 100% selama periode 2020 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh wilayah telah terlayani oleh infrastruktur telekomunikasi secara penuh pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan cakupan menjadi sekitar 90%. Secara umum, capaian ini tetap menunjukkan tingkat akses layanan yang tinggi, namun penurunan di tahun terakhir perlu menjadi perhatian dalam menjaga pemerataan akses komunikasi.

3. Persentase Penduduk yang Menggunaan HP/Telepon

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang memiliki dan menggunakan telepon seluler atau telepon tetap. Indikator ini penting untuk menilai tingkat aksesibilitas dan penggunaan teknologi komunikasi di kalangan masyarakat. Penggunaan HP/telepon yang luas mencerminkan kemajuan dalam infrastruktur telekomunikasi dan kemampuan masyarakat untuk terhubung, berkomunikasi, dan mengakses informasi secara efektif.

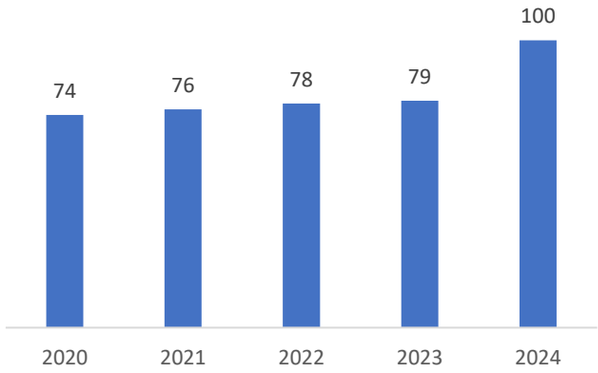

Gambar 2.134 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Berdasarkan grafik, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, mencapai 100% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan tingkat adopsi teknologi komunikasi yang sangat tinggi di masyarakat, yang dapat mendukung konektivitas, akses informasi, dan peningkatan inklusi digital secara merata.

4. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Proporsi rumah tangga dengan akses internet adalah indikator yang menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses ke internet. Indikator ini penting untuk menilai tingkat penetrasi dan penggunaan internet di kalangan masyarakat. Akses internet yang luas dan merata adalah kunci untuk mendukung berbagai aspek kehidupan modern, termasuk pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan komunikasi.

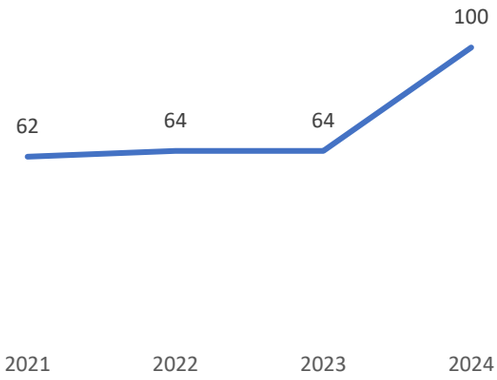

Gambar 2.135 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet (%)
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Proporsi rumah tangga dengan akses internet mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan pemerataan infrastruktur digital dan meningkatnya literasi teknologi yang mendukung akses informasi, pendidikan, dan layanan publik secara daring.

5. Proporsi Rumah Tangga yang Memilki Komputer Pribadi

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi adalah indikator yang menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki setidaknya satu komputer pribadi. Indikator ini penting untuk menilai

tingkat penetrasi teknologi komputer di kalangan masyarakat. Kepemilikan komputer pribadi mendukung akses ke informasi, pendidikan, pekerjaan, dan layanan digital lainnya yang esensial dalam kehidupan modern.

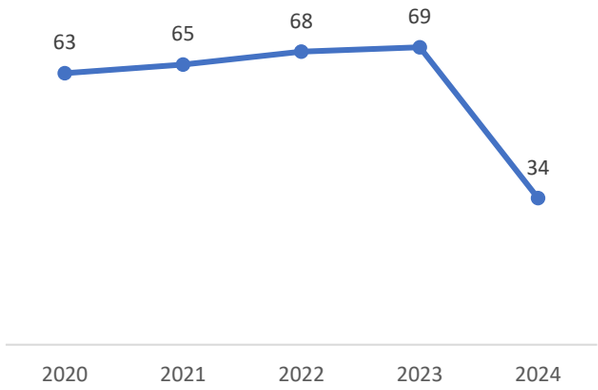

Gambar 2.136 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Data menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi relatif stabil pada periode 2020–2023, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2024. Hal ini dapat mencerminkan pergeseran preferensi teknologi, seperti bergeser ke penggunaan perangkat mobile, atau adanya kendala aksesibilitas ekonomi terhadap perangkat komputer.

J. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif adalah indikator yang menunjukkan proporsi koperasi yang beroperasi secara aktif dibandingkan dengan total jumlah koperasi yang terdaftar. Koperasi aktif adalah koperasi yang secara rutin melakukan kegiatan ekonomi, rapat anggota, dan pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Indikator ini penting untuk menilai kesehatan dan keberlangsungan gerakan koperasi, yang berperan signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor ekonomi informal.

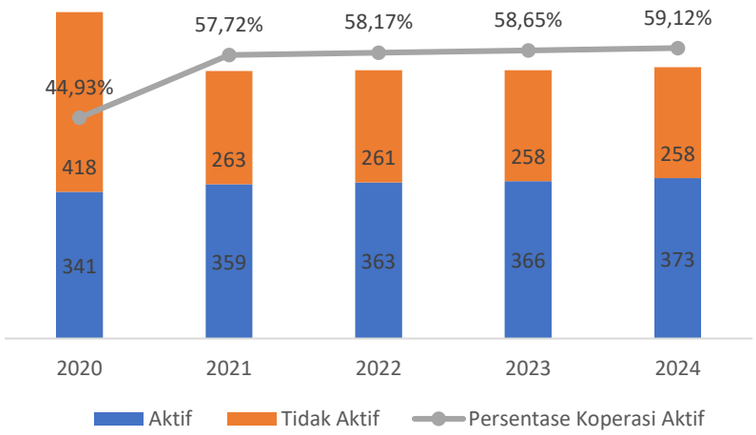

Gambar 2.137 Persentase Koperasi Aktif

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Data persentase koperasi aktif menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan peningkatan keberfungsian dan keberlanjutan kelembagaan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. Angka ini mengindikasikan perbaikan dalam tata kelola, partisipasi anggota, serta kemungkinan dukungan kebijakan pemerintah terhadap penguatan koperasi.

Jumlah koperasi aktif di Kota Malang menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, peningkatan jumlah koperasi aktif mencerminkan adanya perbaikan manajemen, pembinaan, dan pendampingan dari pemerintah maupun lembaga terkait dalam upaya menghidupkan kembali koperasi yang sebelumnya tidak aktif. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan koperasi sebagai sarana ekonomi bersama juga semakin baik, seiring dengan meningkatnya dukungan kebijakan yang mempermudah pengelolaan dan akses permodalan koperasi. Di sisi lain, penurunan jumlah koperasi tidak aktif disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, adanya reaktivasi koperasi yang sebelumnya vakum setelah dilakukan pembinaan dan restrukturisasi. Kedua, adanya pencabutan badan hukum atau pembubaran terhadap koperasi yang sudah lama tidak beroperasi secara nyata.

2. Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas

Persentase usaha mikro yang naik kelas adalah indikator yang menunjukkan proporsi usaha mikro yang berhasil meningkatkan skala operasional mereka menjadi usaha kecil atau menengah dalam periode tertentu. Indikator ini penting untuk menilai dinamika pertumbuhan usaha mikro dan efektivitas program pendukung yang dirancang untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah. Usaha mikro yang naik kelas menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan kapasitas, produktivitas, dan daya saing.

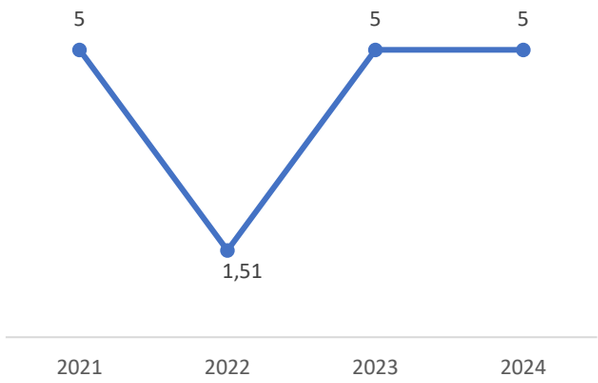

Gambar 2.138 Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Data persentase usaha mikro yang naik kelas menunjukkan capaian yang cukup stabil di angka 5% pada tahun 2021, 2023, dan 2024, meskipun sempat menurun signifikan pada 2022. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya konsistensi dalam pembinaan usaha mikro, namun juga mengisyaratkan perlunya upaya

yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar lebih banyak pelaku usaha dapat berkembang ke skala usaha yang lebih tinggi.

3. Persentase Koperasi Sehat yang Modern

Persentase koperasi sehat menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kondisi kelembagaan koperasi di suatu daerah. Di Kota Malang, keberadaan koperasi sehat mencerminkan kemampuan koperasi dalam mengelola usaha secara profesional, memenuhi kewajiban administrasi, menjalankan prinsip-prinsip koperasi, serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Upaya meningkatkan jumlah koperasi sehat terus dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, dan pendampingan agar koperasi mampu beroperasi secara efisien, transparan, dan akuntabel.

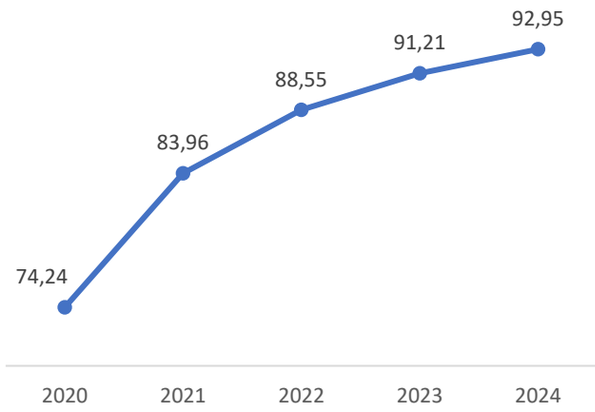

Gambar 2.139 Persentase Koperasi Sehat yang Modern (%)
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Data persentase koperasi sehat di Kota Malang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini menggambarkan perbaikan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi, termasuk peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta layanan kepada anggota yang lebih optimal. Dinamika positif ini didorong oleh upaya pembinaan, pengawasan, dan pendampingan yang intensif dari pemerintah daerah, serta meningkatnya kesadaran pengurus dan anggota koperasi terhadap pentingnya tata kelola yang baik. Selain itu, adanya program pelatihan, digitalisasi, dan fasilitasi akses permodalan juga turut memperkuat kesehatan koperasi di Kota Malang.

Adanya peningkatan tren persentase koperasi sehat yang modern diantaranya karena Pemerintah Kota Malang telah melakukan pembinaan yang intensif kepada koperasi aktif di Kota Malang melalui kegiatan klinik koperasi, penilaian Kesehatan koperasi KSP/USP, pembinaan kepatuhan koperasi, fasilitas pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi dan fasilitsi pengurusan izin usaha koperasi.

K. Urusan Penanaman Modal

1. Realisasi Investasi

Tingkat realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah indikator yang menunjukkan jumlah investasi yang direalisasikan oleh investor domestik dalam periode tertentu. Indikator ini penting untuk menilai kesehatan ekonomi domestik,

daya tarik investasi, dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi dalam negeri. Realisasi investasi yang tinggi menunjukkan adanya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi dan stabilitas bisnis di suatu negara.

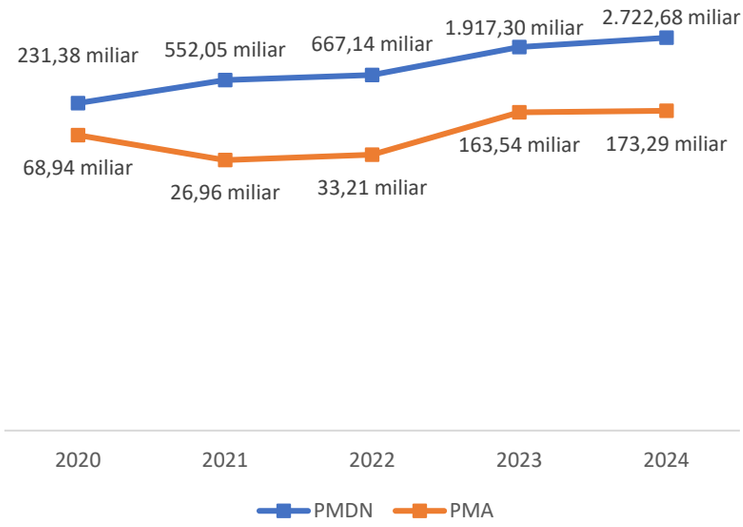

Gambar 2.140 Jumlah Nilai Investasi (Rp)
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

Realisasi investasi di Kota Malang selama 2020–2023 menunjukkan tren pertumbuhan positif, terutama pada investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Nilai PMDN terus meningkat dari Rp231,38 miliar pada 2020 menjadi Rp2.722,68 miliar pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan kepercayaan pelaku usaha domestik terhadap iklim investasi di daerah. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami fluktuasi namun menunjukkan peningkatan signifikan pada 2024, dengan capaian Rp173,29 miliar. Secara umum, kinerja investasi ini menunjukkan penguatan aktivitas ekonomi lokal dan potensi perluasan lapangan kerja di Kota Malang.

L. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1. Tingkat Partisipasi Berolahraga Masyarakat

Tingkat partisipasi berolahraga masyarakat adalah indikator yang menunjukkan persentase penduduk yang secara rutin terlibat dalam kegiatan olahraga. Indikator ini penting untuk menilai kesadaran dan minat masyarakat terhadap olahraga serta untuk mengukur dampak program promosi kesehatan dan kebugaran. Partisipasi dalam olahraga berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan mental, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Gambaran umum partisipasi berolahraga masyarakat di Kota Malang pada tahun 2024 sebesar 7,20 persen meningkat dibanding partisipasi berolahraga masyarakat pada tahun 2023 yang sebesar 4,23 persen.

2. Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga

Persentase cakupan pembinaan olahraga adalah indikator yang menunjukkan persentase area atau populasi yang mendapatkan akses ke program pembinaan olahraga. Pembinaan olahraga mencakup pelatihan, fasilitas, dan dukungan lain yang diberikan untuk mengembangkan kemampuan atlet dan meningkatkan

partisipasi dalam olahraga. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana program-program olahraga didistribusikan dan diimplementasikan di berbagai wilayah.

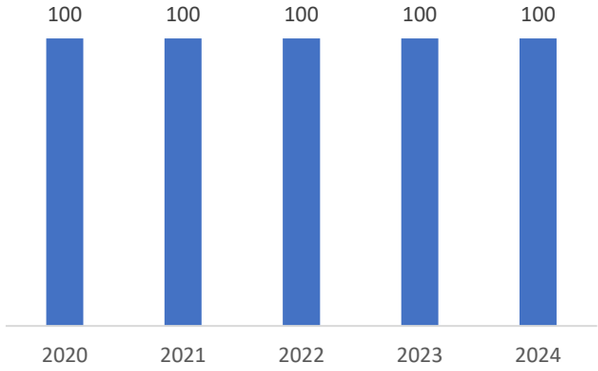

Gambar 2.141 Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

Capaian persentase cakupan pembinaan olahraga sebesar 100% selama periode 2020–2024 menunjukkan komitmen optimal dalam penyelenggaraan pembinaan olahraga secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh sasaran yang direncanakan dalam program pembinaan telah tercapai secara penuh, baik dalam aspek fasilitasi, partisipasi, maupun pembinaan atlet potensial di berbagai cabang olahraga.

3. Persentase Wirausaha Muda

Persentase wirausaha muda adalah indikator yang menunjukkan banyaknya individu-individu atau kelompok-kelompok berusia muda dalam rentang usia 15 sampai 35 tahun yang secara aktif menjalankan usaha sendiri atau membangun bisnis, baik skala mikro, kecil, menengah (UMKM), maupun startup, dengan tujuan menciptakan nilai ekonomi dan/atau sosial. Mereka adalah pelaku ekonomi yang inovatif, kreatif, dan berani mengambil risiko untuk menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, dan nilai tambah bagi masyarakat.

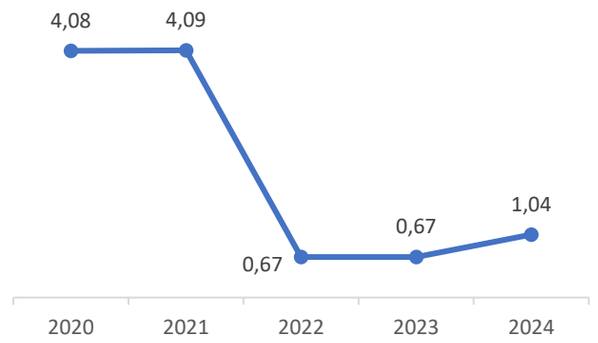

Gambar 2.142 Persentase Wirausaha Muda
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

Terjadi penurunan sangat tajam dari 4,09% pada 2021 menjadi hanya 0,67% pada 2022, penurunan sebesar lebih dari 3,4 persen poin ini menunjukkan adanya gangguan besar terhadap ekosistem kewirausahaan muda hal ini disebabkan oleh dampak lanjutan dari

pandemi COVID-19, termasuk keterbatasan akses modal, pelatihan, dan pasar.

4. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda adalah seluruh aspek yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan atlet usia dini hingga remaja agar dapat mencapai prestasi optimal. Pembinaan ini mencakup proses identifikasi bakat, pelatihan teknik dan fisik, pembinaan mental, serta dukungan pendidikan dan kesejahteraan.

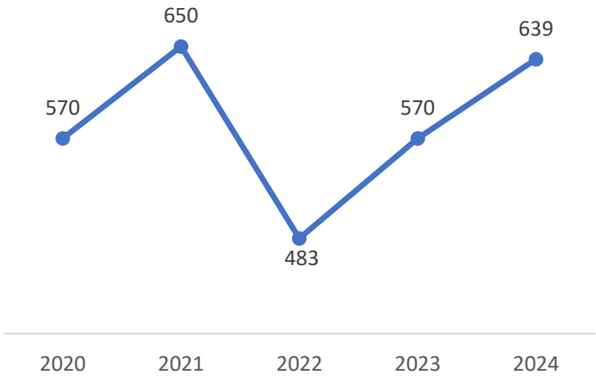

Gambar 2.143 Cakupan Pembinaan Atlet Muda
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

Data cakupan pembinaan atlet muda di Kota Malang pada periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif namun tetap berada pada angka yang relatif tinggi. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan atlet muda belum sepenuhnya stabil, kemungkinan dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, program pembinaan yang berjalan, minat partisipasi atlet muda, serta adanya agenda kompetisi yang mendorong intensitas pembinaan.

5. Jumlah Atlet Berprestasi

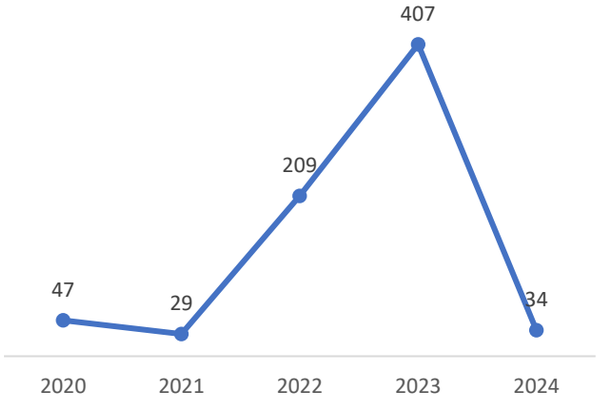

Gambar 2.144 Jumlah Atlet Berprestasi
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

Data jumlah atlet berprestasi di Kota Malang selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. ini mengindikasikan bahwa capaian prestasi atlet sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti intensitas pembinaan, ketersediaan event atau kompetisi yang diikuti, serta dukungan anggaran dan fasilitas yang tersedia di setiap tahun.

6. Jumlah Prestasi Olahraga

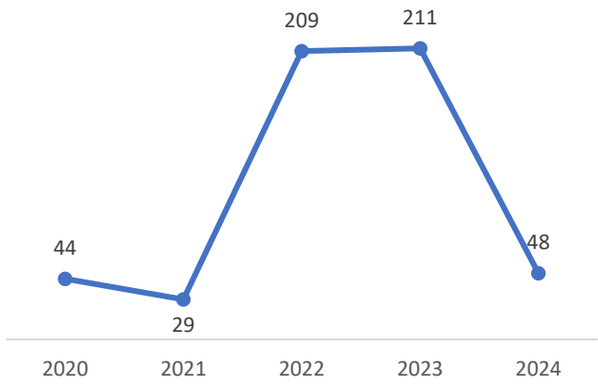

Gambar 2.145 Jumlah Prestasi Olahraga
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

Capaian prestasi olahraga sangat dipengaruhi oleh intensitas pembinaan, dukungan fasilitas, serta partisipasi atlet dalam berbagai kompetisi. Puncak prestasi pada 2022–2023 kemungkinan besar didorong oleh peningkatan kualitas pembinaan, kesiapan atlet, serta lebih banyaknya ajang kompetisi yang diikuti.

M. Urusan Statistik

1. Indeks Pembangunan Statistik

Salah satu tujuan dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data indonesia dan tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia. Tingkat kematangan ini diukur melalui nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang terdiri dari 5 domain yakni prinsip satu data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional. Nilai IPS Kota Malang masuk dalam predikat baik, meskipun mengalami penurunan dari 3,35 pada tahun 2023 menjadi 3,12 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh turunnya nilai pada hampir semua domain, kecuali domain kualitas data yang mengalami peningkatan.

N. Urusan Persandian

1. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Tingkat keamanan informasi pemerintah mengacu pada sejauh mana instansi pemerintah mampu melindungi data dan sistem informasi dari ancaman siber, kebocoran data, atau penyalahgunaan akses. Tingkat keamanan informasi pemerintah Kota Malang pada Tahun 2024 mencapai 60% yang menunjukkan progres positif, tetapi masih belum cukup untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, karena masih terdapat celah sebesar 40%. Dengan langkah strategis seperti peningkatan kapasitas SDM serta adopsi teknologi dan standar keamanan yang lebih baik, dapat membantu meningkatkan keamanan informasi pemerintah.

2. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah adalah indikator yang menunjukkan proporsi perangkat daerah yang menerapkan enkripsi atau sandi dalam komunikasi mereka. Indikator ini penting untuk menilai tingkat keamanan informasi dalam komunikasi antar

perangkat daerah, yang berperan dalam melindungi data sensitif dan memastikan kerahasiaan informasi. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah masih berada di bawah 50%, artinya sebagian besar Perangkat Daerah masih belum memiliki keamanan siber yang mumpuni, sehingga rawan terjadi peretasan. Meskipun begitu, penggunaan sandi di lingkungan pemerintah Kota Malang menunjukkan perkembangan yang lambat namun stabil. Pada tahun 2021 dan 2022, hanya 21,43% perangkat daerah yang menggunakan enkripsi dalam komunikasi mereka. Angka ini kemudian meningkat menjadi 32,14% pada tahun 2023 dan bertahan di level yang sama hingga 2024.

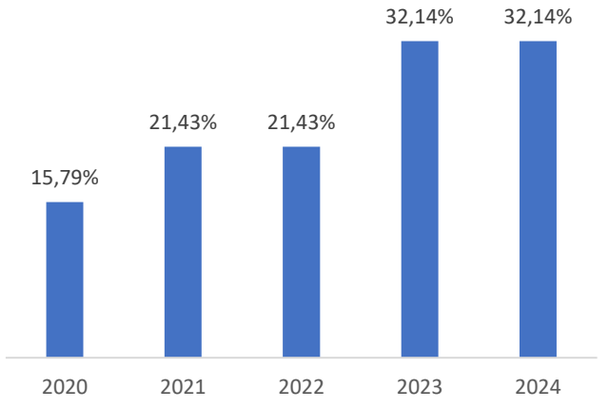

Gambar 2.146 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

O. Urusan Kebudayaan

1. Persentase Kelestarian Keanekaragaman dan Kekayaan Budaya yang Dibina

Kota Malang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam pelestarian keanekaragaman budaya, dimana persentase kelestarian budaya yang berhasil dibina meningkat signifikan dari 41% pada periode 2020-2023 menjadi 75% di tahun 2024. Lonjakan yang terjadi pada tahun 2024, menandakan keberhasilan berbagai upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat. Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor kunci seperti penyelenggaraan event-event kebudayaan, penguatan kolaborasi dengan komunitas budaya, penyempurnaan regulasi pendukung, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan warisan budaya.

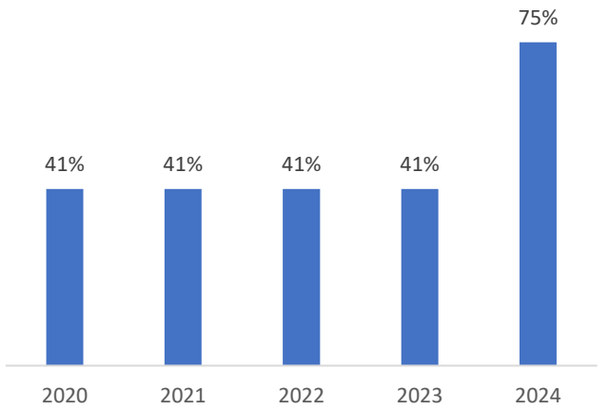

Gambar 2.147 Persentase Kelestarian Keanekaragaman dan Kekayaan Budaya Yang Dibina
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

2. Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan

Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Malang tahun 2020 hingga 2024 mencapai 100%. Artinya, seluruh cagar budaya yang terdaftar di kota tersebut telah mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pemanfaatan secara optimal. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen kuat pemerintah daerah yang didukung oleh regulasi khusus, serta kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, komunitas budaya, dan masyarakat umum. Pencapaian ini memiliki makna strategis bagi identitas kota, di mana bangunan-bangunan bersejarah tidak hanya terpelihara fisiknya tetapi juga hidup melalui berbagai aktivitas kebudayaan dan pariwisata. Beberapa faktor kunci yang mendorong keberhasilan ini antara lain penguatan pemantauan, program restorasi berbasis keaslian, serta transformasi cagar budaya menjadi ruang publik yang dinamis.

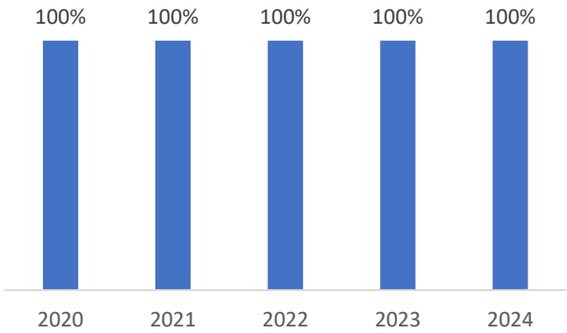

Gambar 2.148 Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

3. Jumlah Kesenian dan Sanggar

Kota Malang memiliki kekayaan budaya yang tercermin dari banyaknya jenis kesenian yang berkembang di masyarakat serta jumlah sanggar yang menjadi wadah pelestarian dan pengembangan seni. Jumlah kesenian yang ada menggambarkan keragaman tradisi, kreativitas, dan ekspresi budaya lokal, sementara keberadaan sanggar seni menunjukkan komitmen masyarakat dalam menjaga keberlanjutan dan regenerasi seni tradisional maupun kontemporer.

Melalui berbagai kesenian dan sanggar ini, budaya daerah tetap hidup dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, sekaligus menjadi daya tarik wisata dan memperkuat identitas Kota Malang sebagai kota budaya.

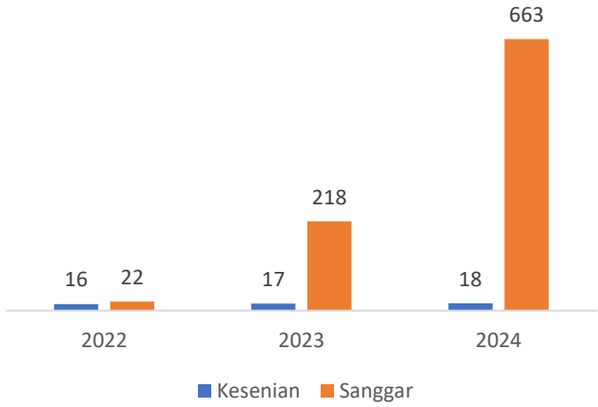

Gambar 2.149 Jumlah Kesenian dan Sanggar
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Jumlah kesenian di Kota Malang mengalami peningkatan bertahap dari 16 pada tahun 2022 menjadi 18 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah sanggar atau kelompok kesenian mengalami lonjakan signifikan, dari hanya 22 pada tahun 2022, menjadi 218 pada 2023, dan melonjak drastis menjadi 663 pada 2024. Di samping itu, jumlah sanggar tersebut telah dilakukan pembinaan seluruhnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Peningkatan kecil pada jumlah kesenian menunjukkan bahwa jenis-jenis kesenian yang ada relatif stabil, dengan tambahan beberapa kesenian baru yang berhasil diidentifikasi atau dikembangkan. Sebaliknya, jumlah sanggar menunjukkan dinamika yang sangat besar, disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya wadah pelatihan dan pelestarian seni, adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk fasilitasi, pendataan yang lebih baik, atau insentif bagi komunitas seni untuk membentuk sanggar secara resmi.

4. Cagar Budaya dan Cagar Situs Budaya

Pelestarian warisan sejarah dan budaya merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Cagar budaya dan situs cagar budaya menjadi wujud nyata dari upaya melindungi nilai-nilai sejarah, arsitektur, serta identitas lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Data mengenai jumlah cagar budaya dan situs cagar budaya memberikan gambaran tentang sejauh mana aset-aset bersejarah di Kota Malang telah diidentifikasi, didokumentasikan, dan dijaga keberadaannya.

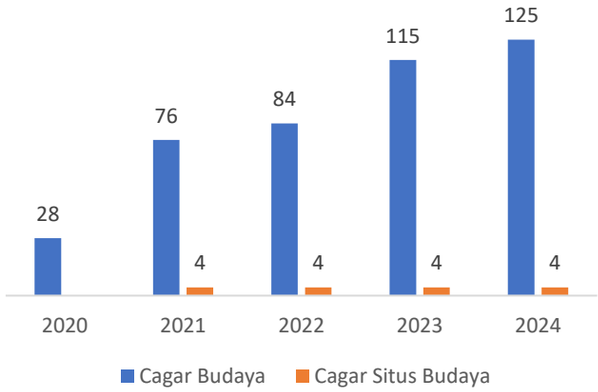

Gambar 2.150 Jumlah Cagar Budaya dan Cagar Situs Budaya
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Jumlah cagar budaya di Kota Malang menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menetapkan bangunan atau lokasi bersejarah sebagai cagar budaya. Hal ini juga menunjukkan kesadaran yang semakin baik terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya lokal.

Sementara itu, jumlah cagar situs budaya relatif stabil sebanyak 4 situs sejak tahun 2021 hingga 2024, setelah tidak tercatat pada tahun 2020. Stabilitas ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan jumlah situs yang memenuhi kriteria sebagai cagar situs budaya, serta proses penetapan yang lebih ketat dan memerlukan kajian mendalam.

P. Urusan Perpustakaan

1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Indikator penilaian tingkat kegemaran membaca meliputi frekuensi membaca masyarakat setiap minggu, jumlah bahan bacaan per triwulan, durasi membaca per hari, frekuensi akses internet per minggu, dan durasi akses internet per hari. Kota Malang menunjukkan tren positif yang konsisten dalam tingkat kegemaran membaca masyarakat selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, indeks kegemaran membaca berada di posisi ke-22 Jawa Timur dengan angka 65,6, kemudian meningkat menjadi 70,47 di tahun 2023, dan melonjak signifikan ke 78,7 di tahun 2024 dan menjadi tertinggi kedua Jawa Timur. Capaian ini tidak terlepas dari optimalisasi mobil baca yang berkeliling ke sejumlah rumah pintar, layanan antar buku dengan sepeda motor dan program Gerakan Literasi Masyarakat Membaca (Gelis Maca).

Inovasi Gelis Maca dijalankan dengan mengoptimalkan pengelolaan rumah pintar yang sudah terbentuk, bantuan bacaan bermutu dari Perpustakaan Nasional pada rumah pintar, penggunaan buku digital pada Rumah Pintar (Sosialisas i-Pusnas dan Pemasangan QR-Code Pusat Baca Digido), pendampingan dari komunitas literasi pada pemustaka baru di rumah pintar, workshop menulis bagi pemustaka di rumah pintar, dan kolaborasi dengan mitra eksternal (Perguruan Tinggi dalam membuat kajian hasil pendampingan dari Komunitas Literasi IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) dalam bantuan cetak buku workshop penulisan.

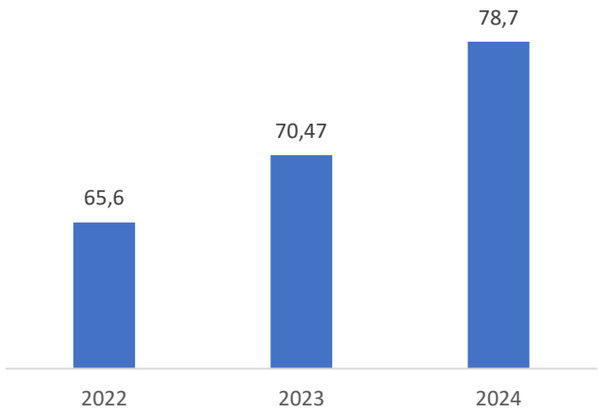

Gambar 2.151 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

2. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Bulan

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per bulan adalah indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah orang yang mengunjungi perpustakaan setiap bulan dalam periode tertentu. Indikator ini penting untuk menilai tingkat penggunaan dan aksesibilitas perpustakaan oleh masyarakat, serta untuk memahami dampak dari program-program perpustakaan dan inisiatif promosi literasi.

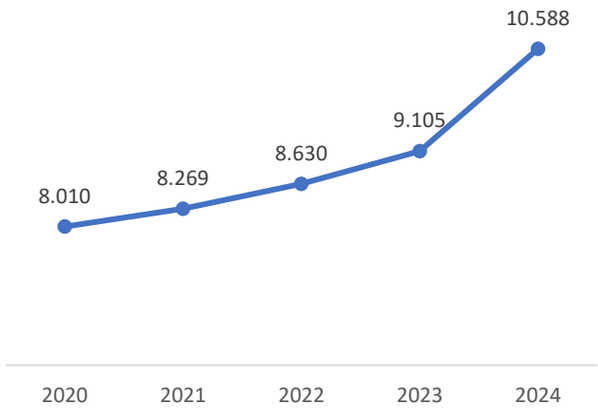

Gambar 2.152 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Bulan
Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per bulan menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 hingga 2024, dari 8.010 menjadi 10.588 orang. Kondisi ini mencerminkan peningkatan minat baca dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan oleh masyarakat. Kinerja ini menjadi indikasi positif terhadap upaya pengembangan literasi dan layanan informasi publik yang semakin efektif.

3. Jumlah Perpustakaan dan Koleksi

Perpustakaan memiliki peran strategis sebagai pusat pembelajaran, sumber pengetahuan, dan sarana meningkatkan literasi masyarakat. Jumlah perpustakaan dan koleksi yang dimiliki menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana akses masyarakat terhadap informasi dan bahan bacaan tersedia dan terlayani dengan baik. Keberadaan perpustakaan yang memadai, disertai koleksi buku dan bahan pustaka yang terus bertambah dan

terbarukan, diharapkan kualitas pendidikan, budaya literasi, serta wawasan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

Gambar 2.153 Jumlah Perpustakaan dan Koleksi
Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Jumlah perpustakaan di Kota Malang mengalami tren kenaikan selama periode 2020–2024, dari 382 unit pada tahun 2020 menjadi 415 unit pada tahun 2024. Peningkatan yang signifikan terlihat pada tahun 2024, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya akses literasi dan dorongan pemerintah untuk memperluas layanan informasi kepada masyarakat.

Sementara itu, jumlah koleksi bahan pustaka juga mengalami peningkatan yang cukup konsisten setiap tahunnya. Lonjakan jumlah koleksi pada 2024 menunjukkan adanya upaya nyata untuk melengkapi dan memperbarui bahan bacaan, baik melalui pengadaan baru maupun digitalisasi koleksi untuk memperkaya sumber informasi.

Q. Urusan Kearsipan

1. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai hasil pengawasan kearsipan mencerminkan tingkat kepatuhan instansi terhadap standar pengelolaan arsip. Pencapaian nilai yang tinggi menandakan bahwa tata kelola arsip telah dilakukan secara tertib, teratur, dan sesuai ketentuan, mendukung akuntabilitas serta keterbukaan informasi publik. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dalam aspek pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyelamatan arsip agar mendukung kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien.

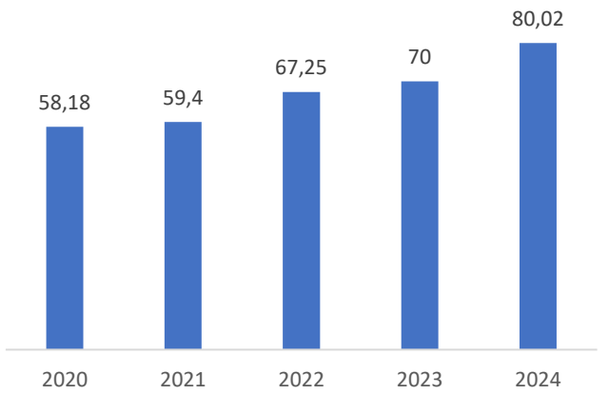

Gambar 2.154 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Nilai hasil pengawasan kearsipan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 58,18 pada tahun 2020 menjadi 80,02 pada tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan arsip, baik dari sisi penyusunan, pemeliharaan, maupun penyelamatan arsip. Peningkatan ini mencerminkan komitmen yang lebih kuat terhadap kepatuhan standar kearsipan nasional serta dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas administrasi pemerintahan.

2. Jumlah Pustakawan dan Arsiparis

Pustakawan dan arsiparis merupakan sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam pengelolaan informasi, pengetahuan, dan arsip di suatu daerah. Jumlah pustakawan dan arsiparis yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, menjadi indikator penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Kota Malang.

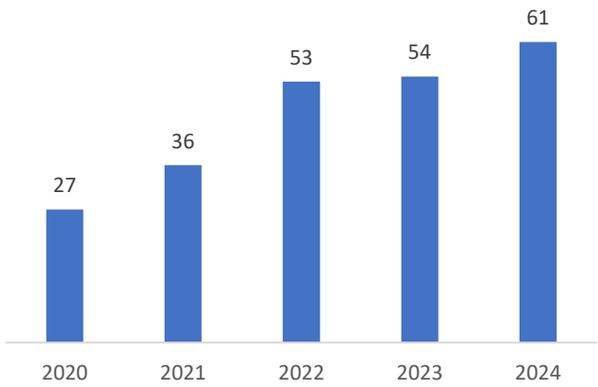

Gambar 2.155 Jumlah Pustakawan dan Arsiparis
Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Jumlah pustakawan dan arsiparis di Kota Malang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perhatian Pemerintah Kota Malang terhadap kebutuhan tenaga profesional di bidang pengelolaan informasi, perpustakaan, dan arsip. Dinamika kenaikan jumlah pustakawan dan arsiparis ini kemungkinan didorong kebutuhan untuk menjaga kualitas pengelolaan dokumen dan arsip daerah yang semakin kompleks.

2.1.4.6 Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Angka Konsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan (Kg/kapita) adalah indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi per kapita dalam satu tahun. Indikator ini penting untuk menilai pola konsumsi pangan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan konsumsi protein hewani yang esensial untuk kesehatan. Tingkat konsumsi ikan yang tinggi umumnya menunjukkan pola makan yang lebih sehat dan kesadaran gizi yang lebih baik di kalangan masyarakat.

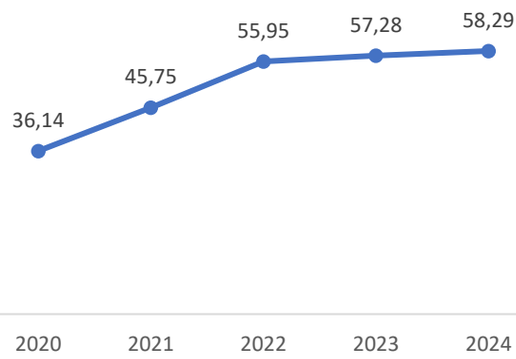

Gambar 2.156 Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang

Angka konsumsi ikan di Kota Malang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, konsumsi ikan tercatat sebesar 36,14 kg/kapita/tahun dan terus meningkat menjadi 58,29 kg/kapita/tahun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan program promosi konsumsi ikan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang berkualitas. Konsistensi pertumbuhan konsumsi juga memperlihatkan adanya perbaikan dalam aksesibilitas, distribusi, dan ketersediaan ikan di tingkat lokal. Mekanisme penghitungan angka konsumsi ikan akan mengalami perubahan pada tahun berikutnya, sehingga realisasi angka konsmumsi ikan pada tahun 2024 jika dilakukan konversi mekanisme penghitungan yang baru menjadi 17,3 kg/kapita/tahun.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya (ton) adalah indikator yang menunjukkan jumlah total hasil produksi ikan yang dibudidayakan dalam satu tahun. Indikator ini penting untuk menilai perkembangan sektor perikanan budidaya, yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat perikanan, dan penyediaan protein hewani.

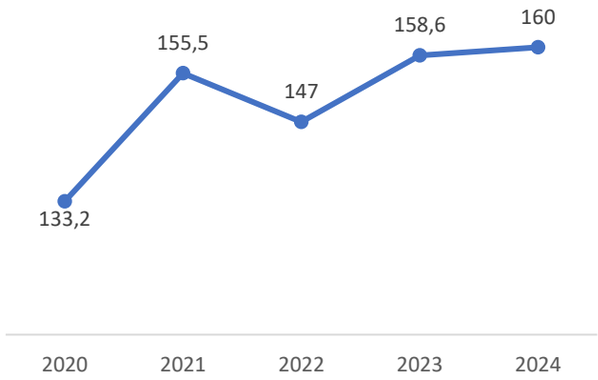

Gambar 2.157 Produksi Perikanan Budidaya (ton)
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang

Data produksi perikanan budidaya menunjukkan tren yang positif dan relatif stabil, dengan peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi, efektivitas pembinaan sektor perikanan, serta dukungan terhadap ketahanan pangan berbasis perairan. Produksi yang konsisten ini juga menjadi indikator penting bagi pertumbuhan sektor ekonomi kelautan dan perikanan.

B. Urusan Pariwisata

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan adalah indikator yang menunjukkan jumlah total kunjungan wisatawan ke suatu daerah dalam periode tertentu. Indikator ini penting untuk menilai daya tarik wisata suatu daerah, efektivitas promosi pariwisata, serta dampaknya terhadap perekonomian lokal. Jumlah kunjungan wisatawan mencerminkan minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, yang dapat mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata dan penciptaan lapangan kerja.

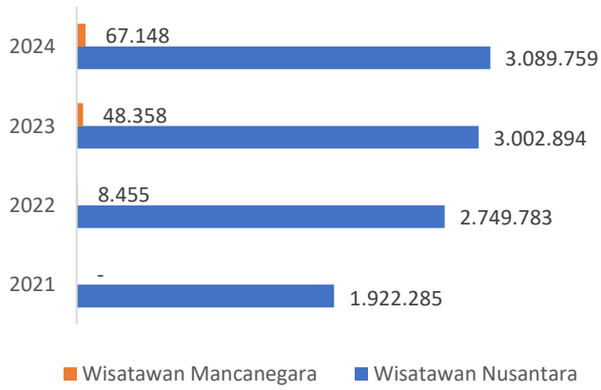

Gambar 2.158 Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

Jumlah kunjungan wisatawan di Kota Malang, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara, menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2021–2024. Peningkatan fasilitas, promosi pariwisata, dan pelonggaran pembatasan perjalanan juga turut mendorong naiknya kunjungan wisatawan. Lonjakan wisatawan pada 2022–2024 salah satunya disebabkan kawasan strategis di kayutangan *heritage*

yang didukung aktivasi beberapa kegiatan pada kawasan tersebut sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan.

2. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata (kawasan) adalah indikator yang menunjukkan jumlah total kawasan yang diidentifikasi dan dikembangkan sebagai destinasi pariwisata dalam suatu wilayah. Indikator ini penting untuk menilai perkembangan sektor pariwisata dan upaya pemerintah atau lembaga terkait dalam memperluas dan meningkatkan destinasi wisata guna menarik lebih banyak wisatawan.

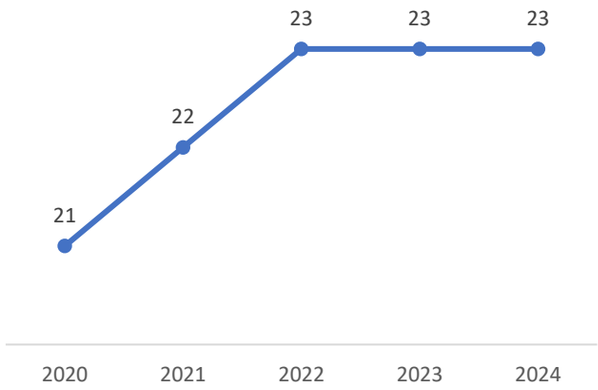

Gambar 2.159 Kawasan Pariwisata
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang

Jumlah kawasan pariwisata mengalami peningkatan pada awal periode, kemudian stabil di angka 23 kawasan sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini mencerminkan bahwa pengembangan kawasan pariwisata telah mencapai titik optimal dalam periode tersebut, dengan fokus kemungkinan bergeser pada peningkatan kualitas, promosi, dan pengelolaan destinasi yang sudah ada.

3. Pengembangan Ekonomi Kreatif

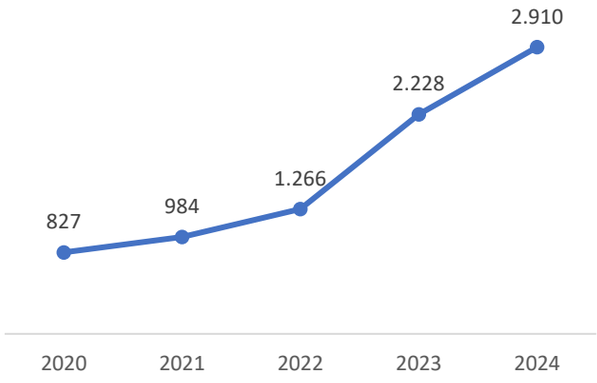

Gambar 2.160 Pengembangan Ekonomi Kreatif
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang

Tren positif pengembangan ekonomi kreatif menunjukkan bahwa ekonomi kreatif menjadi sektor strategis dalam pembangunan ekonomi lokal Kota Malang dan berpotensi besar untuk terus berkembang di masa depan. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor penting. Pertama, dukungan pemerintah daerah terhadap sektor ekonomi kreatif melalui kebijakan, pelatihan, dan fasilitasi akses pasar semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir.

Kedua, tumbuhnya kesadaran masyarakat akan potensi ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan alternatif, terutama pasca-pandemi COVID-19, mendorong lebih banyak pelaku untuk terlibat dalam sektor ini. Ketiga, kemajuan teknologi digital dan penggunaan platform online seperti media sosial, e-commerce, dan digital marketing turut memperluas jangkauan pasar bagi pelaku ekonomi kreatif di Malang. Selain itu, posisi Kota Malang sebagai kota pendidikan juga memberikan kontribusi besar dengan melahirkan generasi muda yang kreatif dan inovatif.

4. Jumlah Destinasi Tujuan Wisata

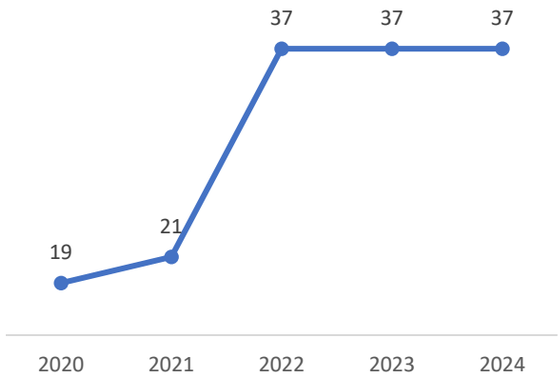

Gambar 2.161 Jumlah Destinasi Tujuan Wisata
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang

Peningkatan jumlah destinasi wisata yang signifikan terutama terjadi antara tahun 2021 dan 2022. Hal ini dapat dijelaskan oleh upaya pemerintah daerah dalam memulihkan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19 melalui berbagai inisiatif seperti revitalisasi kawasan wisata, promosi wisata digital, serta kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Selain itu, meningkatnya minat wisatawan domestik dan dukungan kebijakan yang pro-pariwisata juga turut mendorong pengembangan destinasi baru.

C. Urusan Pertanian

1. Produksi Pertanian

Produksi pertanian adalah indikator yang menunjukkan total hasil produksi dari sektor pertanian dalam satu periode tertentu, diukur dalam satuan ton atau unit produksi lainnya yang relevan. Indikator ini penting untuk menilai kinerja sektor pertanian yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.

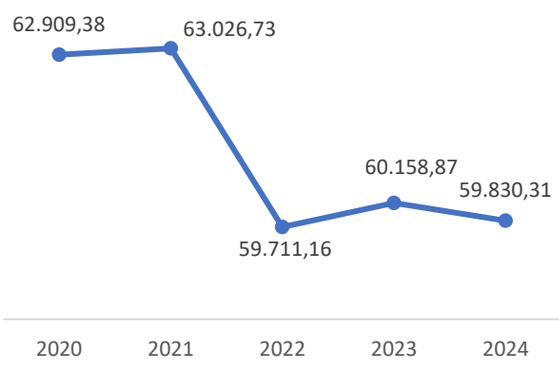

Gambar 2.162 Produksi Pertanian (ton)
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang

Produksi pertanian Kota Malang dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. Pola ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kestabilan produksi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, atau dinamika teknis di sektor pertanian. Upaya intensifikasi produksi dan perlindungan lahan pertanian menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan produktivitas di masa depan.

2. Produktivitas Pertanian

Produktivitas pertanian adalah kemampuan lahan dan faktor produksi lainnya untuk menghasilkan output (hasil panen) per satuan input (misalnya luas lahan, tenaga kerja, modal, dan sebagainya). Dengan kata lain, produktivitas pertanian menunjukkan seberapa efisien suatu usaha tani dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan produk pertanian.

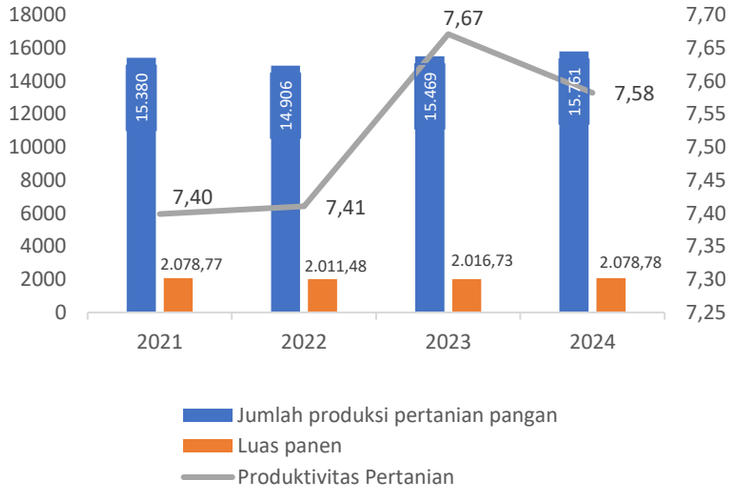

Gambar 2.163 Produktivitas Pertanian
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, terlihat adanya tren positif dalam produktivitas pertanian dari tahun 2021 hingga 2024. Jumlah produksi pertanian pangan mengalami peningkatan secara keseluruhan, meskipun sempat menurun pada tahun 2022. Produksi mencapai angka tertinggi pada tahun 2024, menunjukkan adanya pemulihan dan pertumbuhan yang konsisten setelah penurunan sebelumnya. Di sisi lain, luas panen juga menunjukkan pola serupa, yaitu mengalami penurunan pada tahun 2022, namun secara bertahap kembali meningkat sampai tahun 2024. Sementara itu, produktivitas pertanian per hektare mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023, yang merupakan titik tertinggi dalam periode ini. Meski terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024, produktivitas tetap lebih tinggi dibandingkan dua tahun pertama. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan adanya perbaikan dalam efisiensi dan hasil pertanian, baik dari sisi luas panen maupun hasil produksi per satuan luas.

3. Jumlah Kelompok Tani

Jumlah kelompok petani (Kelompok) adalah indikator yang menunjukkan jumlah total kelompok petani yang ada dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Kelompok petani merupakan wadah bagi para petani untuk saling berbagi informasi, sumber daya, dan

dukungan teknis, yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Indikator ini penting untuk menilai tingkat organisasi dan kolaborasi di antara petani serta efektivitas program dukungan yang mungkin diterima oleh kelompok ini.

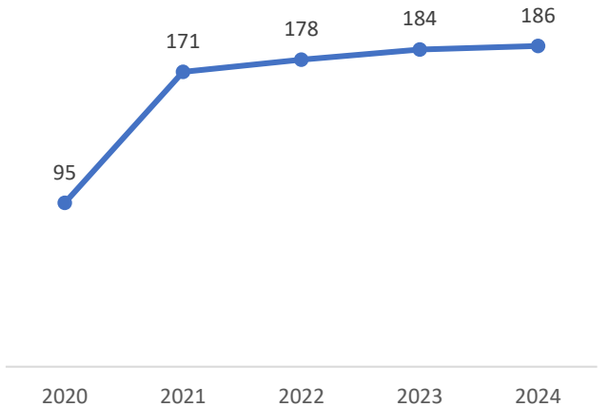

Gambar 2.164 Total Kelompok Tani
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang

Jumlah kelompok tani meningkat bertahap dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat penambahan 2 kelompok tani dibandingkan tahun 2023. Peningkatan jumlah kelompok tani ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Pemerintah Kota Malang dalam mendukung sektor pertanian serta inisiatif para petani untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat posisi tawar dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil panen secara kolektif. Hal ini tentu harus didukung dengan ketersediaan sarana produksi pertanian yang lebih terjangkau yang dapat mendorong petani untuk membentuk kelompok tani dan mengoptimalkan penggunaan sarana tersebut, serta peningkatan teknik budidaya yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas petani.

4. Produksi Peternakan

Produksi ternak adalah indikator yang menunjukkan jumlah total hasil produksi dari berbagai jenis ternak dalam suatu periode tertentu. Indikator ini penting untuk menilai kinerja sektor peternakan, yang berperan penting dalam penyediaan protein hewani, peningkatan pendapatan peternak, dan kontribusi terhadap perekonomian lokal dan nasional.

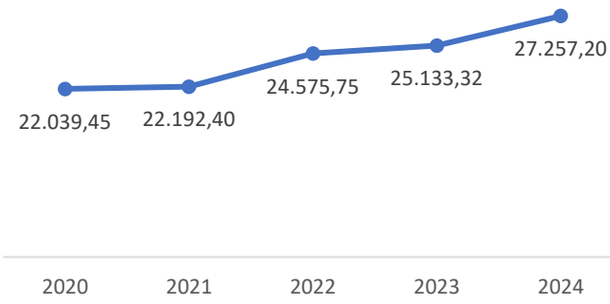

Gambar 2.165 Produksi Ternak (ton)
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang

Produksi ternak di Kota Malang dalam kurun 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Dimulai dari 22.039,45 ton pada 2020, angka produksi terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 27.257,20 ton pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sektor budidaya ternak, baik dari sisi jumlah populasi, produktivitas ternak, maupun dukungan fasilitas produksi dan teknologi peternakan. Secara umum, capaian ini menunjukkan kinerja positif sektor peternakan sebagai penopang ketahanan pangan hewani di Kota Malang.

D. Urusan Perdagangan

1. Persentase Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD

Persentase kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar sumbangan dari retribusi pasar (biaya yang dikenakan kepada pedagang di pasar) terhadap total PAD. Indikator ini penting untuk menilai seberapa signifikan retribusi pasar dalam mendukung keuangan daerah dan stabilitas fiskal.

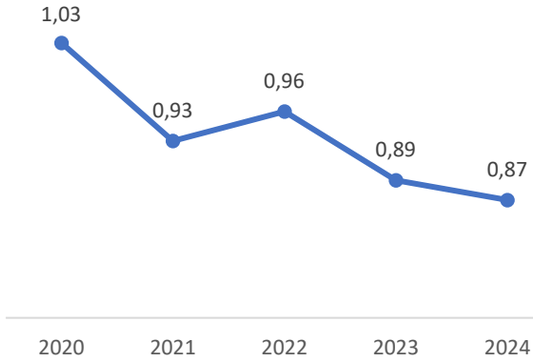

Gambar 2.166 Persentase Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD (%)
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Persentase Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD (%) dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020, kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar 1,03% , kemudian terus menurun setiap tahunnya menjadi 0,93% pada tahun 2021, 0,96% pada tahun 2022 (sedikit naik dibandingkan tahun 2021), lalu turun kembali ke 0,89% pada tahun 2023 dan 0,87% pada tahun 2024.

Meskipun terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2022, secara umum tren ini menunjukkan bahwa peran retribusi pasar dalam membantu PAD semakin mengecil dari tahun ke tahun. Hal ini dapat mengindikasikan adanya penurunan efektivitas pemungutan retribusi pasar, penurunan aktivitas pasar, atau peningkatan kontribusi sektor PAD lainnya yang menyebabkan proporsi retribusi pasar tampak lebih kecil.

2. Persentase Pemeliharaan Pasar Tradisional

Persentase Pemeliharaan Pasar Tradisional adalah indikator yang menunjukkan proporsi pasar tradisional yang mendapatkan pemeliharaan dari total pasar tradisional yang ada dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Pemeliharaan ini mencakup perbaikan infrastruktur, kebersihan, keamanan, dan fasilitas pendukung lainnya yang penting untuk kelancaran operasi pasar. Indikator ini penting untuk menilai upaya pemerintah atau lembaga terkait dalam mempertahankan dan meningkatkan kondisi pasar tradisional.

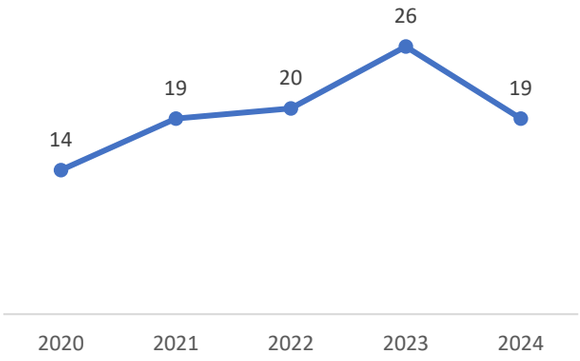

Gambar 2.167 Persentase Pemeliharaan Pasar Tradisional (Pasar Tradisional)

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Jumlah kegiatan pemeliharaan pasar tradisional mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat 14 kegiatan, kemudian meningkat menjadi 19 di 2021, dan 20 di 2022. Puncaknya terjadi pada 2023 dengan 26 kegiatan pemeliharaan, sebelum menurun kembali menjadi 19 pada 2024. Secara umum, data ini menunjukkan perhatian yang cukup konsisten dalam upaya menjaga kondisi pasar tradisional, meskipun terdapat dinamika dalam jumlah kegiatan dari tahun ke tahun. Penurunan pada 2024 perlu dicermati untuk memastikan keberlanjutan kualitas infrastruktur pasar.

3. Jumlah pasar

Jumlah pasar adalah indikator yang menunjukkan total jumlah pasar yang ada dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Indikator ini penting untuk menilai ketersediaan fasilitas perdagangan dan distribusi barang bagi masyarakat. Pasar merupakan pusat ekonomi lokal yang penting untuk aktivitas jual beli dan mendukung perekonomian masyarakat setempat.

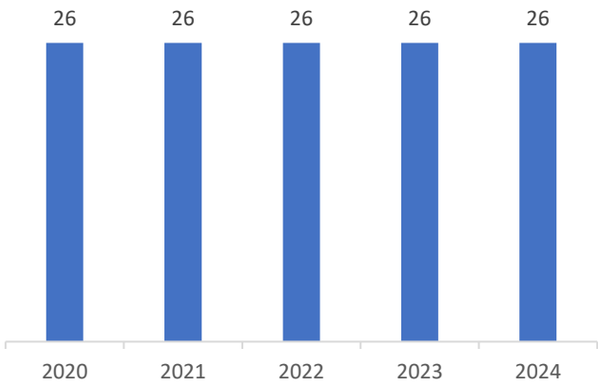

Gambar 2.168 Jumlah Pasar
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Data pada grafik menunjukkan jumlah pasar dari tahun 2020 hingga 2024. Selama periode tersebut, jumlah pasar tercatat konsisten sebanyak 26 pasar setiap tahun. Konsistensi jumlah pasar selama lima tahun berturut-turut menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam pembangunan atau penutupan pasar selama periode tersebut. Beberapa interpretasi dari data ini meliputi:

- Pemerintah daerah mungkin telah mencapai kapasitas optimal dalam jumlah pasar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
- Fokus mungkin lebih pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas pasar yang ada daripada pembangunan pasar baru.
- Tidak adanya peningkatan jumlah pasar mungkin mencerminkan stabilitas dalam kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap fasilitas pasar.

Keberlanjutan jumlah pasar yang sama menunjukkan stabilitas dalam sektor perdagangan lokal, di mana fasilitas yang ada dianggap cukup untuk mendukung aktivitas ekonomi. Namun, ini juga bisa menunjukkan adanya potensi untuk peningkatan layanan atau kualitas pasar yang ada daripada ekspansi fisik jumlah pasar.

Jumlah pasar yang tetap stabil dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah mencapai keseimbangan dalam menyediakan fasilitas perdagangan yang memadai bagi masyarakat. Untuk masa depan, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kebutuhan pasar serta mempertimbangkan peningkatan kualitas dan layanan di pasar yang ada untuk memastikan mereka dapat terus memenuhi kebutuhan ekonomi lokal dengan efektif.

4. UTTP Bertanda Tera Sah

UTTP (Unit Tera dan Timbangan Perdagangan) bertanda tera sah adalah indikator yang menunjukkan jumlah unit alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah melalui proses verifikasi dan mendapat tanda tera sah dari instansi berwenang. Indikator ini penting untuk menjamin keakuratan alat ukur yang digunakan dalam perdagangan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen dan integritas pasar.

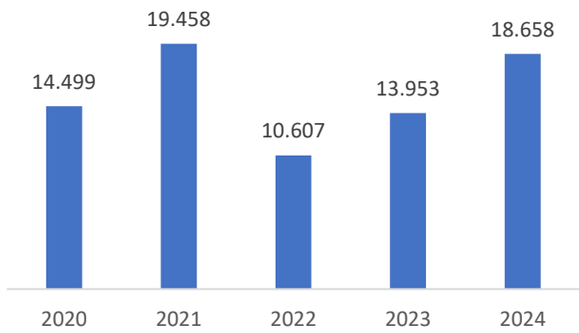

Gambar 2.169 UTTP Bertanda Tera Sah
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, capaian unit tera dan timbangan perdagangan yang bertanda tera sah di Kota Malang menunjukkan dinamika yang relatif positif meskipun sempat mengalami fluktuasi. Kenaikan jumlah unit bertanda tera sah yang signifikan pada tahun 2021 mencerminkan keberhasilan pengawasan dan layanan tera ulang. Penurunan pada tahun 2022 kemungkinan disebabkan oleh kendala operasional atau menurunnya tingkat partisipasi wajib tera, namun upaya pemulihan yang dilakukan berhasil meningkatkan kembali capaian pada tahun 2023 dan 2024.

E. Urusan Perindustrian

1. Jumlah IKM yang Terdata

Jumlah IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang terdata adalah indikator yang menunjukkan jumlah total industri kecil dan menengah yang tercatat secara resmi dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Indikator ini penting untuk menilai perkembangan sektor industri kecil dan menengah yang berperan penting dalam perekonomian, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi.

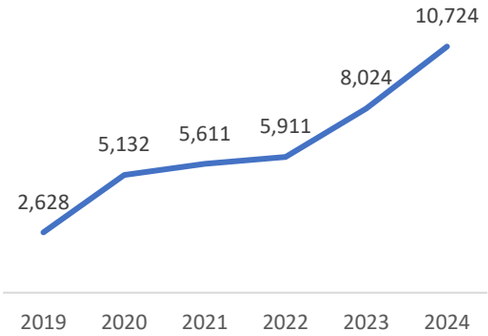

Gambar 2.170 Jumlah IKM yang Terdata
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Data pada grafik menunjukkan jumlah IKM yang terdata dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, jumlah IKM yang terdata tercatat sebanyak 2.628 unit. Angka ini meningkat menjadi 5.132 unit pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 5.611 unit pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah IKM yang terdata bertambah menjadi 5.911 unit. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023

dengan 8.024 unit, dan pada tahun 2024, jumlah IKM yang terdata mencapai 10.724 unit.

Peningkatan jumlah IKM yang terdata setiap tahun menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam sektor industri kecil dan menengah. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan ini meliputi:

- Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan IKM, seperti insentif pajak, bantuan keuangan, dan program pelatihan.
- Peningkatan kesadaran dan minat masyarakat untuk mendirikan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah.
- Akses yang lebih baik ke pasar, teknologi, dan sumber daya yang mendukung pertumbuhan IKM.

Perbaikan dalam sistem pencatatan dan registrasi IKM yang memungkinkan lebih banyak unit terdata secara resmi. Peningkatan signifikan dari tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan adanya dorongan kuat untuk pengembangan IKM dalam periode tersebut. Hal ini bisa mencerminkan respons terhadap kebutuhan pasar, inovasi dalam produk dan layanan, serta dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan lembaga terkait.

Secara keseluruhan, data menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam jumlah IKM yang terdata dari tahun 2019 hingga 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya untuk mendukung dan mengembangkan sektor industri kecil dan menengah. Untuk ke depan, penting untuk terus mendukung IKM melalui kebijakan yang ramah bisnis, akses ke pembiayaan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan teknologi agar sektor ini dapat terus tumbuh dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian.

2.1.4.7 Penunjang Urusan Pemerintah

A. Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Tabel 2.18 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Malang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Data yang ditampilkan dalam tabel tersebut adalah hasil kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Malang. Tabel ini menampilkan ketersediaan berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Kepala Daerah (PERKADA). Dokumen-dokumen yang dimaksud mencakup RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

Berdasarkan data dalam tabel, seluruh dokumen perencanaan yang disebutkan tersedia dan telah ditetapkan dengan PERDA atau PERKADA. Ini menunjukkan bahwa Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Malang telah memenuhi semua indikator kinerja terkait dengan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan. Interpretasi ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kota Malang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mencakup perencanaan jangka panjang, menengah, tahunan, serta perencanaan tata ruang wilayah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kota Malang telah memiliki dasar perencanaan yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di masa mendatang.

2. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)

Indikator ini mengukur seberapa konsisten program-program yang direncanakan dalam RPJMD diimplementasikan dalam RKPD setiap tahunnya. Konsistensi ini penting untuk memastikan bahwa tujuan jangka menengah yang dirumuskan dalam RPJMD dapat diterjemahkan ke dalam rencana kerja tahunan, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan secara sistematis dan terarah.

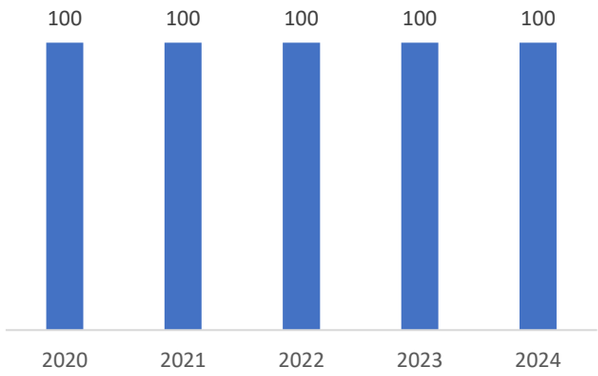

Gambar 2.171 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Data ini menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2024, konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD tetap

stabil dengan persentase yang mendekati 100%. Ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang berhasil menjaga konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah dengan rencana kerja tahunan. Konsistensi yang tinggi ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan rencana strategis daerah, serta kemampuan dalam memastikan bahwa setiap program yang direncanakan dalam RPJMD dapat diwujudkan dalam kegiatan nyata di lapangan melalui RKPD. Hal ini juga mencerminkan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

3. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Indikator ini mengukur seberapa konsisten program-program yang direncanakan dalam RKPD dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya. Konsistensi ini sangat penting karena menunjukkan sejauh mana rencana kerja tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dapat didanai dan diimplementasikan melalui anggaran daerah.

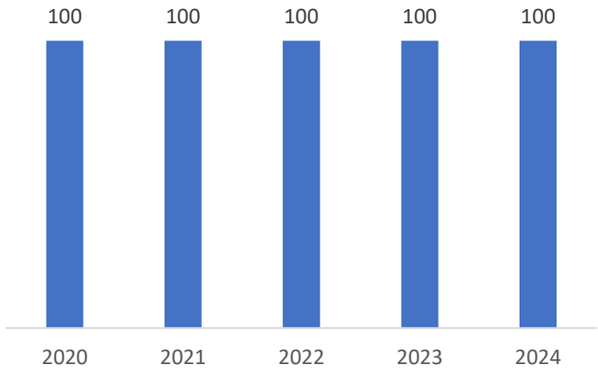

Gambar 2.172 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Data ini menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2024, konsistensi penjabaran program RKPD ke dalam APBD berada pada tingkat 100% setiap tahunnya. Ini berarti setiap program yang direncanakan dalam RKPD berhasil dianggarkan secara penuh dalam APBD. Konsistensi yang sempurna ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang memiliki perencanaan dan penganggaran yang sangat terkoordinasi dengan baik. Hal ini juga mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa rencana kerja tahunan dapat direalisasikan melalui alokasi anggaran yang tepat dan cukup, sehingga dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan daerah secara efektif.

B. Urusan Keuangan

1. Persentase Penurunan Silpa

Persentase Penurunan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar penurunan sisa anggaran yang belum digunakan pada akhir tahun anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan SILPA umumnya dianggap positif, karena menunjukkan bahwa anggaran lebih terserap dan perencanaan lebih tepat sasaran. Tapi terlalu kecilnya SILPA bisa juga menandakan kurangnya

cadangan atau fleksibilitas anggaran. Sebaliknya, kenaikan SILPA bisa menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan program/kegiatan atau realisasi pendapatan yang melampaui ekspektasi.

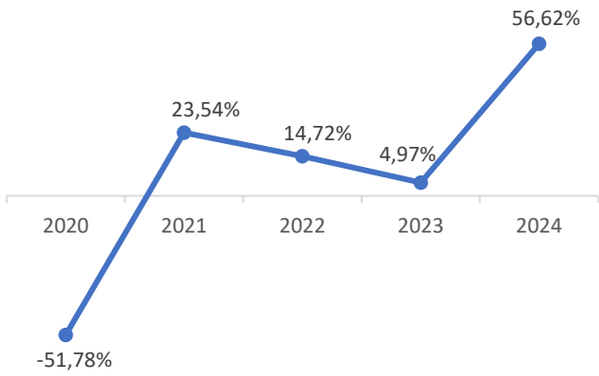

Gambar 2.173 Persentase Penurunan Silpa
Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang

Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Silpa Kota Malang naik sebesar 51,78% jika dibandingkan dengan Silpa tahun 2019. Namun mulai tahun 2021 hingga tahun 2024 Silpa Kota Malang mengalami tren penurunan. Penurunan Silpa yang cukup signifikan terjadi di tahun 2024, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan Perangkat Daerah dalam merencanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran meningkat.

C. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Nilai Sistem Merit

Sistem merit adalah sistem penilaian yang digunakan untuk memastikan bahwa proses rekrutmen, promosi, dan penempatan pegawai di instansi pemerintahan didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan prestasi, bukan pada favoritisme atau praktik diskriminatif lainnya. Nilai sistem merit ini mengindikasikan sejauh mana prinsip-prinsip meritokrasi diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintahan.

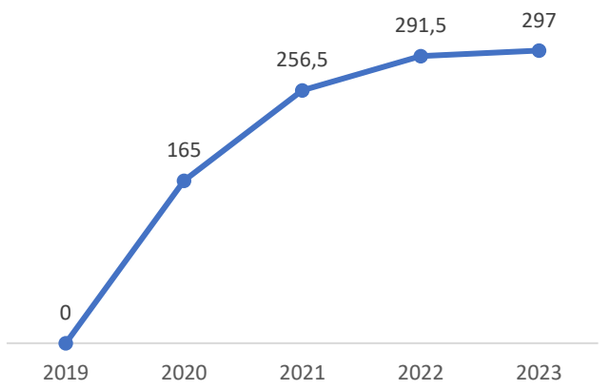

Gambar 2.174 Nilai Sistem Merit
Sumber: Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Kota Malang

Nilai sistem merit dari tahun 2020 hingga 2023 menggambarkan tren yang meningkat. Tren peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam memperbaiki dan memperkuat sistem meritokrasi di instansi pemerintahan.

Peningkatan nilai ini dapat mencerminkan peningkatan transparansi, objektivitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya manusia, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintahan.

2. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) ini adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Kota Malang. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti kompetensi, kinerja, etika, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar kerja yang berlaku.

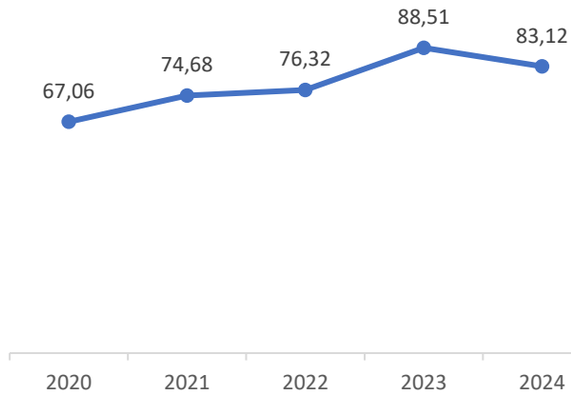

Gambar 2.175 Indeks Profesionalitas ASN
Sumber: Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Kota Malang

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2020 indeks profesionalitas ASN di Kota Malang berada pada angka 67,06. Peningkatan terjadi pada tahun 2021 dengan nilai mencapai 74,68. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai 76,32 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai 88,51. Namun pada tahun 2024 indeks profesionalitas ASN turun menjadi 83,12. Tren ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam meningkatkan profesionalitas ASN di Kota Malang. Namun upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan, peningkatan disiplin dan etika kerja, serta penerapan kebijakan yang lebih efektif dalam manajemen ASN perlu lebih dioptimalkan lagi untuk dapat mempertahankan indeks profesionalitas ASN yang sudah diraih.

D. Urusan Pengawasan

1. MRI (*Management Risk Index*)

Management Risk Index (MRI) atau Indeks Manajemen Risiko adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi, lembaga, atau entitas telah mengelola risiko secara efektif. Indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat kesiapan dan kematangan manajemen risiko dalam suatu institusi.

Pada tahun 2023 Indeks Manajemen Risiko Kota Malang sebesar 3,263. Peningkatan terjadi pada tahun 2024 menjadi sebesar 3,4. Kenaikan nilai MRI menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek-aspek berikut: lebih baiknya proses identifikasi dan evaluasi risiko, penguatan struktur organisasi dan kebijakan risiko,

meningkatnya pelatihan dan budaya sadar risiko, meningkatnya efektivitas mitigasi dan monitoring risiko.

2. Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah ukuran tingkat kemampuan unit pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara efektif, profesional, dan berstandar.

Nilai kapabilitas APIP Kota Malang baru diukur pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 3,1. Nilai tersebut bermakna bahwa nilai kapabilitas APIP Kota Malang sudah baik, serta menunjukkan sistem pengawasan intern telah mapan dan proaktif. Nilai ini bisa dijadikan dasar strategis dalam menyusun rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP menuju Level 4.

3. Maturitas SPIP

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah sistem yang diterapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maturitas SPIP mengukur tingkat kematangan atau kedewasaan dalam penerapan pengendalian internal di instansi pemerintahan.

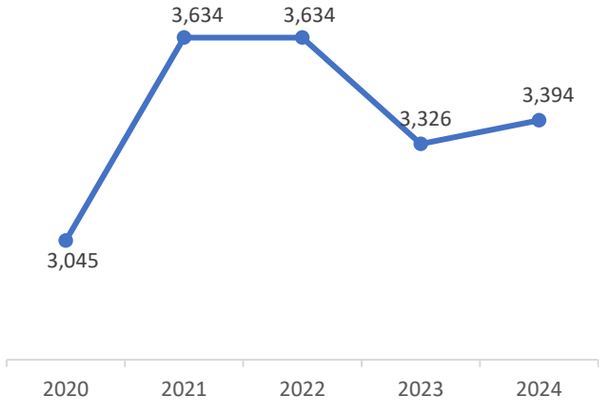

Gambar 2.176 Maturitas SPIP
Sumber: Inspektorat Daerah Kota Malang

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2020 nilai maturitas SPIP Kota Malang berada pada angka 3,045. Pada tahun 2021, nilai maturitas SPIP mengalami peningkatan signifikan menjadi 3,634 dan nilai ini bertahan hingga tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 nilai maturitas SPIP mengalami penurunan menjadi 3,326. Selanjutnya nilai maturitas SPIP pada tahun 2024 naik menjadi 3,394. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan pengendalian internal yang lebih efektif di Kota Malang. Namun, penurunan nilai pada tahun 2023 mengindikasikan adanya tantangan atau kendala yang mungkin menghambat pelaksanaan SPIP secara optimal. Sedangkan kenaikan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya-upaya perbaikan pengendalian intern cukup berhasil. Melihat realisasi tahun 2024 belum sebaik realisasi tahun 2021 dan 2022, maka hal tersebut dapat menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Malang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut dalam sistem pengendalian

internal untuk memastikan keberlanjutan efektivitas dan efisiensi operasional serta pengamanan aset negara.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan tingkat hasil kerja yang dicapai oleh pemerintah daerah, mencakup anggaran dan realisasi anggaran, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan atau peraturan selama periode anggaran. Proses penyusunan perencanaan keuangan daerah perlu memperhatikan kinerja keuangan masa lalu, yang sering dijadikan acuan untuk perencanaan keuangan masa depan. Dokumen kinerja keuangan dari lima tahun sebelumnya sebaiknya digunakan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah di periode mendatang. Analisis kinerja keuangan masa lalu melibatkan kinerja pelaksanaan APBD yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, sementara pengeluaran daerah meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada aturan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.2.1.1 Kinerja pelaksanaan APBD

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara target anggaran dan realisasinya, serta menyandingkan penerimaan dengan pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sementara pengeluaran daerah mencakup belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Secara umum, APBD Kota Malang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja APBD Kota Malang tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar realisasi pendapatan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 telah melampaui target, kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2023 yang realisasinya masib berada di bawah target pendapatan daerah. Sedangkan, realisasi belanja daerah tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak mencapai target tahunannya, khususnya pada tahun 2020 hingga tahun 2022 realisasi belanja daerah masih di bawah 90% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020 hingga tahun 2024, secara keselurahan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020 hingga tahun 2024 telah mencapai taegrt, kecuali pada tahun 2020.

Tabel 2.19 Target dan Realisasi APBD Kota Malang
Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Lebih/Kurang
Pendapatan Daerah				
2020	1.998.935.905.965,37	1.956.090.185.104,35	97,86	(42.845.720.861,02)
2021	2.003.773.466.717,00	2.152.355.838.252,87	107,42	148.582.371.535,87
2022	2.068.666.283.032,00	2.171.753.457.135,85	104,98	103.087.174.103,85
2023	2.377.889.254.705,00	2.344.815.945.277,81	98,61	(33.073.309.427,19)
2024	2.426.072.368.714,90	2.465.737.922.935,90	101,63	39.665.554.221,00
Belanja Daerah				
2020	2.707.862.663.626,54	2.103.467.535.397,26	77,68	(604.395.128.229,28)
2021	2.561.660.537.962,00	2.225.952.718.513,56	86,89	(335.707.819.448,44)
2022	2.545.685.224.017,00	2.188.318.745.870,33	85,96	(357.366.478.146,67)
2023	2.829.655.226.955,00	2.596.706.284.209,93	91,77	(232.948.942.745,07)
2024	2.620.698.813.849,00	2.455.641.071.538,72	93,70	(165.057.742.310,28)
Penerimaan Pembiayaan				
2020	742.764.421.538,17	742.764.421.538,17	100,00	0,00
2021	567.887.071.245,00	567.890.821.245,26	100,00	3.750.000,26
2022	484.293.940.985,00	484.293.940.984,57	100,00	(0,43)
2023	460.453.652.250,00	460.204.464.066,22	99,95	(249.188.183,78)
2024	199.626.445.134,10	199.626.436.781,84	100,00	(8.352,26)
Pengeluaran Pembiayaan				
2020	33.837.663.877,00	27.500.000.000,00	81,27	(6.337.663.877,00)
2021	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
2022	7.275.000.000,00	7.275.000.000,00	100,00	0,00
2023	8.687.680.000,00	8.687.680.000,00	100,00	0,00
2024	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

A. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, serta penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rincian pendapatan daerah diperoleh menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Mengacu pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah terbagi dalam tiga jenis yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh langsung oleh daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah. PAD menjadi indikator kemandirian keuangan daerah dan mencerminkan efektivitas pemungutan pajak dan pengelolaan aset daerah;
2. Pendapatan Transfer yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah dari pihak lain, dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Besaran dan struktur pendapatan daerah bervariasi antar daerah, tergantung pada potensi ekonomi, kinerja pemungutan pajak,

dan kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat. Pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Analisis pendapatan saerah menggunakan rata-rata pertumbuhan menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun pendapatan daerah dan bisa dijadikan sebagai referensi dalam menentukan target pendapatan daerah di masa yang akan datang. Kinerja pendapatan daerah Kota Malang tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,02%. Pada tahun 2020, pendapatan daerah Kota Malang sebesar 1,96 triliun Rupiah, meningkat menjadi 2,47 triliun Rupiah pada tahun 2024.

Komponen pendapatan daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar adalah Pendapatan Asli Daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 15,98%. Kemudian, komponen Pendapatan Transfer juga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 3,63%. Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 65,86%, yang diakibatkan penurunan pada komponen Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan akibat adanya perubahan pada pencatatan jenis pendapatan dari berbagai sumber pendapatan.

Tabel 2.20 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**1.956.090.185.104,35**	**2.152.355.838.252,87**	**2.171.753.457.135,85**	**2.344.815.945.277,81**	**2.465.737.922.935,90**	**6,02%**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**491.189.243.955,35**	**603.794.666.883,32**	**718.337.293.395,35**	**792.120.013.218,17**	**885.318.495.121,91**	**15,98%**
1.1.1	Pajak daerah	351.759.920.903,49	430.226.323.451,91	547.446.866.621,47	610.369.015.650,81	694.253.010.377,75	18,70%
1.1.2	Retribusi Daerah	38.449.140.906,00	40.823.425.184,98	41.460.096.255,00	49.774.180.383,00	120.897.712.987,82	42,67%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	33.348.652.404,80	25.974.904.635,15	29.510.003.383,89	30.267.899.526,91	31.413.404.192,61	-0,54%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	67.631.529.741,06	106.770.013.611,28	99.920.327.134,99	101.708.917.657,45	38.754.367.563,73	-2,16%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.374.144.565.833,00**	**1.475.415.827.616,00**	**1.450.405.048.247,00**	**1.552.647.976.062,00**	**1.580.395.332.205,00**	**3,63%**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.171.904.577.428,00	1.219.895.408.927,00	1.204.342.932.628,00	1.255.568.403.441,00	1.309.682.493.105,00	2,85%
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	59.204.393.562,00	116.597.889.533,00	106.141.341.637,00	112.450.734.000,00	107.253.257.000,00	22,32%
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	73.023.421.955,00	63.748.176.088,00	82.278.172.590,00	49.405.105.218,00	53.693.975.000,00	-3,73%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	805.071.632.000,00	792.693.133.000,00	785.673.513.760,00	826.400.603.605,00	873.130.043.000,00	2,10%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	161.164.220.911,00	168.066.808.306,00	190.201.356.641,00	245.151.022.618,00	254.558.247.105,00	12,55%
1.2.1.5	Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal	73.440.909.000,00	78.789.402.000,00	40.048.548.000,00	22.160.938.000,00	21.046.971.000,00	-22,89%
1.2.2	Transfer Antar Daerah	202.239.988.405,00	255.520.418.689,00	246.062.115.619,00	297.079.572.621,00	270.712.839.100,00	8,63%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	169.329.629.405,00	242.435.059.689,00	232.954.723.619,00	294.217.582.000,00	267.206.142.600,00	14,10%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	32.910.359.000,00	13.085.359.000,00	13.107.392.000,00	2.861.990.621,00	3.506.696.500,00	-28,93%
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**90.756.375.316,00**	**73.145.343.753,55**	**3.011.115.493,50**	**47.955.997,64**	**24.095.608,99**	**-65,86%**

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1	Hibah	90.756.375.316,00	0,00	2.548.416.685,75	47.947.248,64	24.095.608,99	-36,97%
1.3.3	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0,00	73.145.343.753,55	462.698.807,75	8.749,00	0,00	-49,84%

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

Berdasarkan tren proporsi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2020 hingga tahun 2024, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer mengalami tren penurunan, sebaliknya komponen Pendapatan Asli Daerah mengalami tren peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Malang berada pada kondisi yang baik dan menuju pada kemandirian keuangan daerah.

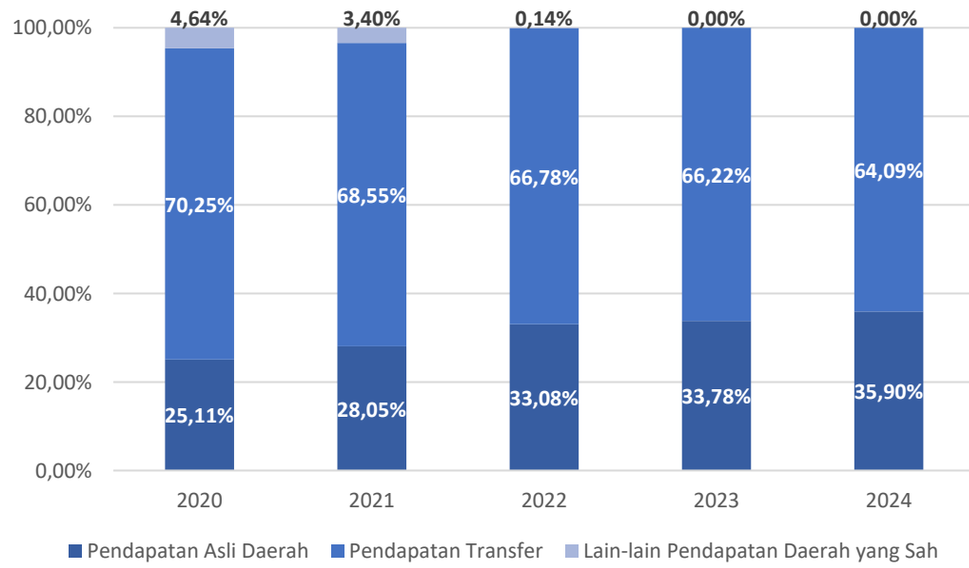

Gambar 2.177 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

Perkembangan rasio kemandirian Kota Malang menunjukkan tren positif, yakni pada tahun 2020 rasio kemandirian awalnya hanya sebesar 0,25, sedangkan pada tahun 2024 telah meningkat menjadi 0,36. Hal ini menunjukkan ketergantungan keuangan Kota Malang terhadap Pendapatan Transfer dari Pusat maupun Provinsi terus mengalami penurunan.

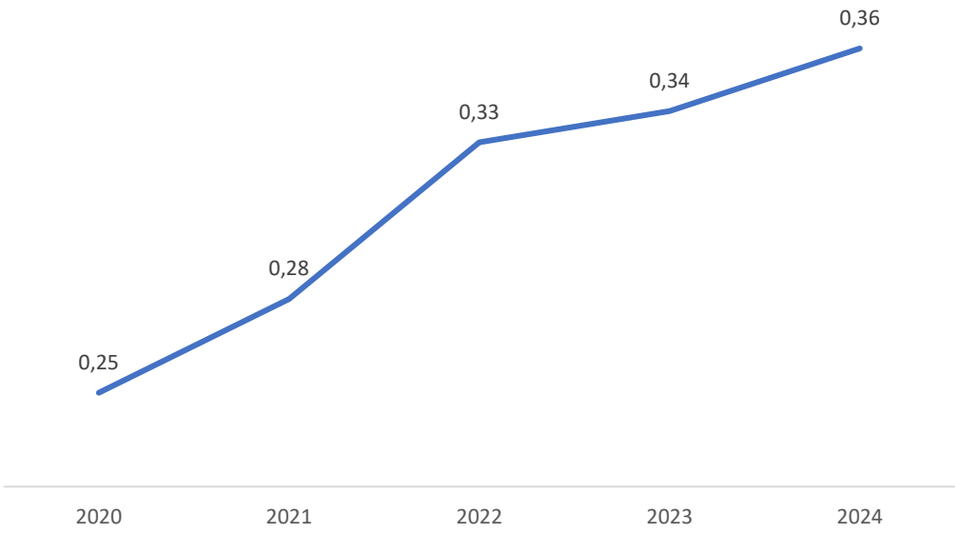

Gambar 2.178 Rasio Kemandirian Kota Malang Tahun 2020-2024
Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah meliputi (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kinerja realiasai Pendapatan Asli Daerah Kota Malang pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 telah mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari 491,19 miliar Rupiah menjadi 885,32 miliar Rupiah. Secara umum, Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian realisasinya masih belum memenuhi target, kecuali pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah telah melampaui target. Realisasi komponen Pajak Daerah tahun 2020 hingga tahun 2024 juga masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Komponen realisasi Retribusi Daerah tahun 2020 hingga tahun 2024 juga secara umum masih belum memenuhi target, kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2024. Sedangkan, komponen Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan serta komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 telah melampaui target.

Tabel 2.21 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Lebih/Kurang
Pajak Daerah				
2020	425.000.000.000,00	351.759.920.903,49	82,77	(73.240.079.096,51)
2021	462.000.000.000,00	430.226.323.451,91	93,12	(31.773.676.548,09)
2022	566.000.000.000,00	547.446.866.621,47	96,72	(18.553.133.378,53)
2023	834.000.000.000,00	610.369.015.650,81	73,19	(223.630.984.349,19)
2024	845.500.000.000,00	694.253.010.377,75	82,11	(151.246.989.622,25)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Lebih/Kurang
Retribusi Daerah				
2020	35.731.137.058,00	38.449.140.906,00	107,61	2.718.003.848,00
2021	45.542.791.500,00	40.823.425.184,98	89,64	(4.719.366.315,02)
2022	53.898.685.400,00	41.460.096.255,00	76,92	(12.438.589.145,00)
2023	55.019.090.400,00	49.774.180.383,00	90,47	(5.244.910.017,00)
2024	52.988.018.750,00	120.897.712.987,82	228,16	67.909.694.237,82
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan				
2020	28.242.674.511,00	33.348.652.404,80	118,08	5.105.977.893,80
2021	25.217.322.874,00	25.974.904.635,15	103,00	757.581.761,15
2022	28.891.896.459,00	29.510.003.383,89	102,14	618.106.924,89
2023	29.453.299.602,00	30.267.899.526,91	102,77	814.599.924,91
2024	30.219.416.507,00	31.413.404.192,61	103,95	1.193.987.685,61
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
2020	43.397.605.834,28	67.631.529.741,06	155,84	24.233.923.906,78
2021	81.307.331.108,00	106.770.013.611,28	131,32	25.462.682.503,28
2022	69.238.021.621,00	99.920.327.134,99	144,31	30.682.305.513,99
2023	83.319.617.859,00	101.708.917.657,45	122,07	18.389.299.798,45
2024	81.989.312.734,90	38.754.367.563,73	47,27	(43.234.945.171,17)
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
2020	532.371.417.403,28	491.189.243.955,35	92,26	(41.182.173.447,93)
2021	614.067.445.482,00	603.794.666.883,32	98,33	(10.272.778.598,68)
2022	718.028.603.480,00	718.337.293.395,35	100,04	308.689.915,35
2023	1.001.792.007.861,00	792.120.013.218,17	79,07	(209.671.994.642,83)
2024	1.010.696.747.991,90	885.318.495.121,91	87,59	(125.378.252.869,99)

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

Adapun komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah dengan kontribusi lebih dari 70% setiap tahunnya. Kontribusi Pajak Daerah mengalami tren peningkatan dari 71,61% di Tahun 2020 menjadi 78,42% di Tahun 2024. Adapun Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

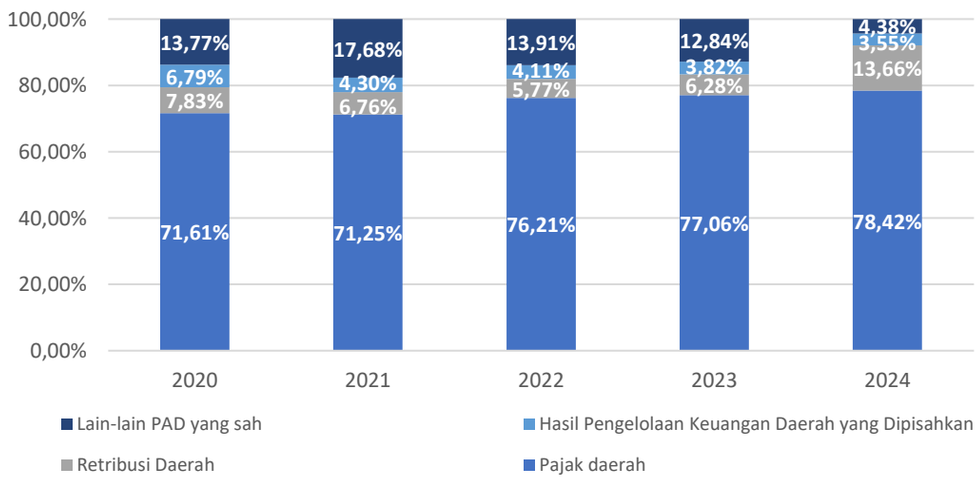

Gambar 2.179 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2020-2024
Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan adanya perubahan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satunya yaitu komponen Pendapatan Daerah yang semula Dana Perimbangan berubah menjadi Pendapatan Transfer. Dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Transfer meliputi (1) Transfer Pemerintah Pusat; dan (2) Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Sedangkan, Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan Transfer Kota Malang pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 telah mengalami tren peningkatan dari 1,37 triliun Rupiah menjadi 1,58 triliun Rupiah. Secara umum, kinerja Pendapatan Transfer tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian realisasinya telah melampaui target. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi transfer pemerintah pusat maupun tranfer antar daerah juga berada di atas target, kecuali untuk transfer antar daerah tahun 2020 realisasinya masih belum memenuhi target.

Tabel 2.22 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Malang Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Lebih/Kurang
Transfer Pemerintah Pusat				
2020	1.148.266.463.052,00	1.171.904.577.428,00	102,06	23.638.114.376,00
2021	1.173.956.677.000,00	1.219.895.408.927,00	103,91	45.938.731.927,00
2022	1.199.547.887.317,00	1.204.342.932.628,00	100,40	4.795.045.311,00
2023	1.245.629.166.000,00	1.255.568.403.441,00	100,80	9.939.237.441,00
2024	1.268.648.264.000,00	1.309.682.493.105,00	103,23	41.034.229.105,00
Transfer Antar Daerah				
2020	215.883.125.510,09	202.239.988.405,00	93,68	(13.643.137.105,09)
2021	146.608.394.235,00	255.520.418.689,00	174,29	108.912.024.454,00
2022	147.264.792.235,00	246.062.115.619,00	167,09	98.797.323.384,00
2023	130.468.080.844,00	297.079.572.621,00	227,70	166.611.491.777,00
2024	146.727.356.723,00	270.712.839.100,00	184,50	123.985.482.377,00
PENDAPATAN TRANSFER				
2020	1.364.149.588.562,09	1.374.144.565.833,00	100,73	9.994.977.270,91
2021	1.320.565.071.235,00	1.475.415.827.616,00	111,73	154.850.756.381,00
2022	1.346.812.679.552,00	1.450.405.048.247,00	107,69	103.592.368.695,00
2023	1.376.097.246.844,00	1.552.647.976.062,00	112,83	176.550.729.218,00
2024	1.415.375.620.723,00	1.580.395.332.205,00	111,66	165.019.711.482,00

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

Tren proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Pendapatan Transfer tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan dari 85,28% menjadi 82,87%. Sebaliknya, tren proporsi Transfer Antar Daerah terhadap Pendapatan Transfer tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan dari 14,72% menjadi 17,13%.

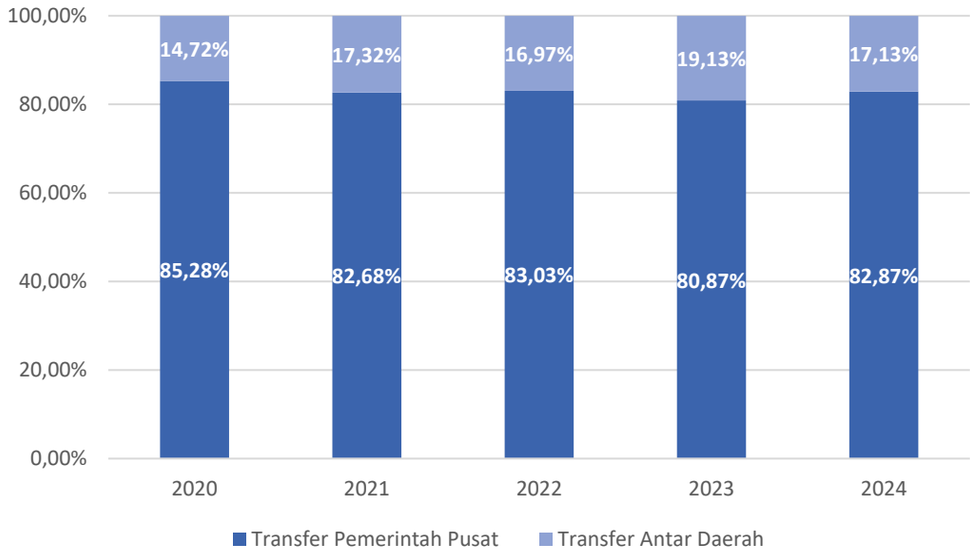

Gambar 2.180 Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Kota Malang Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diklasifikasikan menjadi (1) Hibah, (2) Dana Darurat, serta (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Rata-rata capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 94,63%. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 90,76 miliar rupiah dengan capaian 88,62%. Sedangkan, realisasi terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 24.095.608,99 rupiah dengan capaian 100%, setelah memperoleh hibah, meskipun sebelumnya tidak dianggarkan. Tren penurunan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak terlepas dari adanya perubahan pencatatan pendapatan daerah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah yang diubah pencatatannya menjadi Pendapatan Transfer.

Tabel 2.23 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Malang Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Lebih/Kurang
Hibah				
2020	102.414.900.000,00	90.756.375.316,00	88,62	(11.658.524.684,00)
2021	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	3.825.000.000,00	2.548.416.685,75	66,63	(1.276.583.314,25)
2023	0,00	47.947.248,64	100,00	47.947.248,64
2024	0,00	24.095.608,99	100,00	24.095.608,99
Dana Darurat				
2020	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	0,00	0,00	100,00	0,00

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Lebih/Kurang
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan				
2020	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	69.140.950.000,00	73.145.343.753,55	105,79	4.004.393.753,55
2022	0,00	462.698.807,75	100,00	462.698.807,75
2023	0,00	8.749,00	100,00	8.749,00
2024	0,00	0,00	100,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
2020	102.414.900.000,00	90.756.375.316,00	88,62	(11.658.524.684,00)
2021	69.140.950.000,00	73.145.343.753,55	105,79	4.004.393.753,55
2022	3.825.000.000,00	3.011.115.493,50	78,72	(813.884.506,50)
2023	0,00	47.955.997,64	100,00	47.955.997,64
2024	0,00	24.095.608,99	100,00	24.095.608,99

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Daerah terdiri dari (1) Belanja Operasi; (2) Belanja Modal; (3) Belanja Tidak Terduga; dan (4) Belanja Transfer.

Analisis Belanja Dearah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Perkembangan Belanja Daerah Kota Malang tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,34%. Realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 2,1 triliun rupiah, sedangkan realisasi belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 2,6 triliun rupiah.

Tabel 2.24 Realisasi Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	**BELANJA**	**2.103.467.535.397,26**	**2.225.952.718.513,56**	**2.188.318.745.870,33**	**2.596.706.284.209,93**	**2.455.641.071.538,72**	**4,34%**
2.1	**Belanja Operasi**	**1.685.625.501.405,51**	**1.885.305.464.517,46**	**1.871.107.791.922,33**	**2.188.051.811.802,93**	**2.263.346.316.602,04**	**7,87%**
2.1.1	Belanja Pegawai	729.276.551.486,77	832.390.933.139,63	805.321.434.867,47	834.812.187.648,13	910.024.655.372,78	5,89%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	811.880.036.614,74	940.660.275.301,83	951.131.825.659,86	1.170.440.753.995,80	1.163.846.672.455,26	9,87%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	136.450.223.304,00	93.795.096.076,00	102.185.771.395,00	170.582.940.159,00	180.388.848.774,00	12,59%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.018.690.000,00	18.459.160.000,00	12.468.760.000,00	12.215.930.000,00	9.086.140.000,00	17,53%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Belanja Modal**	**363.227.224.639,75**	**295.092.608.923,53**	**310.828.967.621,00**	**405.779.018.058,00**	**191.931.112.915,68**	**(8,89%)**
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906.504.957,00	25,00%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	80.704.661.723,00	97.829.431.437,61	115.489.917.076,00	106.388.596.049,00	83.621.756.249,79	2,50%

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	145.141.494.691,75	94.359.203.302,09	107.186.636.273,00	75.165.881.369,00	26.362.414.794,11	(29,05%)
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	130.674.050.195,00	100.222.147.133,13	85.904.884.884,00	221.467.541.736,00	75.683.871.113,78	13,60%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.260.743.730,00	2.681.827.050,70	2.247.529.388,00	2.296.998.904,00	759.649.801,00	(34,52%)
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	446.274.300,00	0,00	0,00	460.000.000,00	596.916.000,00	7,44%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**54.614.809.352,00**	**45.554.645.072,57**	**6.381.986.327,00**	**2.875.454.349,00**	**363.642.021,00**	**(61,22%)**
2.4	**Belanja Transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

Komponen terbesar dalam realisasi belanja daerah pada tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah Belanja Operasi dengan dengan proporsi lebih dari 80% dari Belanja Daerah dan cenderung mengalami peningkatan hingga 92,17% pada tahun 2024. Selanjutnya, belanja modal yang mengalami tren menurun dengan proporsi sebesar 17,27% pada tahun 2020 menjadi 7,82% pada tahun 2024. Sementara itu, proporsi Belanja Tidak Terduga juga mengalami penurunan dari 2,6% pada tahun 2020 menjadi 0,01% pada tahun 2024.

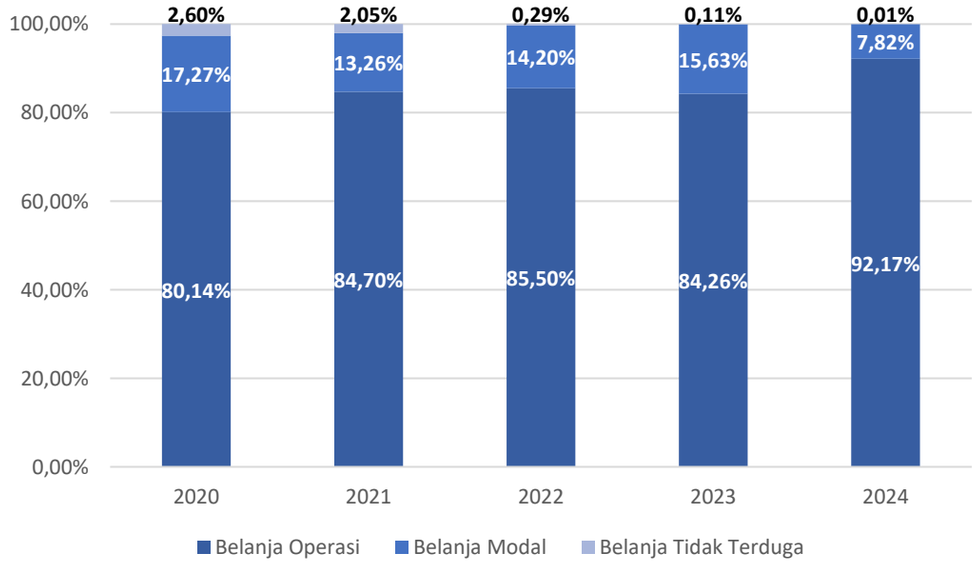

Gambar 2.181 Proporsi Komponen Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2020-2024
Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Operasi terdiri atas (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang dan Jasa; (3) Belanja Bunga; (4) Belanja Subsidi; (5) Belanja Hibah; dan (6) Belanja Bantuan Sosial.

Komponen terbesar dalam realisasi Belanja Daerah tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah Belanja Barang dan Jasa

dengan rata-rata proporsi sebesar 50,76%. Selanjutnya, terdapat komponen Belanja Pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 41,76% dengan tren yang cenderung menurun pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Sedangkan sisanya merupakan Belanja Hibah dengan rata-rata proporsi sebesar 6,86% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,62%. Sementara itu, untuk Belanja Bunga dan Belanja Subsidi realisasinya sama dengan 0 (nol) karena tidak terdapat pengeluaran dalam kedua jenis belanja tersebut.

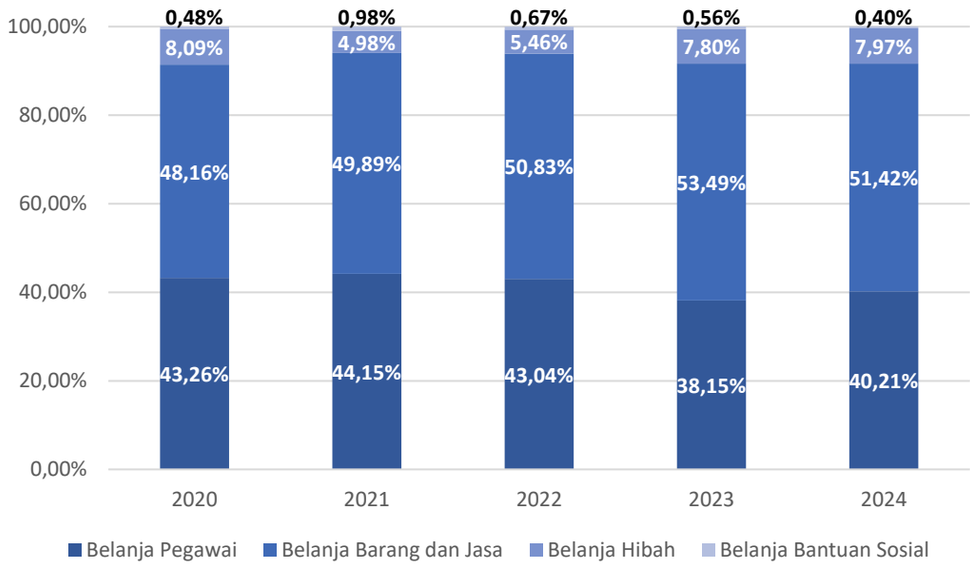

Gambar 2.182 Proporsi Komponen Belanja Operasi Kota Malang Tahun 2020-2024
Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Dalam ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Modal meliputi (1) Belanja Tanah; (2) Belanja Peralatan dan Mesin; (3) Belanja Bangunan dan Gedung; (4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan; (5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan (6) Belanja Aset Lainnya.

Proporsi komponen Belanja Modal Kota Malang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 berfluktuasi mengikuti prioritas belanja daerah pada tahun berjalan. Terdapat tiga komponen utama dalam belanja modal di Kota Malang yakni Belanja Peralatan dan Mesin dengan rata-rata proporsi terhadap belanja modal sebesar 32,46%, Belanja Gedung dan Bangunan dengan rata-rata proporsi terhadap belanja modal sebesar 27,74%, serta Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan rata-rata proporsi terhadap belanja modal sebesar 38,32%.

Tabel 2.25 Proporsi Komponen Belanja Modal Kota Malang
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Tanah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,56%
Belanja Peralatan dan Mesin	22,22%	33,15%	37,16%	26,22%	43,57%
Belanja Gedung dan Bangunan	39,96%	31,98%	34,48%	18,52%	13,74%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	35,98%	33,96%	27,64%	54,58%	39,43%
Belanja Aset Tetap Lainnya	1,72%	0,91%	0,72%	0,57%	0,40%
Belanja Aset Lainnya	0,12%	0,00%	0,00%	0,11%	0,31%

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 Belanja Tidak Terduga digunakan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 beserta pemulihan ekonomi.

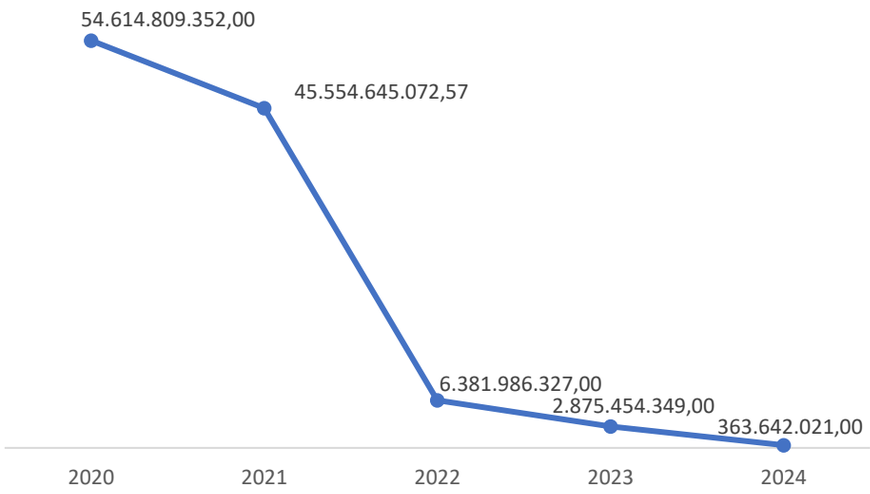

Gambar 2.183 Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Malang
Tahun 2020-2024
Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari 2 (dua) jenis yakni Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak terdapat pengeluaran ke dalam 2 (dua) jenis pengeluaran tersebut sehingga realisasinya sama dengan 0 (nol).

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis Pembiayaan Daerah diperlukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan Pembiayaan Daerah

pada tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Lebih lanjut, dalam Pasal 70 Ayat (3) bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari (1) SiLPA; (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan, dalam Pasal 70 Ayat (4) bahwa Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (4) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, Pembiayaan Neto di Kota Malang nilainya selalu positif, artinya pembiayaan dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pada periode tersebut, Penerimaan Pembiayaan Kota Malang hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan yang menurun sebesar -24,97%. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, secara umum digunakan untuk penyertaan modal daerah ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Besaran Modal yang diserahkan ke BUMD didasarkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah. Adapun Penyertaan Modal Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang menurun sebesar -28,48%.

Tabel 2.26 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Malang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	**PEMBIAYAAN**	**715.264.421.538,17**	**557.890.821.245,26**	**477.018.940.984,57**	**451.516.784.066,22**	**194.626.436.781,84**	**(24,68%)**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**742.764.421.538,17**	**567.890.821.245,26**	**484.293.940.984,57**	**460.204.464.066,22**	**199.626.436.781,84**	**(24,97%)**
3.1.1	Penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	742.764.421.538,17	567.890.821.245,26	484.293.940.984,57	460.204.464.066,22	199.626.436.781,84	(24,97%)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Perundang-Undangan						
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**27.500.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**7.275.000.000,00**	**8.687.680.000,00**	**5.000.000.000,00**	**(28,48%)**
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	27.500.000.000,00	10.000.000.000,00	7.275.000.000,00	8.687.680.000,00	5.000.000.000,00	(28,48%)
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

D. Neraca Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Dalam hal penyusunan Neraca Daerah tersaji informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas.

Tabel 2.27 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Malang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
ASET	**6.498.491.837.328,99**	**8.187.699.936.926,33**	**8.310.492.992.685,47**	**8.180.907.639.742,48**	**8.173.306.765.877,05**	**6,46%**
ASET LANCAR	**706.986.171.111,28**	**642.501.474.086,63**	**627.141.926.268,00**	**352.228.225.884,23**	**364.588.605.206,19**	**(12,96%)**
Kas di Kas Daerah	552.257.089.862,88	450.241.949.192,09	444.066.226.990,94	187.321.555.798,97	194.010.757.571,45	(18,52%)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	30.230.000,00	25,00%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	104.907.517,00	25,00%
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	1.080.580.077,63	619.818.877,57	129.000.742,71	0,00	(30,46%)
Kas di Bendahara BLUD	10.961.839.481,97	32.971.411.714,85	15.747.974.869,58	10.285.931.165,42	7.805.711.895,78	22,44%
Kas Lainnya	8.415.546.727,98	0,00	19.631.512,00	1.889.957.427,00	0,00	2356,79%
Kas Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	69.657.921,79	25,00%
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.023.273,00	25,00%
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Pajak Daerah	251.771.488.237,46	273.570.267.608,30	298.594.778.669,30	321.306.111.192,27	348.510.922.661,25	8,47%
Piutang Retribusi Daerah	10.315.657.788,88	10.749.987.073,88	11.496.589.138,88	11.572.360.938,88	16.512.545.213,88	13,63%
Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	8.404.128.991,00	9.753.617.500,00	0,00	0,00	4,01%
Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyisihan Piutang	-177.509.759.374	-195.318.563.234,49	-211.842.091.068,46	-230.444.513.948,11	-249.718.384.569,91	8,91%
Beban Dibayar Dimuka	847.790.750,92	800.459.613,76	887.940.866,96	1.127.708.419,17	1.105.076.931,39	7,59%
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Lainnya	7.604.737.350,38	9.137.961.415,62	6.230.650.445,38	7.601.952.551,09	5.926.596.258,09	(2,92%)
Persediaan	42.321.780.284,48	50.863.291.633,99	51.566.788.465,85	41.438.161.596,83	37.528.560.532,47	(1,88%)
INVESTASI JANGKA PANJANG	**388.112.467.065,00**	**462.909.606.382,00**	**500.382.325.961,00**	**498.685.631.815,00**	**521.713.573.646,00**	**7,91%**
Investasi NonPermanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investasi Permanen	388.112.467.065,00	462.909.606.382,00	500.382.325.961,00	498.685.631.815,00	521.713.573.646,00	7,91%
ASET TETAP	**5.263.615.641.065,61**	**6.937.702.422.524,26**	**7.022.176.174.663,19**	**7.161.203.800.525,16**	**7.042.391.969.762,13**	**8,34%**
Tanah	2.682.280.149.267,00	4.282.983.382.566,02	4.293.098.204.566,02	4.295.028.172.578,00	4.200.523.112.535,00	14,44%
Peralatan dan Mesin	973.913.983.918,64	1.053.512.110.061,93	1.156.009.699.463,20	1.261.756.376.758,48	1.328.435.893.153,85	8,08%
Gedung dan Bangunan	1.466.856.505.860,26	1.597.302.982.461,54	1.738.143.527.997,42	1.820.660.840.728,04	1.886.148.243.296,15	6,51%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.063.151.560.332,63	2.189.911.248.489,77	2.311.739.363.861,83	2.539.276.489.560,55	2.621.276.223.778,72	6,19%
Aset Tetap Lainnya	68.119.049.369,00	70.669.226.352,70	71.882.981.103,70	72.872.750.178,71	72.192.701.581,71	1,48%
Konstruksi dalam Pengerjaan	140.405.010.336,52	100.076.534.894,00	60.933.172.442,00	58.916.206.813,00	51.096.451.655,00	(21,10%)
Akumulasi Penyusutan	-2.131.110.618.018,44	-2.356.753.062.301,70	-2.609.630.774.770,98	-2.887.307.036.091,62	-3.117.280.656.238,30	9,98%

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ASET LAINNYA	**139.777.558.087,10**	**144.586.433.933,44**	**160.792.565.793,28**	**168.789.981.518,09**	**140.946.658.262,73**	**0,78%**
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tuntutan Ganti Rugi	65.290.000,00	61.010.000,00	41.772.500,00	30.710.000,00	27.560.000,00	(18,71%)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	98.842.318.000,00	98.842.318.000,00	98.842.318.000,00	98.842.318.000,00	98.842.318.000,00	0,00%
Aset Tak Berwujud	8.205.648.058,75	12.975.260.732,78	12.021.101.660,33	10.335.325.374,94	8.234.812.328,51	4,11%
Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya	509.112.439,18	570.044.483,96	639.978.863,29	654.509.037,52	0,00	(18,37%)
Aset Lain-lain	32.155.189.589,17	32.137.800.716,70	49.247.394.769,66	58.927.119.105,63	33.084.741.424,00	7,25%
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00	757.226.510,22	25,00%
PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.665.959.000,00**	**25,00%**
Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	103.665.959.000,00	25,00%
JUMLAH ASET	**6.498.491.837.328,99**	**8.187.699.936.926,33**	**8.310.492.992.685,47**	**8.180.907.639.742,48**	**8.173.306.765.877,05**	**6,46%**
KEWAJIBAN	**12.963.093.499,59**	**23.488.886.515,35**	**41.320.347.679,08**	**14.214.793.648,98**	**16.797.834.781,85**	**27,42%**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**12.963.093.499,59**	**23.488.886.515,35**	**41.320.347.679,08**	**14.214.793.648,98**	**16.797.834.781,85**	**27,42%**
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0,00	0,00	48732329,00	0,00	0,00	0,00%
Utang bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pendapatan Diterima Dimuka	1.730.362.809,84	3.557.842.339,25	4.335.063.060,87	3.739.412.128,46	7.039.864.765,63	50,49%
Utang Belanja	5.164.778.923,00	16.488.304.429,14	35.647.383.361,92	9.779.809.999,00	8.986.557.858,00	63,69%
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.067.951.766,75	3.442.739.746,96	1.289.168.927,29	695.571.521,52	771.412.158,22	(35,24%)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
Utang Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utang Dalam Negeri-Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
EKUITAS DANA	**6.485.528.743.829,40**	**8.164.211.050.410,98**	**8.269.172.645.006,39**	**8.166.692.846.093,50**	**8.156.508.931.095,20**	**6,45%**
EKUITAS	**6.485.528.743.829,40**	**8.164.211.050.410,98**	**8.269.172.645.006,39**	**8.166.692.846.093,50**	**8.156.508.931.095,20**	**6,45%**
Ekuitas	6.485.528.743.829,40	8.164.211.050.410,98	8.269.172.645.006,39	8.166.692.846.093,50	8.156.508.931.095,20	6,45%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**6.498.491.837.328,99**	**8.187.699.936.926,33**	**8.310.492.992.685,47**	**8.180.907.639.742,48**	**8.173.306.765.877,05**	**6,46%**

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

Untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan analisis neraca daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan, rasio solvabilitas mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Rasio likuiditas terdiri dari dua jenis, yaitu rasio lancar dan rasio *quick*. Jika dilihat dari perkembangannya selama tahun 2020 hingga tahun 2024, rasio lancar maupun rasio *quick* mengalami fluktuatif. Meskipun begitu, besaran rasio tersebut menunjukan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Malang dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tergolong baik karena nilainya jauh berada di atas 1 (satu). Pada Tahun 2024, rasio lancar dan rasio *quick* masing-masing sebesar 21,70 dan 19,47.

Tabel 2.28 Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Kota Malang
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar	54,54	27,35	15,18	24,78	21,70
Rasio *Quick*	51,27	25,19	13,93	21,86	19,47
Rasio Solvabilitas					
Rasio Total Hutang terhadap Aset	0,001995	0,002869	0,004972	0,001738	0,002055
Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas	0,001999	0,002877	0,004997	0,001741	0,002059

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

Rasio solvabilitas juga terdiri dari dua yakni rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, kedua jenis rasio solvabilitas nilainya sangat kecil karena nilainya jauh lebih rendah dari 1 (satu). Hal ini menunjukan kemampuan Kota Malang dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya tergolong baik.

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

2.2.2.1 Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (1) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (2) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (3) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (4) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Dalam hal ini, Kota Malang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK tiga belas kali berturut-turut.

Tabel 2.29 Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur

2.2.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budgeting*) yaitu penganggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan keuangan daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro job*).

Untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada kepentingan publik dapat dilihat pada proporsi belanja kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran. Semakin besar belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur berarti semakin kecil alokasi dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kota Malang menunjukkan tren yang fluktuatif selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Secara keseluruhan, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kota Malang masih berada di atas 30%, sehingga belum mampu memenuhi ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Daerah untuk mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru paling tinggi 30% dari total belanja.

Tabel 2.30 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Malang Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	**729.276.551.486,77**	**832.390.933.139,63**	**805.321.434.867,47**	**834.812.187.648,13**	**910.024.655.372,78**
Belanja Daerah	2.103.467.535.397,26	2.225.952.718.513,56	2.188.318.745.870,33	2.596.706.284.209,93	2.455.641.071.538,72
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	27.500.000.000,00	10.000.000.000,00	7.275.000.000,00	8.687.680.000,00	5.000.000.000,00
Total Pengeluaran Daerah	**2.130.967.535.397,26**	**2.235.952.718.513,56**	**2.195.593.745.870,33**	**2.605.393.964.209,93**	**2.460.641.071.538,72**
Proporsi Jenis Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	**34,22%**	**37,23%**	**36,68%**	**32,04%**	**36,98%**

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

Kendati demikian, Pemerintah Kota Malang berupaya untuk menjaga proporsi belanja aparatur tetap terkendali melalui berbagai langkah efisiensi, seperti optimalisasi formasi pegawai, digitalisasi proses kerja, dan peningkatan produktivitas aparatur. Meskipun proporsi belanja pegawai relatif tinggi, Kota Malang tetap mampu mempertahankan alokasi yang memadai untuk belanja modal dan program prioritas, sebagaimana terlihat dari peningkatan belanja daerah secara keseluruhan. Pemerintah Kota Malang juga terus berusaha memperkuat sinergi antar sektor untuk memastikan bahwa pengeluaran aparatur berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, untuk mengetahui kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari efektivitas belanja daerah berdasarkan tingkat serapannya. Rendahnya tingkat serapan daerah menunjukan pengelolaan keuangan yang tidak optimal, karena menyebabkan alokasi dana yang seharusnya dapat dibelanjakan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik menjadi tidak terealisasi dan proses pembangunan terhambat.

Suatu daerah dapat dikatakan memiliki pengelolaan keuangan yang efektif apabila tingkat serapan anggarannya berada di atas 90%. Tingkat capaian belanja Kota Malang mengalami tren positif yang menunjukkan Belanja Daerah semakin efektif, bahkan pada tahun 2024 capaian realisasi belanja telah mencapai 93,70%.

Tabel 2.31 Tingkat Capaian Belanja Kota Malang Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Daerah	**77,68%**	**86,89%**	**85,96%**	**91,77%**	**93,70%**
Belanja Operasi	**80,73%**	**87,65%**	**89,97%**	**91,98%**	**93,84%**
Belanja Pegawai	73,24%	83,98%	89,43%	89,20%	93,78%
Belanja Barang dan Jasa	87,83%	90,09%	89,48%	94,10%	93,43%
Belanja Bunga	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Belanja Subsidi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Belanja Hibah	88,04%	97,68%	98,78%	96,03%	99,64%
Belanja Bantuan Sosial	62,55%	94,16%	97,52%	56,82%	61,43%
Belanja Bantuan Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Belanja Modal	**86,51%**	**89,59%**	**72,83%**	**93,65%**	**93,68%**
Belanja Tanah	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,82%
Belanja Peralatan dan Mesin	91,98%	90,83%	90,74%	94,52%	94,56%
Belanja Gedung dan Bangunan	92,71%	96,42%	92,90%	94,41%	91,17%

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	77,57%	85,20%	57,00%	93,57%	93,24%
Belanja Aset Tetap Lainnya	93,91%	91,47%	84,73%	71,60%	96,92%
Belanja Aset Lainnya	96,02%	0,00%	100,00%	100,00%	88,78%
Belanja Tidak Terduga	**27,30%**	**55,97%**	**16,30%**	**16,46%**	**9,25%**
Belanja Transfer	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Belanja Bagi Hasil Pajak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Belanja Bagi Hasil Retribusi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

2.2.2.3 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Pada tahun 2020 hingga tahun 2023 realisasi pengeluaran daerah melampaui pendapatan daerah, sehingga terjadi defisit anggaran dan selisih tersebut dibiayai melalui penerimaan pembiayaan daerah. Hal ini menyebabkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) menjadi lebih rendah yang menunjukkan Belanja Daerah semakin efektif.

Tabel 2.32 Defisit Riil Anggaran Kota Malang Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah	1.956.090.185.104,35	2.152.355.838.252,87	2.171.753.457.135,85	2.344.815.945.277,81	2.465.737.922.935,90
Dikurangi Realisasi:					
Belanja Daerah	2.103.467.535.397,26	2.225.952.718.513,56	2.188.318.745.870,33	2.596.706.284.209,93	2.455.641.071.538,72
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	27.500.000.000,00	10.000.000.000,00	7.275.000.000,00	8.687.680.000,00	5.000.000.000,00
Defisit/Surplus Riil	**(174.877.350.292,91)**	**(83.596.880.260,69)**	**(23.840.288.734,48)**	**(260.578.018.932,12)**	**5.096.851.397,18**

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

Efektivitas belanja daerah yang mengalami tren positif dan diterapkannya kebijakan defisit pada penganggaran telah mampu menekan proporsi SiLPA terhadap Belanja Daerah, sehingga terus mengalami penurunan. SiLPA pada tahun 2020 sebesar 742,76 miliar Rupiah dan menjadi 199,63 miliar Rupiah pada tahun 2024, sehingga proporsi SiLPA terhadap Belanja Daerah turun dari 35,31% menjadi 8,13%.

Tabel 2.33 Proporsi SiLPA terhadap Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SiLPA	742.764.421.538,17	567.890.821.245,26	484.293.940.984,57	460.204.464.066,22	199.626.436.781,84
Belanja Daerah	2.103.467.535.397,26	2.225.952.718.513,56	2.188.318.745.870,33	2.596.706.284.209,93	2.455.641.071.538,72
Proporsi SiLPA terhadap Belanja Daerah	**35,31%**	**25,51%**	**22,13%**	**17,72%**	**8,13%**

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

Selama lima tahun terakhir, Kota Malang sepenuhnya bergantung pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya untuk menutup defisit anggaran, dengan kontribusi konsisten sebesar 100% setiap tahunnya. Sumber pendanaan lain seperti pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah, pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman daerah, dan piutang daerah tidak memberikan kontribusi sama sekali. Ketergantungan pada SiLPA mengindikasikan bahwa Kota Malang menerapkan kebijakan fiskal yang cenderung konservatif dengan menghindari pinjaman atau pencairan aset, sekaligus mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 2.34 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Malang Kota Malang Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100%	100%	100%	100%	100%
Pencairan dana cadangan	0%	0%	0%	0%	0%
Hasil Penjualan Kekayan Daerah Yang di Pisahkan	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Pinjaman Daerah	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Piutang Daerah	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

Pada tahun 2020 hingga 2022, secara keseluruhan, SiLPA Kota Malang bersumber dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Penyebab besarnya komponen tersebut tidak terlepas dari rencana belanja yang tidak terlaksana dan dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, komponen tersebut mengalami tren negatif yang berarti realisasi belanja semakin mendekati perencanaan. Sehingga, pada tahun 2023 hingga 2024, SiLPA Kota Malang beralih dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya menjadi pelampauan penerimaan pendapatan transfer.

Tabel 2.35 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Malang Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	**567.887.071.245,26**	**100,00**	**484.293.940.984,57**	**100,00**	**460.453.652.250,09**	**100,00**	**199.626.445.134,10**	**100,00**	**204.723.288.179,02**	**100,00**
Pelampauan peneriman PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	308.689.915,35	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan peneriman pendapatan transfer	9.994.977.270,91	1,76	154.850.756.381,00	31,97	103.592.368.695,00	22,50	176.550.729.218,00	88,44	165.019.711.482,00	80,61
Pelampauan peneriman lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	4.004.393.753,55	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa penghematan	557.892.093.974,35	98,24	325.438.790.850,02	67,20	356.552.593.639,74	77,44	23.075.715.916,10	11,56	39.703.576.697,02	19,39

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
belanja atau akibat lainnya										
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: LRA Kota Malang Tahun 2020-2024 (data diolah)

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain kerangka pendanaan yang dialokasikan untuk belanja daerah terdapat alternatif pembiayaan pembangunan daerah di luar APBD Kota Malang, yaitu:

a. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sejauh ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema CSR. Peningkatan kinerja program CSR dalam pembangunan Kota Malang ditempuh melalui penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), perluasan keikutsertaan perusahaan dalam agenda program pembangunan Kota Malang, penyelarasan program-program CSR perusahaan dengan agenda program dan kegiatan prioritas pembangunan. Namun demikian, masih ada peluang untuk optimalisasi CSR dalam rangka Pembangunan Daerah.

b. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan.

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan. Secara definisi dapat diartikan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak dan pengeluaran daerah lainnya.

c. Bantuan dan Kerja Sama dengan Luar Negeri

Alternatif pembiayaan dari bantuan luar negeri merupakan salah satu solusi penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran negara dan daerah. Bantuan luar negeri bisa berupa hibah, pinjaman lunak (soft loan), ataupun kerja sama teknis dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dll. Bantuan ini tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga mencakup dukungan teknis, pelatihan sumber daya manusia, serta penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan proyek. Terdapat beberapa contoh program bantuan dan kerja sama dari luar negeri seperti *Local Service Delivery Improvement Project* (LSDP) yang merupakan proyek dengan untuk meningkatkan penyediaan layanan publik di tingkat lokal serta *National Urban Development Project* (NUDP) yang bertujuan untuk mengatasi tantangan perkotaan di Indonesia, seperti urbanisasi, kesenjangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup perkotaan.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jnagka Menengah Daerah perlu dilakukan proyeksi terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk Tahun 2026-2030 dengan mempertimbangkan analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kondisi saat ini, dan isu-isu strategis di waktu yang akan datang.

Tabel 2.36 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kota Malang Tahun 2026-2030

No.	Uraian	*Baseline*	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**						
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**885.318.495.121,91**	**1.035.898.706.501,00**	**1.054.488.321.383,78**	**1.068.197.561.994,57**	**1.087.756.659.509,30**	**1.097.902.057.188,96**
1.1.1	Pajak daerah	694.253.010.377,75	852.405.450.000,00	868.352.742.000,00	878.662.971.000,00	895.002.814.000,00	901.849.228.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	120.897.712.987,82	63.751.000.000,00	68.987.755.000,00	69.526.992.500,00	69.989.340.625,00	70.514.830.156,25
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	31.413.404.192,61	32.696.829.774,00	34.410.949.758,78	35.145.723.869,57	35.820.630.259,30	36.380.324.407,71
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	38.754.367.563,73	87.045.426.727,00	82.736.874.625,00	84.861.874.625,00	86.943.874.625,00	89.157.674.625,00
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.580.395.332.205,00**	**1.157.046.050.410,00**	**1.157.046.050.410,00**	**1.157.046.050.410,00**	**1.157.046.050.410,00**	**1.157.046.050.410,00**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.309.682.493.105,00	1.101.259.699.000,00	1.101.259.699.000,00	1.101.259.699.000,00	1.101.259.699.000,00	1.101.259.699.000,00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	270.712.839.100,00	55.786.351.410,00	55.786.351.410,00	55.786.351.410,00	55.786.351.410,00	55.786.351.410,00
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**24.095.608,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Hibah	24.095.608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		**2.465.737.922.935,90**	**2.192.944.756.911,00**	**2.211.534.371.793,78**	**2.225.243.612.404,57**	**2.244.802.709.919,30**	**2.254.948.107.598,96**
2	**Belanja Daerah**						
2.1	**Belanja Operasi**	**2.263.346.316.602,04**	**2.164.770.466.063,50**	**2.166.149.003.566,00**	**2.179.858.244.176,79**	**2.199.417.341.691,52**	**2.209.562.739.371,18**
2.1.1	Belanja Pegawai	910.024.655.372,78	1.131.812.880.261,54	1.131.812.880.261,54	1.131.812.880.261,54	1.131.812.880.261,54	1.131.812.880.261,54
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.163.846.672.455,26	926.539.535.801,96	927.918.073.304,46	941.627.313.915,25	961.186.411.429,98	971.331.809.109,64

No.	Uraian	*Baseline*	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	180.388.848.774,00	85.470.150.000,00	85.470.150.000,00	85.470.150.000,00	85.470.150.000,00	85.470.150.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.086.140.000,00	20.947.900.000,00	20.947.900.000,00	20.947.900.000,00	20.947.900.000,00	20.947.900.000,00
2.2	**Belanja Modal**	**191.931.112.915,68**	**127.829.126.200,81**	**127.829.126.200,81**	**127.829.126.200,81**	**127.829.126.200,81**	**127.829.126.200,81**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**363.642.021,00**	**7.556.242.026,97**	**7.556.242.026,97**	**7.556.242.026,97**	**7.556.242.026,97**	**7.556.242.026,97**
2.4	**Belanja Transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA		**2.455.641.071.538,72**	**2.300.155.834.291,28**	**2.301.534.371.793,78**	**2.315.243.612.404,57**	**2.334.802.709.919,30**	**2.344.948.107.598,96**
SURPLUS/DEFISIT		**10.096.851.397,18**	**(107.211.077.380,28)**	**(90.000.000.000,00)**	**(90.000.000.000,00)**	**(90.000.000.000,00)**	**(90.000.000.000,00)**
3	**Pembiayaan**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**199.626.436.781,84**	**107.211.077.380,28**	**95.000.000.000,00**	**95.000.000.000,00**	**95.000.000.000,00**	**95.000.000.000,00**
3.1.1	Penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	199.626.436.781,84	107.211.077.380,28	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	*Baseline*	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5.000.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		**194.626.436.781,84**	**107.211.077.380,28**	**90.000.000.000,00**	**90.000.000.000,00**	**90.000.000.000,00**	**90.000.000.000,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**204.723.288.179,02**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Bapenda dan BKAD Kota Malang (diolah)

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah total belanja daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 2.37 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2026-2030

Uraian	Tahun				
	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	2.192.944.756.911,00	2.211.534.371.793,78	2.225.243.612.404,57	2.244.802.709.919,30	2.254.948.107.598,96
Penerimaan Pembiayaan	107.211.077.380,28	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00
Total Penerimaan	**2.300.155.834.291,28**	**2.306.534.371.793,78**	**2.320.243.612.404,57**	**2.339.802.709.919,30**	**2.349.948.107.598,96**
Dikurangi:					
Belanja Tidak Terduga	7.556.242.026,97	7.556.242.026,97	7.556.242.026,97	7.556.242.026,97	7.556.242.026,97
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Kapasitas riil kemampuan keuangan	**2.192.944.756.911,00**	**2.211.534.371.793,78**	**2.225.243.612.404,57**	**2.244.802.709.919,30**	**2.254.948.107.598,96**

Sumber: Bapenda dan BKAD Kota Malang (diolah)

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 158, kapasitas riil keuangan Daerah dialokasikan kedalam Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 2.38 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang Tahun 2026-2030

Uraian	Tahun				
	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.192.944.756.911,00	2.211.534.371.793,78	2.225.243.612.404,57	2.244.802.709.919,30	2.254.948.107.598,96
Prioritas I	721.961.145.863,00	662.558.041.775,00	664.918.736.442,00	668.364.355.754,00	683.597.711.190,00
Prioritas II	44.801.926.490,03	20.633.366.508,03	21.852.278.807,07	61.634.573.600,03	25.393.446.863,03
Prioritas III	1.525.836.519.911,28	1.610.786.721.483,78	1.620.916.355.128,53	1.597.247.538.538,30	1.628.400.707.518,96

Sumber: Bappeda Kota Malang (diolah)

Program Prioritas yang mendukung perwujudan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Malang dapat dilihat pada Prioritas I dan Prioritas II. Perbedaannya yakni terletak pada Prioritas I yang

terbatas pada belanja *mandatory* dan pemenuhan SPM, sedangkan Prioritas II merupakan belanja untuk program prioritas pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota *non mandatory* dan SPM. Sementara itu, prioritas III merupakan belanja untuk pemenuhan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam tata kelola pemerintahan.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk penyesuaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis pembangunan Kota Malang tahun 2025-2029 berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kota Malang. Pembentukan isu-isu strategis di Kota Malang dilakukan berdasarkan analisis data kondisi eksisting, analisis hasil pembangunan periode sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJPD Kota Malang Tahun 2025-2045; telaah terhadap dokumen RPJMN Tahun 2025-2029; telaah terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029; telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional; telaah terhadap dokumen kualitas lingkungan hidup; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan yang dijabarkan merupakan kondisi eksisting (realita) yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Secara garis besar permasalahan pokok pembangunan berdasarkan Isu Strategis RPJPD adalah:

1. Penguatan SDM yang sehat dan unggul masih belum optimal (IKS masih rendah di 0,341, stunting masih tinggi, APM masih dibawah 100, masih ada 3.468 anak tidak sekolah, kualitas pendidikan belum cukup tinggi);
2. Lingkungan Sosial Masyarakat yang harmonis dan berbudaya (pendidikan karakter, agama, kebangsaan, kewargaan, budaya belum optimal karena masih ada kasus perundungan, karakter

anak yang cenderung tergerus teknologi, implementasi pancasila kurang);
3. Belum meratanya pelaksanaan dan kesempatan pembangunan ekonomi inklusif (pertumbuhan ekonomi di 5,4% tahun 2024, kemiskinan 3,91, pengangguran 6,10 dan ketimpangan 0,42 masih menjadi masalah yang harus diselesaikan dan fluktuasi inflasi terhadap komponen bergejolak);
4. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah daerah dalam rangka kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (PDRB 100,12 Trilyun belum optimal karena kemiskinan, pengangguran, rasio gini masih besar; Proporsi PDRB ekonomi kreatif masih 7,9% padahal IPM Kota Malang cukup tinggi);
5. Infrastruktur fundamental perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan masih belum terbangun optimal (masih ada kawasan kumuh, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman masih 36,17%, Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan masih 83,58%);
6. Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah untuk lingkungan perkotaan masih belum dapat menunjang kenyamanan aktivitas di perkotaan (IKLH di angka 61,76; timbulan sampah terolah di TPA masih sekitar 32,91%, Ketidakcukupan Pangan 4,99%, Indeks Risiko Bencana 78,21);
7. Reformasi Birokrasi belum optimal dilaksanakan (Implementasi RB General masih dibawah 80 (77,42); SPI masih dibawah 70 (68,79), Sistem Merit masih dibawah 300 (297), Nilai SAKIP masih dibawah 90 (80,08));
8. Pendapatan Daerah belum dapat memenuhi kebutuhan Belanja Daerah perkotaan yang direncanakan menjadi Kota Metropolitan/Kawasan Perkotaan Prioritas (Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah masih lebih kecil dari Pendapatan transfer (36%)).

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan diantaranya:

a. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan pada seluruh tingkatan dan satuan pendidikan;
b. Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan pada seluruh tingkatan dan satuan pendidikan secara merata dan berkelanjutan;
c. Belum optimalnya pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk pengembangan kompetensi dan talenta muda;

d. Belum optimalnya aksesibilitas pelayanan pendidikan, termasuk mendorong pelayanan pendidikan inklusi secara merata pada seluruh tingkatan dan satuan pendidikan;
e. Belum optimalnya penerapan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, termasuk peningkatan digitalisasi bahan ajar;
f. Belum optimalnya kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan akses pendidikan lebih lanjut;
g. Masih terdapat anak usia dini/anak usia sekolah yang belum menempuh pendidikan dan masih ada anak tidak sekolah.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang kesehatan diantaranya:

a. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana pelayanan kesehatan;
b. Belum meratanya sebaran tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan;
c. Belum tercukupinya fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan;
d. Belum optimalnya kualitas layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk dalam hal cakupan jenis layanan;
e. Belum optimalnya kualitas layanan pada Rumah Sakit Umum atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan;
f. Belum optimalnya aksesibilitas pelayanan kesehatan, termasuk penyediaan fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas secara memadai pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan;
g. Masih terdapat kasus gizi buruk/malnutrisi dan gangguan pertumbuhan pada anak (*stunting*), *wasting*, angka kematian ibu, kasus baru TBC, malaria (PTI ATM), dan penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
h. Belum optimalnya penanganan HIV/AIDS;
i. Masih terdapat praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
j. Belum optimalnya penanganan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya:

a. Belum optimalnya kualitas sistem jaringan jalan dan jembatan;
b. Belum optimalnya sistem drainase dan utilitas secara terpadu dan berkelanjutan sehingga masih terdapat sejumlah wilayah/titik genangan air yang disebabkan hujan;

c. Kurang terintegrasinya infrastruktur jalan dan drainase sehingga kapasitas dan kelancaran saluran drainase belum optimal untuk mendukung kinerja jalan dan upaya mencegah terjadinya genangan pada ruas-ruas jalan kota;
d. Belum seluruh sistem jaringan irigasi dalam kondisi baik;
e. Belum optimalnya ketersediaan air bersih dan air minum, termasuk ketersediaan akses terhadap jaringan air bersih dan air minum bagi seluruh rumah tinggal;
f. Belum optimalnya kualitas sanitasi, termasuk ketersediaan akses terhadap sanitasi bagi seluruh rumah tinggal;
g. Belum optimalnya penyediaan sumber air baku yang mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Malang secara mandiri;
h. Belum optimalnya sistem manajemen pengelolaan air limbah berbasis komunal yang berkelanjutan;
i. Belum optimalnya integrasi Pengolahan Air Minum (PAM) dan Pengolahan Air Limbah (PAL) atas kebutuhan air dan pengelolaan limbah;
j. Belum optimalnya kerja sama Malang Raya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sungai dan air minum;
k. Belum optimalnya penataan jaringan utilitas;
l. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang *sustainable* dan inklusif, termasuk infrastruktur yang ramah bagi penyandang difabel dan lansia;
m. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kurangnya pengawasan kesesuaian Tata Ruang;
n. Belum optimalnya penataan bangunan gedung pemerintah yang memiliki karakter khas Malang;
o. Belum terdapat integrasi *geospasial* sebagai dukungan penyelesaian permasalahan pembangunan;
p. Terbatasnya keterhubungan/interkoneksi antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya;
q. Kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman antara lain:

a. Belum optimalnya penanganan infrastruktur permukiman;
b. Belum optimalnya prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
c. Masih banyak terdapat rumah hunian dengan kondisi tidak layak huni dan masih terdapatnya sejumlah kawasan kumuh, serta permukiman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (diantaranya dengan status lahan/tanah ilegal atau dalam kawasan rawan bencana);

d. *Backlog* perumahan;
e. Belum optimalnya penataan dan penyediaan rumah layak huni dengan konsep pengembangan hunian vertikal.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu:

a. Belum optimalnya aktivasi poskamling dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
b. Masih belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. Keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku penegak Peraturan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Belum optimalnya ketangguhan masyarakat dalam ketahanan bencana;
e. Belum optimalnya mitigasi dan manajemen risiko bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam, di antaranya guna mengantisipasi dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan;
f. Belum optimalnya manajemen penanggulangan kebakaran, mengingat Kota Malang merupakan kota besar menuju kota metropolitan;
g. Belum semua bangunan gedung publik memiliki sistem proteksi kebakaran yang memadai dan jalur evakuasi;
h. Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran pada area publik, di antaranya pada akses jalan kecil.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang sosial diantaranya:

a. Belum optimalnya fungsi jaring pengaman sosial sebagai penanganan dampak inflasi;
b. Kurangnya kolaborasi perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan Data Kesejahteraan Sosial;
c. Belum optimalnya layanan sosial bagi lansia, mengingat tinggi Usia Harapan Hidup sehingga rasio ketergantungan bagi lansia akan semakin meningkat;
d. Relatif tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan, terutama yang berasal dari luar Kota Malang (urbanisasi PPKS);
e. Lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia;
f. Masih terdapat penyandang kemiskinan ekstrem.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang tenaga kerja diantaranya:

a. Belum optimalnya kualitas hubungan industrial yang kondusif;
b. Masih adanya gap antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan;
c. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten terhadap perubahan teknologi informasi;
d. Ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
e. Informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik;
f. Kurangnya kolaborasi antara pelaku usaha lokal sebagai potensi penyedia lapangan kerja dan pencari kerja lokal;
g. Bonus demografi yang kontraproduktif akibat ketimpangan lapangan pekerjaan yang tersedia;
h. Belum optimalnya peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan perusahaan, kesempatan kerja dan lapangan berusaha.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya;

a. Belum optimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak, dilihat naiknya kasus kekerasan dalam rumah tangga;
b. Masih terjadinya kesenjangan pembangunan gender;
c. Angka perceraian di Kota Malang masih tinggi;
d. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga dalam penguatan karakter berbasis keluarga;
e. Belum optimalnya peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik;
f. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang pangan diantaranya;

a. Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dalam menanggulangi potensi risiko keamanan pangan;
b. Ketersediaan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi perlu dipertahankan;
c. Perlunya menjaga keberlanjutan peningkatan konsumsi dan keamanan pangan menghadapi fluktuasi harga pangan, serta

memastikan inklusivitas akses pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup diantaranya;

a. Belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang dapat dilihat dari nilai masih rendahnya indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan;
b. Volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat meningkat. namun tidak disertai upaya dalam pengurangan sampah melalui program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
c. Terbatasnya penyediaan ruang hijau publik di Kota Malang;
d. Sebagian besar lahan di Kota Malang memiliki daya dukung lingkungan yang rendah dan tidak bisa lagi menampung pertambahan penduduk;
e. Penurunan ketersediaan air dan lahan yang berdampak pada ketahanan air kota secara keseluruhan;
f. Semakin berkurangnya kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang dan akan mencapai batasan maksimal dalam waktu tidak terlalu lama.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya:

a. Belum seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Belum tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang cepat, mudah dan terintegrasi, termasuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai *Single Data* dalam pelayanan publik terintegrasi.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya:

a. Belum optimalnya pengendalian pertumbuhan penduduk;
b. Belum terlayaninya seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB;
c. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kebutuhan layanan dasar dan jaminan sosial tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk;
d. Berkurangnya daya dukung dan daya tampung infrastruktur akibat peningkatan arus migrasi dan urbanisasi penduduk.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas pelayanan transportasi;
b. Tingkat kepadatan dan kemacetan lalu lintas semakin tinggi, khususnya di sejumlah ruas jalan utama;
c. Belum optimalnya pembangunan dan inovasi teknologi pada pengelolaan pusat parkir terpadu maupun tepi jalan umum;
d. Belum terdapat layanan angkutan umum terintegrasi;
e. Belum optimalnya Sistem Transportasi Massal dan terminal yang tersedia;
f. Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang (46,12% belum ada palang pintu) belum optimal.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika antara lain:

a. Sistem informasi manajemen pemerintahan belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan;
b. Penerapan digitalisasi layanan pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal;
c. Kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih belum memadai/belum lengkap;
d. Belum optimalnya tata kelola SPBE termasuk belum optimalnya integrasi, kolaborasi dan interoperabilitas data antar Perangkat Daerah;
e. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi untuk mendukung program pengurangan penggunaan kertas (*paperless*);
f. Belum optimalnya infrastruktur digital;
g. Belum optimalnya literasi digital guna memunculkan talenta digital yang memadai;
h. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Smart City*/*Smart Grid*).

9. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah antara lain:

a. Masih rendahnya jumlah koperasi aktif;
b. Belum optimalnya manajemen tata kelola koperasi yang baik;
c. Belum optimalnya fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta teknologi;
d. Belum optimalnya pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan;
e. Masih rendahnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro;

f. Sebagian besar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki pekerja dengan keahlian rendah (*low-skilled workers*);
g. Masih banyak UMKM yang bergerak di sektor bernilai tambah rendah;
h. Rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha;
i. Rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi;
j. Belum optimalnya penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi;
k. Kurangnya kolaborasi penerapan teknologi untuk mendukung produktivitas UMKM;
l. Belum optimalnya pemanfaatan Malang Creative Center (MCC) sebagai sebagai inkubator bisnis para pelaku UMKM.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal diantaranya:

a. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik belum optimal;
b. Digitalisasi pelayanan publik belum optimal;
c. Penggalian potensi dan peluang investasi belum optimal;
d. Penyederhanaan pelayanan perizinan belum optimal.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yaitu:

a. Belum optimalnya partisipasi dan peran serta pemuda dan organisasi kepemudaan;
b. Belum optimalnya kewirausahaan pemuda dalam rangka peningkatan produktivitas, inovasi dan daya saing;
c. Destruktif teknologi: pengaruh/ekses negatif teknologi terhadap pemuda;
d. Masih kurangnya budaya berolahraga masyarakat;
e. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga khususnya fasilitas publik yang tersedia dan termanfaatkan;
f. Masih diperlukan pembinaan dan pengembangan atlet dan pelatih dalam rangka optimalisasi olahraga prestasi.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang statistik diantaranya;

a. Penyediaan data belum selaras dengan kebutuhan data perencanaan;
b. Ketersediaan data statistik yang relatif belum memadai dan valid, khususnya data statistik sektoral dari Perangkat Daerah;
c. Belum optimalnya pengelolaan satu data/*Big Data* dan pola pemanfaatan secara *geospasial*.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang persandian yaitu:

a. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi dan persandian;
b. Belum optimalnya pengembangan dan penguatan infrastruktur keamanan siber dengan investasi dalam teknologi keamanan terbaru, pelatihan personel, dan pengembangan kebijakan yang ketat;
c. Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang kebudayaan antara lain:

a. Pelestarian cagar budaya belum optimal;
b. Masih kurangnya pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa, termasuk seni tradisional;
c. Belum optimalnya ruang kreasi digital bagi pelaku seni budaya;
d. Belum optimalnya pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya lokal serta mendorong nilai-nilai kebangsaan.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang perpustakaan antara lain:

a. Belum optimalnya budaya gemar membaca dan literasi masyarakat;
b. Belum optimalnya pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi;
c. Belum tersedia fasilitas/sarana prasarana khusus dalam pelaksanaan pelestarian/konservasi terhadap koleksi nasional dan naskah kuno Kota Malang;
d. Belum optimalnya pembaharuan konten literasi digital pada media sosial;
e. Belum optimalnya upaya digitalisasi bahan pustaka dan naskah kuno;
f. Masih terbatasnya cakupan layanan perpustakaan keliling atau titik-titik baca/edukasi.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang kearsipan diantaranya:

a. Belum optimalnya manajemen pengelolaan kearsipan;
b. Belum optimalnya penyediaan layanan *database* arsip daerah;
c. Belum optimalnya pelayanan penelusuran dan akuisisi arsip statis;

d. Belum optimalnya upaya digitalisasi arsip daerah.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan diantaranya:

a. Belum optimalnya pengolahan produk lokal hasil perikanan budidaya serta penggunaan teknologi tepat guna yang belum optimal pengaplikasiannya;
b. Kurangnya peningkatan kapasitas kelompok pengusaha budidaya perikanan melalui inovasi, teknologi, dan kebijakan yang adaptif guna menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang baru;
c. Belum optimalnya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan yang dapat dilihat dari rendahnya angka konsumsi ikan di Kota Malang.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang pariwisata diantaranya:

a. Belum terjaminnya kepastian waktu pelaksanaan *event* pariwisata daerah dan belum luasnya publikasi *event*;
b. Akses pasar produk kreatif yang masih terkendala;
c. Kurangnya standarisasi produk kreatif untuk pengembangan distribusi secara domestik maupun internasional;
d. Belum optimalnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif temasuk fasilitasi pembinaan *startup* pelaku ekonomi kreatif;
e. Belum optimalnya pengelolaan *Malang Creative Center* (MCC) sebagai sarana pembinaan dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif serta sebagai inkubator bisnis;
f. Belum optimalnya pemanfaatan *co-working space* oleh pelaku ekonomi kreatif;
g. Belum optimalnya *branding* Kota Malang sebagai destinasi wisata;
h. Masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas pariwisata;
i. Masih rendahnya kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan;
j. Kurangnya destinasi/promosi wisata unggulan;
k. Belum optimalnya diversifikasi wisata untuk menjamin *sustainable tourism*;
l. Belum optimalnya penguatan destinasi pariwisata dan penyerapan produk lokal;
m. Belum optimalnya budaya masyarakat menjadi bagian nilai ekonomi pariwisata.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang pertanian antara lain:

a. Penurunan kualitas atau ketersediaan lahan pertanian yang menyebabkan penurunan produksi padi;
b. Kurangnya akses terhadap input pertanian yang berkualitas seperti benih, pupuk, dan teknologi;
c. Penurunan luas panen padi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau fungsi lainnya;
d. Nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian yang masih lemah.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan diantaranya:

a. Distribusi dan pemasaran produk lokal belum menjangkau pasar secara luas dan efisien;
b. Strategi promosi produk lokal kurang inovatif dan belum maksimal dalam meningkatkan preferensi konsumen;
c. Rantai pasok bahan pokok belum terjamin keberlanjutannya, berpotensi menimbulkan kelangkaan;
d. Pengelolaan Pasar Rakyat belum termodernisasi untuk meningkatkan daya saing dan kenyamanan;
e. Volatilitas harga pangan mengganggu stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat;
f. Mekanisme pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan penting belum efektif dalam meredam inflasi.

5. Urusan Perindustrian

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian diantaranya:

a. Keterbatasan ruang pengembangan dan inkubasi bagi industri kreatif;
b. Pengawasan perizinan usaha IKM belum optimal;
c. Tingkat pemberdayaan IKM masih rendah;
d. Adopsi teknologi, riset, dan inovasi dalam perindustrian masih terbatas;
e. Dukungan pengembangan ekonomi kreatif belum terintegrasi.

A. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

a. Penataan Produk Hukum Daerah belum komprehensif dan efektif;
b. Belum optimalnya perumusan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif untuk mendukung fungsi Perangkat Daerah dalam menjalankan urusan kewenangannya.

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

a. Program Pembentukan Perda (Propemperda) belum berjalan optimal.

B. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya upaya mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang inovatif, *sustainable* dan terintegrasi (*intern* dan *ekstern*);
b. Belum optimalnya keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan provinsi dan nasional;
c. Belum optimalnya kesesuaian dan keterkaitan antara isu strategis/prioritas pembangunan daerah dengan kebutuhan daerah/permasalahan pembangunan;
d. Belum optimalnya keselarasan perencanaan dan penganggaran.

2. Keuangan

Permasalahan yang muncul dalam urusan keuangan diantaranya:

a. Belum terwujudnya kemandirian fiskal daerah;
b. Belum berkembangnya inovasi pembiayaan pembangunan.
c. Belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah;
d. Pengamanan terhadap aset daerah baik secara fisik, administrasi dan hukum belum maksimal;
e. Belum optimalnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi perlu ditingkatkan.

3. Kepegawaian

Permasalahan yang muncul dalam urusan kepegawaian diantaranya:

a. Belum optimalnya kesiapan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan di era digitalisasi;
b. Belum optimalnya penerapan pola karier berbasis Merit Sistem;
c. Belum semua PNS memiliki kesesuaian antara kualifikasi dan kompetensi pada unit kerjanya;
d. Belum optimalnya kinerja dan profesionalitas ASN.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pendidikan dan pelatihan diantaranya:

a. Belum optimalnya peningkatan kompetensi ASN yang ramah digital;
b. Belum optimalnya peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berorientasi pada kebutuhan organisasi.

5. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang muncul dalam urusan penelitian dan pengembangan diantaranya:

a. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan;
b. Dengan adanya Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah maka perlu implementasi yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing daerah;
c. Belum optimalnya penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah.

C. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pengawasan pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Survei Penilaian Integritas masih di kategori "Rentan" perlu menjadi perhatian khusus terhadap integritas pelaksanaan fungsi pemerintahan;
b. Belum optimalnya fungsi pengawasan yang dapat memberikan *insight* pelaksanaan kinerja dan *forecasting* risiko untuk menjaga fungsi Perangkat Daerah dalam menjalankan urusan kewenangannya;
c. Belum optimalnya perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih (pencegahan korupsi dan integritas terhadap risiko korupsi;
d. Belum optimalnya penerapan Manajemen Risiko pada seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern.

D. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang muncul dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya:

a. Belum optimalnya pembinaan kerukunan antarsuku, umat beragama, ras dan golongan secara intensif terutama mengingat pluralitas dan heterogenitas masyarakat Kota Malang cukup tinggi;
b. Belum optimalnya antisipasi potensi terjadinya konflik sosial, khususnya yang bermotif SARA;
c. Belum optimalnya penguatan pendidikan politik khususnya untuk membangun kesadaran dan mendorong partisipasi politik masyarakat.

2.3.2 Isu Strategis

2.3.2.1 Isu Internasional

A. Risiko Global Jangka Menengah

1. Risiko *Climate Action Failure*

   Climate action failure merupakan ketidakmampuan negara, daerah, atau kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim yang sedang berlangsung. Hal ini mencakup kegagalan dalam implementasi

kebijakan, kurangnya pendanaan, dan kurangnya kesadaran atau komitmen dari berbagai pemangku kepentingan. Terdapat beberapa implikasi dalam pembangunan apabila hal ini terjadi, diantaranya sebagai berikut:

a. Peningkatan risiko bencana alam
    1) Berupa banjir dan longsor akibat meningkatnya intensitas hujan yang disebabkan oleh perubahan iklim, sehingga dapat merusak infrastruktur dan bahkan mengancam keselamatan penduduk;
    2) Berupa gelombang panas yang diakibatkan oleh meningkatnya suhu sehingga dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
b. Dampak Pada Kesehatan Masyarakat
    1) Potensi muncul bahkan mewabahnya penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan penyakit pernapasan, yang merupakan penyakit yang berpotensi meningkat seiring perubahan iklim yang mempengaruhi pola cuaca dan kualitas udara;
    2) Semakin terbatasnya ketersediaan air bersih akibat perubahan pola hujan, yang berdampak pada sanitasi dan kesehatan masyarakat.
c. Ketahanan infrastruktur
    1) Terjadi kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya akibat bencana yang terjadi terkait iklim, sehingga perlu adanya investasi dalam infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim;
    2) Hambatan dan kompleksitas dalam pengelolaan sumber daya air, mengingat diperlukan sistem pengelolaan air yang lebih baik untuk menangani perubahan pola curah hujan dan mencegah kekurangan air.
d. Ketahanan Pangan
    1) Menurunnya produktivitas pertanian akibat perubahan iklim yang dapat mengancam ketahanan pangan lokal, sehingga diperlukan upaya diversifikasi tanaman dan teknik pertanian yang adaptif;
    2) Gangguan pada rantai pasok akibat bencana alam terkait perubahan iklim sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan.
e. Ekonomi Lokal
    1) Terjadinya kerugian ekonomi besar akibat bencana alam terkait perubahan iklim sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas, dan biaya pemulihan;
    2) Ketidakstabilan iklim dapat mengurangi minat investasi dan pariwisata.

2. Cuaca Ekstrem Seiring Perubahan Iklim

   Cuaca ekstrem adalah salah satu dampak nyata dari perubahan iklim yang mencakup fenomena seperti badai, banjir, gelombang panas, dan kekeringan. Peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem ini dapat membawa berbagai implikasi signifikan bagi pembangunan kota Malang dalam jangka menengah. Cuaca ekstrem itu sendiri adalah kondisi cuaca yang jauh dari rata-rata normal, seperti hujan lebat, badai, suhu ekstrem (panas atau dingin), dan angin kencang. Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem di berbagai wilayah di dunia. Berikut beberapa isu yang perlu diperhatikan menyikapi potensi terjadinya cuaca ekstrem:

   a. Manajemen Risiko dan Tanggap Darurat
      1) Perlunya penyiapan dan implementasi sistem peringatan dini untuk bencana seperti banjir dan gelombang panas;
      2) Perlunya menyusun rencana rencana tanggap darurat yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk respons cepat terhadap cuaca ekstrem.
   b. Pembangunan Berkelanjutan
      1) Pengembangan ruang terbuka hijau yang dapat menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir;
      2) Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, termasuk konservasi air dan penggunaan teknologi pengelolaan air modern.

3. Deglobalisasi

   Deglobalisasi merujuk pada fenomena penurunan tingkat interkoneksi dan ketergantungan antar negara di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan aliran informasi. Ini berlawanan dengan globalisasi, yang mencakup peningkatan integrasi ekonomi dan sosial secara global. Deglobalisasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan proteksionis, ketegangan geopolitik, dan peningkatan kesadaran akan dampak negatif globalisasi terhadap ekonomi lokal dan lingkungan.

   Deglobalisasi, yang mencakup penurunan tingkat interkoneksi global dalam perdagangan, investasi, dan aliran informasi, membawa dampak signifikan bagi pembangunan Kota Malang. Dengan adanya deglobalisasi, Kota Malang perlu memperkuat sektor ekonomi lokal dengan diversifikasi sektor (UMKM, pertanian berkelanjutan, pariwisata lokal); menarik investasi domestik (melalui perbaikan infrastruktur dan kemudahan berusaha); mengoptimalkan rantai pasok lokal; menerapkan proteksi dan regulasi yang terukur; meningkatkan konektivitas antar daerah (infrastruktur fisik dan digital); serta mengembangkan SDM dan inovasi demi ketahanan ekonomi-sosial. Ketergantungan pada rantai pasok global yang kurang stabil memaksa Kota Malang harus mengoptimalkan rantai

pasok lokal, meningkatkan efisiensi dan ketahanan terhadap gangguan global. Selain itu, kebijakan proteksionis dan penguatan regulasi lokal menjadi krusial, untuk melindungi industri lokal dan memastikan keberlanjutan lingkungan serta sosial. Penguatan konektivitas dengan kota-kota lain di Indonesia dan peningkatan infrastruktur transportasi serta digital menjadi langkah strategis untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

4. Krisis Lapangan Pekerjaan
   Krisis lapangan pekerjaan merupakan isu global yang kian mendalam, dipicu oleh faktor-faktor seperti otomatisasi, globalisasi dan perubahan struktur ekonomi. Di Kota Malang, krisis ini berpotensi memperburuk tingkat pengangguran dan ketimpangan sosial ekonomi. Dengan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat automatisasi dan penurunan investasi asing, Kota Malang perlu fokus pada diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor baru yang berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan, seperti teknologi informasi, pariwisata berbasis budaya, dan pertanian modern. Penguatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri lokal menjadi krusial. Selain itu, mendukung pengembangan UMKM dan *start-up* lokal dengan akses ke modal, teknologi, dan pasar dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan kewirausahaan. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup di daerah-daerah terpencil juga penting untuk mengurangi migrasi ke kota-kota besar, menjaga keseimbangan pembangunan wilayah, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Kota Malang dapat mengurangi dampak krisis lapangan pekerjaan dan menciptakan ekonomi yang lebih *resilient* dan berdaya saing tinggi.
5. Krisis Utang
   Krisis utang global, yang mencakup peningkatan utang pemerintah, korporasi, dan rumah tangga di berbagai negara, dapat memiliki dampak signifikan pada pembangunan daerah termasuk Kota Malang. Dalam konteks ini, meningkatnya beban utang dapat membatasi kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan ekonomi. Kota Malang perlu fokus pada kemandirian fiskal sekaligus pengurangan ketergantungan pada Dana Transfer yang besarannya dipengaruhi pada dinamika global termasuk diantaranya kondisi utang negara. Selain itu, diversifikasi sumber pembiayaan, seperti kemitraan publik-swasta (PPP) dan pinjaman berbasis proyek, dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Transfer. Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang produktif

dan berkelanjutan, seperti pariwisata, teknologi, dan pertanian modern, juga penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi defisit anggaran. Penguatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan PAD dan efisiensi belanja publik akan memperkuat ketahanan fiskal Kota Malang dalam menghadapi tekanan krisis utang global, memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tetap berjalan dengan stabil dan berkelanjutan.

6. Konfrontasi Geoekonomi
   Konfrontasi geoekonomi, yang melibatkan persaingan dan ketegangan antar negara terkait perdagangan, teknologi, dan investasi, dapat memiliki dampak signifikan pada pembangunan Kota Malang. Ketegangan ini seringkali mengarah pada kebijakan proteksionis, pembatasan perdagangan, dan hambatan terhadap aliran investasi asing, yang dapat mengganggu dinamika ekonomi lokal. Konfrontasi geoekonomi global adalah ancaman bagi pembangunan Kota Malang melalui proteksionisme dan pembatasan ekonomi. Solusi utama penanganan konfrontasi geoekonomi adalah dengan mempercepat diversifikasi ekonomi lokal (fokus pada pariwisata budaya, teknologi informasi, dan pertanian modern); memperkuat konektivitas dengan wilayah lain di Indonesia (melalui infrastruktur dan kolaborasi antar kota); serta meningkatkan riset, inovasi, dan kualitas Sumber Daya Manusia yang relevan untuk mencapai daya saing dan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta tangguh.
7. Risiko Kegagalan *Cybersecurity*
   Risiko kegagalan *cybersecurity*, yang melibatkan potensi serangan siber dan kebocoran data, merupakan isu global yang semakin mendesak dan berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan sistem informasi di berbagai sektor. Bagi Kota Malang, risiko ini dapat berdampak serius pada infrastruktur digital, layanan publik, dan keamanan data pribadi serta bisnis. Ancaman serangan siber dapat mengganggu operasional pemerintah, merusak kepercayaan publik, dan menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Oleh karena itu, Kota Malang perlu mengembangkan dan memperkuat infrastruktur keamanan siber dengan investasi dalam teknologi keamanan terbaru, pelatihan personel, dan pengembangan kebijakan yang ketat. Meningkatkan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi tentang keamanan siber juga sangat penting untuk memitigasi risiko. Selain itu, Kota Malang harus membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keamanan siber nasional dan sektor swasta, untuk menciptakan jaringan pertahanan yang solid dan responsif terhadap ancaman siber. Dengan langkah-langkah ini, Kota Malang dapat memperkuat ketahanan sibernya,

memastikan keamanan data, dan mendukung perkembangan ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan.

8. *Biodiversity Loss*

   Risiko kehilangan keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*) merupakan salah satu isu global yang semakin mendesak, yang mengancam keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Pada Kota Malang polusi dan perubahan penggunaan lahan dapat mempercepat proses kehilangan keanekaragaman hayati. Dampaknya bisa sangat luas, mulai dari berkurangnya stok sumber daya alam yang vital hingga terganggunya ekosistem yang mendukung kehidupan manusia, seperti polinasi tanaman dan penyaringan air. Untuk mengatasi hal ini, Kota Malang perlu mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dengan mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, memfasilitasi restorasi habitat alami, serta meningkatkan kawasan konservasi dan koridor ekologis. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam program konservasi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati melalui edukasi dan kampanye, serta mendorong praktik-praktik ramah lingkungan di sektor-sektor utama seperti pertanian dan pariwisata. Dengan langkah-langkah ini, Kota Malang dapat menjaga keberlanjutan ekosistemnya, meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

9. *Asset Bubble Burst*

   Risiko pecahnya gelembung aset (*asset bubble burst*) adalah isu global yang dapat terjadi ketika harga aset, seperti properti atau saham, meningkat secara signifikan di atas nilai intrinsiknya dan kemudian mengalami penurunan tajam. Di Kota Malang, jika terjadi gelembung aset properti, hal ini dapat menyebabkan krisis keuangan lokal, penurunan nilai properti, dan peningkatan kredit macet. Ini berdampak pada sektor perbankan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Penurunan tajam harga properti juga bisa mengakibatkan proyek pembangunan terhenti dan menurunkan pendapatan pajak daerah dari sektor properti. Untuk mengatasi risiko ini, Kota Malang perlu menerapkan kebijakan pengelolaan risiko yang ketat, seperti regulasi ketat terhadap pinjaman properti dan evaluasi berkala terhadap nilai pasar aset. Pemerintah kota juga harus mempromosikan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor properti, mendorong investasi dalam sektor-sektor produktif seperti industri kreatif, teknologi, dan pariwisata. Edukasi kepada masyarakat tentang risiko investasi dan pentingnya manajemen keuangan yang baik juga sangat penting untuk mencegah spekulasi berlebihan.

Dengan langkah-langkah ini, Kota Malang dapat mengurangi dampak negatif dari potensi pecahnya gelembung aset dan memastikan stabilitas ekonomi jangka menengah.

B. Megatren Global

1. Perkembangan Demografi Global
   a. Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7 miliar jiwa dan akan semakin meningkat, hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050 akan meningkatkan tantangan pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (pangan, energi dan air) dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan;
   b. Proporsi demografi seperti bertambahnya penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan;
   c. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis yang menyebabkan turunnya angka kelahiran.
2. Geopolitik dan Geoekonomi
   a. Geopolitik
      1) Eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru yang mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional;
      2) Perang antara Rusia dan Ukraina yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan tekanan bagi negara-negara lainnya, seperti inflasi global yang tinggi serta terjadinya krisis energi dan pangan;
      3) Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan.
   b. Geoekonomi
      1) Negara berkembang saat ini semakin tidak lagi mengandalkan komoditas sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi;
      2) Proyeksi ekonomi global menunjukkan peningkatan signifikan, tiga kali lipat menjadi USD 74,0 triliun pada tahun 2050, dengan kontribusi mayoritas (sekitar 55%) berasal dari Tiongkok, India, Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia.
3. Perkembangan Teknologi
   a. Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat;
   b. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat;
   c. Pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor;

d. Teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur dan sektor Pendidikan, menyebabkan sejumlah jenis pekerjaan akan tergantikan oleh teknologi, serta berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi dan cara kerja pemerintah.

4. Peningkatan Urbanisasi Dunia
   a. Dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di Kawasan perkotaan pada tahun 2050 dimana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*, dan urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota;
   b. Tekanan penduduk dan Pembangunan perkotaan pada di negara *emerging economies* umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik sehingga dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.
5. Konstelasi Perdagangan Global
   a. Pusat perdagangan global kini bergeser ke Asia-Afrika seiring dengan menguatnya peran ekonomi negara-negara berkembang;
   b. Perdagangan internasional semakin ditentukan oleh kecepatan perkembangan teknologi dan digitalisasi;
   c. Kerjasama antar negara dalam lingkup regional dan melalui pembentukan blok perdagangan strategis semakin mempererat hubungan dagang global.
6. Tata Kelola Keuangan Global
   a. Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi pada perubahan struktur ekonomi dan demografi, di mana pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 berpotensi menyebabkan komposisi belanja negara akan lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun;
   b. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara;
   c. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan, di mana ke depan puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang namun akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru.
7. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)
   a. Jumlah kelas menengah dunia pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen dari populasi dunia, di mana pertumbuhan kelas menengah yang pesat tersebut akan menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik;

b. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru di masa mendatang, yakni pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi.

8. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, yakni kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (energi, air dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang akibat bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi.
9. Perubahan Iklim
   a. Perubahan iklim, bersama kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (*Triple Planetary Crisis*) secara global akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari;
   b. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global;

   Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.
10. Pemanfaatan Luar Angkasa (*Space Economy*), di mana tren eksplorasi antariksa semakin meningkat, dan pertumbuhan antariksa secara global akan tumbuh signifikan untuk jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan pada uraian di atas, dinamika pembangunan saat ini dan masa depan akan dihadapkan pada tantangan megatren global yakni demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, peningkatan urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah (*middle class*), peningkatan persaingan pemanfaatan Sumber Daya Alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).

Aspek demografi, ke depan diproyeksikan pertumbuhan populasi dunia akan terus meningkat hingga mencapai 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050 kendati laju pertumbuhannya cenderung melambat, karena penambahan populasi dunia cenderung disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya Angka Harapan Hidup. Proporsi demografi akan diwarnai dengan bertambahnya kelompok usia tua (*aging population*) dan tingginya penduduk usia muda, yang mana fenomena tersebut akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Sementara di sisi lain, tingginya populasi juga akan memberikan tantangan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di tengah keterbatasan pangan, energi dan air.

Aspek geopolitik, tantangan geopolitik yang dominan dan perlu diperhatikan adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan berpotensi memunculkan kekuatan baru.

Peristiwa geopolitik yang saat ini sedang terjadi dan tidak menutup kemungkinan akan berlangsung dalam waktu yang lama adalah perang antara Rusia dan Ukraina, dinamika kawasan Laut China Selatan dan persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang merupakan kawasan bernilai strategis dan diproyeksikan akan menjadi pusat ekonomi baru dunia. Sedangkan dari aspek geoekonomi, nilai *output* dunia negara berkembang akan semakin dominan dan diproyeksikan akan menyumbang sebesar 55 persen dari nilai *output* dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama. Namun di sisi lain, sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan utama negara berkembang sehingga memberikan tantangan berupa kesiapan dalam menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

Aspek perkembangan teknologi khususnya perkembangan teknologi digital seperti *Internet of Things* (IoT), *block chain*, *Artificial Intelligence* (AI), *auto robotic system*, dan semacamnya, di mana kecepatan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, memberikan tantangan berupa kesiapan yang adaptif dari masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang tentunya perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik.

Aspek urbanisasi dunia, di mana menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050 dan 95 persen penambahan tersebut berada di negara emerging economies. Mengingat peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota sementara pembangunan perkotaan pada negara emerging economies umumnya kurang terencana dengan baik, maka akan menimbulkan tantangan berupa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat guna memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

Aspek konstelasi perdagangan global, akan terjadi pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global yang mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Ke depan diproyeksikan bahwa perekonomian negara berkembang akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia dengan menggantikan posisi negara maju yang saat ini tergabung dalam G7. Salah satu tantangan yang muncul adalah penciptaan kerja sama kawasan guna menciptakan hubungan perdagangan strategis.

Aspek tata kelola keuangan global, tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara dan perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan dan mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan di mana ke

depan puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang namun akan tergantikan oleh pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) baru. Kondisi tersebut akan memberikan tantangan bagi tata kelola keuangan global untuk beradaptasi dengan praktik-praktik tata kelola keuangan baru.

Aspek pertumbuhan kelas menengah (*middle class*), diperkirakan bahwa jumlah kelas menengah dunia akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen populasi dunia. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat akan mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Kondisi tersebut memberikan tantangan bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan jenis pekerjaan baru yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan proses, konsumsi yang lebih beragam, serta kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*).

Aspek persaingan sumber daya alam, di mana akan terjadi kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam berupa energi, air dan pangan akibat meningkatnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam. Hal ini menimbulkan tantangan berupa efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru dan perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

Aspek perubahan iklim, di mana perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global-*The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena tersebut akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, lingkungan, penghidupan masyarakat dan laju pembangunan secara keseluruhan. Secara umum dapat dikatakan perubahan iklim akan mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan dan kualitas kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan signifikan. Tantangan yang diberikan atas perubahan iklim adalah meninggalkan paradigma Pembangunan lama yang berorientasi pada *Business as Usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan, yakni melalui aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor (seperti sektor energi, industri, lahan dan sektor lainnya) yang selaras dengan tren kebijakan sekaligus strategi Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon.

Aspek pemanfaatan luar angkasa, di mana tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir dan melahirkan tiga isu utama yakni ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*), memberikan tantangan

berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi guna mengeksplorasi luar angkasa.

C. KTT G-20

Isu strategis internasional juga mengacu pada beberapa kesepakatan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 di Bali. G20, atau *Group of Twenty*, adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia dan Uni Eropa. G20 mewakili lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, dan 85% PDB dunia. Anggotanya meliputi Uni Eropa, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Spanyol yang selalu diundang sebagai tamu.

Isu-isu yang dibahas oleh para pemimpin G20 telah berkembang dari ekonomi ke perubahan iklim, energi berkelanjutan, pengampunan utang internasional, dan pajak perusahaan multinasional. Tiga isu strategis dalam G20 tahun 2022 adalah arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi menuju energi terbarukan. Pilar prioritas presidensi G20 Indonesia tahun 2022 meliputi peningkatan produktivitas untuk pemulihan ekonomi, membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas.

Isu yang dibahas dalam bidang keuangan dan moneter (*finance track*) G20 meliputi koordinasi kebijakan global untuk memulihkan ekonomi, termasuk *exit policy*, dampak pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan perekonomian, penyusunan prinsip umum pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC), pembiayaan berkelanjutan, digitalisasi sistem pembayaran antar negara, inklusi keuangan yang mencakup digitalisasi dan kredit UMKM, serta reformasi perpajakan. Sedangkan isu dalam bidang non keuangan dan moneter (*sherpa track*) pada pertemuan antar menteri meliputi energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi dan industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan dan perubahan iklim, serta hubungan luar negeri. Isu dalam bidang non keuangan dan moneter (*sherpa track*) pada pertemuan di luar pemerintahan mencakup bisnis, masyarakat sipil, serikat buruh, ilmuwan, lembaga *think tank*, perkotaan, wanita, pemuda, parlemen, dan lembaga audit tertinggi.

Komitmen G20 yang merupakan kesepakatan para pemimpin dunia antara lain menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral, menangani krisis ekonomi melalui kerja sama kebijakan makro internasional, meningkatkan ketahanan pangan

dan energi, mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi, dan komitmen bersama untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs) guna mengatasi perubahan iklim, serta memperkuat sektor kesehatan. Komitmen-komitmen ini sekaligus menjadi tantangan yang harus dihadapi.

D. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4) Menurunkan angka kematian anak;
5) Meningkatkan kesehatan ibu;
6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2016-2030 meliputi:

1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana;
2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;

9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Komitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian.

2.3.2.2 Isu Nasional

Isu strategis dan tantangan pembangunan nasional secara lengkap tersaji dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan relevan untuk diperhatikan dalam rangka perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Malang, sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat
   Kondisi produktivitas yang rendah dibandingkan negara-negara yang menuju negara maju lainnya di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.
2. Lemahnya kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN)
   Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.
3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

Deindustrialisasi dini secara nasional (ditandai penurunan kontribusi manufaktur akibat "*Dutch Disease*", produktivitas rendah, lambatnya adopsi teknologi, ketidakmerataan ekosistem industri, dan biaya tinggi) serta rendahnya produktivitas sektor pertanian (akibat lambatnya regenerasi, keterbatasan keterampilan, minimnya adopsi teknologi dan akses keuangan, ketiadaan standar, penyusutan lahan, dan kelembagaan yang lemah).

4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
   Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah serta belum optimalnya inovasi dan akses ke pasar internasional.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
   Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.
6. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
   UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
7. Produktivitas tenaga kerja indonesia selama kurun waktu tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal
   Ketertinggalan produktivitas terjadi pada tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.
8. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan
   Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi.

Di samping itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.

9. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi

   Tantangan utama sektor energi nasional adalah pemerataan akses, peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan target 17% pada tahun 2025, dan peningkatan efisiensi energi. Upaya nasional meliputi pengembangan biomassa dari limbah dan integrasinya dengan ekonomi masyarakat, pemanfaatan energi angin skala kecil dan menengah, pengembangan energi surya di perkotaan dan pedesaan serta industrialisasinya, pengembangan energi nuklir melalui sosialisasi dan kerjasama, serta integrasi mikrohidro dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan potensi irigasi. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan biomasa adalah mendorong pemanfaatan limbah industri pertanian dan kehutanan, mengintegrasikan pengembangan biomassa dengan kegiatan ekonomi masyarakat, mendorong pabrikasi teknologi konversi energi biomassa, dan meningkatkan penelitian dan pengembangan pemanfaatan limbah termasuk sampah kota untuk energi. Upaya untuk mengembangkan energi angin mencakup pengembangan energi angin untuk listrik dan non listrik, pengembangkan teknologi energi angin yang sederhana untuk skala kecil (10 kW) dan skala menengah (50-100 kW) dan mendorong pabrikan memproduksi SKEA skala kecil dan menengah secara massal. Pengembangan energi surya mencakup pemanfaatan PLTS di perdesaan dan perkotaan, mendorong komersialisasi PLTS dengan memaksimalkan keterlibatan swasta, mengembangkan industri PLTS dalam negeri, dan mendorong terciptanya sistem dan pola pendanaan yang efisien dengan melibatkan dunia perbankan. Untuk mengembangkan energi nuklir, langkah-langkah yang dambil pemerintah adalah melakukan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan melakukan kerjasama dengan berbagai negara untuk meningkatkan penguasaan teknologi. Sedang langkah-langkah yang dilakukan untuk pengebangan mikrohidro adalah dengan mengintegrasikan program pengembangan PLTMH dengan kegiatan ekonomi masyarakat, memaksimalkan potensi saluran irigasi untuk PLTMH, mendorong industri mikrohidro dalam negeri, dan mengembangkan berbagai pola kemitraan dan pendanaan yang efektif. Isu-isu ini perlu menjadi perhatian bagi Kota Malang dalam merencanakan diversifikasi sumber energi, memanfaatkan potensi EBT lokal, dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor.

10. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai Ekonomi Hijau
    Ekonomi hijau menjadi penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju negara berpendapatan tinggi setara dengan negara maju, dan keluar dari *middle income trap*. Terdapat dua peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi hijau. Peluang pertama adalah transisi aktivitas ekonomi eksisting. Pada sektor energi, upaya transisi diarahkan melalui penerapan energi baru dan terbarukan, seperti energi surya, angin, hidro, dan biomassa. Peluang kedua, yaitu memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor dan aktivitas sirkular yang inovatif, termasuk industri berbasis sumber daya alam hayati berkelanjutan atau bio-ekonomi, ekonomi biru, dan industri pemanfaatan limbah.
11. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas
    Kapasitas dan kapabilitas TIK yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
12. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas
    Integrasi ekonomi di tingkat nasional belum optimal akibat pusat pertumbuhan yang terpusat di Jawa, minimnya infrastruktur konektivitas yang memadai, regulasi yang menghambat, dan disparitas kualitas SDM antar wilayah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Malang, terutama dalam merancang strategi kerjasama antar daerah dan penguatan daya saing ekonomi lokal.
13. Belum meratanya akses dan kualitas di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk menciptakan tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045;
14. Kualitas pendidikan yang masih rendah
    Peningkatan kualitas pendidikan penting karena berdampak langsung pada kemajuan individu dan masyarakat. Dengan pendidikan yang berkualitas, individu dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal, meningkatkan keterampilan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, pendidikan yang baik juga membantu dalam memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing.
15. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah;

16. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi

    Disharmonisasi regulasi muncul akibat sejumlah faktor, termasuk pembentukan oleh lembaga yang berbeda, perubahan pejabat berwenang, dan pendekatan sektoral yang dominan. Kelemahan koordinasi, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan ketidakpastian hukum menjadi konsekuensi langsung dari disharmoni ini. Terdapat dampak serius, seperti perbedaan penafsiran, ketidakpastian hukum, dan disfungsi hukum yang menghambat pelaksanaan efektif dan efisien peraturan.
17. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif;
18. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif;
19. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah;
20. Aparatur Sipil Negara (ASN) berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik;
21. Belum meratanya kualitas pelayanan publik;
22. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar;
23. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik;
24. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal;
25. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan;
26. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakkan hukum yang terkendali

    Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.
27. Dalam aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan;
28. Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan terutama di perbatasan;
29. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global;

    Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini relatif solid, tercermin dalam indikator-indikator seperti terkendalinya inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, meskipun demikian, kewaspadaan tetap

diperlukan mengingat ketidakpastian ekonomi global yang berkelanjutan, dipicu oleh faktor-faktor seperti tensi geopolitik, perubahan kebijakan moneter global, dan potensi perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif dan mampu memitigasi risiko eksternal.

30. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan;
31. Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
32. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tapi masih jauh dari kebutuhan.

2.3.2.3 Isu Regional

Tema Pembangunan pulau Jawa dalam rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 adalah Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan. Pada periode tahun 2025-2029 Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat menjadi Mata-Rantai Penting Ketahanan Industri Nasional dan Pusat Pengembangan Agrikultur, Agroindustri dan Ekonomi Nasional. Dalam rangka mencapai hal tersebut terdapat beberapa isu strategis jangka menengah yang perlu dituntaskan. Isu Strategis Kewilayahan Jawa-Bali merupakan isu strategis yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat dan tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah;
   Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Jawa Timur masih menjadi isu signifikan, yang ditandai dengan persebaran pusat-pusat ekonomi yang belum merata. Perbedaan mencolok terlihat antara wilayah Utara dan Selatan, Barat (dengan Bali sebagai contoh wilayah yang lebih maju), serta wilayah-wilayah lainnya di provinsi ini. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas yang berbeda, dan konsentrasi investasi di wilayah tertentu turut memperdalam kesenjangan ini. Kondisi ini perlu menjadi perhatian terutama dalam merancang strategi kerjasama antar daerah, pengembangan potensi wilayah pinggiran, dan upaya pemerataan pembangunan di tingkat provinsi yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Malang secara keseluruhan.
2. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa;
3. Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas;

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian;
5. Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri;
6. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi Covid-19.

Selain tertuang dalam rancangan RPJMN Tahun 2025-2029, isu strategis regional juga tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030, meliputi:

1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah, yang meliputi
   a. Mengatasi kemiskinan dengan memperluas akses layanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak;
   b. Mendorong ekonomi mandiri untuk mengurangi pengangguran, meskipun investasi meningkat belum menyerap tenaga kerja secara optimal;
   c. Menguatkan usaha ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.
3. Pengambangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas, melalui:
   a. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan guna menciptakan SDM berkualitas;
   b. Mengatasi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan serta dampak demografi akibat migrasi;
   c. Mencegah meningkatnya pengangguran akibat kurangnya keterampilan tenaga kerja.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik, yang meliputi:
   a. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi birokrasi;
   b. Menyederhanakan prosedur administrative dan meningkatkan kualitas layanan publik;
   c. Memperkuat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui integrasi data dan partisipasi publik;
   d. Membangun kepemimpinan lokal berwawasan global dengan tetap menjaga kearifan lokal.

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan, meliputi:
   a. Mengatasi penurunan daya dukung lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan perubahan tata guna lahan;
   b. Mengelola risiko bencana terutama akibat perubahan iklim dan minimnya infrastruktur mitigasi;
   c. Mempromosikan konservasi berbasis kearifan lokal untuk menjaga ekosistem dan ketahanan lingkungan.
6. Kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, antara lain:
   a. Menjaga Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional dengan kestabilan produksi dan distribusi pangan;
   b. Mengatasi kelangkaan pangan dengan sistem logistic yang lebih baik;
   c. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui stabilisasi harga, efisiensi produksi dan hilirisasi produk pertanian.

2.3.2.4 Isu Strategis Daerah

Kota Malang merupakan bagian penting dalam mendukung tercapaianya pembangunan di Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah prioritas yang diharapkan menjadi Kota Metropolitan di Jawa Timur, Kota Malang mendapat beberapa arahan secara langsung dari pusat untuk memperhatikan beberapa aspek transformasi dalam pelaksanaan pembangunan periode tahun 2025-2029. Arahan tersebut termuat dalam rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 khusus untuk wilayah Jawa Timur yang kemudian secara langsung menyebutkan kondisi transformasi yang harus dilakukan oleh Kota Malang sebagai bagian dari akselerasi untuk mencapai transformasi sosial dan ekonomi, yang meliputi:

A. Transformasi Sosial
   1. Peningkatan Rumah Sakit Kota Malang menjadi Rumah Sakit Kelas A;
   2. Penguatan Pendidikan Tinggi tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan agrikultur, ekonomi biru dan Perindustrian (*Pilot Project* termasuk Universitas Brawijaya didalamnya).

B. Transformasi Ekonomi
   1. Penguatan infrastruktur Perkotaan Metropolitan;
   2. Peremajaan kota (*urban renewal*) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
   3. Pengembangan Kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Malang-Pasuruan-Surabaya.

Kondisi Kota Malang sebagaimana seluruh daerah/wilayah bernegara dan bermasyarakat pada umumnya tentu tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan regional, nasional bahkan

internasional sehingga perlu memperhatikan perkembangan regional, nasional bahkan internasional. Sejumlah ringkasan isu di tingkat internasional, nasional dan regional yang perlu mendapatkan perhatian dan pencermatan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Malang karena dirasa relevan, diantaranya:

a. Perkembangan Demografi

Selaras dengan dinamika global, nasional dan regional, perkembangan demografi saat ini seolah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan Kota Malang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Malang diproyeksikan terus bertambah dari kondisi tahun 2023 sejumlah 865.280 jiwa menjadi 879.870 jiwa pada akhir tahun 2025, dan menjadi 912,070 jiwa pada akhir tahun 2030 serta 968.760 jiwa pada akhir tahun 2045. Kendati demikian angka atau laju pertumbuhan penduduk setiap tahun diproyeksikan melambat, yang artinya pertambahan jumlah penduduk Kota Malang bukan dikarenakan meningkatnya angka kelahiran, melainkan dikarenakan semakin panjangnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakatnya.

Komposisi penduduk Kota Malang saat ini masih didominasi pada rentang usia produktif atau kelompok usia 15-64 tahun, yang pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 69,65 persen dari total penduduk sehingga rasio ketergantungan sebesar 43,58 persen. Kondisi tersebut bermakna bahwa saat ini hingga setidaknya tahun 2030, Kota Malang sedang mengalami kondisi bonus demografi atau kondisi demografi dimana proporsi kelompok usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun).

Kendati demikian proporsi penduduk pada rentang usia produktif tersebut diproyeksikan akan mengalami tren penurun pada tahun 2030 menjadi 69 persen dengan rasio ketergantungan meningkat menjadi 44,92 persen, dan tren tersebut akan terus menurun dimana pada tahun 2045 proporsi penduduk pada rentang usia produktif menjadi 65,69 persen dengan rasio ketergantungan meningkat menjadi 52,23 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Malang dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan menuju menjadi komunitas menua (*aging society*).

Di sisi lain, proporsi rentang usia muda atau kelompok umur 0-14 tahun diproyeksi mengalami penurunan dari sejumlah 20,92 persen pada tahun 2025 menjadi 19,54 persen pada tahun 2030 dan kembali terus mengalami tren penurunan hingga menjadi menjadi 17,33 persen pada tahun 2045. Dan sebaliknya, proporsi rentang usia tua atau kelompok umur 65 tahun ke atas diproyeksikan mengalami tren meningkat dari sejumlah 9,43 persen pada tahun 2025 menjadi 11,45 persen pada tahun 2030 dan terus

mengalami tren meningkat hingga menjadi 16,98 persen pada tahun 2035.

Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam tren pertambahan jumlah penduduk terdapat tren penurunan proporsi penduduk usia muda (yang ditandai dengan menurunnya tren angka kelahiran) dan usia produktif, sementara proporsi penduduk usia tua (lansia) akan diproyeksikan terus meningkat (sebagai konsekuensi atas meningkatnya usia harapan hidup).

Kondisi perkembangan demografi tersebut tentu akan menjadi perhatian dan pencermatan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah khususnya perencanaan jangka panjang.

b. Disrupsi Teknologi

Perkembangan teknologi khususnya teknologi digital yang sedemikian pesat, termasuk diakselerasi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang pernah berlangsung, menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang perlu dicermati dan disikapi secara baik dan bijaksana. Disrupsi teknologi adalah perubahan sistem teknologi digital secara fundamental, yang mana teknologi digital, robot, *Artificial Intelligent* (AI) atau sejenisnya mampu mengubah peran dan menggantikan pekerjaan manusia. Saat ini, sistem kerja pada komputer mampu berpikir layaknya manusia, sehingga dapat memberikan layanan secara cepat dan praktis.

Era disrupsi teknologi membuat segala hal menjadi instan, mudah, praktis dan modern. Hal ini tentu selaras dengan tujuan utama kehadiran teknologi, yaitu memudahkan manusia dalam beraktivitas, seperti bekerja, berkomunikasi, mencari informasi, dan lain-lain. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi adalah terjadinya perubahan atau transformasi pada gaya hidup (*life style*) dan perilaku masyarakat (*behaviour*) serta sistem/pola kerja. Transformasi gaya hidup, perilaku dan sistem kerja tentu menuntut adaptasi bagi aktivitas keseharian dan kehidupan masyarakat.

Dengan perkembangan teknologi, gaya hidup masyarakat akan berubah secara fundamental dari yang sebelumnya konvensional menjadi lebih akrab dengan pemanfaatan teknologi seperti melakukan aktivitas transaksi keseharian atau aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan secara *online*/digital. Perkembangan teknologi juga mengubah perilaku masyarakat yang semakin menuntut kemudahan dan kecepatan serta tidak lagi terbelenggu pada keterbatasan ruang maupun waktu dalam beraktivitas. Perilaku tersebut berkorelasi dengan *mindset* masyarakat yang menginginkan segala sesuatunya menjadi serba cepat dan praktis.

Disrupsi teknologi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari, sehingga fokus titik beratnya bukan pada upaya

menghindari atau memperlambat, namun pada upaya memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai peluang sekaligus tantangan.

c. Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim merupakan salah satu bagian utama dari isu lingkungan secara luas, dan telah menjadi isu utama yang digaungkan pada segala level bahkan sampai dengan level internasional dengan melibatkan komitmen pejabat level tertinggi negara sehingga menjadi salah satu isu global yang paling banyak diperbincangkan dan mendapatkan atensi dari seluruh negara di dunia. Pada dasarnya kendati perubahan iklim merupakan hal alami dan terjadi secara alami pula (seperti melalui variasi siklus matahari), namun aktivitas manusia menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim secara signifikan, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil, emisi Gas Rumah Kaca (GRK), gas buang industri dan sebagainya.

Perubahan iklim perlu menjadi perhatian dan antisipasi karena dampaknya tidak sederhana bagi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia, sehingga perlu menjadi perhatian dan antisipasi. Berbagai dampak negatif dari perubahan iklim yang dapat mendegradasi kualitas lingkungan termasuk kualitas hidup manusia di antaranya pemanasan global, meningkatnya kekeringan dikarenakan hilangnya mata air dan sumber-sumber air yang mengakibatkan kerawanan pangan, naiknya permukaan air laut yang berpotensi dapat menenggelamkan sejumlah daratan/pulau, menurunnya keanekaragaman hayati akibat hilangnya berbagai spesies, dan sebagainya.

d. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Era disrupsi merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Masifnya inovasi itulah yang bisa mengubah berbagai sistem dari pola lama ke baru. Efek disrupsi yang luas tersebut pada akhirnya juga akan merambah ke pola kerja Birokrasi dan sistem Pemerintahan. Disrupsi yang selalu dikaitkan dengan kemunculan teknologi yang semakin berkembang dapat membentuk pola “gangguan” pada sistem dalam sebuah organisasi bisnis maupun pemerintahan. Reformasi Birokrasi yang menjadi harapan masyarakat pada terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien serta menciptakan sebuah pelayanan publik yang optimal dan lebih baik dituntut untuk menyesuaikan diri dan mengikuti arus perubahan saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik bereformasi menjadi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

Dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien perlu peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan risiko (manajemen risiko), maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam sistem pemerintahan di Kota Malang.

Berdasarkan penelaahan terhadap berbagai aspek yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan sejumlah isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029. Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

a. mendasarkan atau merespons permasalahan pembangunan utama dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan di Kota Malang;
b. merupakan isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan daerah;
c. memiliki dampak luas pada pencapaian tujuan pembangunan daerah di berbagai bidang;
d. merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran Pembangunan daerah;
e. merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya;
f. merupakan lingkup kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota Malang yang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

Berikut isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Malang tahun 2025-2029 meliputi:

1. Penguatan daya saing SDM berkelanjutan

Manusia merupakan modal utama Pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Beberapa faktor pengaruh internal dalam pencapaian SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah kemudahan akses dan ruang bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali untuk dapat melanjutkan pendidikan yang diinginkan serta pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi. Sedangkan faktor pengaruh eksternal antara lain penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, bertanggung jawab dan memiliki kreativitas tinggi.

Pentingnya peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing merupakan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Untuk

pemerintah kabupaten/kota, urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan yaitu pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.

Dalam menentukan mutu pendidikan digunakan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) Kota Malang mengalami kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir, hal ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Malang dalam memprioritaskan program pendidikan dalam perencanaan.

Beberapa faktor pengaruh internal dalam pencapaian SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah kemudahan akses dan ruang bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali untuk dapat melanjutkan pendidikan yang diinginkan serta pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi. Sedangkan faktor pengaruh eksternal antara lain penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, bertanggung jawab dan memiliki kreativitas tinggi.

Selain faktor penentu terdapat juga faktor penghambat dalam pencapaian SDM yang berkualitas dan berdaya saing antara lain minimnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik dan perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan standar, belum meratanya layanan pendidikan yang inklusif, pelestarian cagar budaya belum optimal, kurang berkembangnya budaya kegemaran membaca, serta masih kurangnya pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa.

2. Penguatan lingkungan sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya

Kota Malang harus dilandasi nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi etika serta budaya bangsa yang didasari oleh norma-norma agama. Hal ini penting karena keberhasilan pembangunan akan memiliki makna kesejahteraan spiritual, sesuai dengan tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Malang yang sejahtera baik secara materiil maupun spiritual. Ketenteraman lahir dan batin hanya dapat terwujud apabila kehidupan sosial masyarakat didasari oleh nilai-nilai kehidupan yang agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Kota Malang yang agamis adalah wujud masyarakat yang mencirikan karakter beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia serta berkehidupan harmonis.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diperlukan Upaya untuk menghilangkan gangguan disintegrasi bangsa, meningkatkan stabilitas lingkungan, meningkatkan partisipasi politik masyarakat

dalam pembangunan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di daerah.

Harmonisasi sosial dapat tercapai apabila mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, dapat menyelesaikan gangguan disintegrasi bangsa, ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter keluarga dan adanya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Namun kerukunan umat dan harmonisasi sosial dapat terganggu apabila ketangguhan masyarakat dalam ketahanan bencana kebakaran belum tercapai, peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik masih rendah, kurangnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran, khususnya untuk jalan-jalan kecil, Rasio linmas masih kurang optimal, dan belum optimalnya Indeks Pembangunan Gender.

3. Penguatan lingkungan sosial masyarakat yang sehat

Peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat juga diperlukan, dimana Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator utama dalam menilai kinerja kesehatan oleh pemerintah, yang merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan khususnya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Berdasarkan data Usia Harapan Hidup di Kota Malang yang meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Malang dalam memperbaiki kualitas taraf kesehatan masyarakat terutama pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 100% atau seluruh penduduk di Kota Malang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan. Selain itu unit pelayanan kesehatan telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan tenaga medis yang kompeten menjadi.

Kota Malang banyak memperoleh prestasi olahraga mulai event tingkat regional, provinsi, dan nasional. Dalam meningkatkan prestasi olahraga tersebut perlu juga didukung oleh kebiasaan masyarakat dalam olahraga terutama jenis olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat merupakan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Olahraga masyarakat harus mulai dilakukan pembiasaan sejak dini, dengan mulai aktivasi standar sekolah yang memiliki ruang untuk berolahraga sehingga dapat mendukung pembiasaan olahraga anak,

menggiatkan ekstrakurikuler olahraga untuk menarik minat anak untuk berprestasi dalam olahraga.

Angka stunting Kota Malang terus turun dari tahun ke tahun walaupun penurunan yang terjadi belum signifikan, hal ini sebagai wujud nyata pelaksanaan agenda pemerintah yang berkomitmen menurunkan angka stunting. Permasalahan stunting bukan urusan kelompok atau perangkat daerah tertentu, namun menjadi tanggung jawab bersama, baik secara institusional dan personal. Tingginya angka stunting di suatu wilayah salah satunya dikarenakan oleh tingginya jumlah pasangan subur sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan postnatal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan air bersih merupakan beberapa penyebab stunting. Untuk itu diperlukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang merupakan wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayaan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar salah satunya untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan pencegahan stunting.

Beberapa faktor penghambat peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat yang perlu untuk segera ditangani antara lain belum optimalnya tingkat layanan puskesmas dan dokter keluarga terkait home visit, belum optimalnya Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB masih rendah, masih tingginya angka kematian ibu sehingga diperlukan penanganan secara intens dan berkesinambungan, masih rendahnya status kesehatan suatu keluarga dan belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan dirinya dan keluarga atas penyakit tidak menular.

4. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif karena menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja yang pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif. Namun demikian pertumbuhan ekonomi dalam kaidah

pembangunan ekonomi inklusif juga harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, serta berorientasi bahwa ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan atau diperkecil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi inklusif juga mendorong perluasan akses dan kesempatan dalam pembangunan/ pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang keberhasilannya ditandai dengan terwujudnya sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Paradigma pembangunan ekonomi inklusif berorientasi pada keberlanjutan atau berwawasan lingkungan yang saat ini dikenal dengan ekonomi hijau, di mana pertumbuhan ekonomi tidak mengeksplorasi dan mengeksploitasi lingkungan namun sebaliknya menempatkan keberlanjutan atau wawasan lingkungan sebagai aspek fundamental.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan lapangan berusaha merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi. Jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk usia kerja makan akan menimbulkan permasalahan yang disebut pengangguran. Untuk dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan lapangan berusaha diperlukan pelatihan keterampilan kerja sesuai kebutuhan, program perluasan kesempatan kerja, meningkatkan daya saing wirausaha muda, meningkatkan potensi penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif, perkembangan ekonomi digital yang akan membuka banyak kesempatan berusaha sehingga menurunkan angka pengangguran di Kota Malang. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi antara lain masih adanya gap antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten terhadap perubahan teknologi informasi, belum optimalnya kualitas hubungan industrial yang kondusif, pemutusan hubungan kerja dampak dari krisis global, serta masih rendahnya fasilitasi produktivitas dan inovasi pemuda melalui kewirausahaan dan pengembangan pendidikan kepramukaan. Pembangunan ekonomi dalam konteks penyediaan lapangan kerja haruslah memperhatikan sekaligus memanfaatkan kondisi bonus demografi yang saat ini hingga tahun 2030 sedang dan diproyeksikan akan berlangsung di Kota Malang, sebelum akhirnya akan terjadi aging population menuju aging society di tahun 2045.

Peningkatan potensi daya saing daerah melalui penguatan ekonomi kreatif menghadapi krisis global adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Kota Malang memiliki keunggulan komparatif berupa Sumber Daya Manusia yang

melimpah dan berkualitas dengan lebih dari 50 (lima puluh) kampus/perguruan tinggi dan lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) mahasiswa didalamnya. Atas pertimbangan keunggulan komparatif tersebut terpilihlah 3 (tiga) sub sektor ekonomi kreatif unggulan Kota Malang yang terdiri atas Sub Sektor Kuliner; Sub Sektor Game dan Aplikasi; serta Sub Sektor Film, Video, dan Animasi. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kreatif Kota Malang, selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Diperlukan penguatan ekosistem dan pemasaran ekonomi kreatif guna mendorong Ekonomi Kreatif sebagai motor penggerak ekonomi di era modern.

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan penentu bagi peningkatan daya saing nasional di tengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global. Daya saing daerah diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Dengan adanya identifikasi daya saing daerah diharapkan dapat menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat dengan menjaga daya beli masyarakat sebagai penanganan dampak inflasi merupakan salah satu upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas karena tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Bagi tata kelola pembangunan, sejatinya pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam

berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tersebut ditandai oleh tiga hal yang fundamental. Pertama, semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Kedua, semakin jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur. Ketiga, semakin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar sesama penduduk. Semakin tinggi tingkat ketimpangan, tensi sosial juga akan semakin meningkat, lingkungan dengan tensi sosial yang tinggi memiliki tingkat kerawanan konflik, tindakan kriminal, atau bahkan pembunuhan lebih tinggi. Situasi ini pada akhirnya akan menurunkan keramahan lingkungan bagi dunia usaha dan investasi tidak akan berkembang, sehingga berpotensi mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan lainnya. Ketimpangan juga menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini karena ketika pertumbuhan terjadi di suatu konteks perekonomian yang tidak inklusif atau timpang, maka hasil pertumbuhan ekonomi cenderung semu dan hanya dinikmati oleh pelaku ekonomi dengan tingkat pendapatan teratas saja. Oleh karena itu, diperlukan langkah terobosan dalam mengatasi ketimpangan melalui langkah afirmatif untuk meredistribusi pendapatan dari kalangan teratas ke kalangan terbawah, melalui serangkaian kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menempatkan pemerataan sebagai penjurunya termasuk melalui perlindungan sosial.

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial dalam rangka pemerataan. Perlindungan sosial merupakan segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan dan utamanya kemiskinan ekstrim. Perlindungan sosial dilaksanakan dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan.

5. Pengendalian Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di Kota Malang

antara lain: kenaikan harga bahan pokok dan BBM; kenaikan harga makanan, minuman, dan tembakau; kenaikan harga pakaian dan alas kaki; kenaikan harga perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga; kenaikan harga kesehatan; kenaikan harga transportasi; kenaikan harga rekreasi, olah raga, dan budaya; kenaikan harga pendidikan; kenaikan harga penyediaan makanan dan minuman atau restoran; kenaikan harga perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Pemerintah Kota Malang bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan koordinasi yang bertujuan untuk memastikan inflasi tetap terkendali. Langkah-langkah strategis dilakukan pemerintah seperti pemantauan harga secara intensif, intervensi pasar, serta optimalisasi distribusi bahan pokok akan terus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terkendali.

6. Peningkatan produktivitas daerah

Daya saing daerah diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Dengan adanya identifikasi daya saing daerah diharapkan dapat menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Salah satu upaya meningkatkan daya saing daerah dengan meningkatkan peran UMKM dan pasar rakyat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Kota Malang sendiri memiliki kurang lebih 8.000 (delapan ribu) pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal sangat nyata dan terus dikuatkan, di antaranya dengan penerbitan Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Malang Melalui Aplikasi Jatim Bejo dan Bela Pengadaan. Pemerintah Kota Malang juga telah mengalokasikan 46 (empat puluh enam) persen pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi jenis usaha kecil dan atau koperasi pada tahun anggaran 2022. Sejumlah sentra industri UMKM unggulan di antaranya yakni keripik tempe, batik, fashion, painting, keramik, rotan, sanitair, gerabah, mebel, raket, dan sebagainya.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius guna mengefektifkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) berdampak, salah satunya melalui pelaksanaan RB tematik peningkatan investasi. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan iklim investasi terutama di daerah. Dengan reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi, peningkatan investasi diterapkan untuk meningkatkan *competitiveness index* sehingga diharapkan dapat melipatgandakan investasi. Dengan investasi yang semakin besar di daerah diharapkan dapat membuka lebar kesempatan kerja dan lapangan berusaha masyarakat agar mengurangi jumlah pengangguran yang ada di daerah.

7. Penguatan infrastruktur berkelanjutan

Penguatan infrastruktur berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Pembangunan dan penataan ruang serta infrastruktur kota yang mendukung dan mewadahi aktivitas pengembangan kota secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Fungsi rencana tata ruang wilayah kota salah satunya sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Penyusunan rencana jangka menengah daerah harus dapat meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu. Pembangunan infrastruktur yang direncanakan harus dapat menyelesaikan permasalahan utama di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur harus dapat memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi terutama di daerah, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

Perencanaan optimal atas infrastruktur yang terintegrasi akan dapat menekan biaya transportasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, kelengkapan prasarana pendukung melahirkan efisiensi setiap moda transportasi maupun jaringan logistik barang yang modern dan terintegrasi antar pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pemerintah selalu berupaya mengoptimalisasi pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Untuk mempertinggi efisiensi dan optimasi sistem dan jaringan transportasi yang ada dengan orientasi jangka pendek

dan jangka menengah dengah biaya yang relatif murah diperlukan suatu konsep perencanaan dan kebijakan transportasi perkotaan yang disebut manajemen transportasi. Manajemen transportasi dijalankan dengan cara mengoptimalkan jaringan fasilitas transportasi yang ada.

Untuk mewujudkan tata kota yang dapat menunjukkan ciri khas daerah tersebut diperlukan branding daerah. Seluruh daerah harus mulai mendesain kotanya dengan baik, sehingga setiap kota dan kabupaten memiliki diferensiasi. Selain branding, juga harus dipersiapkan masterplan dan infrastruktur untuk mendukung branding kota. Pemerintah daerah menyusun rencana induk (masterplan) penataan kota dan juga penjenamaan yang memiliki visi dan dapat menunjukkan keunggulan dari setiap kabupaten/kota tersebut sebagai sebuah keunikan.

Faktor (kekuatan dan peluang) yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan penataan ruang antara lain:

- Kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik;
- Kerjasama Malang Raya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sungai dan air minum;
- Kebutuhan penataan bangunan gedung pemerintah yang memiliki karakter khas Malang;
- Kepuasan Infrastruktur Pembangunan Prasarana Sarana Publik;
- Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang;
- Belum semua rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak.

Sedangkan beberapa kelemahan dan ancaman yang akan mempengaruhi tercapainya pembangunan dan kesesuaian penataan ruang yaitu:

a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyediaan infrastruktur masih rendah;
b. Belum optimalnya penanganan banjir;
c. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah masih belum optimal;
d. Belum adanya perencanaan layanan angkutan umum terintegrasi;
e. Kualitas pelayanan transportasi masih belum optimal;
f. Belum optimalnya prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
g. Penyediaan air bersih;
h. Potensi terjadinya banjir;
i. Potensi kemacetan;
j. Antisipatif munculnya kawasan kumuh baru;
k. Belum semua rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak;
l. Masih banyak permukiman dengan status tanah ilegal atau dalam kawasan rawan bencana.

8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

Dalam mencapai kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), indikator yang digunakan Kota Malang antara lain Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, sedangkan Indeks Kualitas Air Laut tidak digunakan sesuai kondisi eksisting Kota Malang yang tidak berbatasan dengan laut. Potensi bencana yang sering terjadi di Kota Malang yakni bencana longsor, banjir dan angin topan. Potensi bencana tersebut terlebih harus diwaspadai pada pemukiman di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) atau tebing bibir sungai. Sehingga titik bencana dan lokasi yang berpotensi bencana harus selalu dimonitoring, mengingat intensitas hujan sedang sampai tinggi pada saat musim penghujan memicu debit Sungai Brantas, meluap di sejumlah titik. Dampaknya, volume air waduk pun meningkat. Selain itu, kondisi muka air waduk di DAS Brantas dan Bengawan Solo, menunjukkan peningkatan volume. Kota Malang juga mempunyai daerah yang cenderung padat penduduk seperti di wilayah Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun. Padatnya penduduk juga hunian juga menimbulkan kekhawatiran akan rawan bencana kebakaran. Data menunjukkan bahwa 25,39% resiko kebakaran berada pada daerah yang padat penduduknya, yaitu di Kecamatan Klojen dan juga Kecamatan Sukun. Penyebab kebakaran sebagian besar adalah karena konsleting listrik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kualitas lingkungan hidup yang menjadi kekuatan dan peluang antara lain Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup/Skor IKLH Jawa Timur, pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, ketahanan bencana, serta penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup sebagai bagian dari gerakan peduli lingkungan hidup. Sedangkan faktor penghambat pencapaian kualitas lingkungan hidup yang menjadi kelemahan dan ancaman yaitu penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup belum berjalan optimal, masih rendahnya kualitas lingkungan hidup (air, udara dan lahan), luas Ruang Terbuka Hijau belum sesuai ketentuan, belum optimalnya

pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3), pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir belum optimal, kurangnya kesadaran warga dalam memilah sampah dan membuang sampah sesuai tempatnya, serta masih kurangnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam memberikan daya dukung lingkungan yang optimal bagi kehidupan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan ketangguhan (*resiliency*) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing Perangkat Daerah dan penganggaran daerah.

9. Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien

Era disrupsi merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Masifnya inovasi itulah yang bisa mengubah berbagai sistem dari pola lama ke baru. Efek disrupsi yang luas tersebut pada akhirnya juga akan merambah ke pola kerja Birokrasi dan sistem Pemerintahan. Disrupsi yang selalu dikaitkan dengan kemunculan teknologi yang semakin berkembang dapat membentuk pola "gangguan" pada sistem dalam sebuah organisasi bisnis maupun pemerintahan. Reformasi Birokrasi yang menjadi harapan masyarakat pada terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien serta menciptakan sebuah pelayanan publik yang optimal dan lebih baik dituntut untuk menyesuaikan diri dan mengikuti arus perubahan saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik bereformasi menjadi tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien. Berkembangnya penilaian masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintahan berdampak juga terhadap regulasi kebijakan dalam pengawasan sehingga perlu perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih yaitu pencegahan korupsi dan integritas terhadap risiko korupsi.

Dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif perlu transformasi terhadap tata kelola pemerintahan

dari hulu ke hilir sehingga terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak pada pembangunan. Sisi hulu dimaknai sebagai tata kelola pemerintahan internal yang arahnya adalah mengimplementasikan tata kelola pemerintahan berbasis digital agar terwujud tata kelola pemerintahan yang berintegritas yakni bersih, akuntabel, efektif efisien. Sedangkan sisi hilir dimaknai sebagai pembangunan daerah berorientasi pada dampak yang dapat dirasakan masyarakat (birokrasi berdampak) melalui terpenuhinya indikator-indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.

Percepatan reformasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perlu disegerakan, mengingat terdapat tiga arahan Presiden tentang reformasi birokrasi, dimana salah satunya adalah birokrasi lincah dan cepat. Penerapan digitalisasi dirasa menjadi salah satu cara untuk melahirkan birokrasi yang lincah dan cepat, sebab semua kebutuhan sudah terintegrasi sehingga birokrasi semakin efektif efisien dengan ciri agile dan adaptif agar setara dengan birokrasi berkelas dunia. Era disrupsi merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Masifnya inovasi itulah yang bisa mengubah berbagai sistem dari pola lama ke baru. Efek disrupsi yang luas tersebut pada akhirnya juga akan merambah ke pola kerja Birokrasi dan sistem Pemerintahan. Disrupsi yang selalu dikaitkan dengan kemunculan teknologi yang semakin berkembang dapat membentuk pola “gangguan” pada sistem dalam sebuah organisasi bisnis maupun pemerintahan. Reformasi Birokrasi yang menjadi harapan masyarakat pada terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien serta menciptakan sebuah pelayanan publik yang optimal dan lebih baik dituntut untuk menyesuaikan diri dan mengikuti arus perubahan saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik bereformasi menjadi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

10. Pelayanan publik yang adaptif dan melayani

Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekspektasi dan tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Arahan presiden tentang reformasi birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Tujuan mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian pembangunan nasional.

Membangun efisiensi birokrasi melalui digitalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga perlu diperhatikan terlebih akselerasi pembangunan aparatur negara dilakukan sejak tahun 2010 dalam rangka mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau. Dengan perkembangan teknologi 4.0, program reformasi birokrasi didorong melalui penerapan SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara untuk akselerasi pencapaian birokrasi berkelas dunia. Di samping itu, secara khusus SPBE ditempatkan pada area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Dalam revolusi industri 4.0, digitalisasi menjadi hal yang mutlak dilakukan, termasuk di bidang pelayanan publik. Di era digitalisasi ini, aplikasi sangat efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat terkait sistem pengelolaan pengaduan secara maksimal. Digitalisasi dalam pelayanan publik, diharapkan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dengan adanya kemudahan pelayanan, diharapkan juga dapat mengubah stigma ketidakpercayaan masyarakat atas pelayanan buruk pemerintah dapat menghilang.

11. Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal melalui penguatan PAD perlu diwujudkan, mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mampu menunjukan sejauh mana perekonomian itu berkembang dalam kurun waktu tertentu. Bagi negara berkembang, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Sebagaimana yang tertera dalam Visi Indonesia Tahun 2045, Indonesia ditargetkan menjadi negara berpendapatan tinggi pada Tahun 2036 dan masuk dalam 5 (lima) besar negara dengan Produk Domestik Bruto tertinggi di dunia pada Tahun 2045. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMD dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Untuk meningkatkan PAD perlu menggali potensi PAD secara optimal, memanfaatkan aset daerah, penetapan objek

pajak, subjek pajak dan tarif pajak, penyesuaian tarif mengikuti regulasi terbaru serta memaksimalkan peranan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah. Faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian PAD sesuai potensi antara lain masih adanya piutang pajak yang belum tertagih, belum optimalnya potensi retribusi parkir dan kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga menghambat penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan.

2.3.2.5 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Isu Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 memiliki peran penting dalam mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Isu-isu tersebut mencakup fenomena yang perlu diantisipasi karena berpengaruh terhadap upaya mencapai tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan tata Kelola pemerintahan. Isu strategis daerah harus selaras dengan isu strategis KLHS dan menjadi dasar penyusunan RPJMD Kota Malang. Isu strategis pembangunan berkelanjutan antara lain:

1. **Peningkatan timbulan sampah**

Permasalahan sampah pada suatu kota erat kaitannya dengan asal sampah serta sumber penghasil sampah, dikarenakan sumber penghasil sampah akan memberikan kontribusi yang berbeda terkait volume timbulan sampah yang dihasilkan maupun komposisi sampahnya. Salah satu penyebab meningkatnya timbulan sampah di Kota Malang adalah pesatnya pertumbuhan UMKM yang aktivitas di dalamnya akan menambah timbulan sampah baru, sehingga berkorelasi dengan meningkatnya timbulan sampah. Selain itu peningkatan jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap peningkatan volume timbulan sampah yang ada di Kota Malang. Dalam isu strategis daerah, peningkatan timbulan sampah ada pada isu “Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah”. Dengan mengurangi timbulan sampah diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Malang.

2. **Penataan ulang sistem (saluran) drainase yang holistik**

Ditinjau dari kondisi fisik kawasannya, wilayah Kota Malang merupakan dataran tinggi yang dilayani saluran drainase alamiah/utama berupa beberapa sungai besar dan anak sungai, salah satunya adalah Sungai Brantas. Sistem jaringan drainase yang terdapat di Kota Malang terdiri atas 2 (dua) jenis yakni drainase makro dan drainase mikro. Sistem drainase makro pada umumnya memanfaatkan sungai sebagai saluran pembuangan akhir, dimana terdapat 5 (lima) sungai besar yakni Sungai Brantas, Sungai Amprong, Sungai Bango, Sungai Metro dan Sungai Sukun (Saluran Irigasi Primer). Permasalahan genangan di Kota Malang

meliputi genangan di sekitar DAS Metro, DAS Bango, dan DAS Brantas. Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir tahun 2015-2023 memiliki tren tetap, namun di Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang mengalami penurunan dikarenakan meningkatnya perubahan guna lahan menjadi lahan terbangun.

3. **Optimalisasi pelayanan kesehatan guna menurunkan angka stunting dan malnutrisi pada balita**

Angka stunting Kota Malang terus turun dari tahun ke tahun walaupun penurunan yang terjadi belum signifikan, hal ini sebagai wujud nyata pelaksanaan agenda pemerintah yang berkomitmen menurunkan angka stunting. Permasalahan stunting bukan urusan kelompok atau perangkat daerah tertentu, namun menjadi tanggung jawab bersama, baik secara institusional dan personal. Tingginya angka stunting di suatu wilayah salah satunya dikarenakan oleh tingginya jumlah pasangan subur sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan postnatal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan air bersih merupakan beberapa penyebab stunting.

4. **Optimalisasi rekayasa lalu lintas sebagai upaya penanggulangan kemacetan**

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu daerah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan budaya masyarakat. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan dan efisiensi usaha. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Malang yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan serta kurangnya pengelolaan lalu lintas yang efektif menjadi faktor penyebab utama kemacetan. Oleh karena itu, rekayasa lalu lintas menjadi solusi penting dalam upaya menanggulangi permasalahan ini.

5. **Optimalisasi bantuan sosial bagi penduduk miskin baik yang masuk kategori ekstrem maupun rentan**

Optimalisasi bantuan sosial memerlukan reformasi menyeluruh mulai dari pendataan, penyaluran, hingga pemberdayaan. Program bansos harus dipandang sebagai investasi sosial yang tidak hanya mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat miskin. Dukungan lintas sektor, inovasi digital, dan pengawasan publik sangat penting untuk memastikan efektivitas program ini. Beberapa langkah/intervensi Pemerintah Kota Malang dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT), Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), rantang kasih, bantuan sosial, Bosda dan beasiswa, *Universal Health Coverage*, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, *database* kesejahteraan sosial *by name by address* dan *by need*.

6. Pengembangan potensi industri kreatif

Industri kreatif adalah sektor ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Di Kota Malang, industri ini memiliki potensi besar karena kekayaan budaya, seni, dan sumber daya manusia yang melimpah. Dalam era digital saat ini, pengembangan industri kreatif menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Salah satu wadah pengembangan potensi ekonomi kreatif di Kota Malang yaitu Malang Creative Center (MCC). Malang Creative Center (MCC) adalah pusat kegiatan bagi pelaku yang aktif di sektor industri kreatif. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) dalam industri kreatif dengan menyediakan fasilitas penunjang yang memadai. MCC memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan merata di setiap sektor ekonomi kreatif yang tergabung dalam 17 sub-sektor ekonomi kreatif yaitu arsitektur, film, fotografi, kriya, kuliner, seni rupa, produk, aplikasi, *game*, televisi dan radio, *fashion*, pertunjukan, desain interior, periklanan, penerbitan, DKV, dan musik, sambil tetap memperhatikan kepentingan budaya sebagai warisan berharga.

7. Pembaharuan sistem kepegawaian guna mendukung gerakan antikorupsi, budaya kerja dan pelayanan publik yang prima

Reformasi birokrasi di Indonesia terus menjadi fokus utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek krusial dalam reformasi ini adalah pembaharuan sistem kepegawaian. Aparatur sipil negara (ASN) sebagai tulang punggung pelayanan publik harus memiliki integritas tinggi, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Oleh karena itu, sistem kepegawaian perlu diperbaharui secara menyeluruh guna mendukung gerakan antikorupsi, menciptakan budaya kerja yang sehat, serta pelayanan publik yang prima.

8. Optimalisasi kualitas pendidikan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan berdaya saing global. Namun, tantangan dalam sistem pendidikan Indonesia masih cukup kompleks, mulai dari kesenjangan akses, mutu guru, hingga sarana prasarana yang belum merata. Oleh karena itu, optimalisasi kualitas pendidikan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan zaman dan mendorong kemajuan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang menekankan pada pemerataan dan perluasan pelayanan Pendidikan. Hal tersebut

ditunjukkan dengan indikator-indikator yang mengukur pemerataan pendidikan, seperti Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah. Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang perlu adanya kualifikasi terhadap tenaga pendidik dalam mendukung kegiatan pendidikan, selain itu perlu adanya perbaikan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjangnya.

Tabel 2.39 Perumusan Isu Strategis

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Peningkatan kualitas SDM (jumlah Perguruan Tinggi yang cukup banyak, aliran Informasi yang cepat, prestasi SDM Kota Malang yang meningkat)	Penguatan SDM yang sehat dan unggul masih belum optimal (IKS masih rendah di 0,341, stunting masih tinggi, APM masih dibawah 100, masih ada 3.778 anak tidak sekolah, kualitas pendidikan belum cukup tinggi)	Optimalisasi kualitas pendidikan	Tujuan SDGs yaitu (3) pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia dan (4) menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	Kualitas pendidikan yang masih rendah	Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas	Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan
	Lingkungan Sosial Masyarakat yang harmonis dan berbudaya (pendidikan karakter, agama, kebangsaan, kewargaan, budaya belum optimal karena masih ada kasus perundungan, karakter anak yang cenderung tergerus teknologi, implementasi pancasila kurang)	Optimalisasi bantuan sosial bagi penduduk miskin baik yang masuk kategori miskin maupun rentan	Tujuan SDGs yaitu (1) mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana	Belum meratanya akses dan kualitas di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk menciptakan tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045	Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting, dan Penanggulangan Kemiskinan	Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang harmonis dan berbudaya
		Optimalisasi pelayanan kesehatan guna menurunkan angka stunting	Potensi muncul bahkan mewabahnya penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan penyakit pernapasan, yang	Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat	Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang	Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
		dan malnutrisi pada balita	merupakan penyakit yang berpotensi meningkat seiring perubahan iklim yang mempengaruhi pola cuaca dan kualitas udara	jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah	layak dan berkualitas	
Pembangunan yang kolaboratif di Kota Malang	Belum meratanya pelaksanaan dan kesempatan pembangunan ekonomi inklusif (pertumbuhan ekonomi di 5,4% tahun 2024, kemiskinan 3,91, pengangguran 6,10 dan ketimpangan 0,42 masih menjadi masalah yang harus diselesaikan dan fluktuasi inflasi terhadap komponen bergejolak)	Optimalisasi bantuan sosial bagi penduduk miskin baik yang masuk kategori miskin maupun rentan; Pengembangan potensi industri kreatif potensial	Tujuan SDGs (8) mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua	Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global	Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah	Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan
			Deglobalisasi, yang mencakup penurunan tingkat interkoneksi global dalam perdagangan, investasi, dan aliran informasi	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas	Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah melalui mendorong ekonomi mandiri untuk mengurangi	Pengendalian Inflasi

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
					pengangguran, meskipun investasi meningkat belum menyerap tenaga kerja secara optimal	
Sumber Daya Manusia yang kreatif cukup banyak dan mampu menumbuhkan sub sektor ekonomi kreatif dan pelaku usaha mikro baru	Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah daerah dalam rangka kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (PDRB 100,12 T belum optimal karena kemiskinan, pengangguran, gini rasio masih besar; Proporsi PDRB ekraf masih 7,9% padahal IPM Kota Malang cukup tinggi)	Pengembangan potensi industri kreatif potensial	Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negeri berkembang	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal	Peningkatan Produktivitas Daerah
Potensi infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor	Infrastruktur fundamental perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan masih belum terbangun optimal (masih ada	Penataan ulang sistem (saluran) drainase yang holistik; Optimalisasi rekayasa lalu lintas sebagai	Dampak *Climate action failure* terhadap ketahanan infrastruktur; Hambatan dan kompleksitas dalam pengelolaan sumber	Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tapi masih jauh dari kebutuhan	Ketersediaan infrastruktur di Jawa Timur masih membutuhkan peningkatan dari segi kualitas dan pemerataan	Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
perdagangan, jasa, dan pariwisata	kawasan kumuh, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman masih 36,17%, Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan masih 83,58%)	upaya penanggulangan kemacetan	daya air, mengingat diperlukan sistem pengelolaan air yang lebih baik untuk menangani perubahan pola curah hujan dan mencegah kekurangan air			
Kota Malang memiliki potensi untuk pembangunan lingkungan yang berkelanjutan melalui kampung tematik dan peran serta komunitas lingkungan, Perguruan Tinggi dan Perusahaan dalam edukasi	Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah untuk lingkungan perkotaan masih belum dapat menunjang kenyamanan aktivitas di perkotaan (IKLH di angka 61,76; timbulan sampah terolah di TPA masih sekitar 32,91%, Ketidakcukupan pangan 4,99%, indeks risiko bencana 78,21)	Timbulan sampah yang semakin meningkat; Penurunan daya dukung pangan dan air dan Peningkatan resiko bencana	Risiko kehilangan keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*) yang mengancam keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan manusia; Perubahan iklim, bersama kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (*Triple Planetary Crisis*) secara global akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari	Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau; Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan; tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan meliputi mengatasi penurunan daya dukung lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan perubahan tata guna lahan, mengelola risiko	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan ketahanan daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi	bencana terutama akibat perubahan iklim dan minimnya infrastruktur mitigasi	
Potensi Kota Malang dalam transformasi pelayanan publik yang terstruktur, profesional, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi digital	Reformasi Birokrasi belum optimal dilaksanakan (Implementasi RB General masih dibawah 80 (77,42); SPI masih dibawah 70 (68,79), Sistem Merit masih dibawah 300 (297), Nilai SAKIP masih dibawah 90 (80,08))	Pembaharuan manajemen sistem kepegawaian guna mendukung antikorupsi, budaya kerja dan pelayanan publik yang prima	Risiko kegagalan *cybersecurity*, yang melibatkan potensi serangan siber dan kebocoran data, berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan sistem informasi di berbagai sektor	Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik, meliputi: meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, membangun kepemimpinan lokal berwawasan global dengan tetap menjaga kearifan lokal	tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien
				Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif; Proses bisnis dan tata kelola urusan	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik, meliputi: menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan	Pelayanan publik yang adaptif dan melayani

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif	kualitas layanan publik, memperkuat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui integrasi data dan partisipasi publik	
Potensi Kota Malang dalam pertumbuhan ekonomi (melalui pariwisata, akomodasi, makan minum dan perkembangan pelaku ekonomi kreatif) serta Potensi Kota Malang menjadi daya tarik investasi (nilai investasi meningkat setiap tahunnya)	Pendapatan Daerah belum dapat memenuhi kebutuhan Belanja Daerah perkotaan yang direncanakan menjadi Kota Metropolitan/Kawasan Perkotaan Prioritas (Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah masih lebih kecil dari Pendapatan transfer (36%))	Pengembangan potensi industri kreatif	Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi pada perubahan struktur ekonomi dan demografi, di mana pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 berpotensi menyebabkan komposisi belanja negara akan lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas	Pengembangan investasi berbasis sumber daya lokal di Provinsi Jawa Timur masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi dan pembangunan daerah	Kemandirian Fiskal Daerah

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sedangkan Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan merupakan cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, Kota Malang sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode dua puluh tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah dan merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kota Malang selama lima tahun yang terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus dan terfokus.

A. Visi

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periodisasi pertama RPJPD Kota Malang Tahun 2025-2045. Arah kebijakan tahun pertama dan sasaran pokok RPJPD menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Malang untuk tahun 2025-2029. Visi Kota Malang Tahun 2025-2029 berdasarkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Malang adalah sebagai berikut:

“Menuju Malang Mbois dan Berkelas”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Malang diarahkan untuk menjadi kota yang berdaya saing global pada tahun 2045 selaras dengan cita-cita Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas, sehingga perlu penguatan fondasi untuk menuju Kota Malang berdaya saing global sesuai dengan arah kebijakan tahun pertama RPJPD yaitu penguatan fondasi. Berdaya saing global juga dapat disetarakan dengan "Keren" atau bahasa lokal Malangan adalah "Mbois". "Berkelas" merupakan perwujudan kondisi Kota Malang yang berakhlak, maju, sejahtera dan berkelanjutan. Selain itu MBOIS BERKELAS adalah akronim perwujudan dari Mandiri, Berbudaya, Optimis, Indah, Sejahtera, BERkelanjutan, Kolaboratif, Efisien, Lestari, Adaptif, Sinergis.

Mbois memiliki arti bahwa Kota Malang menjadi kota yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan terhadap tantangan/tuntutan globalisasi dan tanggap terhadap setiap perubahan lingkungan, tidak hanya untuk sekedar bertahan/survive namun untuk bisa terus tumbuh dan berkembang, baik di sektor ekonomi, sosial maupun sektor lainnya. Dimaknai juga bahwa Kota Malang memiliki fondasi yang kuat dan modal dasar dalam melaksanakan percepatan pembangunan yang inklusif dengan pilar sumberdaya yang memiliki daya saing di tingkat global, khususnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan dan kemandirian daerah, lingkungan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, serta daya saing birokrasi sebagai motor utama. Hal ini merupakan sebuah komitmen dan cita-cita untuk menjadikan dan menempatkan Kota Malang sejajar dengan kota-kota maju di Dunia. Selain itu Mbois juga berarti Kota Malang menjadi Kota yang sejahtera, mandiri, adaptif, indah, kolaboratif, berkelanjutan, lestari, dengan dukungan sumberdaya yang berbudaya, optimis, inovatif, serta pemerintahan yang efisien dan sinergis.

Berkelas merupakan cita-cita terwujudnya kondisi kota yang berakhlak, maju, berdaya saing global, sejahtera, inklusif, berkelanjutan mengajak dan mengikutsertakan semua *stakeholders*, meningkatkan kelas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang, ramah dan toleran, seimbang dengan pembangunan sosial dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam/lingkungan sehingga menggaransi kelestarian lingkungan hidup untuk kesejahteraan generasi mendatang. Akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan berbasis pada pemenuhan daya dukung dan daya tampung perkotaan yang ramah/pro lingkungan dengan berbasis pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Misi

Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Untuk mewujudkan Visi **"Menuju Malang Mbois dan Berkelas"** dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Generasi yang Berbudaya, Optimis dan Inovatif

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan transformasi sosial menuju generasi emas maka kerangka pembangunan 5 (lima) tahun pertama diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Di

tengah globalisasi yang semakin pesat, penting bagi kita untuk memperhatikan pembentukan karakter generasi muda. Generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual tinggi, tetapi juga memiliki kepribadian yang berbudaya, optimis, dan inovatif.

Generasi muda yang berbudaya adalah mereka yang mampu menjaga dan melestarikan warisan budaya seperti nilai-nilai luhur serta nilai pancasila, sehingga karakter dan penanaman nilai-nilai budaya lokal akan membentuk perilaku yang berbudaya di masyarakat.

Generasi yang optimis adalah mereka yang memiliki keyakinan bahwa setiap tantangan bisa dihadapi dan setiap masalah ada solusinya. Dengan semangat yang tak mudah menyerah, mereka berani menghadapi ketidakpastian dengan percaya diri. Untuk mencapainya, kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi, baik itu di rumah, sekolah, maupun masyarakat.

Generasi yang inovatif adalah mereka yang mampu berpikir kreatif, mencari solusi baru, dan menciptakan hal-hal yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk mewujudkannya, kita harus menciptakan sistem pendidikan yang mendukung pemikiran kritis dan eksplorasi tanpa batas. Mendorong mereka untuk berpikir berbeda, melakukan eksperimen, serta memanfaatkan teknologi untuk menciptakan perubahan positif. Sehingga generasi muda akan mampu menjadi generasi emas menuju Kota Malang berdaya saing global.

Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri berbasis Perekonomian yang Mapan dan Adaptif

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan transformasi ekonomi yang inklusif maka kerangka pikir penguatan fondasi di periodisasi 5 (lima) tahun pertama adalah pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta penurunan kemiskinan.

Perekonomian merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri, kita perlu membangun sistem perekonomian yang mapan dan adaptif. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang memiliki hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi harus mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Pemerataan pembangunan adalah kunci agar setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Selain itu, kesejahteraan juga tidak hanya berbicara soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang kualitas hidup yang baik. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan sektor-sektor yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan kesejahteraan yang merata, masyarakat akan dapat merasakan dampak positif dari kemajuan ekonomi secara langsung.

Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu menciptakan peluang ekonomi bagi dirinya sendiri. Untuk mencapai hal ini, pemberdayaan ekonomi harus menjadi prioritas. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Malang. Program pelatihan keterampilan, akses modal yang mudah, dan kemudahan berusaha adalah langkah-langkah penting untuk mendukung pemberdayaan ini. Selain itu, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar juga harus menjadi fokus utama. Generasi muda perlu dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membuat mereka mandiri, baik dalam berwirausaha maupun dalam

mengelola karier mereka. Masyarakat yang mandiri bukan hanya mengandalkan diri mereka sendiri, tetapi juga memiliki rasa percaya diri untuk menghadapi tantangan ekonomi dan berinovasi di tengah perubahan.

Untuk membangun perekonomian yang mapan, perlu adanya kebijakan pada sektor-sektor produktif, seperti pertanian, industri, dan teknologi, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sementara itu, untuk menjadi adaptif, masyarakat dan sektor ekonomi harus peka terhadap perubahan dan siap berinovasi. Pemanfaatan teknologi digital, misalnya, dapat menjadi salah satu cara untuk membuka peluang ekonomi baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Perekonomian yang adaptif juga berarti perekonomian yang mampu mengatasi tantangan-tantangan baru, seperti krisis ekonomi global. Dengan memperkuat daya tahan ekonomi melalui diversifikasi sektor dan peningkatan kapasitas lokal, masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi setiap perubahan dan tantangan yang ada.

Misi 3. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Indah, Kolaboratif, Berkelanjutan dan Lestari

Pembangunan kota yang ideal bukan hanya soal kemajuan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang harmonis, menyenangkan, dan ramah bagi penghuninya. Infrastruktur fundamental yang memadai tetap dibutuhkan sehingga akses layanan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang bersih dan aman dapat terpenuhi dengan baik.

Lingkungan perkotaan yang indah, kolaboratif, berkelanjutan, dan lestari menjadi tujuan penting dalam merancang kota yang tidak hanya nyaman untuk dihuni, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

Lingkungan yang indah bukan hanya soal estetika visual, tetapi juga menciptakan suasana yang menyenangkan dan nyaman bagi masyarakat yang menghuninya. Ruang-ruang publik seperti taman kota, alun-alun, dan jalur pejalan kaki yang asri, harus didesain dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keberagaman kebutuhan warga. Penanaman pohon, penghijauan, dan penggunaan material ramah lingkungan akan memberikan dampak positif terhadap kualitas udara dan memperindah lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan bersama. Selain itu, kolaborasi juga mencakup upaya untuk membangun jaringan sosial yang solid antarwarga, di mana mereka saling mendukung dan bekerja sama dalam memecahkan masalah-masalah perkotaan, seperti kemacetan, polusi, dan keterbatasan sumber daya. Program komunitas, seperti kerja bakti, pengelolaan sampah bersama, dan kegiatan sosial lainnya, akan memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Dalam hal ini, pengelolaan energi, air, dan sampah menjadi aspek yang sangat penting. Selain itu, sistem transportasi yang ramah lingkungan dan efisien juga perlu diperkenalkan untuk mengurangi polusi udara

dan kemacetan. Di bidang pengelolaan air, pengembangan teknologi untuk konservasi air dan pengolahan air limbah harus dioptimalkan. Sampah harus dipilah, didaur ulang, dan dimanfaatkan kembali, bukan hanya dibuang begitu saja.
Hal ini hanya dapat terwujud melalui kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan pelestarian alam. Dengan komitmen dan upaya bersama, kita dapat menciptakan kota yang tidak hanya nyaman untuk dihuni hari ini, tetapi juga layak untuk diwariskan kepada generasi mendatang.

Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Sinergis

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan profesionalisme aparatur, birokrasi yang efisien dan efektif serta adaptif terhadap disrupsi teknologi dan responsif terhadap perubahan dan tantangan global sehingga mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel serta mewujudkan birokrasi yang berdampak dan menjamin manfaat kebijakan dirasakan oleh masyarakat.
Tata kelola pemerintahan yang efisien adalah pemerintahan yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan menjadi langkah awal menuju sistem yang lebih efektif. Penggunaan teknologi digital untuk menyederhanakan proses birokrasi sangat penting untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sistem ini tidak hanya mempermudah akses informasi dan dokumen, tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Pengelolaan anggaran yang transparan dan berbasis hasil juga akan memastikan bahwa dana yang digunakan oleh pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pelayanan publik yang sinergis adalah pelayanan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholders*, dengan saling mendukung dan berkolaborasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, penting untuk membangun sistem yang memfasilitasi partisipasi masyarakat/*stakeholders* dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah harus mendengarkan kebutuhan dan aspirasi warga agar kebijakan yang diambil sesuai dengan harapan dan kondisi lapangan. Selain itu, penyederhanaan proses administrasi dan layanan yang berbasis digital menjadi sangat penting untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.

Berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi tersebut dirumuskanlah **Dasabakti Unggulan**. Dasabakti Unggulan merupakan upaya percepatan pembangunan daerah yang dibangun dari ikhtiar pemahaman terhadap permasalahan dan potensi Kota Malang. Selanjutnya uraian dari Dasabakti unggulan dijabarkan melalui 10 (sepuluh) bahasa malangan dan aktivitasnya akan menjadi fokus pembangunan 5 (lima) tahun dari arah kebijakan dan strategi jangka menengah dan diintegrasikan dengan arahan kawasan strategis Kota Malang dalam RTRW Kota Malang. Adapun uraian aktivitas 10 Dasabakti sebagai berikut:

1. **Ngalam Pinter**
    1) Pengembangan talenta muda;

2) Beasiswa tuntas sekolah dan tuntas kuliah;
3) Pendidikan dasar gratis dan berkualitas berikut peningkatan sarana dan prasarana.

2. Ngalam Tahes

1) Peningkatan pelayanan puskesmas dan RSUD.
2) Pemberdayaan posyandu balita, lansia dan remaja yang ajeg.
3) Permakanan sehat untuk lansia, ibu hamil dan balita *stunting.*

3. Ngalam Ngopeni

1) Santunan kematian dan kelahiran untuk keluarga tidak mampu;
2) Pemberian insentif guru agama, guru madrasah dan guru TPQ;
3) Fasilitasi dana abadi pesantren;
4) Peningkatan kompetensi dan insentif kader posyandu;
5) Beasiswa pendidikan lanjut dan pelatihan untuk guru;
6) Bantuan operasional tempat ibadah;
7) Instansi pemerintahan terpadu untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
8) *Merit system* birokrasi dan peningkatan tunjangan pegawai berbasis kinerja;
9) Penyelenggaraan pelayanan publik dan perizinan berbasis aplikasi *online.*

4. Ngalam Nyaman

1) Penguatan layanan sistem transportasi publik yang akomodatif dan *modern;*
2) Penataan drainase dan sistem pengendalian banjir;
3) Penyediaan air bersih berikut infrastruktur secara merata, handal dan sehat;
4) Pengembangan jalan dan penataan sistem lalu lintas untuk mengurai kemacetan;
5) Pembentukan tim sapu lobang (salop) untuk jalan mulus di kota malang dan tim sedot banyu (senyu) untuk pemulihan bencana banjir;
6) Fasilitasi rumah layak huni/bedah rumah;
7) Pembangunan pusat parkir terpadu dan penerapan e-parkir tepi jalan umum;
8) 500 biopori tiap kelurahan;
9) Aktivasi pos kamling dan CCTV tiap lingkungan.

5. Ngalam Seger

1) Pengembangan sekolah dan institusi hijau;
2) Pembuatan kampung ikonik pelestarian lingkungan;
3) Perluasan ruang terbuka hijau plus dilengkapi sarana bermain dan olahraga Masyarakat;
4) Pengendalian limbah industri dan rumah tangga di Kota Malang.

6. Ngalam Asyik

1) Pengembangan ekosistem usaha pariwisata berbasis konferensi, pameran dan produk malang/*mice;*
2) Kolaborasi/*sister city* malang raya sebagai kawasan wisata terpadu;
3) Pengembangan taman apresiasi seni budaya masing-masing kecamatan;
4) Pengembangan kawasan kayu tangan *heritage* sebagai ruang ekonomi dan pelestarian budaya.

7. Ngalam Rijik
1) Pemberdayaan bank sampah masing-masing kampung;
2) Modernisasi sarana-prasarana TPA;
3) Pendirian TPS Terpadu tiap-tiap kelurahan.

8. Ngalam Idrek
1) Penciptaan lapangan kerja baru berbasis potensi dan sumberdaya lokal.

9. Ngalam Laris
1) Penataan dan pemberdayaan pasar rakyat melalui revitalisasi dan digitalisasi;
2) Fasilitasi pemasaran produk UMKM dan unggulan;
3) Pengembangan penelitian dan pendampingan usaha;
4) Fasilitasi akses permodalan usaha yang mudah dan ringan.

10. Ngalam Santun
1) Pengarusutaman pendidikan dan kegiatan keagamaan yang inklusif dan toleran;
2) Pengarusutamaan pendidikan karakter pada setiap jenjang pendidikan;
3) Pemberdayaan jaminan sosial kelompok rentan dan difabel.

Selain perumusan Dasabakti Unggulan, dalam rangka mempercepat transformasi sosial dan ekonomi pada periode "penguatan fondasi transformasi" diperlukan strategi/*highlight* intervensi. Adapun *highlight* menuju Malang Mbois dan Berkelas adalah:

1. Percepatan Transformasi Sosial:
   1) Seragam gratis bagi pelajar;
   2) 1.000 beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.

   Intervensi ini dalam rangka pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat khususnya pelajar tidak mampu.
2. Percepatan Transformasi Ekonomi:
   1) 1.000 event olahraga, seni, budaya dan ekonomi kreatif;
   2) 50 juta dana pembangunan per RT setiap tahun;
   3) Menyelesaikan masalah dasar perkotaan, banjir, macet, dan parkir.

   Intervensi ini dalam rangka peningkatan produktivitas daerah melalui ekonomi kreatif dan ekonomi lokal sehingga menciptakan lapangan kerja berbasis potensi lokal serta pemberdayaan masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis perekonomian yang berdaya saing dan inklusif. Selain itu juga dalam rangka mempercepat terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan nyaman melalui pengembangan infrastruktur perkotaan sebagai penunjang transformasi ekonomi dan sosial.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Walikota dan Wakil Walikota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selain itu perumusan Tujuan RPJMD juga memperhatikan dan mengintegrasikan tujuan penataan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang sehingga kawasan strategis kota dapat selaras dengan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah. Tujuan tujuan penataan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang adalah mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan dan Jasa yang berkualitas dan berskala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi serta pengembangan permukiman, fasilitas perkotaan, dan infrastruktur kota yang terintegratif, inklusif dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan isu strategis fokus pembangunan 5 (lima) tahun kedepan antara lain penguatan daya saing SDM berkelanjutan, pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan (berikut di dalamnya adalah sektor jasa maupun pengembangan usaha mikro kecil), dan penguatan infrastruktur berkelanjutan (termasuk di dalamnya fasilitas perkotaan dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan lestari).

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah serta isu strategis fokus pembangunan daerah, berikut disajikan Tujuan RPJMD tahun 2025-2029:

1. **Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berbudaya, sehat, tangguh, dan unggul**

   Sumber daya manusia (SDM) adalah kunci utama bagi kemajuan suatu bangsa. Untuk mewujudkan SDM yang berbudaya, sehat, tangguh, dan unggul, dibutuhkan pendekatan yang holistik, melibatkan pendidikan, kesehatan, pelatihan, serta pembinaan karakter. Pertama-tama, SDM yang **berbudaya** adalah mereka yang memiliki pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Melalui pendidikan yang berbasis budaya, generasi muda dapat menghargai warisan nenek moyang dan memanfaatkan kekayaan

budaya sebagai modal sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini bukan hanya menguatkan identitas bangsa, tetapi juga memperkaya cara berpikir dan cara bertindak dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan.

Selain itu, SDM yang **sehat** adalah SDM yang memiliki tubuh yang bugar serta mental yang kuat. Kesehatan fisik dan mental merupakan pondasi utama untuk bekerja dan berinovasi dengan maksimal. Oleh karena itu, program-program yang mendukung pola hidup sehat seperti olahraga dan makan bergizi. Selanjutnya, SDM yang **tangguh** adalah mereka yang mampu menghadapi tantangan dan kesulitan hidup dengan sikap optimis dan resilien. Pembangunan karakter yang mengedepankan ketahanan mental dan keberanian untuk bangkit dari kegagalan sangat penting. Pendidikan karakter yang fokus pada pengembangan sikap positif, kepemimpinan, dan ketahanan menghadapi tekanan hidup harus menjadi bagian dari setiap proses pembelajaran. Dengan mental yang tangguh, SDM dapat menghadapi berbagai situasi sulit, mulai dari bencana alam hingga tantangan ekonomi global. Terakhir, SDM yang **unggul** adalah mereka yang memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi di berbagai bidang, baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, seni, maupun sektor lainnya. Keunggulan ini tercapai melalui sistem pendidikan yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain itu, pengembangan bakat dan keterampilan melalui pelatihan yang relevan serta program beasiswa untuk studi lanjutan akan memberikan peluang bagi individu untuk mengembangkan potensi mereka. Dengan mengintegrasikan keempat aspek tersebut yaitu budaya, kesehatan, ketangguhan, dan keunggulan, kita dapat menciptakan SDM yang tidak hanya siap menghadapi tantangan zaman, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa.

2. **Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis perekonomian yang berdaya saing dan inklusif**

   Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sebuah perekonomian yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga inklusif, yang mampu memberi kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk berkembang dan meraih kesejahteraan. Perekonomian yang **berdaya saing** berarti ekonomi yang mampu bersaing baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Untuk mencapainya, dibutuhkan peningkatan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor, seperti industri, pertanian, dan teknologi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar juga menjadi kunci utama dalam memperkuat daya saing. Infrastruktur yang memadai dan akses terhadap teknologi terbaru akan membuka peluang bagi masyarakat untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi standar global. Selain itu, keberlanjutan dalam praktek bisnis yang ramah lingkungan dan inovatif akan menjadi daya tarik dalam memperkuat posisi ekonomi negara di pasar internasional. Namun, perekonomian yang berdaya saing tidak akan berarti banyak jika tidak bersifat **inklusif**. Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat hanya bisa tercapai

apabila setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografi, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses perekonomian. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, seperti petani kecil, pekerja informal, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program-program yang memberikan akses kepada mereka dalam hal modal, pelatihan, serta pemasaran produk akan membuka peluang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Selain itu, penting juga untuk membangun sistem ekonomi yang **berkeadilan**, yang memastikan distribusi kekayaan dan peluang secara adil. Pemerataan pembangunan yang mencakup wilayah terpencil, pendidikan yang merata, serta sistem kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat akan memberikan dasar yang kuat bagi terciptanya kemandirian masyarakat. Dengan akses yang setara, masyarakat tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga dapat berkontribusi secara aktif dalam perekonomian.

3. **Terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan nyaman**

   Lingkungan perkotaan merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Agar kota dapat menjadi tempat yang layak huni bagi semua warganya, dibutuhkan konsep pembangunan yang **inklusif**, **berkelanjutan**, dan **nyaman**. Mewujudkan kota seperti ini bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang seimbang. Pertama-tama, kota yang **inklusif** adalah kota yang memberikan akses yang setara kepada semua warganya, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kemampuan fisik. Pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, penyediaan ruang publik yang dapat diakses oleh semua kalangan, serta keberagaman layanan yang mencakup berbagai kelompok masyarakat adalah langkah utama dalam menciptakan kota inklusif. Dalam kota yang inklusif, tidak ada satu pun kelompok yang terpinggirkan, dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menikmati kehidupan perkotaan.

   Selain itu, kota yang **berkelanjutan** adalah kota yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan yang berkelanjutan mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengurangan emisi karbon, dan penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari transportasi hingga pengelolaan sampah. Dengan adanya kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan, penghijauan ruang publik, serta transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan, kota dapat mengurangi jejak ekologis dan memastikan kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang. Agar kota juga **nyaman** untuk dihuni, kualitas hidup warganya harus menjadi prioritas. Faktor kenyamanan mencakup keamanan, ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merata, serta adanya ruang publik yang mendukung interaksi sosial. Lingkungan perkotaan yang nyaman adalah lingkungan yang bebas dari polusi, memiliki udara yang

bersih, serta dilengkapi dengan taman-taman kota, jalur sepeda, dan ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Desain kota yang memperhatikan tata ruang, kemudahan akses transportasi, dan keamanan publik akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya.

Terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, dan nyaman adalah impian bersama yang memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, kota-kota masa depan dapat menjadi tempat yang tidak hanya menarik dan produktif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kelestarian alam. Sebuah kota yang inklusif, berkelanjutan, dan nyaman adalah kota yang tidak hanya menjadi rumah bagi hari ini, tetapi juga menjadi warisan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

4. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan adaptif**

   Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang **bersih**, **akuntabel**, **efektif**, **efisien**, dan **adaptif** dalam setiap lini pemerintahan dan pelayanan publik. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya memperbaiki kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahan yang **bersih** berarti pemerintah harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini mengharuskan adanya sistem pengawasan yang ketat, baik internal maupun eksternal, serta implementasi teknologi yang dapat meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan. Reformasi birokrasi yang terus-menerus dilakukan bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang profesional, jujur, dan memiliki integritas tinggi. Selain itu, penerapan sistem e-*government* yang transparan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pemerintahan yang **akuntabel** adalah pemerintahan yang bertanggung jawab atas setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang ada. Setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintahan yang **efektif** adalah pemerintahan yang mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan tepat waktu. Ini membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar lembaga, serta pengelolaan sumber daya yang optimal. Pemerintahan yang **efisien** berarti bahwa penggunaan sumber daya, baik itu anggaran, tenaga kerja, maupun waktu, dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam konteks pelayanan publik, efisiensi dapat dicapai dengan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, memperbaiki proses administrasi, serta memanfaatkan teknologi untuk mempermudah layanan. Digitalisasi pelayanan publik, seperti pendaftaran, pembayaran, dan pengajuan izin secara *online*, akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat maupun pemerintah. Akhirnya, pemerintahan yang **adaptif** adalah pemerintahan yang mampu menyesuaikan diri

dengan perubahan yang terjadi, baik itu perubahan sosial, ekonomi, teknologi, maupun budaya. Pemerintah harus peka terhadap dinamika yang ada di masyarakat dan memiliki kemampuan untuk merespons dengan cepat serta tepat. Di samping itu, pemerintah juga perlu mengedepankan inovasi dalam setiap aspek pelayanannya, sehingga selalu dapat menghadapi perkembangan zaman.

Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Hasil rumusan Sasaran RPJMD tahun 2025-2029 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berbudaya, sehat, tangguh, dan unggul**

   Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   1) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan unggul; dan
   2) Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat.
2. **Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis perekonomian yang berdaya saing dan inklusif**

   Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   1) Meningkatnya perlindungan sosial terintegrasi untuk mencapai masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan;
   2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan sosial; dan
   3) Meningkatnya produktivitas daya saing ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.
3. **Terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan nyaman**

   Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   1) Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan; dan
   2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dan ketahanan daerah terhadap ekologi, pangan, bencana dan perubahan iklim.
4. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan adaptif**

   Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
   1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien;
   2) Meningkatnya pelayanan publik yang adaptif dan melayani; dan
   3) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang optimal.

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029
Visi: Menuju Malang Mbois dan Berkelas

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target						KET
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Mewujudkan Generasi yang Berbudaya, Optimis dan Inovatif	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berbudaya, sehat, tangguh, dan unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	84,68	85,50	85,63	85,96	86,5	87,1	87,8	
2.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri Berbasis Perekonomian yang Mapan dan Adaptif		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan Unggul	Rata-rata Lama Sekolah	11,14	11,21	11,3	11,63	12,16	12,69	13,22	
3.	Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Indah, Kolaboratif, Berkelanjutan dan Lestari			Harapan Lama Sekolah	15,79	15,93	15,95	15,97	15,99	16,04	16,08	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target						KET
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Sinergis			Skor Literasi: SD: SMP:	 75,51 84,31	 77,72 85,22	 79,93 86,13	 82,14 87,04	 84,35 87,95	 86,56 88,86	 88,77 89,77	
				Skor Numerasi: SD: SMP:	 55,84 72,07	 59,68 73,07	 63,52 74,06	 67,36 75,05	 71,20 76,04	 75,04 77,03	 78,88 78,01	
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,91*	60,66	61,30	61,94	62,58	63,22	63,86	
			Meningkatnya kualitas taraf kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,54	75,65	75,91	76,17	76,43	76,69	76,95	
		Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis perekonomian yang berdaya saing dan inklusif		Tingkat Kemiskinan	3,91	3,87	3,63	3,52	3,43	3,25	2,84	
				Rasio Gini	0,422	0,421	0,420	0,419	0,418	0,417	0,414	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target						KET
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				PDRB per Kapita (juta Rp)	114,722	119,69	121,20	125,708	131,054	136,399	141,745	
			Meningkatnya perlindungan sosial terintegrasi untuk mencapai masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,78*	58,78	58,98	59,18	59,38	59,58	59,78	
				Indeks Ketimpangan Gender	0,131*	0,129	0,122	0,118	0,115	0,111	0,108	
				Indeks Daya Beli	0,87	0,875	0,88	0,885	0,90	0,905	0,91	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan sosial	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	87,56	87,8	87,97	88,21	88,6	88,83	89,58	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target						KET
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Meningkatnya produktivitas daya saing ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	7,9*	7,92	7,94	7,98	8,02	8,06	8,10	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	6,1	5,98	5,87	5,76	5,64	5,53	5,42	
		Terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan nyaman		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif (Ton CO2 Eq)	485.960, 15	495.829, 28	505.745, 87	515.860, 79	526.178	536.701, 56	547.435, 59	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	4,53	4,55	4,57	4,59	4,61	4,63	4,65	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target						KET
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dan ketahanan daerah terhadap ekologi, pangan, bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,76	61,61	61,69	61,77	61,85	61,92	62,00	
				Indeks Ketahanan Pangan [a]	88,76	89,00 64,04*	89,38 65,05*	90,35 66,06*	91,33 67,07*	92,30 68,08*	93,27 69,09*	
				Indeks Risiko Bencana	78,21	69,46	67,77	66,15	64,62	63,15	61,74	
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi	88,96	89,00	89,31	89,62	89,93	90,24	90,56	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target						KET
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Indeks Integritas Pemerintah Kota Malang	68,79	73	74	75	76	78	79	
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
				Nilai SAKP	80,08	80,31	80,95	81,59	82,23	82,87	83,51	
			Meningkatnya pelayanan publik yang adaptif dan melayani	Indeks Pelayanan Publik	4,57	4,59	4,62	4,64	4,66	4,69	4,71	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemerintah Digital (b)	4,24	4,29	4,32 2,13*	4,36 2,27*	4,40 2,42*	4,45 2,56*	4,51 2,71*	
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang optimal	Rasio PAD	0,36	0,40	0,41	0,42	0,423	0,427	0,43	

(a) Indeks Ketahanan Pangan akan berubah komponen variabel perhitungannya, sehingga target akan tersesuaikan;
(b) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital, sehingga target akan tersesuaikan.

3.1.3 *Cascading* Kinerja

Visi dan misi yang telah disusun diturunkan (*cascading*) hingga sasaran. *Cascading* kinerja Pemerintah Daerah dimulai dari *outcome* tujuan sampai dengan *outcome* sasaran serta indikator masing-masing.

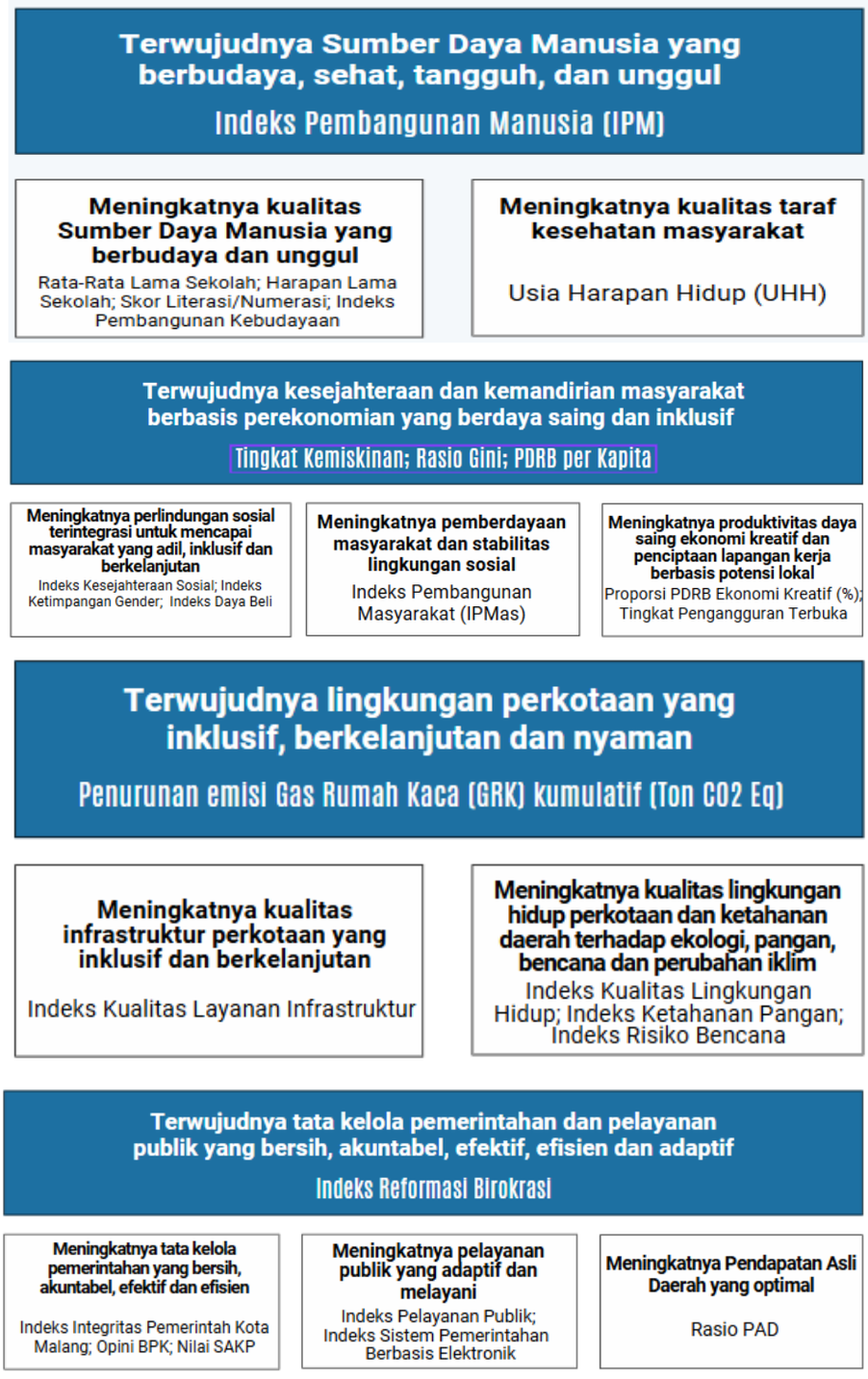

Gambar 3.1
Cascading Kinerja Pemerintah Kota Malang

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Pendekatan dengan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Capaian pembangunan yang sudah dilakukan oleh Kota Malang harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui adaptasi terhadap perkembangan internal maupun eksternal Kota Malang. Disamping itu, lingkungan internal juga menjadi hal penting karena didalamnya berisi sumber daya yang dimiliki sehingga sasaran, tujuan yang dirumuskan harus berdasarkan kondisi riil.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas. Perumusan strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan langkah krusial dalam memastikan arah pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan efektif. Proses ini bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam rangka pelaksanaan strategi dan arah kebijakan daerah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah perlu terintegrasi dengan kebijakan nasional maupun regional, antara lain:

1. Kota Malang menjadi lokus arah pembangunan kewilayahan RPJMN tahun 2025-2029 (Kawasan Pertumbuhan) dengan posisi sebagai Kawasan Perkotaan Malang-Batu, Kawasan Pengembangan Industri Malang-Singosari-Lawang dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bromo-Tengger-Semeru dan Lingkar Kawi (Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo Tengger-Semeru) (Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang) berupa dukungan preservasi jalan ruas Malang-Batu dan Malang-Bromo serta perluasan *coverage* jaringan transportasi publik perkotaan pada jaringan utama dan jaringan pengumpan (*feeder*) dan peningkatan konektivitas ke simpul transportasi lainnya serta penguatan tata kelola kelembagaan transportasi publik terintegrasi;
2. Dukungan Kota Malang untuk memastikan pembangunan daerah telah selaras dengan sasaran pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 melalui pencapaian target Program Strategis Nasional, meliputi:
   a. Penanggulangan kemiskinan (Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Sekolah Rakyat; Pembangunan 3 Juta Rumah);
   b. Ketahanan Pangan;

c. Kesehatan Untuk Semua (Jaminan Kesehatan Nasional; *stunting*; Makan Bergizi Gratis);
d. Perluasan Akses Pendidikan;
e. Pertumbuhan Ekonomi (Pengendalian Inflasi; Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Kemudahan perizinan di daerah);
f. Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

3. Dalam rangka percepatan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang diintegrasikan dengan kebijakan tentang Posyandu, bahwa Posyandu tidak hanya menangani sektor kesehatan, namun membantu penanganan enam urusan wajib, sehingga potensi ini dapat dimanfaatkan dalam membantu pencapaian standar pelayanan minimal pembangunan di Kota Malang. Diharapkan dengan intervensi strategi ini, tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai dengan baik dengan partisipasi masyarakat melalui peran serta posyandu.

Perumusan strategi tahun 2025-2029 memperhatikan kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis daerah. Keterkaitan isu strategis, sasaran, dan strategi pembangunan sebagai berikut.

Tabel 3.2
Identifikasi Keterkaitan Isu Strategis, Sasaran, dan Strategi Pembangunan

ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan Unggul	Penguatan pendidikan berkualitas yang merata
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
		Pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif
Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang harmonis dan berbudaya		Penguatan karakter dan budaya masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila
		Peningkatan kualitas institusi keluarga, perlindungan anak, kualitas perempuan dan pemuda
Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat	Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat	Pemerataan akses pelayanan kesehatan untuk semua
		Pencegahan dan penurunan *stunting*

ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan	Meningkatnya perlindungan sosial terintegrasi untuk mencapai masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan	Kolaborasi dalam perlindungan sosial terintegrasi terutama pengentasan kemiskinan
Pengendalian Inflasi		Kolaborasi dalam pengendalian inflasi
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan Sosial	Stabilitas keamanan lingkungan yang nyaman untuk Masyarakat
		Penguatan kemandirian masyarakat dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat
Peningkatan Produktivitas Daerah	Meningkatnya produktivitas daya saing ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal kerja berbasis potensi lokal	Peningkatan atraksi, aksesibilitas dan amenitas pariwisata, termasuk penyelenggaraan event pariwisata sebagai upaya branding dan marketing potensi daerah
		Peningkatan pertumbuhan dan kemandirian pelaku ekonomi kreatif, serta pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
		peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen tata kelola, produktivitas, daya saing, serta pemasaran dan nilai tambah produk koperasi dan UMKM
		Peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan	Penguatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur fundamental yang inklusif dan berkelanjutan

ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan ketahanan daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dan ketahanan daerah terhadap ekologi, pangan, bencana dan perubahan iklim	Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup secara berkelanjutan
		Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
		Mencapai Ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal
Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Peningkatan kompetensi, kinerja dan profesionalitas ASN
		Perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih (pencegahan korupsi dan integritas terhadap risiko korupsi)
Pelayanan publik yang adaptif dan melayani	Meningkatnya pelayanan publik yang adaptif dan melayani	Peningkatan Pelayanan Publik yang adaptif berbasis teknologi informatika yang terintegrasi
Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang optimal	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan agar seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif antara lain:

a. Perspektif masyarakat/layanan, bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
b. Perspektif proses internal, strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
c. Perspektif kelembagaan, strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
d. Perspektif keuangan, strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Pada peta strategi Kota Malang dapat digambarkan beberapa sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Peta strategi Kota Malang dapat dilihat pada gambar berikut.

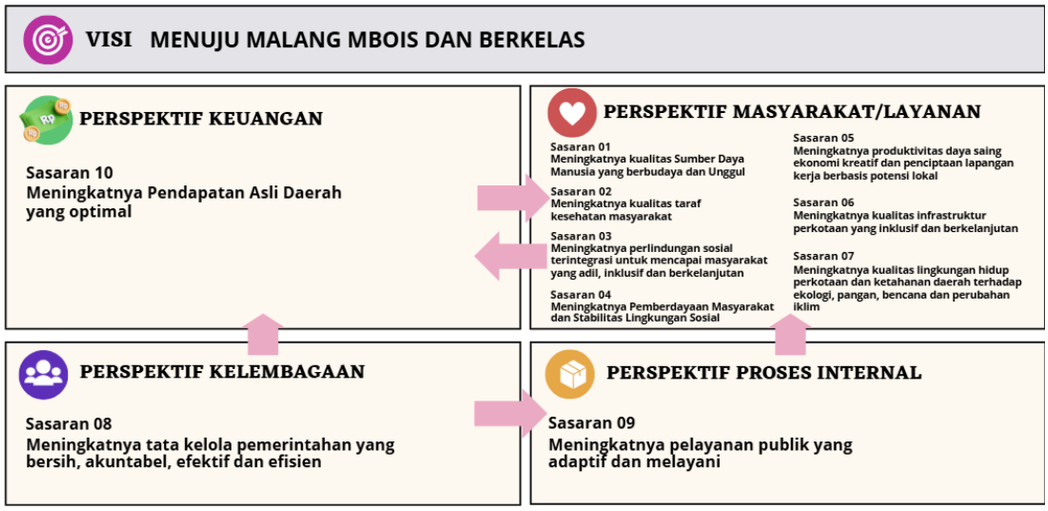

Gambar 3.2
Peta Strategi Kota Malang

1. **Perspektif Keuangan**
   Sudut pandang ini menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas. Perlu strategi pengelolaan keuangan daerah yang inovatif agar dapat terbentuk kemandirian fiskal, sehingga dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang maka perlu pengelolaan sumber pendanaan yang efektif untuk membiayai pembangunan yang berdampak pada masyarakat. Sasaran "Meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah yang optimal" diukur dengan indikator yaitu rasio PAD.
2. **Perspektif Masyarakat/Layanan**
   Sudut pandang ini menjabarkan bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sehingga memberikan nilai manfaat atau berdampak. Dalam perspektif ini ada 7 (tujuh) sasaran antara lain:
   a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan Unggul, yang diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Skor Literasi/Numerasi dan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
   b. Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat, yang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH);
   c. Meningkatnya perlindungan sosial terintegrasi untuk mencapai masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan, yang diukur dengan Indeks Kesejahteraan Sosial, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Daya Beli;
   d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan Sosial, yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas);
   e. Meningkatnya produktivitas daya saing ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal kerja berbasis

potensi lokal, yang diukur dengan indikator Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif dan Tingkat Pengangguran Terbuka;

f. Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI);
g. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dan ketahanan daerah terhadap ekologi, pangan, bencana dan perubahan iklim, yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Ketahanan Pangan, dan Indeks Risiko Bencana;

3. Perspektif Proses Internal

Fokus dalam perspektif ini adalah proses internal yang ada di internal Pemerintah Kota Malang yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya. Dalam perspektif ini sasaran "Meningkatnya pelayanan publik yang adaptif dan melayani" yang diukur dengan indikator Indeks Pelayanan publik dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintah Digital.

Perlu peningkatan pelayanan publik yang adaptif berupa responsif terhadap perubahan dan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan menjadi langkah awal menuju sistem yang lebih efektif. Penggunaan teknologi digital untuk menyederhanakan proses birokrasi sangat penting untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

4. Perspektif Kelembagaan

Fokus dari perspektif ini yaitu sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik dalam jangka panjang. Dalam perspektif adalah sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien"

Pemerintahan yang bersih adalah transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek pengelolaan daerah. Pemerintahan yang bersih bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik dan penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara yang jujur, efisien, dan adil. Prinsip dasar dari pemerintahan yang bersih adalah mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mewujudkan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Sedangkan pemerintahan yang efektif dan efisien adalah pemerintahan yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan menjadi langkah awal menuju sistem yang lebih efektif. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini menggunakan indikator Indeks Integritas Pemerintah Kota Malang, Opini BPK, dan Nilai SAKIP.

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih, berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, penahapan pembangunan, lokus (disesuaikan dengan arah kawasan strategis dalam RTRW yaitu dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya) dan penentuan program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berikut rumusan arah kebijakan/fokus pembangunan tahun 2025-2029.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan/Fokus
Pembangunan Kota Malang Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/FOKUS PEMBANGUNAN (DASABAKTI)		LOKUS/ LOKASI
Misi 1: Mewujudkan Generasi yang Berbudaya, Optimis dan Inovatif					
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berbudaya, sehat, tangguh, dan unggul	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan Unggul	Penguatan pendidikan berkualitas yang merata	NGALAM PINTAR	Pendidikan dasar gratis dan berkualitas berikut peningkatan sarana dan prasarana	Kota Malang
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		Beasiswa tuntas sekolah dan tuntas kuliah	Kota Malang
		Pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif		Pengembangan talenta muda	Kota Malang
			NGALAM NGOPENI	Beasiswa pendidikan lanjut dan pelatihan untuk guru	Kota Malang
		Penguatan karakter dan budaya masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila	NGALAM ASYIK	Pengembangan taman apresiasi seni budaya masing-masing kecamatan	Kota Malang
			NGALAM SANTUN	Pengarusutaman pendidikan dan kegiatan keagamaan yang inklusif dan toleran	Kota Malang
				Pengarusutamaan pendidikan karakter pada setiap jenjang Pendidikan	Kota Malang
			NGALAM NGOPENI	Pemberian insentif guru agama, guru madrasah dan guru TPQ	Kota Malang
				Fasilitasi dana abadi pesantren	Kota Malang
				Bantuan operasional tempat Ibadah	Kota Malang
		Peningkatan kualitas institusi keluarga, perlindungan anak, kualitas perempuan dan pemuda	NGALAM SANTUN	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan,dan pemuda	Kota Malang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/FOKUS PEMBANGUNAN (DASABAKTI)		LOKUS/ LOKASI
	Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat	Pemerataan akses pelayanan kesehatan untuk semua	NGALAM TAHES	Peningkatan pelayanan puskesmas dan RSUD	Kota Malang, khususnya Kecataman Kedungkan-dang untuk Pelayanan RSUD
				Pemberdayaan posyandu balita, lansia dan remaja yang ajeg	Kota Malang
			NGALAM NGOPENI	Peningkatan kompetensi dan insentif kader posyandu	Kota Malang
		Pencegahan dan penurunan stunting	NGALAM TAHES	Permakanan sehat untuk lansia, ibu hamil dan balita *stunting*	Kota Malang
Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri Berbasis Perekonomian yang Mapan dan Adaptif					
Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis perekonomian yang berdaya saing dan inklusif	Meningkatnya perlindungan sosial terintegrasi untuk mencapai masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan	Kolaborasi dalam perlindungan sosial terintegrasi terutama pengentasan kemiskinan	NGALAM NGOPENI	Santunan kematian dan kelahiran untuk keluarga tidak mampu	Kota Malang, khususnya kecamatan Kedungkan-dang dan Sukun dengan jumlah penduduk sangat miskin dan miskin tertinggi
			NGALAM SANTUN	Pemberdayaan jaminan sosial kelompok rentan dan difabel	Kota Malang
		Kolaborasi dalam pengendalian inflasi	NGALAM NGOPENI	Penguatan program kerja pengendalian inflasi daerah	Kota Malang
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan Sosial	Stabilitas keamanan lingkungan yang nyaman untuk masyarakat	NGALAM NYAMAN	Aktivasi pos kamling dan CCTV tiap lingkungan	Kota Malang
		Penguatan kemandirian masyarakat dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat	NGALAM ASYIK	Penguatan peran pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat mandiri dan sejahtera	Kota Malang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/FOKUS PEMBANGUNAN (DASABAKTI)		LOKUS/ LOKASI
	Meningkatnya produktivitas daya saing ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal kerja berbasis potensi lokal	Peningkatan atraksi, aksesibilitas dan amenitas pariwisata, termasuk penyelenggaraan event pariwisata sebagai upaya branding dan marketing potensi daerah	NGALAM ASYIK	Pengembangan Ekosistem Usaha Pariwisata Berbasis Konferensi, Pameran Dan Produk Malang/*Mice*	Kota Malang
				Kolaborasi/*sister city* malang raya sebagai kawasan wisata terpadu	Kota Malang
				Pengembangan kawasan kayutangan *heritage* sebagai ruang ekonomi dan pelestarian budaya	Kecamatan Klojen
		Peningkatan pertumbuhan dan kemandirian pelaku ekonomi kreatif, serta pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	NGALAM LARIS	Fasilitasi pemasaran produk UMKM dan unggulan	Kota Malang
		Peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen tata kelola, produktivitas, daya saing, serta pemasaran dan nilai tambah produk koperasi dan UMKM	NGALAM LARIS	Pengembangan penelitian dan pendampingan usaha	Kota Malang
				Fasilitasi akses permodalan usaha yang mudah dan ringan	Kota Malang
				Penataan dan pemberdayaan pasar rakyat melalui revitalisasi dan digitalisasi	Kota Malang
		Peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	NGALAM IDREK	Penciptaan lapangan kerja baru berbasis potensi dan sumber daya lokal	Kota Malang
Misi 3: Mewujudkan lingkungan perkotaan yang Indah, Kolaboratif, Berkelanjutan dan Lestari					
Terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang	Penguatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur	NGALAM NYAMAN	Penguatan layanan sistem transportasi publik yang akomodatif dan *modern*	Kota Malang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/FOKUS PEMBANGUNAN (DASABAKTI)		LOKUS/ LOKASI
dan nyaman	inklusif dan berkelanjutan	fundamental yang inklusif dan berkelanjutan		Pengembangan jalan dan penataan sistem lalu lintas untuk mengurai kemacetan	Kota Malang
				Pembangunan pusat parkir terpadu dan penerapan e-parkir tepi jalan umum	Kota Malang
				Penataan drainase dan sistem pengendalian banjir	Kota Malang
				Penyediaan air bersih berikut infrastruktur secara merata, handal dan sehat	Kota Malang
				Pembentukan tim sapu lobang (salop) untuk jalan mulus di kota malang dan tim sedot banyu (senyu) untuk pemulihan bencana banjir	Kota Malang
				500 biopori tiap kelurahan	Kota Malang
				Fasilitasi rumah layak huni /bedah rumah	Kota Malang
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dan ketahanan daerah terhadap ekologi, pangan, bencana dan perubahan iklim	Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup secara berkelanjutan	NGALAM SEGER	Pengembangan sekolah dan institusi hijau	Kota Malang
				Pembuatan kampung ikonik pelestarian lingkungan	Kota Malang
				Perluasan ruang terbuka hijau plus-dilengkapi sarana bermain dan olahraga masyarakat	Kota Malang
				Pengendalian limbah industri dan rumah tangga di kota malang	Kota Malang
			NGALAM RIJIK	Pemberdayaan bank sampah masing-masing kampung	Kota Malang
				Modernisasi sarana - prasarana TPA	Kecamatan Sukun

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN/FOKUS PEMBANGUNAN (DASABAKTI)		LOKUS/ LOKASI
				Pendirian TPS terpadu tiap-tiap kelurahan	Kota Malang
		Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana	MALANG NYAMAN	Peningkatan mitigasi risiko dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Kota Malang
		Mencapai Ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal	MALANG NYAMAN	Ketercukupan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat	Kota Malang
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Sinergis					
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan adaptif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Peningkatan kompetensi, kinerja dan profesionalitas ASN	NGALAM NGOPENI	Merit *system* birokrasi dan peningkatan tunjangan pegawai berbasis kinerja	Kota Malang
	Meningkatnya pelayanan publik yang adaptif dan melayani	Peningkatan Pelayanan Publik yang adaptif berbasis teknologi informatika yang terintegrasi	NGALAM NGOPENI	Instansi pemerintahan terpadu untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan publik	Kota Malang
				Penyelenggaraan pelayanan publik dan perizinan berbasis aplikasi *online*	Kota Malang
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang optimal	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	NGALAM NGOPENI	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	Kota Malang

Tabel 3.4
Penahapan Pembangunan RPJMD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas SDM yang berbudaya, sehat dan tangguh	Peningkatan kualitas SDM yang berbudaya, sehat, tangguh dan inovatif	Peningkatan kualitas SDM yang berbudaya, sehat dan unggul	Peningkatan kualitas SDM yang berbudaya, sehat, unggul dan pelopor modal sosial dalam masyarakat	Peningkatan kualitas Daya Saing SDM yang berbudaya, sehat, tangguh, unggul serta menggerakkan modal sosial dalam masyarakat
Perlindungan sosial terintegrasi dan peningkatan produktivitas daerah	Perlindungan sosial terintegrasi dan peningkatan produktivitas daerah	Perlindungan sosial terintegrasi dan peningkatan produktivitas daerah	Perlindungan sosial terintegrasi dan peningkatan produktivitas daerah	Perlindungan sosial terintegrasi dan peningkatan produktivitas daerah
Infrastruktur fundamental yang inklusif dan menunjang ketahanan daerah	• Pengembangan Infrastruktur yang berkelanjutan mendukung ekonomi produktif • Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup secara berkelanjutan	• Pengembangan Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan mendukung nilai tambah daerah • Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup secara berkelanjutan	• Penguatan Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan • Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup secara berkelanjutan	Lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, nyaman dan berketahanan
• Birokrasi yang adaptif dan melayani • Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	• Birokrasi yang adaptif, melayani dan inovatif • Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	• Percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien • Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	• Transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel • Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	• Transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas (bersih, akuntabel, efektif dan adaptif berbasis digital) • Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Arah kebijakan pembangunan Kota Malang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan terbagi dalam 5 (lima) periode dengan uraian sebagai berikut:

Tahun-1, kebijakan pembangunan tahun 2026 Kota Malang yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM yang berbudaya, sehat dan tangguh dalam rangka mewujudkan tujuan pertama RPJMD yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berbudaya, sehat, tangguh, dan unggul;
2. Perlindungan sosial terintegrasi dan peningkatan produktivitas daerah dalam rangka mewujudkan tujuan kedua RPJMD yaitu Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis perekonomian yang berdaya saing dan inklusif;
3. Infrastruktur fundamental yang inklusif dan menunjang ketahanan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan ketiga RPJMD yaitu Terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan nyaman;
4. Birokrasi yang adaptif dan melayani, dan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam rangka mewujudkan tujuan keempat RPJMD yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan adaptif.

Tahun ke-2, kebijakan pembangunan tahun 2027 Kota Malang yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM yang berbudaya, sehat, tangguh dan inovatif dalam rangka mewujudkan tujuan pertama RPJMD yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berbudaya, sehat, tangguh, dan unggul;
2. Perlindungan sosial terintegrasi dan peningkatan produktivitas daerah dalam rangka mewujudkan tujuan kedua RPJMD yaitu Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis perekonomian yang berdaya saing dan inklusif;
3. Pengembangan Infrastruktur yang berkelanjutan mendukung ekonomi produktif dan Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tujuan ketiga RPJMD yaitu Terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan nyaman;
4. Birokrasi yang adaptif, melayani dan inovatif dan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam rangka mewujudkan tujuan keempat RPJMD yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan adaptif.

Tahun ke-3, kebijakan pembangunan tahun 2028 Kota Malang yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM yang berbudaya dan unggul dalam rangka mewujudkan tujuan pertama RPJMD yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berbudaya, sehat, tangguh, dan unggul;
2. Perlindungan sosial terintegrasi dan peningkatan produktivitas daerah dalam rangka mewujudkan tujuan kedua RPJMD yaitu Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis perekonomian yang berdaya saing dan inklusif;
3. Pengembangan Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan mendukung nilai tambah daerah dan Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tujuan ketiga RPJMD yaitu Terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan nyaman;

4. Percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam rangka mewujudkan tujuan keempat RPJMD yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan adaptif.

Tahun ke-4, kebijakan pembangunan tahun 2029 Kota Malang yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM yang berbudaya, unggul dan pelopor modal sosial dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pertama RPJMD yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berbudaya, sehat, tangguh, dan unggul;
2. Perlindungan sosial terintegrasi dan peningkatan produktivitas daerah dalam rangka mewujudkan tujuan kedua RPJMD yaitu Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis perekonomian yang berdaya saing dan inklusif;
3. Penguatan Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan dan Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tujuan ketiga RPJMD yaitu Terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan nyaman;
4. Transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan efisien dan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam rangka mewujudkan tujuan keempat RPJMD yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan adaptif.

Tahun ke-5, kebijakan pembangunan tahun 2030 Kota Malang yaitu:

1. Terciptanya kualitas Daya Saing SDM yang berbudaya, sehat, tangguh, unggul serta menggerakkan modal sosial dalam Masyarakat sebagai perwujudan tujuan pertama RPJMD yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berbudaya, sehat, tangguh, dan unggul;
2. Terciptanya perlindungan sosial terintegrasi dan peningkatan produktivitas daerah sebagai perwujudan tujuan kedua RPJMD yaitu Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis perekonomian yang berdaya saing dan inklusif;
3. Lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, nyaman dan berketahanan sebagai perwujudan tujuan ketiga RPJMD yaitu Terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan nyaman;
4. Transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas (bersih, akuntabel, efektif dan adaptif berbasis digital) dan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai perwujudan tujuan keempat RPJMD yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan adaptif.

3.2.2 Program-Program Prioritas Daerah

Tabel 3.5
Perumusan Program Prioritas RPJMD (Program Perangkat Daerah (P1))

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menuju Malang Mbois dan Berkelas						
1. Mewujudkan Generasi yang Berbudaya, Optimis dan Inovatif	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berbudaya, sehat, tangguh, dan unggul			Indeks Pembangunan Manusia		
2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri Berbasis Perekonomian yang Mapan dan Adaptif		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan Unggul		Rata-Rata Lama Sekolah		
3. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Indah, Kolaboratif, Berkelanjutan dan Lestari				Harapan Lama Sekolah		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Sinergis				Skor Literasi/Numerasi		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APS 7-12 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Ngalam Pintar
				APM SD		
				APS 13-15 tahun		
				APM SMP		
			Meningkatnya partisipasi anak usia dini	APS 5-6 tahun		
				APM PAUD		
			Meningkatnya kualitas pendidikan kesetaraan dan Lembaga Pendidikan Non Formal	Persentase Satuan PKBM yang terakreditasi		
				Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan yang terstandar Industri		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya perkembangan kurikulum untuk peserta didik	Persentase satuan pendidikan dasar yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum	Ngalam Ngopeni
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan anak usia dini	Persentase satuan pendidikan anak usia dini yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal		
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	
				Indeks Pemerataan Guru		
			Meningkatnya kapasitas daya saing wirausaha yang berkualitas	Persentase Pemuda (16-30 tahun) wirausaha yang mengikuti pembinaan.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Ngalam Pintar
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase partisipasi penduduk diatas usia 7 tahun dalam kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
			Tercapaianya Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kelestarian Keanekaragaman dan Kekayaan budaya yang dibina	Program Pengembangan Kebudayaan	Ngalam Asyik

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Tercapainya Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase peningkatan Lembaga Kesenian Tradisional yang Aktif	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Ngalam Santun
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Ngalam Ngopeni
				Indeks Aktualisasi Pancasila		
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunanan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga Yang Aktif	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Ngalam Santun
		Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Mayarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dan Promosi Kesehatan yang sesuai standar	Persentase Ibu Hamil Risiko Kurang Energi Kronik (KEK)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ngalam Tahes
				Prevalensi Balita Wasting		
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat		
				Jumlah kematian ibu		
				Jumlah kematian balita		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai standar	Persentase Imunisasi Bayi Lengkap		
				Prevalensi obesitas		
				Angka keberhasilan pengobatan TB		
			Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan di puskesmas sesuai standar	Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar		
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan RSUD	Net Death Rate (NDR)		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD yang kompeten	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan di RSUD	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Ngalam Ngopeni
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
			Terselenggaranya event olahraga massal	Jumlah event olahraga massal yang diselenggarakan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Timur	Jumlah medali emas pada event di tingkat Provinsi Jawa Timur		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sesuai standar	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Ngalam Tahes
	Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis perkonomian yang berdaya saing dan inklusif			Tingkat Kemiskinan		
				Rasio Gini		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				PDRB per Kapita (juta Rp)		
		Meningkatnya perlindungan sosial terintegrasi untuk mencapai masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan		Indeks Kesejahteraan Sosial		
				Indeks Ketimpangan Gender		
				Indeks Daya Beli		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Pemberdayaan	Program Pemberdayaan Sosial	Ngalam Ngopeni
				Persentase PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kemampuan dan Berperan Aktif Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.		
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Ngalam Santun

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	
			Meningkatnya Kualitas dan efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengurustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
			Menurunnya kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Yang Berperspektif Gender Dan Hak Anak Sesuai Standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Konfrehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	
			Tercapainya stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Ngalam Ngopeni
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan Sosial		Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)		
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ngalam Asyik

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Ngalam Nyaman
			Meningkatnya keaktifan Satuan Linmas dalam ketenteraman dan ketertiban lingkungan	Persentase satuan Linmas yang aktif	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya produktivitas daya saing ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		
				Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya kualitas daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dibina	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Ngalam Asyik
				Persentase industri pariwisata yang dibina		
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terfasilitasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Ngalam Laris
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Meningkatnya usaha mikro menuju usaha kecil	Persentase usaha mikro binaan yang difasilitasi menuju usaha kecil	Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya usaha mikro yang terfasilitasi	Persentase usaha mikro binaan yang terfasilitasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya izin usaha	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap penggunaan bahan berbahaya	Persentase sampel pelaku usaha yang tidak menggunakan bahan berbahaya		
			Meningkatnya sarana umum perdagangan	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pemanfaatannya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ngalam Idrek
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	Terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan nyaman			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif (%)		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Menurunnya Titik Kemacetan	Kecepatan Rata-Rata Kendaraan di Jalan Kewenangan Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Ngalam Nyaman
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Umum	Persentase Faktor Muat (Load Factor)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Darat	Persentase Kendaraan yang Lulus Uji Berkala		
			Meningkatnya kualitas distribusi air pada daerah irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota Malang yang dilayani oleh jaringan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Ngalam Nyaman
			Meningkatnya ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung		
			Meningkatnya kualitas rumah tinggal berakses air minum	Persentase rumah tangga dengan akses air siap minum jaringan perpipaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas daya tampung drainase yang sesuai rencana	Rasio luas kawasan permukiman rawan genangan yang terlindungi oleh infrastruktur drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	Program Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatnya kualitas jembatan Kota dalam kondisi baik	Persentase jembatan kota dalam kondisi baik (%)		
			Meningkatnya kualitas kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	Program Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase usulan sarana dan prasarana prioritas yang dilaksanakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dan ketahanan daerah terhadap ekologi, pangan, bencana dan perubahan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
				Indeks Ketahanan Pangan		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat yang Meningkat Pengetahuan dan Kemampuannya dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Ngalam Seger
			Meningkatnya Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Persetujuan Lingkungan	Persentase Penerbitan Arahan dan Rekomendasi Persetujuan Lingkungan yang Tepat Waktu	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Meningkatnya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi , Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan dan Ijin PPLH		
			Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kesesuaian Status Mutu Air dengan Kelas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau yang Layak dan Sesuai dengan Fungsinya	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Layak dan Sesuai dengan Fungsinya	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			Terlaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	Persentase Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Ngalam Rijik
			Terlaksananya Penanganan Sampah yang Sesuai dengan Kebijakan Strategi Daerah	Persentase Penanganan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
			Terlaksananya Pengurangan Sampah yang Sesuai dengan Kebijakan Strategi Daerah	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sektor Informal		
			Meningkatnya layanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Ngalam Nyaman

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		
			Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Persentase Keamanan Pangan Yang Layak Konsumsi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Ngalam Nyaman
			Meningkatnya diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	Persentase Ketersediaan bahan makanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Menurunnya kerawanan pangan dan gizi	Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan adaptif			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien		Indeks Integritas Pemerintah Kota Malang		
				Opini BPK		
				Nilai SAKP		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Ngalam Ngopeni
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
				Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kapabilitas APIP		
				Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP		
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan		
			Meningkatnya tata kelola akuntasi dan pelaporan	Persentase Laporan keuangan tepat waktu		
			Meningkatnya kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya efektivitas pengendalian perencanaan pembangunan	Persentase capaian Program dan Kegiatan pada RKPD		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Persentase Kesesuaian Kebijakan Nasional dalam Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA		
				Persentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Perekonomian dan SDA		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang infrastruktur dan kewilayahan		
				Persentase Kesesuaian Kebijakan Nasional dalam Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik	Program Kepegawaian Daerah	
			Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian tindak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pembinaan dan penyelesaian tindak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya keterisian JPT, administrasi dan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan	Persentase terisinya JPT, administrasi dan fungsional		
			Terlaksananya tindaklajut hasil penilaian kompetensi	Persentase ASN yang telah ditindaklanjuti hasil penilaian kompetensinya		
			Terlaksananya pemuktakiran data ASN sesuai dengan dokumen kepegawaian yang terbit	Persentase data kepegawaian yang termuktakirkan		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial dan fungsional		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam sehari		
				Persentase penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa		
			Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan		
				Persentase warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada		
		Meningkatnya pelayanan publik yang adaptif dan melayani		Indeks Pelayanan Publik		
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintah Digital		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dalam mendukung perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum	Program Pelayanan Penanaman Modal	Ngalam Ngopeni
			Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya dalam mendukung perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya		
			Meningkatnya kualitas layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase penyelesaian konsultasi/pengaduan perizinan dan nonperizinan dalam mendukung perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
			Meningkatnya pengendalian penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola dan layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Persentase kebijakan SPBE yang ditetapkan/ dimutakhirkan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Persentase Layanan Publik dan Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
				Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS (Program Perangkat Daerah (P1))	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang optimal		Rasio PAD		
			Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	Rasio Pajak daerah terhadap PDRB (%)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ngalam Ngopeni
				Persentase retribusi parkir terhadap hasil retribusi daerah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	

Tabel 3.6
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PP 8	Jatim Harmoni (Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif)	PD 1	Memperkuat Ideologi Pancasila dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
						2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
						3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
						4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PP 4	Jatim Agro (Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan)	PD 2	Penguatan ketahanan daerah dan kemandirian pangan	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan
						6	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
						7	Program Penanganan Kerawanan Pangan
						8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
						9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
						10	Program Pengelolaan Persampahan
						11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	PP 3	Jatim Akses (Memperkuat Infrastuktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan)	PD 3	Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan sebagai penunjang transformasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM dan koperasi	12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
						13	Program Penataan Bangunan Gedung
						14	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
						15	Program Penyelenggaraan Jalan
						16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
						17	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
						18	Program Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
						19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
						20	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						21	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		PP 2	Jatim Kerja (Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas)			22	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
						23	Program Pemasaran Pariwisata
						24	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
						25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
						26	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
						27	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
						28	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
						29	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
						30	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
						31	Program Pengembangan UMKM
						32	Program Perencanaan Tenaga Kerja
						33	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
PN 4	Memperkuat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PP 5	Jatim Cerdas (Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan)	PD 4	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, kompeten, produktif, berkarakter dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat menjadi masyarakat inklusif	34	Program Pengelolaan Pendidikan
						35	Program Pengembangan Kurikulum
						36	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
						37	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
						38	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
						39	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
						40	Program Pembinaan Perpustakaan

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
						41	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
		PP 6	Jatim Sehat (Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan)			42	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						43	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
						44	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
						45	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
						46	Program Rehabilitasi Sosial
						47	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
						48	Program Penanganan Bencana

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
		PP 8	Jatim Harmoni (Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif)			49	Program Pengurustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
						50	Program Perlindungan Perempuan
						51	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
						52	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
						53	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
						54	Program Perlindungan Khusus Anak
						55	Program Pengendalian Penduduk
						56	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
						57	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	PP 2	Jatim Kerja (Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas)	PD 5	Meningkatkan nilai tambah produktivitas daerah melalui pengembangan industri berbasis sumber daya/produk lokal unggulan	58	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
						59	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
						60	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
						61	Program Pengembangan Ekspor
						62	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
						63	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
		PP 4	Jatim Agro (Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan)			64	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
						65	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
						66	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
						67	Program Penyuluhan Pertanian
						68	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
						69	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
PN 6	Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP 1	Jatim Sejahtera (Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan)	PD 6	Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan (menciptakan akses dan kesempatan bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan)	70	Program Pemberdayaan Sosial
						71	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
						72	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
						73	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
						74	Program Promosi Penanaman Modal
						75	Program Penempatan Tenaga Kerja
						76	Program Hubungan Industrial

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
						77	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
						78	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
						79	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
						80	Program Pengembangan Perumahan
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP 7	Jatim Berkah-Amanah (Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif)	PD 7	Memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang inovatif responsif berbasis teknologi terintegrasi, serta memperkuat pencegahan judi	81	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
						82	Program Pengelolaan Arsip
						83	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
						84	Program Pendaftaran Penduduk
						85	Program Pencatatan Sipil
						86	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
						87	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
						88	Program Pelayanan Penanaman Modal
						89	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
						90	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
						91	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
						92	Program penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
						93	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
						94	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum
						95	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
						96	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
						97	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
						98	Program Perekonomian dan Pembangunan
						99	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
						100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
						101	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
						102	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
						103	Program Riset dan Inovasi Daerah
						104	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
						105	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
						106	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
						107	Program Kepegawaian Daerah
						108	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
						109	Program Penyelenggaraan Pengawasan
						110	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis Dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PP 8	Jatim Harmoni (Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif)	PD 8	Memperkuat lingkungan sosial yang harmonis dengan alam, budaya dan antara masyarakat	111	Program Pengembangan Kebudayaan
						112	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
						113	Program Pembinaan Sejarah
						114	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
						115	Program Pengelolaan Permuseuman
						116	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
						117	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		PP 9	Jatim Lestari (Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan)			118	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
						119	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						120	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
						121	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Daerah		Program Perangkat Daerah	
						122	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
						123	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
						124	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
						125	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
						126	Program Penanggulangan Bencana
						127	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

lndikasi rencana program prioritas Kota Malang berisi program-program baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

4.1.1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program-program Perangkat Daerah dalam RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029 merupakan rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah yang dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yang digunakan sebagai pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Adapun daftar program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai berikut:

1. **Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**
   a. Pendidikan
      1) Program pengelolaan pendidikan;
      2) Program pengembangan kurikulum;
      3) Program pendidik dan tenaga kependidikan.
   b. Kesehatan
      1) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
      2) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
      3) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
      4) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
   c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
      1) Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
      2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
      3) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
      4) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
      5) Program penataan bangunan gedung;
      6) Program penataan bangunan dan lingkungannya;
      7) Program penyelenggaraan jalan;

8) Program pengembangan jasa konstruksi;
9) Program penyelenggaraan penataan ruang.

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman
1) Program pengembangan perumahan;
2) Program kawasan permukiman;
3) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Program penanggulangan bencana;
3) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

f. Sosial
1) Program pemberdayaan sosial;
2) Program rehabilitasi sosial;
3) Program perlindungan dan jaminan sosial;
4) Program penanganan bencana;
5) Program pengelolaan taman makam pahlawan.

2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja
1) Program perencanaan tenaga kerja;
2) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
2) Program penempatan tenaga kerja;
3) Program hubungan industrial.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
2) Program perlindungan perempuan;
3) Program peningkatan kualitas keluarga;
4) Program pengelolaan sistem data gender dan anak;
5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
6) Program perlindungan khusus anak.

c. Pangan
1) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
2) Program penanganan kerawanan pangan;
3) Program pengawasan keamanan pangan.

d. Lingkungan Hidup
1) Program perencanaan lingkungan hidup;
2) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3) Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI);
4) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
5) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
6) Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
7) Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
8) Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
9) Program pengelolaan persampahan.

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   1) Program pendaftaran penduduk;
   2) Program pencatatan sipil;
   3) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
   4) Program pengelolaan profil kependudukan.
f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   1) Program pengendalian penduduk;
   2) Program pembinaan Keluarga Berencana (KB);
   3) Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
g. Perhubungan
   1) Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
h. Komunikasi dan Informatika
   1) Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
   2) Program pengelolaan aplikasi informatika.
i. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   1) Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
   2) Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
   3) Program pendidikan dan latihan perkoperasian;
   4) Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
   5) Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
   6) Program pengembangan UMKM.
j. Penanaman Modal
   1) Program pengembangan iklim penanaman modal;
   2) Program promosi penanaman modal;
   3) Program pelayanan penanaman modal;
   4) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
   5) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
k. Kepemudaan dan Olahraga
   1) Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
   2) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
   3) Program pengembangan kapasitas kepramukaan.
l. Statistik
   1) Program penyelenggaraan statistik sektoral.

m. Persandian
   1) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
n. Kebudayaan
   1) Program pengembangan kebudayaan;
   2) Program pengembangan kesenian tradisional;
   3) Program pembinaan sejarah;
   4) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
   5) Program pengelolaan permuseuman.
o. Perpustakaan
   1) Program pembinaan perpustakaan;
   2) Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.
p. Kearsipan
   1) Program pengelolaan arsip;
   2) Program perlindungan dan penyelamatan arsip.

3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan
   1) Program pengelolaan perikanan budidaya;
   2) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

b. Pariwisata
   1) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
   2) Program pemasaran pariwisata;
   3) Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
   4) Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

c. Pertanian
   1) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
   2) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
   3) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
   4) Program penyuluhan pertanian.

d. Perdagangan
   1) Program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
   2) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
   3) Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
   4) Program pengembangan ekspor;
   5) Program standardisasi dan perlindungan konsumen;
   6) Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

e. Perindustrian
   1) Program perencanaan dan pembangunan industri;
   2) Program pengendalian izin usaha industri;
   3) Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah
   1) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
   2) Program perekonomian dan pembangunan.
   3) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

b. Sekretariat DPRD
   1) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan
   1) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
   2) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

b. Keuangan
   1) Program pengelolaan keuangan daerah;
   2) Program pengelolaan barang milik daerah;
   3) Program pengelolaan pendapatan daerah.

c. Kepegawaian
   1) Program kepegawaian daerah.

d. Pendidikan dan Pelatihan
   1) Program pengembangan sumber daya manusia.

e. Penelitian dan Pengembangan
   1) Program penelitian dan pengembangan daerah;

2) Program riset dan inovasi daerah.

6. Unsur Pengawasan

a. Inspektorat Daerah
   1) Program penyelenggaraan pengawasan;
   2) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan
   1) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
   2) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
   3) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
   4) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik
   1) Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
   2) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
   3) Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
   4) Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
   5) Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

4.1.2 Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program Perangkat Daerah beserta indikasi kebutuhan pendanaannya tahun 2026 hingga tahun 2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib													
Terkait Pelayanan Dasar													
Pendidikan													
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							100		100		100		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APS 7-12 tahun	99,05	100	143.271.661.649,00	100	143.939.908.899,00	100	144.696.661.649,00	100	144.667.378.120,00	100	148.061.661.649,00	
	APM SD	99,05	99,05		99,29		99,53		99,77		100		
	APS 13-15 tahun	99,99	100		100		100		100		100		
	APM SMP	83,28	83,28		86		88,72		91,44		94,16		
Meningkatnya partisipasi anak usia dini	APS 5-6 tahun	89,38	91,06	33.427.480.000,00	91,89	32.507.480.000,00	92,73	32.507.480.000,00	93,56	31.727.480.000,00	94,4	33.797.480.000,00	
	APM PAUD	56,38	56,38		65,1		73,82		82,54		91,26		
Meningkatnya kualitas pendidikan kesetaraan dan Lembaga Pendidikan Non Formal	Persentase Satuan PKBM yang terakreditasi	54,17	65,83	7.045.320.000,00	71,66	6.142.920.000,00	77,49	5.142.920.000,00	83,32	5.601.487.058,00	89,15	8.294.679.817,00	
	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan yang terstandar Industri	8	10		11		12		13		14		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM													
Meningkatnya perkembangan kurikulum untuk peserta didik	Persentase satuan pendidikan dasar yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	80,00	100,00	5.401.000,00	100,00	5.401.000,00	100,00	5.401.000,00	100,00	5.401.000,00	100,00	5.401.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan anak usia dini	Persentase satuan pendidikan anak usia dini yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100,00	100,00	5.401.000,00	100,00	5.401.000,00	100,00	5.401.000,00	100,00	5.401.000,00	100,00	5.401.000,00	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	53,33	56,4	73.000.000,00	61,4	73.000.000,00	66,4	73.000.000,00	71,4	73.000.000,00	76,4	73.000.000,00	
	Indeks Pemerataan Guru	0,4	0,63		0,73		0,83		0,93		1,00		
Kesehatan													
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Mayarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dan Promosi Kesehatan yang sesuai standar	Persentase Ibu Hamil Risiko Kurang Energi Kronik (KEK)	9,00	8,50	6.667.796.700,00	8,25	5.307.274.977,00	8,00	5.339.118.627,00	7,75	5.383.967.223,00	7,50	5.407.118.282,00	
	Prevalensi Balita Wasting	6,00%	7,50%		7,00%		6,50%		6,00%		5,50%		
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	14,04%	63,37%		75,87%		88,37%		100,00%		100,00%		
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	80,00%	80,50%		80,75%		81,00%		81,25%		81,50%		
	Jumlah kematian Ibu	9	9		8		8		7		7		
	Jumlah kematian balita	115	113		112		111		110		109		
Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai standar	Persentase Imunisasi Bayi Lengkap	95,15%	95,25%	1.627.991.450,00	95,25%	1.186.343.525,00	95,50%	1.193.461.586,00	95,50%	1.203.486.663,00	95,75%	1.208.661.656,00	
	Prevalensi obesitas	< 39,7%	< 39,7%		< 39,7%		< 39,7%		< 39,7%		< 39,7%		
	Angka keberhasilan pengobatan TB	77%	90%		90%		90%		90%		90%		
Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan di puskesmas sesuai standar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar	80,00%	83,00%	5.825.378.850,00	86,00%	5.883.632.638,00	89,00%	5.918.934.434,00	92,00%	5.968.653.483,00	95,00%	5.994.318.693,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan RSUD	Net Death Rate (NDR)	0,60%	<2%	11.200.000.000,00	<2%	11.200.000.000,00	<2%	11.200.000.000,00	<2%	11.200.000.000,00	<2%	11.200.000.000,00	
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar	100,00%	100,00%	107.569.953.987,00	100,00%	95.169.722.027,00	100,00%	95.828.692.016,00	100,00%	96.756.785.387,00	100,00%	97.235.871.604,00	
	Persentase fasyankes yang terakreditasi paripurna	84,09%	84,44%		84,44%		84,78%		86,96%		89,13%		
	Persentase fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	53,38%	58,00%		58,00%		66,00%		71,00%		76,00%		
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	80,48%	82,00%	3.458.614.000,00	83,00%	3.458.614.000,00	84,00%	3.458.614.000,00	85,00%	3.458.614.000,00	86,00%	3.458.614.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	7,3/1000 penduduk	7,4/1000 penduduk	307.634.000,00	7,5/1000 penduduk	310.710.340,00	7,5/1000 penduduk	312.574.602,00	7,6/1000 penduduk	315.200.229,00	7,6/1000 penduduk	316.555.590,00	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD yang kompeten	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan di RSUD	41,00%	62,00%	200.000.000,00	64,00%	202.000.000,00	66,00%	203.212.000,00	68,00%	204.918.981,00	70,00%	205.800.133,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN													
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	77,54%	83,00%	80.040.000,00	87,00%	80.840.400,00	91,00%	81.325.442,00	95,00%	82.008.576,00	100,00%	82.361.213,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sesuai standar	Persentase UKBM yang aktif	75,00%	76,00%	1.217.382.000,00	77,00%	636.251.520,00	78,00%	640.069.029,00	79,00%	645.445.609,00	80,00%	648.221.025,00	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya kualitas distribusi air pada daerah irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kota Malang yang dilayani oleh jaringan irigasi	98,54%	98,90%	1.163.400.000,00	99,10%	1.114.434.000,00	99,20%	1.121.120.604,00	99,30%	1.130.538.017,00	99,40%	1.135.399.330,00	
Meningkatnya ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	56,11%	58,00%	330.000.000,00	59,00%	333.300.000,00	60,00%	335.299.800,00	61,00%	338.116.318,00	62,00%	339.570.218,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													
Meningkatnya kualitas rumah tinggal berakses air minum	Persentase rumah tangga dengan akses air siap minum jaringan perpipaan	83,56%	85,00%	3.400.000.000,00	86,00%	3.232.000.000,00	87,00%	3.251.392.000,00	88,00%	3.278.703.693,00	89,00%	3.292.802.119,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
Meningkatnya kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	36,17%	38,00%	9.779.317.000,00	39,00%	9.649.860.170,00	40,00%	9.707.759.331,00	41,00%	9.789.304.509,00	42,00%	9.831.398.518,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE													
Meningkatnya kualitas daya tampung drainase yang sesuai rencana	Rasio luas kawasan permukiman rawan genangan yang terlindungi oleh infrastruktur drainase	86,34%	88,69%	50.189.108.190,00	90,00%	48.475.489.698,00	91,00%	48.766.342.636,00	92,00%	49.175.979.914,00	92,50%	49.387.436.628,00	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG													
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	95,48%	96,00%	12.853.732.880,00	97,00%	12.875.311.208,00	98,00%	12.952.563.075,00	98,00%	13.061.364.605,00	99,00%	13.117.528.473,00	
	Rasio bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF bangunan gedung	94,00%	97,00%		97,50%		98,00%		98,50%		99,00%		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA													
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rasio penataan koridor sesuai RTBL	77,43%	77,46%	450.000.000,00	77,50%	454.500.000,00	77,60%	457.227.000,00	77,70%	461.067.707,00	77,80%	463.050.298,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	95,18%	97,08%	78.641.643.925,00	97,63%	72.316.759.444,00	97,85%	72.750.660.001,00	98,18%	73.361.765.545,00	98,64%	78.677.221.137,00	
Meningkatnya kualitas jembatan Kota dalam kondisi baik	Persentase jembatan kota dalam kondisi baik (%)	96,19%	96,48%	3.615.896.000,00	97,60%	3.652.054.960,00	97,83%	3.673.967.290,00	98,19%	3.704.828.615,00	98,74%	3.720.759.378,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI													
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	32,62%	35,00%	700.000.000,00	37,00%	707.000.000,00	39,00%	711.242.000,00	41,00%	717.216.433,00	44,00%	720.300.464,00	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG													
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam penataan ruang	Persentase koordinasi dan sinkronisasi dalam penataan ruang	12,00%	24,00%	567.580.000,00	28,00%	1.156.450.000,00	32,00%	1.163.388.700,00	36,00%	1.173.161.165,00	40,00%	1.178.205.758,00	
Meningkatnya Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	100,00%	100,00%	2.030.000.000,00	100,00%	2.050.300.000,00	100,00%	2.062.601.800,00	100,00%	2.079.927.655,00	100,00%	2.088.871.344,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perumahan dan Kawasan Permukiman													
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya kualitas perumahan yang layak huni	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00%	100,00%	3.000.000.000,00	100,00%	3.030.000.000,00	100,00%	3.048.180.000,00	100,00%	3.073.784.712,00	100,00%	3.087.001.986,00	
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	43,15%	49,77%		53,08%		56,39%		59,70%		63,00%		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
Meningkatnya kualitas kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	90,10%	91,55%	1.259.326.000,00	92,28%	1.271.919.260,00	93,01%	1.279.550.776,00	93,74%	1.290.299.003,00	94,47%	1.295.847.289,00	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													
Meningkatnya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	35,49%	47,52%	3.628.772.300,00	53,53%	3.665.060.023,00	59,55%	3.687.050.383,00	65,56%	3.718.021.606,00	71,58%	3.734.009.099,00	
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100,00%	100,00%	263.003.200,00	100,00%	551.028.952,00	100,00%	554.335.126,00	100,00%	558.991.541,00	100,00%	561.395.205,00	
	Persentase Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam sehari	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Persentase penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan	100,00%	100,00%	341.000.000,00	100,00%	542.043.244,00	100,00%	545.295.503,00	100,00%	549.875.985,00	100,00%	552.240.452,00	
	Persentase warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
Meningkatnya keaktifan Satuan Linmas dalam ketenteraman dan ketertiban lingkungan	Persentase satuan Linmas yang aktif	98,00%	98,00%	257.955.317,00	98,00%	271.536.187,00	98,00%	273.165.404,00	98,00%	275.459.993,00	98,00%	276.644.471,00	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100,00%	100,00%	4.350.453.477,00	100,00%	4.949.447.912,00	100,00%	4.979.144.599,00	100,00%	5.020.969.414,00	100,00%	5.042.559.582,00	
Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100,00%	100,00%	142.849.650,00	100,00%	698.071.600,00	100,00%	702.260.030,00	100,00%	708.159.014,00	100,00%	711.204.098,00	
Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100,00%	100,00%	521.139.000,00	100,00%	577.077.640,00	100,00%	580.540.106,00	100,00%	585.416.643,00	100,00%	587.933.935,00	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													
Meningkatnya layanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	100,00%	100,00%	1.014.176.500,00	100,00%	3.979.839.998,00	100,00%	4.003.719.038,00	100,00%	4.037.350.278,00	100,00%	4.054.710.884,00	
	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
Sosial													
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Pemberdayaan	-	5,00%	6.006.725.642,00	6,00%	5.225.780.040,00	7,00%	5.257.134.720,00	8,00%	5.301.294.652,00	9,00%	5.324.090.219,00	
	Persentase PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kemampuan dan Berperan Aktif Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	-	72,00%		74,00%		76,00%		78,00%		80,00%		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	-	63,00%	1.979.185.600,00	66,00%	2.325.786.997,00	69,00%	2.339.741.719,00	72,00%	2.359.395.549,00	75,00%	2.369.540.950,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	82,00%	13.659.560.000,00	84,00%	13.190.862.600,00	86,00%	13.270.007.776,00	88,00%	13.381.475.841,00	90,00%	13.439.016.187,00	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100,00%	100,00%	378.856.000,00	100,00%	382.644.560,00	100,00%	384.940.427,00	100,00%	388.173.927,00	100,00%	389.843.075,00	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN													
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	100,00%	100,00%	253.061.640,00	100,00%	303.000.000,00	100,00%	304.818.000,00	100,00%	307.378.471,00	100,00%	308.700.198,00	
Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar													
Tenaga Kerja													
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja makro	75,00%	75,00%	0,00	83,33%	150.000.000,00	83,33%	150.900.000,00	91,67%	152.167.560,00	91,67%	152.821.881,00	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	46,38%	48,38%	2.911.963.000,00	49,38%	524.321.300,00	50,38%	527.467.228,00	51,38%	531.897.953,00	52,38%	534.185.114,00	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	68,77%	69,75%	271.134.000,00	70,38%	275.174.500,00	70,88%	276.825.547,00	71,47%	279.150.882,00	72,18%	280.351.231,00	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
Meningkatnya kualitas hubungan industrial yang kondusif	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10,30%	10,90%	197.740.000,00	11,20%	202.060.600,00	11,50%	203.272.964,00	11,80%	204.980.457,00	12,10%	205.861.873,00	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	100,00%	100,00%	417.349.500,00	100,00%	421.522.995,00	100,00%	424.052.133,00	100,00%	427.614.171,00	100,00%	429.452.912,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00%	100,00%	741.486.300,00	100,00%	698.625.787,00	100,00%	702.817.542,00	100,00%	708.721.209,00	100,00%	711.768.710,00	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA													
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan Gender, pemenuhan Hak, serta perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	100,00%	100,00%	193.248.000,00	100,00%	147.864.000,00	100,00%	148.751.184,00	100,00%	150.000.694,00	100,00%	150.645.697,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK													
Meningkatnya pemanfaatan data Gender dan Anak	Tingkat pemanfaatan data Gender dan Anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	100,00%	100,00%	3.570.000,00	100,00%	3.605.700,00	100,00%	3.627.334,00	100,00%	3.657.804,00	100,00%	3.673.533,00	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)													
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara konfrehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	69,00	581.194.000,00	69,20	271.048.650,00	69,50	272.674.942,00	69,70	274.965.412,00	70,00	276.147.763,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00%	100,00%	582.321.300,00	100,00%	868.334.521,00	100,00%	873.544.528,00	100,00%	880.882.302,00	100,00%	884.670.096,00	
Pangan													
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Meningkatnya diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	Persentase Ketersediaan bahan makanan	104,00%	106,00%	3.691.340.152,00	108,00%	992.138.303,00	110,00%	998.091.133,00	112,00%	1.006.475.099,00	114,00%	1.010.802.942,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													
Menurunnya kerawanan pangan dan gizi	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,99	4,05	135.000.000,00	3,63	136.350.000,00	3,32	137.168.100,00	3,26	138.320.312,00	2,84	138.915.089,00	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN													
Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Persentase keamanan pangan yang layak konsumsi	92,00%	94,00%	10.000.000,00	95,00%	10.100.000,00	96,00%	10.160.600,00	98,00%	10.245.949,00	98,00%	10.290.007,00	
Lingkungan Hidup													
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP													
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP (Kebijakan, Rencana, Program)	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	60,00%	70,00%	500.000.000,00	80,00%	505.000.000,00	90,00%	508.030.000,00	100,00%	512.297.452,00	100,00%	514.500.331,00	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kesesuaian Status Mutu Air dengan Kelas Air	38,00%	42,00%	1.218.600.000,00	44,00%	1.230.786.000,00	46,00%	1.238.170.716,00	48,00%	1.248.571.350,00	50,00%	1.253.940.207,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)													
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau yang Layak dan Sesuai dengan	Presentase Ruang Terbuka Hijau yang Layak dan Sesuai dengan Fungsinya	14,18%	14,47%	5.483.196.800,00	14,60%	5.561.021.418,00	14,73%	5.594.387.547,00	14,86%	5.641.380.402,00	15,00%	5.665.638.338,00	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
Terlaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	Persentase Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	26,00%	28,00%	150.000.000,00	29,00%	151.500.000,00	30,00%	152.409.000,00	31,00%	153.689.236,00	32,00%	154.350.100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													
Meningkatnya Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Persetujuan Lingkungan	Presentase Penerbitan Arahan dan Rekomendasi Persetujuan Lingkungan yang Tepat Waktu	100,00%	100,00%	81.000.000,00	100,00%	81.810.000,00	100,00%	82.300.860,00	100,00%	82.992.187,00	100,00%	83.349.053,00	
Meningkatnya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi , Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan dan Ijin PPLH	25,00%	26,50%	102.318.000,00	27,00%	147.865.212,00	27,50%	148.752.403,00	28,00%	150.001.923,00	28,50%	150.646.931,00	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat yang Meningkat Pengetahuan dan Kemampuannya dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	5,00%	19,00%	174.672.650,00	38,00%	176.419.376,00	57,00%	177.477.892,00	76,00%	178.968.706,00	95,00%	179.738.271,00	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
Meningkatnya partisipasi Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17,00%	21,00%	260.327.350,00	23,00%	262.930.623,00	25,00%	264.508.207,00	27,00%	266.730.076,00	30,00%	267.877.015,00	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP													
Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Sesuai dengan SOP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti yang Sesuai SOP	100,00%	100,00%	197.682.000,00	100,00%	244.182.852,00	100,00%	245.647.949,00	100,00%	247.711.392,00	100,00%	248.776.551,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN													
Terlaksananya Penanganan Sampah yang Sesuai dengan Kebijakan Strategi Daerah	Presentase Penanganan Sampah	70,63%	70,00%	5.868.605.404,00	70,00%	5.927.291.458,00	70,00%	5.962.855.207,00	70,00%	6.012.943.191,00	70,00%	8.038.798.847,00	
Terlaksananya Pengurangan Sampah yang Sesuai dengan Kebijakan Strategi Daerah	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sektor Informal	28,34%	30,00%	443.820.960,00	30,00%	215.410.234,00	30,00%	216.702.695,00	30,00%	218.522.998,00	30,00%	219.462.647,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan	60,93%	68,13%	185.000.000,00	71,73%	186.850.000,00	75,33%	187.971.100,00	78,93%	189.550.057,00	82,53%	190.365.122,00	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	91,55%	91,75%	185.000.000,00	91,87%	186.850.000,00	92,00%	187.971.100,00	92,12%	189.550.057,00	92,24%	190.365.122,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN													
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase perangkat daerah yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Adminduk	71,43%	80,95%	110.000.000,00	85,71%	111.100.000,00	90,48%	111.766.600,00	95,24%	112.705.439,00	100,00%	113.190.072,00	
	Persentase Instansi dan Lembaga yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Adminduk	57,00%	75,95%		82,28%		88,61%		94,94%		100,00%		
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN													
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan muatan profil kependudukan merujuk pada ketentuan perundangan	100,00%	100,00%	50.000.000,00	100,00%	50.500.000,00	100,00%	50.803.000,00	100,00%	51.229.745,00	100,00%	51.450.033,00	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1,82%	1,78%	52.720.000,00	1,76%	53.247.200,00	1,74%	53.566.683,00	1,72%	54.016.643,00	1,70%	54.248.915,00	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)													
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR)	-	66,84%	37.900.000,00	69,27%	38.279.000,00	71,70%	38.508.674,00	74,13%	38.832.147,00	76,56%	38.999.125,00	
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	-	9,04		8,78		8,52		8,26		8,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	-	93,49%	822.100.000,00	93,54%	838.401.000,00	93,59%	843.431.406,00	93,64%	850.516.230,00	93,69	854.173.450,00	
Perhubungan													
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Menurunnya Titik Kemacetan	Kecepatan Rata-Rata Kendaraan di Jalan Kewenangan Kota	34,25 km/jam	34,30 km/jam	2.043.100.000,00	34,35 km/jam	1.649.027.000,00	34,40 km/jam	1.658.921.162,00	34,45 km/jam	1.672.856.100,00	34,50 km/jam	1.680.049.381,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Umum	Persentase Faktor Muat (Load Factor)	30,30%	30,35%	597.141.200,00	30,40%	603.112.612,00	30,45%	606.731.288,00	30,50%	611.827.831,00	30,55%	614.458.691,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Darat	Persentase Kendaraan yang Lulus Uji Berkala	66,00%	67,00%	923.000.000,00	68,00%	932.230.000,00	69,00%	937.823.380,00	70,00%	945.701.096,00	71,00%	949.767.611,00	
Meningkatnya Retribusi Parkir	Nilai Retribusi Parkir	10.736.238.520	23.825.000.000	758.688.380,00	24.166.250.000	758.195.263,00	24.524.562.500	762.744.435,00	24.900.790.625	769.151.488,00	25.295.830.156	772.458.839,00	
Komunikasi dan Informatika													
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	69,75	69,95	2.612.379.939,00	70,05	1.557.465.388,00	70,15	1.566.810.180,00	70,25	1.579.971.386,00	70,35	1.586.765.263,00	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA													
Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola dan layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Persentase kebijakan SPBE yang ditetapkan/ dimutakhirkan	100,00%	100,00%	7.181.298.735,00	100,00%	7.095.501.222,00	100,00%	7.138.074.229,00	100,00%	7.198.034.053,00	100,00%	7.228.985.599,00	
	Persentase Layanan Publik dan Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	71,19	73.33%		75,53%		77,79%		80,12%		82,53%		
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Presentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	59,78%	60,70%	169.305.000,00	61,49%	170.998.050,00	62,28%	172.024.038,00	63,07%	173.469.040,00	63,87%	174.214.957,00	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI													
Meningkatnya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Persentase koperasi yg melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut	92,95%	94,29%	121.188.754,00	94,86%	122.400.641,00	95,43%	123.135.045,00	96,00%	124.169.379,00	96,57%	124.703.307,00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN													
Meningkatnya Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas & kompetensi SDM koperasi	Persentase SDM koperasi yang dididik dan dilatih	92,95%	93,50%	111.498.754,00	93,66%	106.250.741,00	93,82%	106.888.245,00	93,98%	107.786.106,00	94,14%	108.249.586,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													
Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	92,95%	96,67%	464.138.754,00	96,99%	394.545.141,00	97,31%	396.912.412,00	97,62%	400.246.476,00	98,10%	401.967.536,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
Meningkatnya usaha mikro yang terfasilitasi	Persentase usaha mikro binaan yang terfasilitasi	11,33%	14,35%	5.144.800.800,00	15,07%	394.545.141,00	15,82%	396.912.412,00	16,61%	400.246.476,00	17,45%	401.967.536,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													
Meningkatnya usaha mikro menuju usaha kecil	Persentase usaha mikro binaan yang difasilitasi menuju usaha kecil	0,98%	1,08%	339.427.750,00	1,14%	202.000.000,00	1,20%	203.212.000,00	1,26%	204.918.981,00	1,32%	205.800.133,00	
Penanaman Modal													
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase realisasi investasi terhadap target investasi	100,00%	100,00%	100.000.000,00	100,00%	101.020.200,00	100,00%	101.626.321,00	100,00%	102.479.982,00	100,00%	102.920.646,00	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL													
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah minat investor	2 Investor	3 Investor	80.000.000,00	4 Investor	80.800.000,00	5 Investor	81.284.800,00	5 Investor	81.967.592,00	6 Investor	82.320.053,00	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL													
Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dalam mendukung perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum	66,00%	70,00%	49.210.000,00	72,00%	50.510.100,00	74,00%	50.813.161,00	76,00%	51.239.992,00	78,00%	51.460.324,00	
Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya dalam mendukung perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	53,00%	57,00%	49.000.000,00	59,00%	50.500.000,00	61,00%	50.803.000,00	63,00%	51.229.745,00	65,00%	51.450.033,00	
Meningkatnya kualitas layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase penyelesaian konsultasi/pengaduan perizinan dan nonperizinan dalam mendukung perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100,00%	100,00%		100,00%	50.000.000,00	100,00%	50.300.000,00	100,00%	50.722.520,00	100,00%	50.940.627,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL													
Meningkatnya pengendalian penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	100,00%	100,00%	402.710.000,00	100,00%	129.613.300,00	100,00%	130.390.980,00	100,00%	131.486.264,00	100,00%	132.051.655,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL													
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan dan informasi penanaman modal	100,00%	100,00%	100.000.000,00	100,00%	101.000.000,00	100,00%	101.606.000,00	100,00%	102.459.490,00	100,00%	102.900.066,00	
Kepemudaan dan Olahraga													
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Terselenggaranya event olahraga massal	Jumlah event olahraga massal yang diselenggarakan	6 event	6 event	1.714.398.194,00	6 event	901.339.202,00	6 event	860.467.237,00	6 event	823.323.162,00	6 event	779.959.452,00	
Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Timur	Jumlah medali emas pada event di tingkat Provinsi Jawa Timur	20 medali emas	25 Medali Emas	10.150.000.000,00	70 Medali Emas	686.527.473,00	30 Medali Emas	736.926.638,00	75 Medali Emas	787.488.822,00	35 Medali Emas	837.779.024,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN													
Meningkatnya kapasitas daya saing wirausaha yang berkualitas	Persentase Pemuda (16-30 tahun) wirausaha	35,70%	36,70%	2.710.412.540,00	37,70%	882.814.587,00	38,70%	888.111.475,00	39,70%	895.571.611,00	40,70%	899.422.569,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN													
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase partisipasi penduduk diatas usia 7 tahun dalam kepramukaan	3,16%	6,98%	350.000.000,00	7,98%	350.000.000,00	8,98%	352.100.000,00	9,98%	355.057.640,00	10,98%	356.584.388,00	
Statistik													
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Persentase keterisian E-Database SIPD	75,00%	84,00%	838.202.887,00	84,50%	746.271.715,00	85,00%	750.749.345,00	85,50%	757.055.639,00	86,00%	760.310.978,00	
Persandian													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Meningkatnya keamanan informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	60,00%	67,00%	459.911.500,00	69,00%	564.823.815,00	71,00%	568.212.758,00	73,00%	572.985.745,00	75,00%	575.449.584,00	
Kebudayaan													
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Tercapaianya Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	75,00%	90,00%	1.718.500.000,00	90,00%	424.656.747,00	90,00%	1.167.056.747,00	90,00%	743.500.000,00	90,00%	1.519.980.370,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL													
Tercapainya Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Lembaga Kesenian Tradisional yang Aktif	10,00%	20,00%	4.189.600.000,00	25,00%	1.157.000.000,00	30,00%	1.473.864.587,04	32,00%	1.157.000.000,00	35,00%	4.389.600.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH													
Tercapaianya Pembinaan Pelaku Sejarah	Persentase Pelaku Sejarah yang dibina	50,00%	60,00%	0,00	65,00%	105.000.000,00	70,00%	105.000.000,00	75,00%	105.000.000,00	80,00%	105.000.000,00	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA													
Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	100,00%	100,00%	48.000.000,00	100,00%	48.000.000,00	100,00%	48.000.000,00	100,00%	48.000.000,00	100,00%	48.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN													
Meningkatnya pengelolaan museum	Nilai Kepuasan Pengunjung Museum	90	92	70.000.000,00	93	70.000.000,00	94	370.000.000,00	95	370.000.000,00	96	892.400.000,00	
Perpustakaan													
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar untuk mendorong budaya baca	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	9.26%	9.30%	854.819.122,00	9.40%	544.207.313,00	9.55%	547.472.557,00	9.75%	552.071.326,00	10.00%	554.445.233,00	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO													
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	47,60%	56,00%	81.325.000,00	59,00%	82.138.250,00	62,00%	82.631.080,00	64,00%	83.325.181,00	66,00%	83.683.479,00	
Kearsipan													
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase arsip dinamis dan statis milik pemerintah kota malang yang dikelola sesuai peraturan perundangan	33,80%	35,50%	296.156.129,00	36,00%	299.117.690,00	36,50%	300.912.396,00	37,00%	303.440.060,00	37,50%	304.744.852,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP													
Meningkatnya upaya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	24,00%	35,00%	20.000.000,00	39,00%	20.200.000,00	42,00%	20.321.200,00	46,00%	20.491.898,00	50,00%	20.580.013,00	
Urusan Pilihan													
Kelautan dan Perikanan													
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	160 Ton	162 Ton	2.325.087.000,00	163 Ton	919.337.350,00	164 Ton	924.853.374,00	165 Ton	932.622.142,00	166 Ton	936.632.417,00	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													
Meningkatnya pola konsumsi ikan di masyarakat	Angka konsumsi ikan	17,30	18,95	345.343.000,00	19,35	281.305.200,00	19,76	282.993.031,00	20,17	285.370.172,00	20,57	286.597.264,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pariwisata													
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Meningkatnya kualitas daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dibina	71,85%	74,00%	1.815.006.288,00	76,00%	1.868.070.789,00	78,00%	1.879.279.214,00	80,00%	1.895.065.159,00	82,00%	1.903.213.939,00	
	Persentase industri pariwisata yang dibina	85,96%	87,00%		88,00%		89,00%		90,00%		91,00%		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase pemasaran Pariwisata	57,40%	59,00%	196.780.000,00	60,15%	202.283.002,00	61,29%	203.496.700,00	62,28%	205.206.072,00	63,16%	206.088.458,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL													
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	15,73%	16,04%	133.880.000,00	17,06%	25.250.000,00	18,08%	25.401.500,00	19,05%	25.614.873,00	20,11%	25.725.017,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terfasilitasi	30,6%	32,10%	519.340.000,00	33,13%	576.700.001,00	34,10%	580.160.201,00	35,15%	585.033.547,00	36,17%	587.549.191,00	
Pertanian													
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian	59830,31 Ton	59900 ton	719.693.000,00	59950 ton	612.254.930,00	60000 ton	615.928.460,00	60050 ton	621.102.259,00	60100 ton	623.772.999,00	
Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah Produksi Peternakan	27257,2 Ton	27.442 Ton	272.166.800,00	27.444 Ton	72.888.468,00	27.446 Ton	73.325.799,00	27.448 Ton	73.941.736,00	27.450 Ton	74.259.685,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
Meningkatnya luasan lahan pertanian yang dialiri saluran irigasi tersier untuk meningkatkan produksi pertanian	Persentase sawah/lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi tersier	100,00%	100,00%	1.186.125.000,00	100,00%	1.197.986.250,00	100,00%	1.205.174.168,00	100,00%	1.215.297.631,00	100,00%	1.220.523.411,00	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
Meningkatnya pengendalian penyakit hewan	Persentase kasus penyakit hewan yang tertangani	100,00%	100,00%	125.500.000,00	100,00%	126.755.000,00	100,00%	127.515.530,00	100,00%	128.586.660,00	100,00%	129.139.583,00	
Meningkatmya pemahaman pelaku usaha tentang produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Persentase produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	94,00%	95,00%	550.535.000,00	95,50%	290.274.000,00	96,00%	292.015.644,00	96,50%	294.468.575,00	97,00%	295.734.790,00	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
Meningkatnya kapasitas kelompok tani yang aktif dan berkelanjutan	Persentase kelompok tani yang aktif	70,00%	72,00%	65.264.000,00	73,00%	65.916.640,00	74,00%	66.312.140,00	75,00%	66.869.162,00	76,00%	67.156.699,00	
Perdagangan													
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya izin usaha	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha perdagangan	1,70%	2,01%	61.930.000,00	2,11%	76.760.000,00	2,16%	77.220.560,00	2,21%	77.869.213,00	2,26%	78.204.051,00	
Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap penggunaan bahan berbahaya	Persentase sampel pelaku usaha yang tidak menggunakan bahan berbahaya	84,00%	86,00%		87,00%	0,00	88,00%	0,00	89,00%		90,00%		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN													
Meningkatnya sarana umum perdagangan	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pemanfaatannya	69,23%	76,92%	5.084.340.630,00	80,77%	6.458.334.537,00	84,62%	6.497.084.544,00	88,46%	6.551.660.054,00	92,31%	6.579.832.192,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING													
Tercapainya stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	100,00%	100,00%	1.152.661.215,00	100,00%	161.964.827,00	100,00%	162.936.616,00	100,00%	164.305.284,00	100,00%	165.011.797,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR													
Meningkatnya pengembangan promosi dagang produksi ekspor	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitasi pengembangan ekspor	0,22%	0,30%	85.000.000,00	0,33%	85.850.000,00	0,35%	86.365.100,00	0,37%	87.090.567,00	0,39%	87.465.056,00	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN													
Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase jumlah alat UTTP yang ditera dan tera ulang	100,00%	100,00%	300.000.000,00	100,00%	303.000.000,00	100,00%	304.818.000,00	100,00%	307.378.471,00	100,00%	308.700.198,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI													
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	0,00%	0,23%	350.000.000,00	0,27%	202.000.000,00	0,28%	203.212.000,00	0,32%	204.918.981,00	0,33%	205.800.133,00	
Perindustrian													
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Meningkatnya persentase IKM yang diberdayakan	Persentase IKM yang diberdayakan	7,25%	8,00%	5.361.400.000,00	8,50%	5.237.557.000,00	9,00%	5.268.982.342,00	10,00%	5.313.241.794,00	10,00%	5.336.088.734,00	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya pengawasan perizinan di bidang industri	Persentase pengawasan izin usaha industri yang terbit melalui OSS pada tahun berjalan	44,64%	44,80%	50.000.000,00	44,90%	50.500.000,00	45,00%	50.803.000,00	45,00%	51.229.745,00	45,00%	51.450.033,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL													
Tersedianya informasi industri yang lengkap dan terkini	Persentase data IKM yg masuk di SIINAS	1,57%	1,75%	200.000.000,00	2,00%	202.000.000,00	2,25%	203.212.000,00	2,50%	204.918.981,00	2,75%	205.800.133,00	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan													
Sekretariat Daerah													
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas penetapan produk hukum daerah	Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti	88,71%	100,00%	2.050.000.000,00	100,00%	2.070.500.000,00	100,00%	2.082.923.000,00	100,00%	2.100.419.553,00	100,00%	2.109.451.357,00	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan	Persentase ketercapaian IKK	85,00%	95,00%	1.057.000.000,00	96,00%	1.046.147.950,00	97,00%	1.052.724.838,00	98,00%	1.061.987.727,00	99,00%	1.066.769.274,00	
Meningkatnya kualitas layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	13.505.500.000,00	100,00%	12.287.155.000,00	100,00%	12.360.877.930,00	100,00%	12.464.709.305,00	100,00%	12.518.307.555,00	
Meningkatnya implementasi kerjasama daerah	Persentase implementasi kerjasama daerah	100,00%	100,00%	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	85,00%	85,00%	1.200.000.000,00	90,00%	1.212.000.000,00	90,00%	1.219.272.000,00	90,00%	1.229.513.885,00	90,00%	1.234.800.795,00	
Meningkatnya kualitas layanan perekonomian, infrastruktur dan SDA	Persentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	97,00%	100,00%	940.000.000,00	100,00%	949.400.000,00	100,00%	955.096.400,00	100,00%	963.119.210,00	100,00%	967.260.623,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya kualitas peta jabatan, Anjab, dan ABK, serta capaian perangkat daerah dalam area akuntabilitas, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, dan manajemen perubahan	Persetase kesesuaian peta jabatan dengan Anjab dan ABK	85,00%	91,00%	785.000.000,00	94,00%	792.850.000,00	97,00%	797.607.100,00	100,00%	804.307.000,00	100,00%	807.765.520,00	
	Persentase perangkat dareah yang memiliki skor kematangan minimal 44	85,70%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%		95,00%		
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung capaian komponen pelaporan pada SAKIP	Rata-rata nilai komponen pelaporan kinerja perangkat daerah	12,88	13,93	100.000.000,00	13,94	116.150.000,00	13,95	116.846.900,00	13,96	117.828.414,00	13,97	118.335.076,00	
Meningkatnya kualitas layanan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase penyelenggaraan layanan protokol dan komunikasi pimpinan	100,00%	100,00%	6.400.000.000,00	100,00%	6.464.000.000,00	100,00%	6.502.784.000,00	100,00%	6.557.407.386,00	100,00%	6.585.604.238,00	
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	34.551.286.533,74	100,00%	29.879.888.952,00	100,00%	30.059.048.285,00	100,00%	30.311.376.290,59	100,00%	30.441.629.208,64	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	11.183.749.791,20	100,00%	15.779.020.289,00	100,00%	15.845.357.405,00	100,00%	15.978.458.407,20	100,00%	16.047.264.678,74	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	225.000.000,00	100,00%	510.000.000,00	100,00%	513.060.000,00	100,00%	517.369.704,36	100,00%	519.594.394,09	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80,00%	80,00%	4.910.000.000,00	80,00%	5.313.554.979,00	80,00%	5.373.893.315,00	80,00%	5.419.202.018,85	80,00%	5.442.504.587,53	
Sekretariat DPRD													
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD													SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100,00%	100,00%	7.335.197.000,00	100,00%	7.686.066.507,00	100,00%	7.821.851.192,00	100,00%	8.013.090.342,00	100,00%	8.013.090.342,00	
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	38,00%	41,00%		43,00%		45,00%		48,00%		50,00%		
Meningkatnya kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan	96,77%	96,85%	8.922.363.330,00	97,00%	11.959.863.330,00	98,00%	11.959.863.330,00	99,00%	11.959.863.330,00	100,00%	12.058.581.890,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													
Perencanaan													
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN
Meningkatnya kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100,00%	100,00%	813.000.000,00	100,00%	998.890.000,00	100,00%	1.004.883.340,00	100,00%	1.013.324.360,00	100,00%	1.017.668.755,00	
Meningkatnya efektivitas pengendalian perencanaan pembangunan	Persentase capaian Program dan Kegiatan pada RKPD	100,00%	100,00%	100.000.000,00	100,00%	101.000.000,00	100,00%	101.606.000,00	100,00%	102.459.490,00	100,00%	102.900.066,00	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	100,00%	864.530.000,00	100,00%	1.082.635.452,00	100,00%	1.089.131.264,00	100,00%	1.098.279.967,00	100,00%	1.103.002.571,00	
	Persentase Kesesuaian Kebijakan Nasional dalam Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA	100,00%	100,00%	480.330.000,00	100,00%	562.378.100,00	100,00%	565.752.369,00	100,00%	570.504.689,00	100,00%	572.957.859,00	
	Persentase kesesuaian kebijakan nasional dalam dokumen perencanaan daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang infrastruktur dan kewilayahan	100,00%	100,00%	1.496.182.000,00	100,00%	1.995.567.669,00	100,00%	2.007.541.103,00	100,00%	2.024.404.449,00	100,00%	2.033.109.388,00	
	Persentase Kesesuaian Kebijakan Nasional dalam Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85,00%	95,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	62,05%	62,06%		62,07%		62,08%		62,09%		62,10%		
Keuangan													
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEUANGAN
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100,00%	100,00%	1.206.589.100,00	100,00%	1.194.771.319,00	100,00%	1.201.939.947,00	100,00%	1.212.036.243,00	100,00%	1.217.247.999,00	
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Pelayanan Perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	7.864.777.026,00	100,00%	104.918.329.229,00	100,00%	113.360.249.374,00	100,00%	79.738.018.754,00	100,00%	114.890.123.440,00	
Meningkatnya tata kelola akuntasi dan pelaporan	Persentase Laporan keuangan tepat waktu	100,00%	100,00%	650.705.500,00	100,00%	651.960.555,00	100,00%	655.872.318,00	100,00%	661.381.645,00	100,00%	664.225.586,00	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH													
Tercapainya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah, gedung dan bangunan	15,5 M	16,5 M	2.916.798.134,00	17,5M	3.140.216.637,00	18,5M	3.159.057.937,00	19,5M	3.185.594.024,00	20,5M	3.199.292.078,00	
	Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai dengan ketentuan	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
Meningkatnya Potensi PAD	Nilai potensi Pendapatan Asli Daerah	1.115.868.660.784	1.029.875.533.595	1.707.600.000,00	1.054.488.321.384	867.630.551,00	1.068.197.561.995	872.836.334,00	1.087.756.659.509	880.168.159,00	1.097.902.057.189	883.952.882,00	
Menurunnya Piutang Pajak Daerah	Realisasi Piutang Pajak Daerah tertagih	43.932.712.497,16	55.078.653.574	3.255.122.652,00	56.304.921.108	3.659.661.928,00	56.756.880.983	3.681.619.900,00	57.213.447.289	3.712.545.507,00	57.674.669.939	3.728.509.453,00	
Tercapainya Target Pajak Daerah	Persentase realisasi pajak daerah terhadap target Pajak Daerah	82,00%	88,00%	3.488.830.000,00	90,00%	3.639.531.263,00	93,00%	3.661.368.451,00	95,00%	3.692.123.946,00	100,00%	3.708.000.079,00	
Kepegawaian													
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik	97,70%	98,00%	200.000.000,00	98,00%	202.000.000,00	98,50%	203.212.000,00	98,50%	204.918.981,00	98,75%	205.800.133,00	
Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian tindak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pembinaan dan penyelesaian tindak disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100,00%	100,00%	250.000.000,00	100,00%	252.500.000,00	100,00%	254.015.000,00	100,00%	256.148.726,00	100,00%	257.250.166,00	
Meningkatnya keterisian JPT, administrasi dan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan	Persentase terisinya JPT, administrasi dan fungsional	66,04%	66,50%	750.000.000,00	66,75%	808.000.000,00	67,00%	812.848.000,00	67,25%	819.675.923,00	67,50%	823.200.529,00	
Terlaksananya tindaklajut hasil penilaian kompetensi	Persentase ASN yang telah ditindaklanjuti hasil penilaian kompetensinya	39,00%	40,00%	565.024.647,00	40,10%	520.174.893,00	40,20%	523.295.942,00	40,30%	527.691.628,00	40,40%	529.960.702,00	
Terlaksananya pemuktakiran data ASN sesuai dengan dokumen kepegawaian yang terbit	Persentase data kepegawaian yang termuktahirkan	100,00%	100,00%	80.000.000,00	100,00%	80.800.000,00	100,00%	81.284.800,00	100,00%	81.967.592,00	100,00%	82.320.053,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pendidikan dan Pelatihan													
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	74,00%	80,00%	200.000.000,00	80,05%	202.000.000,00	81,00%	203.212.000,00	81,05%	204.918.981,00	82,00%	205.800.133,00	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar manajerial dan fungsional	68,00%	70,00%	300.000.000,00	70,50%	303.000.000,00	71,00%	304.818.000,00	71,50%	307.378.471,00	72,00%	308.700.198,00	
Penelitian dan Pengembangan													
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	85,00%	91.00%	683.200.000,00	92.00%	1.187.854.132,00	93.00%	1.194.981.257,00	94.00%	1.205.019.100,00	95.00%	1.210.200.682,00	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH													
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	62,50%	69,79%	581.405.900,00	74,26%	590.850.000,00	77,83%	594.395.100,00	80,60%	599.388.019,00	83,00%	601.965.387,00	
Unsur Pengawasan													
Inspektorat Daerah													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN													INSPEKTORAT DAERAH
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun N-1	87,20%	87,50%	3.323.487.701,00	88,00%	3.323.487.701,00	88,50%	3.323.487.701,00	89,00%	3.323.487.701,00	89,50%	3.323.487.701,00	
	Persentase tindak lanjut rekomendasi APIP	97,37%	97,50%		97,60%		97,65%		97,70%		97,75%		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI													
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Manajemen Resiko Indeks (MRI)	3,4	3,415	4.304.633.023,00	3,42	4.304.633.023,00	3,425	4.304.633.023,00	3,43	4.304.633.023,00	3,43	4.304.633.023,00	
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	level 2 (2,904)	level 2 (2,93)		level 2 (2,95)		level 2 (2,97)		level 3 (3,00)		level 3 (3,05)		
	Kapabilitas APIP	Level 3 3,1	Level 3 3,2		Level 3 3,25		Level 3 3,3		Level 3 3,35		Level 3 3,40		
	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP	93	95		96		97		98		98		
Unsur Kewilayahan													
Kecamatan													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													KECAMATAN KLOJEN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan dan urusan pemerintahan kewilayahan	Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100,00%	100,00%	9.075.826.990,00	100,00%	9.929.603.747,00	100,00%	9.798.930.604,00	100,00%	9.674.988.014,00	100,00%	9.560.384.142,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													KECAMATAN KLOJEN
Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase usulan sarana dan prasarana prioritas yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	10.611.443.010,00	100,00%	8.824.603.747,00	100,00%	8.877.551.369,00	100,00%	8.952.122.800,00	100,00%	8.990.616.928,00	
Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96,00%	100,00%	9.875.100.730,00	100,00%	8.077.451.963,00	100,00%	8.078.344.292,00	100,00%	8.079.238.851,00	100,00%	8.120.914.677,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													KECAMATAN KLOJEN
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100,00%	100,00%	1.822.286.560,00	100,00%	2.096.000.000,00	100,00%	2.203.300.000,00	100,00%	2.423.630.000,00	100,00%	2.662.968.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													KECAMATAN KLOJEN
Meningkatnya pembinaan dan koordinasi dalam penerapan kerukunan masyarakat	Cakupan wilayah yang dilakukan pembinaan	96,00%	100,00%	226.777.500,00	100,00%	650.000.000,00	100,00%	795.000.000,00	100,00%	870.750.000,00	100,00%	792.438.826,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													KECAMATAN BLIMBING
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan dan urusan pemerintahan kewilayahan	Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100,00%	100,00%	10.939.545.220,00	100,00%	10.272.580.223,00	100,00%	10.335.115.704,00	100,00%	10.423.190.676,00	100,00%	10.468.655.396,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													KECAMATAN BLIMBING
Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase usulan sarana dan prasarana prioritas yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	18.231.280.900,00	100,00%	7.980.792.396,00	100,00%	8.028.677.150,00	100,00%	8.096.118.038,00	100,00%	8.130.931.346,00	
Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100,00%	100,00%	15.627.990.100,00	100,00%	15.289.431.798,00	100,00%	15.380.268.389,00	100,00%	15.508.202.643,00	100,00%	15.574.242.914,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													KECAMATAN BLIMBING
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100,00%	100,00%	2.721.569.360,00	100,00%	2.969.589.839,00	100,00%	2.987.407.378,00	100,00%	3.012.501.600,00	100,00%	3.025.455.357,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													KECAMATAN BLIMBING
Meningkatnya pembinaan dan koordinasi dalam penerapan kerukunan masyarakat	Cakupan wilayah yang dilakukan pembinaan	100,00%	100,00%	214.100.000,00	100,00%	17.170.000,00	100,00%	17.273.020,00	100,00%	17.418.113,00	100,00%	17.493.011,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													KECAMATAN KEDUNGKANDANG
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan dan urusan pemerintahan kewilayahan	Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100,00%	100,00%	10.870.289.335,00	100,00%	11.112.824.525,00	100,00%	11.179.501.472,00	100,00%	11.273.409.284,00	100,00%	11.321.884.944,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													KECAMATAN KEDUNGKANDANG
Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	85,20%	85,20%	20.104.261.220,00	85,30%	8.986.799.866,00	85,40%	9.040.720.665,00	85,50%	9.116.662.719,00	85,60%	9.155.864.369,00	
Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	88,00%	88,76%	15.951.289.176,00	88,80%	15.908.420.902,00	88,90%	16.003.871.427,00	89,00%	16.138.303.947,00	89,10%	16.207.698.654,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													KECAMATAN KEDUNGKANDANG
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	95,00%	100,00%	2.707.189.565,00	100,00%	3.074.579.789,00	100,00%	3.093.027.268,00	100,00%	3.119.008.697,00	100,00%	3.132.420.434,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													KECAMATAN KEDUNGKANDANG
Meningkatnya pembinaan dan koordinasi dalam penerapan kerukunan masyarakat	Cakupan wilayah yang dilakukan pembinaan	100,00%	100,00%	255.098.800,00	100,00%	25.000.000,00	100,00%	25.150.000,00	100,00%	25.361.260,00	100,00%	25.470.313,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													KECAMATAN LOWOKWARU
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan dan urusan pemerintahan kewilayahan	Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100,00%	100,00%	10.866.776.720,00	100,00%	9.517.563.917,00	100,00%	9.552.156.457,00	100,00%	9.600.876.591,00	100,00%	9.626.026.157,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													KECAMATAN LOWOKWARU
Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase usulan sarana dan prasarana prioritas yang dilaksanakan	80,00%	100,00%	16.137.796.016,00	100,00%	14.134.136.463,00	100,00%	14.185.508.399,00	100,00%	14.257.860.630,00	100,00%	14.295.209.206,00	
Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96,00%	100,00%	12.346.601.400,00	100,00%	10.813.654.406,00	100,00%	10.852.957.719,00	100,00%	10.908.312.509,00	100,00%	10.936.886.903,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													KECAMATAN LOWOKWARU
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100,00%	100,00%	2.398.704.600,00	100,00%	2.100.882.804,00	100,00%	2.108.518.673,00	100,00%	2.119.273.032,00	100,00%	2.124.824.483,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													KECAMATAN LOWOKWARU
Meningkatnya pembinaan dan koordinasi dalam penerapan kerukunan masyarakat	Cakupan wilayah yang dilakukan pembinaan	100,00%	100,00%	272.810.000,00	100,00%	238.938.065,00	100,00%	239.806.510,00	100,00%	241.029.627,00	100,00%	241.661.006,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													KECAMATAN SUKUN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan dan urusan pemerintahan kewilayahan	Persentase nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan kelurahan diatas 80	100,00%	100,00%	10.714.569.420,00	100,00%	10.664.789.515,00	100,00%	10.728.778.252,00	100,00%	10.818.899.989,00	100,00%	10.865.421.259,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													KECAMATAN SUKUN
Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100,00%	100,00%	14.276.387.100,00	100,00%	14.336.975.108,00	100,00%	14.422.996.959,00	100,00%	14.544.150.133,00	100,00%	14.606.689.979,00	
Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase usulan sarana dan prasarana prioritas yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	17.276.006.900,00	100,00%	7.219.213.158,00	100,00%	7.262.528.437,00	100,00%	7.323.533.676,00	100,00%	7.355.024.871,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													KECAMATAN SUKUN
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase wilayah RT yang termonitor keamanan dan ketertiban umum	100,00%	100,00%	2.501.460.680,00	100,00%	2.770.589.297,00	100,00%	2.787.212.833,00	100,00%	2.810.625.421,00	100,00%	2.822.711.110,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													KECAMATAN SUKUN
Meningkatnya pembinaan dan koordinasi dalam penerapan kerukunan masyarakat	Cakupan wilayah yang dilakukan pembinaan	100,00%	100,00%	249.430.000,00	100,00%	71.625.160,00	100,00%	72.054.911,00	100,00%	72.660.172,00	100,00%	72.972.611,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Unsur Pemerintahan Umum													
Kesatuan Bangsa dan Politik													
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN													BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	17,45%	72,50%	1.624.500.000,00	75,00%	1.199.375.000,00	77,50%	1.206.571.250,00	80,00%	1.216.706.449,00	82,50%	1.221.938.287,00	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK													
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada masyarakat	60,33%	84,00%	7.385.545.000,00	85,00%	8.060.382.476,00	86,00%	8.108.744.771,00	87,00%	48.474.726.516,00	88,00%	8.143.612.374,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN													
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	38,18%	55,00%	194.575.000,00	56,00%	196.520.750,00	57,00%	197.699.875,00	58,00%	199.360.554,00	59,00%	200.217.804,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunanan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	89,13%	89,63%	1.196.250.000,00	90,13%	314.312.000,00	90,63%	316.197.872,00	91,13%	318.853.934,00	91,63%	320.225.006,00	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
Meningkatnya fasilitasi penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	75,00%	75,00%	731.000.000,00	75,00%	580.750.000,00	75,00%	584.234.500,00	75,00%	8.710.429.900,00	75,00%	586.746.708,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	440.204.787.695,00	100,00%	440.244.787.695,00	100,00%	440.244.787.695,00	100,00%	440.244.787.695,00	100,00%	440.445.137.694,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	1.371.551.100,00	100,00%	1.454.936.601,00	100,00%	1.454.936.601,00	100,00%	1.461.551.101,00	100,00%	1.759.936.600,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	109.133.121,00	100,00%	109.133.121,00	100,00%	109.133.121,00	100,00%	109.133.121,00	100,00%	129.133.121,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	2.464.747.944,00	100,00%	2.414.747.944,00	100,00%	2.414.747.944,00	100,00%	2.414.747.944,00	100,00%	2.674.747.944,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	173.555.059.574,00	100,00%	173.555.059.574,00	100,00%	173.555.059.574,00	100,00%	173.555.059.574,00	100,00%	173.555.059.574,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	730.000.000,00	100,00%	730.000.000,00	100,00%	730.000.000,00	100,00%	730.000.000,00	100,00%	730.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	3.697.000.000,00	100,00%	3.697.000.000,00	100,00%	3.697.000.000,00	100,00%	3.697.000.000,00	100,00%	3.697.000.000,00	
Tercapainya kualitas pengelolaan BLUD yang akuntabel	Hasil audit eksternal Wajar tanpa pengecualian	100,00%	100,00%	60.945.426.727,00	100,00%	60.945.426.727,00	100,00%	60.945.426.727,00	100,00%	60.945.426.727,00	100,00%	60.945.426.727,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	23.109.455.993,00	100,00%	25.800.000.000,00	100,00%	25.800.000.000,00	100,00%	25.800.000.000,00	100,00%	25.800.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	6.326.405.400,00	100,00%	4.479.975.993,00	100,00%	4.479.975.993,00	100,00%	4.479.975.993,00	100,00%	4.479.975.993,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	95,92%	100,00%	230.000.000,00	100,00%	230.000.000,00	100,00%	230.000.000,00	100,00%	230.000.000,00	100,00%	230.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	4.564.564.600,00	100,00%	3.820.450.000,00	100,00%	3.820.450.000,00	100,00%	3.820.450.000,00	100,00%	3.820.450.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	22.390.986.973,00	100,00%	20.440.831.288,00	100,00%	20.440.831.288,00	100,00%	20.440.831.288,00	100,00%	20.440.831.288,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80,00%	80,00%	4.456.827.700,00	80,00%	2.092.690.111,00	80,00%	2.092.690.111,00	80,00%	2.092.690.111,00	80,00%	2.092.690.111,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	148.000.000,00	100,00%	88.320.000,00	100,00%	88.320.000,00	100,00%	88.320.000,00	100,00%	88.320.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	2.660.909.333,00	100,00%	1.430.164.488,00	100,00%	1.430.164.488,00	100,00%	1.430.164.488,00	100,00%	1.430.164.488,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	5.630.735.026,00	100,00%	5.714.791.026,00	100,00%	5.714.791.026,00	100,00%	5.714.791.026,00	100,00%	5.714.791.026,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	1.145.584.094,00	100,00%	665.452.700,00	100,00%	665.452.700,00	100,00%	665.452.700,00	100,00%	665.452.700,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	150.400.000,00	100,00%	40.400.000,00	100,00%	40.400.000,00	100,00%	40.400.000,00	100,00%	40.400.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	2.219.751.700,00	100,00%	1.347.951.744,00	100,00%	1.347.951.744,00	100,00%	1.347.951.744,00	100,00%	1.347.951.744,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	13.174.597.672,00	100,00%	12.489.430.392,00	100,00%	12.489.430.392,00	100,00%	12.489.430.392,00	100,00%	12.489.430.392,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	1.371.158.600,00	100,00%	1.009.264.000,00	100,00%	1.009.264.000,00	100,00%	1.009.264.000,00	100,00%	1.009.264.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	64.900.000,00	100,00%	730.193.164,00	100,00%	730.193.164,00	100,00%	730.193.164,00	100,00%	730.193.164,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	4.384.082.998,00	100,00%	5.083.958.299,00	100,00%	5.083.958.299,00	100,00%	5.083.958.299,00	100,00%	5.083.958.299,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DAN PENANAMAN MODAL
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	11.725.198.114,00	100,00%	11.873.773.114,00	100,00%	11.873.773.114,00	100,00%	11.873.773.114,00	100,00%	11.873.773.114,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	1.512.088.000,00	100,00%	1.490.010.000,00	100,00%	1.490.010.000,00	100,00%	1.490.010.000,00	100,00%	1.490.010.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	1.084.899.117,00	100,00%	1.074.909.117,00	100,00%	1.084.909.117,00	100,00%	1.084.909.117,00	100,00%	1.084.909.117,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN, PERTANIAN, DAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	13.284.794.626,00	100,00%	13.289.409.627,00	100,00%	13.289.409.627,00	100,00%	13.289.409.627,00	100,00%	13.289.409.627,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	691.486.539,00	100,00%	1.177.670.620,00	100,00%	1.177.670.620,00	100,00%	1.177.670.620,00	100,00%	1.177.670.620,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	1.157.199.029,00	100,00%	664.649.947,00	100,00%	664.649.947,00	100,00%	664.649.947,00	100,00%	664.649.947,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	103.163.112.278,00	100,00%	90.387.519.250,00	100,00%	90.387.519.250,00	100,00%	90.387.519.250,00	100,00%	90.387.519.250,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	900.000.000,00	100,00%	900.000.000,00	100,00%	900.000.000,00	100,00%	900.000.000,00	100,00%	900.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	69.000.000,00	100,00%	69.000.000,00	100,00%	69.000.000,00	100,00%	69.000.000,00	100,00%	69.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	23.475.078.924,00	100,00%	23.340.000.000,00	100,00%	23.340.000.000,00	100,00%	23.340.000.000,00	100,00%	23.340.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	90,50%	100,00%	11.564.275.038,00	100,00%	11.564.275.038,00	100,00%	11.564.275.038,00	100,00%	11.564.275.038,00	100,00%	11.564.275.038,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	1.287.785.613,00	100,00%	1.287.785.613,00	100,00%	1.287.785.613,00	100,00%	1.287.785.613,00	100,00%	1.287.785.613,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	2.317.527.272,00	100,00%	2.317.527.272,00	100,00%	2.317.527.272,00	100,00%	2.317.527.272,00	100,00%	2.317.527.272,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu	90,00%	100,00%	18.124.137.572,00	100,00%	18.353.456.652,00	100,00%	18.353.456.652,00	100,00%	18.353.456.652,00	100,00%	18.353.456.652,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	90,00%	100,00%	1.506.193.055,00	100,00%	1.701.611.955,00	100,00%	1.701.611.955,00	100,00%	1.701.611.955,00	100,00%	1.701.611.955,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	90,00%	100,00%	30.050.000,00	100,00%	30.050.000,00	100,00%	30.050.000,00	100,00%	30.050.000,00	100,00%	30.050.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	90,00%	100,00%	3.157.327.979,00	100,00%	3.165.390.000,00	100,00%	3.165.390.000,00	100,00%	3.165.390.000,00	100,00%	3.165.390.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	10.476.853.865,00	100,00%	10.476.853.865,00	100,00%	10.476.853.865,00	100,00%	10.476.853.865,00	100,00%	10.476.853.865,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	1.133.224.020,00	100,00%	1.138.284.020,00	100,00%	1.138.284.020,00	100,00%	1.138.284.020,00	100,00%	1.138.284.020,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	26.900.000,00	100,00%	26.900.000,00	100,00%	26.900.000,00	100,00%	26.900.000,00	100,00%	26.900.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	439.392.000,00	100,00%	434.332.000,00	100,00%	434.332.000,00	100,00%	434.332.000,00	100,00%	434.332.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	30.170.908.810,00	100,00%	30.230.745.910,00	100,00%	30.230.745.910,00	100,00%	30.230.745.910,00	100,00%	30.230.745.910,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100,00%	100,00%	2.199.403.058,00	100,00%	3.316.536.000,00	100,00%	3.316.536.000,00	100,00%	3.316.536.000,00	100,00%	3.316.536.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	100,00%	100,00%	20.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	100,00%	100,00%	2.521.204.219,00	100,00%	1.065.978.083,00	100,00%	1.065.978.083,00	100,00%	1.065.978.083,00	100,00%	1.065.978.083,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	10.788.263.685,00	100,00%	10.921.957.519,00	100,00%	10.921.957.519,00	100,00%	10.921.957.519,00	100,00%	10.921.957.519,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	1.224.680.266,00	100,00%	1.194.991.616,00	100,00%	1.194.991.616,00	100,00%	1.194.991.616,00	100,00%	1.194.991.616,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	3.044.626.402,00	100,00%	2.696.873.828,00	100,00%	2.696.873.828,00	100,00%	2.696.873.828,00	100,00%	2.696.873.828,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPUURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	8.352.967.738,00	100,00%	8.402.967.738,00	100,00%	8.352.967.738,00	100,00%	8.352.967.738,00	100,00%	8.352.967.738,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80,00%	85,00%	625.951.239,00	85,00%	575.951.239,00	85,00%	600.951.239,00	85,00%	600.951.239,00	85,00%	600.951.239,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu		100,00%	0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%	85,00%	1.254.350.000,00	85,00%	1.229.350.000,00	90,00%	1.254.350.000,00	90,00%	1.254.350.000,00	95,00%	1.254.350.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	37.783.226.977,00	100,00%	39.059.526.977,00	100,00%	39.059.526.977,00	100,00%	39.059.526.977,00	100,00%	39.059.526.977,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	1.786.988.000,00	100,00%	1.786.988.000,00	100,00%	1.786.988.000,00	100,00%	1.786.988.000,00	100,00%	1.786.988.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	997.110.000,00	100,00%	997.110.000,00	100,00%	997.110.000,00	100,00%	997.110.000,00	100,00%	997.110.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	10.436.726.570,00	100,00%	10.436.726.570,00	100,00%	10.436.726.570,00	100,00%	10.436.726.570,00	100,00%	10.436.726.570,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase Dokumen prencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	10.251.539.674,00	100,00%	25.714.501.690,00	100,00%	25.714.501.690,00	100,00%	25.714.501.690,00	100,00%	25.714.501.690,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasaran dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	1.198.150.275,00	100,00%	943.911.327,00	100,00%	943.911.327,00	100,00%	943.911.327,00	100,00%	943.911.327,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	17.400.000,00	100,00%	35.400.000,00	100,00%	35.400.000,00	100,00%	35.400.000,00	100,00%	35.400.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	2.241.936.620,34	100,00%	1.924.286.552,78	100,00%	1.924.286.553,53	100,00%	1.924.286.553,30	100,00%	1.924.286.553,96	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEUANGAN
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	13.393.784.063,00	100,00%	13.040.483.320,00	100,00%	13.040.483.320,00	100,00%	13.040.483.320,00	100,00%	13.040.483.320,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	1.455.453.000,00	100,00%	862.902.000,00	100,00%	862.902.000,00	100,00%	862.902.000,00	100,00%	862.902.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	334.099.000,00	100,00%	341.619.000,00	100,00%	341.619.000,00	100,00%	341.619.000,00	100,00%	341.619.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	2.800.940.715,00	100,00%	3.202.747.800,00	100,00%	3.202.747.800,00	100,00%	3.202.747.800,00	100,00%	3.202.747.800,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	48.027.083.160,00	100,00%	44.102.771.050,00	100,00%	44.102.771.050,00	100,00%	44.102.771.050,00	100,00%	44.102.771.050,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	2.107.110.000,00	100,00%	2.455.610.000,00	100,00%	2.455.610.000,00	100,00%	2.455.610.000,00	100,00%	2.455.610.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	2.031.467.204,00	100,00%	1.255.907.000,00	100,00%	1.255.907.000,00	100,00%	1.255.907.000,00	100,00%	1.255.907.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	4.394.060.427,00	100,00%	5.120.699.181,00	100,00%	5.120.699.181,00	100,00%	5.120.699.181,00	100,00%	5.120.699.181,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	10.025.681.508,00	100,00%	10.029.250.225,00	100,00%	10.029.250.225,00	100,00%	10.029.250.225,00	100,00%	10.029.250.225,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80,00%	85,00%	460.072.717,00	86,00%	443.604.000,00	87,00%	443.604.000,00	88,00%	443.604.000,00	90,00%	443.604.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	1.364.396.926,00	100,00%	1.377.296.927,00	100,00%	1.377.296.927,00	100,00%	1.377.296.927,00	100,00%	1.377.296.927,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													INSPEKTORAT DAERAH
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	12.114.254.502,00	100,00%	12.176.266.332,00	100,00%	12.213.845.501,00	100,00%	12.266.772.003,00	100,00%	12.294.092.916,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	3.680.190.000,00	100,00%	3.680.190.000,00	100,00%	3.680.190.000,00	100,00%	3.680.190.000,00	100,00%	3.680.190.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	3.227.754.277,00	100,00%	3.227.754.277,00	100,00%	3.227.754.277,00	100,00%	3.227.754.277,00	100,00%	3.227.754.277,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase prasarana dan sarana dalam kondisi baik	80,00%	82,00%	506.906.000,00	84,00%	506.906.000,00	86,00%	506.906.000,00	88,00%	506.906.000,00	90,00%	506.906.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													KECAMATAN KLOJEN
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	20.338.050.733,00	100,00%	20.354.050.733,00	100,00%	20.354.050.733,00	100,00%	20.354.050.733,00	100,00%	20.354.050.733,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	236.958.500,00	100,00%	245.892.120,00	100,00%	247.998.620,00	100,00%	250.489.467,00	100,00%	252.996.401,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	638.850.050,00	100,00%	527.400.000,00	100,00%	527.400.000,00	100,00%	527.400.000,00	100,00%	527.400.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													KECAMATAN BLIMBING
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	20.385.879.113,00	100,00%	20.380.079.113,00	100,00%	20.380.079.113,00	100,00%	20.380.079.113,00	100,00%	20.380.079.113,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80,00%	80,00%	188.910.667,00	80,00%	182.560.667,00	80,00%	182.560.667,00	80,00%	182.560.667,00	80,00%	182.560.667,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	16.700.000,00	100,00%	16.700.000,00	100,00%	16.700.000,00	100,00%	16.700.000,00	100,00%	16.700.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	570.889.249,00	100,00%	547.415.125,00	100,00%	547.415.125,00	100,00%	547.415.125,00	100,00%	547.415.125,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/*OUTCOME*	INDIKATOR *OUTCOME*	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													KECAMATAN KEDUNGKANDANG
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	21.859.610.858,00	100,00%	21.859.780.114,00	100,00%	21.859.780.114,00	100,00%	21.859.780.114,00	100,00%	21.859.780.114,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80,00%	80,20%	151.895.500,00	80,30%	151.895.500,00	80,40%	151.895.500,00	80,50%	151.895.500,00	80,50%	151.895.500,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	12.561.600,00	100,00%	12.561.600,00	100,00%	12.561.600,00	100,00%	12.561.600,00	100,00%	12.561.600,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	827.371.522,00	100,00%	790.310.922,00	100,00%	790.310.922,00	100,00%	790.310.922,00	100,00%	790.310.922,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													KECAMATAN LOWOKWARU
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	21.455.085.339,00	100,00%	18.791.234.174,00	100,00%	18.859.532.799,00	100,00%	18.955.724.582,00	100,00%	19.005.379.240,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80,00%	80,00%	185.958.600,00	80,00%	162.870.086,00	80,00%	163.462.054,00	80,00%	164.295.780,00	80,00%	164.726.155,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	606.380.350,00	100,00%	531.092.511,00	100,00%	533.022.820,00	100,00%	535.741.468,00	100,00%	537.144.846,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													KECAMATAN SUKUN
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	20.994.882.252,00	100,00%	20.992.497.252,00	100,00%	20.992.497.252,00	100,00%	20.992.497.252,00	100,00%	20.992.497.252,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80,00%	80,00%	131.762.432,00	80,00%	218.783.820,00	80,00%	218.783.820,00	80,00%	218.783.820,00	80,00%	218.783.820,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentasi pelaporan administrasi kepagawaian tepat waktu	100,00%	100,00%	-	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	529.697.568,00	100,00%	406.601.180,00	100,00%	406.601.180,00	100,00%	406.601.180,00	100,00%	406.601.180,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	5.284.505.434,00	100,00%	5.141.825.434,00	100,00%	5.141.825.434,00	100,00%	5.141.825.434,00	100,00%	5.141.825.434,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80,00%	80,00%	454.694.800,00	80,00%	432.994.800,00	80,00%	432.994.800,00	80,00%	432.994.800,00	80,00%	432.994.800,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	80,00%	80,00%	23.400.000,00	80,00%	23.400.000,00	80,00%	23.400.000,00	80,00%	23.400.000,00	80,00%	23.400.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan admininistrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%	80,00%	1.234.888.017,00	80,00%	1.399.268.018,00	80,00%	1.399.268.018,00	80,00%	1.399.268.018,00	80,00%	1.399.268.018,00	
				2.300.155.834.291,28		**2.301.534.371.793,78**		**2.315.243.612.404,57**		**2.334.802.709.919,30**		**2.344.948.107.598,96**	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja dibagi menjadi dua yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kota Malang dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Kota Malang selama kurun waktu 2025-2030 terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Kota Malang Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,68	85,50	85,63	85,96	86,5	87,1	87,8
2.	Tingkat Kemiskinan	%	3,91	3,87	3,63	3,52	3,43	3,25	2,84
3.	Rasio Rasio	Rasio	0,422	0,421	0,420	0,419	0,418	0,417	0,414
4.	PDRB per Kapita	Juta Rp	114,722	119,69	121,20	125,708	131,054	136,399	141,745
5.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif (Ton CO2 Eq)	Ton CO_2 eq	485.960,15	495.829,28	505.745,87	515.860,79	526.178	536.701,56	547.435,59
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,96	89,00	89,31	89,62	89,93	90,24	90,56

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Kota Malang Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,14	11,21	11,3	11,63	12,16	12,69	13,22
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,79	15,93	15,95	15,97	15,99	16,04	16,08

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	Skor Literasi/Numerasi								
	Skor literasi SD	Skor	75,51	77,72	79,93	82,14	84,35	86,56	88,77
	Skor literasi SMP	Skor	84,31	85,22	86,13	87,04	87,95	88,86	89,77
	Skor numerasi SD	Skor	55,84	59,68	63,52	67,36	71,2	75,04	78,88
	Skor numerasi SMP	Skor	72,07	73,07	74,06	75,05	76,04	77,03	78,01
4.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59,91*	60,66	61,30	61,94	62,58	63,22	63,86
5.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,54	75,65	75,91	76,17	76,43	76,69	76,95
6.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,78*	58,78	58,98	59,18	59,38	59,58	59,78
7.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,131*	0,129	0,122	0,118	0,115	0,111	0,108
8.	Indeks Daya Beli	Indeks	0,87	0,875	0,88	0,885	0,90	0,905	0,91
9.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	87,56	87,8	87,97	88,21	88,6	88,83	89,58
10.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	7,9*	7,92	7,94	7,98	8,02	8,06	8,10
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	6,1	5,98	5,87	5,76	5,64	5,53	5,42
12.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	4,53	4,55	4,57	4,59	4,61	4,63	4,65

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,76	61,61	61,69	61,77	61,85	61,92	62,00
14.	Indeks Ketahanan Pangan (a)	Indeks	88,76	89,00 64,04*	89,38 65,05*	90,35 66,06*	91,33 67,07*	92,30 68,08*	93,27 69,09*
15.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	78,21	69,46	67,77	66,15	64,62	63,15	61,74
16.	Indeks Integritas Pemerintah Kota Malang	Indeks	68,79	73	74	75	76	78	79
17.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	Nilai SAKP	Nilai	80,08	80,31	80,95	81,59	82,23	82,87	83,51
19.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,57	4,59	4,62	4,64	4,66	4,69	4,71
20.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemerintah Digital (b)	Indeks	4,24	4,29	4,32 2,13*	4,36 2,27*	4,40 2,42*	4,45 2,56*	4,51 2,71*
21.	Rasio PAD	Rasio	0,36	0,40	0,41	0,42	0,423	0,427	0,43

(a) Indeks Ketahanan Pangan akan berubah komponen variabel perhitungannya, sehingga target akan tersesuaikan;
(b) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital, sehingga target akan tersesuaikan.

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah Kota Malang selama kurun waktu 2025-2030 terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Malang

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.	**Aspek Geografi dan Demografi**								
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	88,76	88,76 64,04*	89,38 65,05*	90,35 66,06*	91,33 67,07*	92,3 68,08*	93,27 69,09*
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*prevalence of undernourishment*)	%	4,99	4,43	4,05	3,63	3,32	3,26	2,84
3.	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	96,18	96,43	96,50	97,00	97,30	97,50	98,00
4.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	83,58	84,98	86,38	87,78	89,18	90,58	91,98
5.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	95,85	96,73	97,1	97,4	98,07	98,5	98,66
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,76	61,61	61,69	61,77	61,85	61,92	62
7.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%RT	36,17	37	38	39	40	41	42
8.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	32,91	35,07	37,70	38,74	40,04	42,17	43,31

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%RT	99,02	99,20	99,35	99,43	99,52	99,61	99,69
10.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif	Ton CO_2 eq	485.960,15	495.829,28	505.745,87	515.860,79	526.178	536.701,56	547.435,59
11.	Indeks Risiko Bencana	Angka	78,21	69,46	67,77	66,15	64,62	63,15	61,74
12.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65
13.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
14.	Rasio Penduduk	%	98,8	98,94	99,05	99,16	99,27	99,38	99,49
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,41	5,12-5,71	5,15-5,73	5,24-6,08	5,29-6,32	5,34-6,46	5,23-6,01
2.	Tingkat Kemiskinan	%	3,91	3,87	3,63	3,52	3,43	3,25	2,84
3.	PDRB per Kapita	Juta Rp	114,722	119,69	121,2	125,708	131,054	136,399	141,745
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,1	5,98	5,87	5,76	5,64	5,53	5,42
5.	Rasio Gini	Rasio	0,422	0,421	0,420	0,419	0,418	0,417	0,419
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,68	85,50	85,63	85,96	86,5	87,1	87,8
7.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,54	75,65	75,91	76,17	76,43	76,69	76,95
8.	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	77,16	74,67	72,18	69,69	65,67	61,62	57,52
9.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	22,70	14,92	14,39	13,85	13,32	11,48	11
10.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,14	11,21	11,3	11,63	12,16	12,69	13,22
11.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,79	15,93	15,95	15,97	15,99	16,04	16,08
12.	Skor Literasi:								

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	SD	Skor	75,51	77,72	79,93	82,14	84,35	86,56	88,77
	SMP	Skor	84,31	85,22	86,13	87,04	87,95	88,86	89,77
	Skor Numerasi:an								
	SD	Skor	55,84	59,68	63,52	67,36	71,2	75,04	78,88
	SMP	Skor	72,07	73,07	74,06	75,05	76,04	77,03	78,01
13.	Tingkat Penyelesaian pendidikan SD/MI/ sederajat	%	99,94	96,45	99,94	100	100	100	100
14.	Tingkat Penyelesaian pendidikan SMP/MTs/ sederajat	%	93,94	97,98	98,94	99,89	100	100	100
15.	Persentase anak kelas 1 SD/MI yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini	%	96,58	97,85	98,88	99,44	100	100	100
16.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
17.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	34	39,44	41,34	44,46	46,36	49,48	51,71
18.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,78	58,78	58,98	59,18	59,38	59,58	59,78
19.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	-	70	70,5	71	71,5	72	73
20.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59,91	60,66	61,30	61,94	62,58	63,22	63,86
21.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	-	70	70,5	71	71,5	72	72,5
22.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,131*	0,129	0,122	0,118	0,115	0,111	0,108
23.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Angka	87,56	87,8	87,97	88,21	88,6	88,83	89,58
24.	Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	-	75	76	77	78	79	80
25.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	70,61	71	72	73	74	75	76

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
26.	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	-	70	70,5	71	71,5	72	72,5
27.	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,54	0,58	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78
III.	**Aspek Daya Saing Daerah**								
1.	Angka Ketergantungan	%	43,35	43,35	43,34	43,33	43,32	43,31	43,30
2.	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	23,12	24,2	24,45	24,71	24,96	25,21	25,76
3.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,08	27,12	27,15	27,20	27,25	27,30	27,35
4.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	4,89	4,96	5,03	5,1	5,16	5,23	5,3
5.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	7,9*	7,92	7,94	7,98	8,02	8,06	8,1
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,52	67,53	67,54	67,55	67,76	67,98	68,2
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	55,86	56,48	57,31	57,99	58,66	59,3	60
8.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	50,15	52,5	55	57,5	60	62,5	65
9.	Rasio PAD	Rasio	0,36	0,40	0,41	0,42	0,423	0,427	0,43
10.	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,27	64,28	64,38	64,48	64,58	64,68	64,78
11.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,36	73,81	73,91	74,01	74,11	74,21	74,31
12.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	27,15	34,47	34,47	34,47	34,47	34,47	34,47
13.	Indeks Literasi Digital	Indeks	-	3,6	3,63	3,66	3,69	3,73	3,76
14.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%PDRB	35,45	31,95-35,41	31,98-35,46	32,04-35,47	32,08-35,48	32,11-35,5	32,13-35,51
15.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	4,53	4,55	4,57	4,59	4,61	4,63	4,65
16.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	83,58	84,98	86,38	87,78	89,18	90,58	91,98
17.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio	0,69	0,79	0,79	0,8	0,8	0,81	0,81

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
18.	Proporsi kontribusi PDRB Kota Malang terhadap Nasional	%	0,452	0,45	0,455	0,457	0,458	0,459	0,46
19.	Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	%	2,93	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
20.	Indeks Daya Beli	Indeks	0,87	0,875	0,88	0,885	0,9	0,905	0,91
21.	Tingkat Inflasi		1,36	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
22.	Realisasi Investasi	Rp.	2,8 trilyun	2,9 trilyun	3 trilyun	3,1 trilyun	3,2 trilyun	3,3 trilyun	3,4 trilyun
23.	ICOR			5,12	5,68	5,68	5,67	5,67	5,66
24.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	6,84	6,85	6,85	6,85	6,86	6,86	6,86
IV.	**Aspek Pelayanan Umum**								
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,96	89,00	89,31	89,62	89,93	90,24	90,56
2.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,38	96,39	96,4	96,42	96,44	96,46	96,48
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemerintah Digital	Indeks	4,24	4,29	4,32 2,13*	4,36 2,27*	4,40 2,42*	4,45 2,56*	4,51 2,71*
4.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,57	4,59	4,62	4,64	4,66	4,69	4,71
5.	Indeks Integritas Pemerintah Kota Malang	Indeks	68,79	73	74	75	76	78	79
6.	Nilai SAKP	Angka	80,08	80,31	80,95	81,59	82,23	82,87	83,51
7.	Maturitas SPIP	Angka	3,394	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	3,65
8.	Nilai Sistem Merit	Angka	297	330	325	327	329	330	331
9.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP	Indeks	93	94	95	96	97	98	98

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	91,27	91,5	92	93	94	94	95
13.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,17	4,23	4,28	4,34	4,4	4,45	4,5
V.	**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**								
	Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	**Pendidikan**								
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Angka	103,26	100	100	100	100	100	100
1.2	APS 7-12 tahun	Angka	99,05	100	100	100	100	100	100
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka	99,05	99,05	99,05	99,29	99,53	99,77	100
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Angka	86,6	86,6	86,6	89,95	93,3	96,65	100
1.5	APS 13-15 tahun	Angka	99,99	100	100	100	100	100	100
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka	83,28	83,28	83,28	86	88,72	91,44	94,16
1.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka	57,53	57,53	57,53	66,03	74,53	83,03	91,53
1.8	APS 5-6 tahun	Angka	89,38	90,22	91,06	91,89	92,73	93,56	94,4
1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Angka	56,38	56,38	56,38	65,1	73,82	82,54	91,26
2	**Kesehatan**								
2.1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	77,16	74,67	72,18	69,69	65,67	61,62	57,52
2.2	Angka Kematian Balita	Angka	9,86	9,66	9,45	9,23	9,02	8,8	8,58
2.3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	22,70	14,92	14,39	13,85	13,32	11,48	11
2.4	Persentase RS, Puskesmas, Labkesda yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.5	Persentase Pengelolaan Krisis Kesehatan	%	73	80	83	85	87	90	93
2.6	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Persentase Imunisasi Bayi Lengkap	%	95,15	95,20	95,25	95,25	95,5	95,5	95,75
2.8	Prevalensi obesitas	%	< 39,7	< 39,7	< 39,7	< 39,7	< 39,7	< 39,7	< 39,7
2.9	Persentase Ketersediaan Obat-Obatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan Sesuai Standar	%	80	80	81	82	83	84	85
2.11	Net Death Rate (NDR)	%	0,60	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
2.12	Persentase UKBM yang aktif	%	75	75,50	76	77	78	79	80
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1	Indeks Infrastruktur	Indeks	-	4,2	4,24	4,28	4,33	4,37	4,40
3.2	Tingkat kemantapan jalan kota	%	95,18	96,14	97,08	97,63	97,85	98,18	98,64
3.3	Persentase rumah tangga dengan akses air minum	%	96,18	96,43	96,68	97,00	97,50	98,00	98,50
3.4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	36,17	37	38	39	40	41	42
3.5	Rasio genangan	%	55,92	54	53,12	51,80	50,50	49,24	48,01
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
4.1	Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	%	35,49	41,50	47,52	53,53	59,55	65,56	71,58
4.2	Persentase penanganan area kawasan kumuh (dibawah 10 Ha)	%	90,10	90,83	91,55	92,28	93,01	93,74	94,47
4.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33	0,30	0,28

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	**Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat**								
5.1	Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (IPKKU)	Indeks	91,27	91,5	92	93	94	94	95
5.2	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Rasio Linmas per RT	Rasio	1	1	1	1	1	1	1
5.4	Persentase tingkat waktu tanggap (*response time rate*) 15 menit kejadian kebakaran	%	67,6	70	75	80	85	90	95
5.5	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	50	50	50	50	55	55	60
5.6	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65
5.7	Indeks Manajemen Satuan Pelindungan Masyarakat	Indeks	83,46	83,5	84	84,5	85	85,5	86
6	**Sosial**								
6.1	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan pemberdayaan	%	-	4	5	6	7	8	9
6.2	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	-	80	82	84	86	88	90
6.3	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	%	-	60	63	66	69	72	75

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.4	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana.	%	100	100	100	100	100	100	100
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1	**Tenaga Kerja**								
1.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	63,4	63,69	64,56	65,43	66,29	67,15	68,02
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,67	95,67	95,77	95,87	96,00	96,20	96,30
2.2	Rasio KDRT	Rasio	1:37.302	1:14.000	1:11.500	1:9.500	1:8.500	1:7.000	1:6.500
2.3	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	-	79	82	85	88	91	94
3	**Pangan**								
3.1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	95,85	96,73	97,1	97,4	98,07	98,5	98,66
3.2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*)	%	4,99	4,43	4,05	3,63	3,32	3,26	2,84
4	**Lingkungan Hidup**								
4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,76	61,61	61,69	61,77	61,85	61,92	62
4.2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	32,91	35,07	37,70	38,74	40,04	42,17	43,31
5	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
5.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	76,24	78,07	79,94	81,80	83,66	85,52	87,38

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	91,55	91,62	91,75	91,87	92	92,12	92,24
6	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
6.1	TFR per WUS (15 s.d. 49 tahun) (Angka Kelahiran Total)	%	1,82	1,80	1,78	1,76	1,74	1,72	1,70
6.2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	64,61	65,25	65,57	66,00	66,5	67.00	67,5
6.3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	%	-	64,41	66,84	69,27	71,70	74,13	76,56
7	**Perhubungan**								
7.1	Rasio V/C	Rasio	0,741	0,57	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53
7.2	Persentase Retribusi Parkir terhadap Hasil Retribusi Daerah	%	18,57	32,32	34,75	35,03	35,27	35,58	35,87
8	**Komunikasi dan Informatika**								
8.1	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)	Indeks	85	85	85,25	85,5	85,75	86	86,25
8.2	Indeks Kebijakan SPBE/Indeks Strategi dan Rencana Pemerintah Digital	Indeks	4,70	4,70	2,33	2,49	2,65	2,80	2,97
8.3	Indeks Tata Kelola SPBE/Indeks Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital	Indeks	4,30	4,30	2,13	2,27	2,42	2,57	2,72
8.4	Indeks Layanan SPBE/Indeks Layanan Digital Pemerintah	Indeks	4,69	4,69	2,33	2,48	2,65	2,80	2,96
8.5	Indeks Manajemen SPBE	Indeks	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Indeks Keamanan Siber	Indeks	0,00	0,00	1,24	1,32	1,40	1,48	1,57

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemerintah Digital								
9	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
9.1	Persentase koperasi sehat yang *modern*	%	91,07	91,29	91,52	91,74	91,96	92,19	92,41
9.2	Persentase volume penjualan usaha mikro binaan	%	0,89	0,94	0,99	1,04	1,09	1,11	1,16
9.3	Rasio Usaha koperasi terhadap PDRB sektor jasa keuangan	Rasio	0,0081	0,0082	0,0082	0,0083	0,0084	0,0085	0,0087
10	**Penanaman Modal**								
10.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	%	85,55	86	87	88	89	90	91
10.2	Indeks Domain Layanan SPBE pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks	4,69	4,7	4,72	4,74	4,76	4,78	4,8
11	**Kepemudaan dan Olah Raga**								
11.1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	60,43	60,50	60,57	60,64	60,71	60,78	60,85
11.2	Rasio Wirausaha Pemuda	%	1,04	1,05	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
11.3	Persentase Pemuda (16-30) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	%	0,50	0,65	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75
11.4	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	%	-	19,35	19,47	19,58	19,70	19,83	19,98
11.5	Peringkat Kota Malang pada event Tingkat Provinsi Jawa Timur	Peringkat	V	II	III	III	III	III	III
12	**Statistik**								
12.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	3,12	3,12	3,20	3,22	3,26	3,30	3,40

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	**Persandian**								
13.1	Indeks Manajemen SPBE	Indeks	2,55	2,55	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15
13.2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	60	65	67	69	71	73	75
14	**Kebudayaan**								
14.1	Nilai Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	Angka	77,38*	82,6	83,6	84,6	85,6	86,6	87,6
14.2	Nilai Dimensi Warisan Budaya	Angka	58,41*	59,13	60,13	61,13	62,13	63,13	64,13
14.3	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	Angka	14,37*	40,55	41,55	42,58	43,61	44,64	45,67
14.4	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan.	%	100	100	100	100	100	100	100
15	**Perpustakaan**								
15.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	98,79	98,8	98,81	98,82	98,83	98,84	98,85
15.2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	78,70	83	83,1	83,2	83,3	83,4	83,5
16	**Kearsipan**								
16.1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Angka	80,02	80,04	80,06	80,08	80,10	80,15	80,20
16.2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	24	32	35	39	42	46	50
16.3	Tingkat ketersediaan arsip	%	75.07	75.10	75.17	75.18	75.19	75.20	75.21
	Layanan Urusan Pilihan								
1	**Kelautan dan Perikanan**								
1.1	Angka konsumsi ikan	Angka	17,3	18,54	18,95	19,35	19,76	20,17	20,57
2	**Pariwisata**								
2.1	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	4,89	4,96	5,03	5,1	5,16	5,23	5,3
2.2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	7,9*	7,92	7,94	7,98	8,02	8,06	8,1
2.3	Jumlah start-up pariwisata dan ekonomi kreatif	Unit	48	52	57	62	68	74	81

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.4	Jumlah kunjungan wisata	orang	3.156.907	3.337.468	3.437.468	3.537.468	3.637.468	3.737.468	3.837.468
3	**Pertanian**								
3.1	PDRB sektor pertanian	%	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25
3.2	Jumlah produksi pertanian	Ton	59.830,31	59.850	59.900	59.950	60.000	60.050	60.100
3.3	Jumlah Produksi Peternakan	Ton	27.257,2	27.300	27.442	27.444	27.446	27.448	27.450
4	**Perdagangan**								
4.1	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	%	1,78	1,75	1,75	1,50	1,50	1,50	1,50
4.2	Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks	70	70,56	70,66	70,76	70,86	70,90	80
4.3	Persentase Pasar Rakyat yang bersertifikat dan berstandar Nasional (Jumlah pasar yang memenuhi 50% kriteria SNI	%	11,54	15,38	19,23	23,08	26,92	30,77	34,62
4.4	Persentase produk dalam negeri yang dipasarkan	%	97,27	100	100	100	100	100	100
5	**Perindustrian**								
5.1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,08	27,12	27,15	27,20	27,25	27,30	27,35
5.2	Persentase wirausaha industri kecil baru	%	18,77	18,78	18,80	18,82	18,85	18,88	18,90
	Pendukung Urusan								
1	**Sekretariat Daerah**								
1.1	Indeks kualitas kebijakan	Indeks	79,06	80	80,5	81	81,5	82	82,5
1.2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,38	96,39	96,4	96,42	96,44	96,46	96,48
1.3	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	84,3	85	85,32	87,34	88,36	89,38	90,1
1.4	Nilai EKPPD	Angka	2,9775	3	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25
1.5	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	6,84	6,85	6,85	6,85	6,86	6,86	6,86
1.6	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Angka	47,39	47,40	47,53	47,67	47,81	47,95	48,09

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	**Sekretariat DPRD**								
2.1	Persentase Ranperda yang telah mendapatkan persetujuan/ finalisasi	%	40	40	41	43	45	47	50
	Penunjang Urusan								
1	**Perencanaan**								
1.1	Indeks perencanaan	%	79,74	80	81	82	83	84	85
1.2	Tingkat capaian kinerja daerah	%	102	100	100	100	100	100	100
2	**Keuangan**								
2.1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	69,365	69,365	70,000	70,200	70,300	70,400	70,500
2.2	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	%	87,59	100	100	100	100	100	100
2.3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	36	40	41	42	42,3	42,7	43
2.4	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	-	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
3	**Kepegawaian**								
3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	83,12	83,8	83,81	83,82	83,83	83,84	83,85
4	**Pendidikan dan Pelatihan**								
4.1	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	%	95,25	95,40	95,50	96	96,10	96,15	96,20
4.2	Persentase layanan Manajemen ASN yang berbasis digital	%	75	76	88	89	90	91	92

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	**Penelitian dan Pengembangan**								
5.1	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	85	90	91	92	93	94	95
5.2	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	62,50	62,50	69,79	74,26	77,83	80,60	83,00
6	**Pengawasan**								
6.1	Manajemen Risiko Indeks	Indeks	3,4	3,41	3,415	3,42	3,425	3,43	3,43
6.2	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	level 2 (2,904)	level 2 (2,91)	level2 (2,93)	level2 (2,95)	level2 (2,97)	level2 (3,00)	level2 (3,05)
6.3	Kapabilitas APIP	Angka	Level 3 3,1	Level 3 3,15	Level 3 3,2	Level 3 3,25	Level 3 3,3	Level 3 3,35	Level 3 3,40

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 dilakukan secara konsisten, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab dengan memenuhi kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang serta masyarakat, termasuk dunia usaha dan *stakeholders*, agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 ini sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
2. RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030;
3. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Malang berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Malang berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029;
5. Masyarakat Kota Malang diberikan ruang agar dapat berperan dalam pelaksanaan RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka pengendalian terhadap capaian kinerja pelaksanaan Pembangunan daerah yang tertuang dalam dalam Dokumen RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029, maka perlu dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD secara konsisten, transparan, partisipatif, dan penuh tanggungjawab dengan memenuhi kaidah-kaidah evaluasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 dengan cara melakukan identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target, identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas, tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya, dan tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD berikutnya berikutnya;
2. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Malang berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan apabila adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

5.3 Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029, maka setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya mempedomani perumusan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 oleh masing-masing Perangkat Daerah.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002